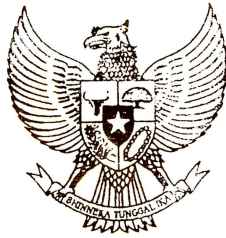


**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**





**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bireuen yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 disingkat dengan RPK Bireuen Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Bireuen Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan SKPK Bireuen untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023-2026

Pasal 2

RPK Bireuen merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX : PENUTUP
- (2) Sistematika RPK Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPK Bireuen merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, dan Rencana Kerja SKPK.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 650

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1.Latar Belakang	I-1
1.2.Dasar Hukum	I-12
1.3.Hubungan Antar Dokumen.....	I-16
1.4.Maksud dan Tujuan	I-18
1.5.Sistematika Penulisan	I-19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Geografis	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-1
2.1.1.3. Geologi	II-5
2.1.1.4. Jenis Tanah.....	II-9
2.1.1.5. Geomorfologi	II-11
2.1.1.6. Hidrologi	II-11
2.1.1.7. Klimatologi	II-13
2.1.1.8. Penggunaan Lahan.....	II-14
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah	II-20
2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana	II-22
2.1.1.11. Demografi.....	II-23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-27
2.1.2.1.2. Laju Inflasi	II-33
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita	II-35
2.1.2.1.4. Indeks Gini	II-36
2.1.2.1.5. Kemiskinan.....	II-37
2.1.2.1.6. Ketenagakerjaan	II-49

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-52
2.1.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah .	II-52
2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah ..	II-53
2.1.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup	II-54
2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-55
2.1.2.2.5. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	II-58
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-59
2.1.2.3.1 Seni Budaya	II-59
2.1.2.3.2 Olahraga	II-60
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-61
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-61
2.1.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-61
A. Pendidikan	II-61
B. Kesehatan	II-70
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .	II-84
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	II-92
E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ...	II-95
F. Urusan Sosial.	II-98
2.1.3.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-101
A. Tenaga Kerja.....	II-101
B. Pangan	II-102
C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-106
D. Pertanahan.....	I-112
E. Lingkungan Hidup.....	II-113
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-121
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	II-122
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-125
I. Perhubungan	II-126

J. Komunikasi dan Informatika	II-127
K. Persandian	II-129
L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah	II-129
M. Penanaman Modal	II-131
N. Kepemudaan dan Olahraga	II-133
O. Kebudayaan	II-135
P. Perpustakaan.....	I-135
Q. Kearsipan	II-137
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-137
2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan	II-137
2.1.3.2.2. Pariwisata.....	II-141
2.1.3.2.3. Pertanian	II-142
2.1.3.2.4. Perdagangan	II-149
2.1.3.2.5. Perindustrian.....	II-151
2.1.3.2.6. Transmigrasi.....	II-153
2.1.3.3. Penunjang Urusan	II-154
2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan.....	II-154
2.1.3.3.2. Keuangan	II-156
2.1.3.3.3. Kepegawaian.....	II-157
2.1.3.3.4. Kelitbangan	II-158
2.1.3.3.5. Pengawasan.....	II-159
2.1.3.3.6. Sekretariat Daerah	II-159
2.1.3.3.7. Sekretariat Dewan	II-160
2.1.3.3.8. Kecamatan.....	II-161
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh	II-162
2.1.3.4.1. Pelaksanaan Syariat Islam.....	II-162
2.1.3.4.2. Pendidikan Dayah.....	II-163
2.1.3.4.3. Peningkatan Peran Ulama.....	II-165
2.1.3.4.4. Pendidikan Aceh	II-166
2.1.3.4.5. Baitul Mal	II-166
2.1.3.4.6. Pelestarian Adat Aceh	II-168
2.1.3.5. Aspek Daya Saing Daerah	II-168
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah	I-168
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-170
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-172

2.1.4.3.1. Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	II-172
2.1.4.3.2. Ketersediaan Air Bersih	II-173
2.1.4.2.3. Ketersediaan Listrik.....	II-174
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi	II-175
2.1.4.4.1. Perizinan	II-175
2.1.4.4.2. Keamanan dan Ketertiban	II-171
2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia	II-177
2.1.4.5.1 Tingkat Ketergantungan	II-178
2.1.4.5.2. Ketenagakerjaan.....	II-179
2.2 Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGsa.....	II-179
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMK periode sebelumnya	II-189
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK	III-2
3.3.1.1 Pendapatan Daerah	III-2
3.3.1.2 Belanja Daerah	III-14
3.3.1.3 Pembiayaan	III-18
3.1.2 Neraca Daerah	III-23
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-29
3.2.1 Kebijakan Pendapatan	III-29
3.2.2 Kebijakan Belanja	III-31
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan	III-32
3.2.4 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-32
3.2.5 Analisis Pembiayaan Daerah	III-35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bireuen	IV-2
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	IV-2
4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-2
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum	IV-3
4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-9
4.2 Isu-Isu Strategis	IV-9
4.2.1 Isu Strategis Nasional	IV-10

4.2.2 Isu Strategis Aceh	IV-10
4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Bireuen.....	IV-11
BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1 Tujuan Pembangunan	V-1
5.2 Sasaran Pembangunan.....	V-1
5.3 Penyelerasan RPK Bireuen dengan RKA dan RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS. VI-1	
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2 Kebijakan Pembangunan	VI-6
6.3 Program Prioritas.....	VI-6
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-2
7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	VII-3
7.1.1.1 Proyeksi Pendapatan	VII-3
7.1.1.1.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah.	VII-5
7.1.1.1.2 Proyeksi Pendapatan Transfer.....	VII-7
7.1.1.2 Proyeksi Belanja.....	VII-9
7.1.1.3 Proyeksi Pembiayaan.....	VII-12
7.1.2 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	VII-14
7.2 Program Perangkat Daerah	VII-16
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1	
8.1 Indikator Makro Pembangunan	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.3 Indikator Kinerja Daerah	VIII-2
BAB IX PENUTUP.....	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kelerengan di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....	II-3
Tabel 2.2	Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....	II-4
Tabel 2.3	Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bireuen.....	II-7
Tabel 2.4	Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen.....	II-9
Tabel 2.5	Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen.....	II-12
Tabel 2.6	Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen.....	II-14
Tabel 2.7	Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2019.....	II-17
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen.....	II-24
Tabel 2.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-25
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-26
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-2021.....	II-27
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-2021.....	II-29
Tabel 2.13	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen ADHB dan ADHK Tahun 2017-2021.....	II-31
Tabel 2.14	PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2020 dan 2021.....	II-32
Tabel 2.15	Laju Inflasi Tahunan 2017-2021.....	II-34
Tabel 2.16	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Bireuen 2017-2021.....	II-36
Tabel 2.17	Indeks Gini Tahun di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-36
Tabel 2.18	Statistik Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-41

Tabel 2.19	Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021.....	II-41
Tabel 2.20	Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan BPS.....	II-45
Tabel 2.21	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.....	II-46
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-50
Tabel 2.23	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-50
Tabel 2.24	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021	II-51
Tabel 2.25	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.26	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-53
Tabel 2.27	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-54
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-56
Tabel 2.29	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dalam Provinsi Aceh Tahun 2021	II-57
Tabel 2.30	Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020	II-59
Tabel 2.31	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-60
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.....	II-62
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.34	Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.35	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-65

Tabel 2.36	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-66
Tabel 2.37	Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.38	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-68
Tabel 2.39	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2021.....	II-71
Tabel 2.40	Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2017 – 2021.....	II-72
Tabel 2.41	Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.42	Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.....	II-79
Tabel 2.43	Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.....	II-80
Tabel 2.44	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020	II-81
Tabel 2.45	Sarana Sediaan Farmasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.....	II-82
Tabel 2.46	Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.....	II-83
Tabel 2.47	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.48	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.....	II-85
Tabel 2.49	Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2021	II-86
Tabel 2.50	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-87
Tabel 2.51	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.....	II-92
Tabel 2.52	Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021.....	II-94
Tabel 2.53	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021.....	II-95
Tabel 2.54	Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-96

Tabel 2.55	Cakupan Pelayanan keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-97
Tabel 2.56	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.....	II-98
Tabel 2.57	Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-99
Tabel 2.58	Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-100
Tabel 2.59	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021.....	II-101
Tabel 2.60	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-102
Tabel 2.61	Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-103
Tabel 2.62	Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-104
Tabel 2.63	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.64	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-107
Tabel 2.65	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-109
Tabel 2.66	Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-110
Tabel 2.67	Data Kabupaten Layak Anak dan Gampong Layak Anak di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2021.....	II-112
Tabel 2.68	Cakupan Pelayanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-113
Tabel 2.69	Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-116
Tabel 2.70	Luas RTH di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-117
Tabel 2.71	Capaian MHA di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-117
Tabel 2.72	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020	II-119
Tabel 2.73	Kejadian Bencana dan Penanganan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-120
Tabel 2.74	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-121

Tabel 2.75	Jumlah KTP dan Akte yang di Terbitkan di Kabupaten Bireuen tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.76	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-122
Tabel 2.77	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.78	Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.79	Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021.....	II-125
Tabel 2.80	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.81	Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.82	Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021 ...	II-129
Tabel 2.83	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021	II-130
Tabel 2.84	Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021...	II-132
Tabel 2.85	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2020	II-133
Tabel 2.86	Sarana Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-133
Tabel 2.87	Capaian Prestasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-134
Tabel 2.88	Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020	II-135
Tabel 2.89	Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020.....	II-136
Tabel 2.90	Capaian Pembangunan Bidang Arsip Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021	II-137
Tabel 2.91	Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021	II-138
Tabel 2.92	Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bireuen.....	II-139

Tabel 2.93	Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-140
Tabel 2.94	Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020.....	II-140
Tabel 2.95	Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-143
Tabel 2.96	Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-143
Tabel 2.97	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen	II-144
Tabel 2.98	Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-145
Tabel 2.99	Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020.....	II-145
Tabel 2.100	Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021..	II-146
Tabel 2.101	Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.102	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-147
Tabel 2.103	Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-154
Tabel 2.104	Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-156
Tabel 2.105	Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 -2020.....	II-158
Tabel 2.106	Kinerja Pengawasan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021...	II-159
Tabel 2.107	Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-160
Tabel 2.108	Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-161
Tabel 2.109	Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021	II-161
Tabel 2.110	Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-164
Tabel 2.111	Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	II-164
Tabel 2.112	Capaian Peningkatan Peran Ulama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-165

Tabel 2.113	Capaian Pendidikan Aceh di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-166
Tabel 2.114	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-171
Tabel 2.115	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021	II-172
Tabel 2.116	Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-174
Tabel 2.117	Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.....	II-174
Tabel 2.118	Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020	II-175
Tabel 2.119	Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-177
Tabel 2.120	Jumlah Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-179
Tabel 2.121	Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.....	II-191
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018.....	III-5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2022.....	III-7
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-12
Tabel 3.4	Perbedaan Struktur Belanja Daerah dalam APBK.....	III-15
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018.....	III-16
Tabel 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2022.....	III-17
Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	III-20
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020.....	III-25
Tabel 3.9	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020.....	III-26

Tabel 3.10	Current Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 (Rp. Juta).....	III-27
Tabel 3.11	Quick Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020.....	III-27
Tabel 3.12	Total Debt to Equity Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	III-28
Tabel 3.13	Total Debt to Asset Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	III-28
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-34
Tabel 3.15	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-37
Tabel 3.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-38
Tabel 3.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-39
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	V-5
Tabel 5.2	Penyelerasan Indikator Makro RPK Bireuen dengan RPA dan RPJMN Tahun 2020 – 2024.....	V-10
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VI-2
Tabel 6.2	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VI-6
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 – 2026.....	VI-7
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VII-6
Tabel 7.2	Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VII-6
Tabel 7.3	Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VII-8
Tabel 7.4	Proyeksi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026....	VII-11
Tabel 7.5	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VII-13

Tabel 7.6	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VII-15
Tabel 7.7	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bireuen.....	VII-17
Tabel 8.1	Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VIII-3
Tabel 8.2	Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.....	VIII-4
Tabel 8.3	Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-17
Gambar 2.1	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen	II-2
Gambar 2.2	Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Geologi di Kabupaten Bireuen.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen.....	II-12
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen.....	II-13
Gambar 2.7	Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten Bireuen	II-13
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen.....	II-14
Gambar 2.9	PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-30
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021.....	II-30
Gambar 2.11	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-39
Gambar 2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-42
Gambar 2.14	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-43
Gambar 2.15	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Exstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Menurut Kabupaten dalam Provinsi Aceh Tahun 2020.....	II-46
Gambar 2.16	Persentase Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-51
Gambar 2.17	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-56
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	II-74
Gambar 2.19	Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021	II-75

Gambar 2.20	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-88
Gambar 2.21	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-89
Gambar 2.22	Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-93
Gambar 2.23	Volume Sampah di Kabupaten Bireuen.....	II-115
Gambar 2.24	Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu.....	II-115
Gambar 2.25	Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021.....	II-132
Gambar 2.26	Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021.....	II-141
Gambar 2.27	Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-148
Gambar 2.28	Kondisi Pasar di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-149
Gambar 2.29	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-150
Gambar 2.30	Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-150
Gambar 2.31	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-152
Gambar 2.32	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-153
Gambar 2.33	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-163
Gambar 2.34	Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-167
Gambar 2.35	Spider Web Grafik Penilaian IDSD Berdasarkan Pilar di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-169
Gambar 2.36	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bireuen(miliar rupiah), 2017-2021.....	II-171
Gambar 2.37	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-178
Gambar 3.1	Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022.....	III-10

Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-13
Gambar 3.3	Rata-rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.....	III-13
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020	III-14
Gambar 3.5	Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-22
Gambar 3.6	Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	III-34

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah, menurut Pasal 258 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014, menyebutkan pembangunan di daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk menyelaraskan pembangunan daerah dan pusat tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bireuen pada tahun 2022, RPJM Kabupaten Bireuen Periode 2017-2022 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025. RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

berakhir pada tahun 2022, sehingga untuk perencanaan tahun 2023, Kabupaten Bireuen tidak memiliki dokumen perencanaan menengah daerah sebagaimana mestinya karena periode RPJMK berakhir. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Menindaklanjuti keadaan tersebut dan sejalan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Kepada bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah ini digunakan oleh pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen 2023-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif untuk perencanaan empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026.

Perbedaan antara RPK Bireuen Tahun 2023-2026 dengan RPJMK periode sebelumnya tidak memuat visi dan misi kepala daerah dan tidak memerlukan KLHS. Dari sisi tahun pelaksanaan RPK direncanakan untuk empat tahun, sementara RPJMK direncanakan selama lima tahun. Penetapan RPJMK melalui qanun/perda, sementara RPK ditetapkan dengan perkada.

Dalam penyusunan RPK Bireuen Tahun 2023-2026 memperhatikan :

- (1) penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
- (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bireuen tahap akhir (Tahun 2020-2025);
- (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022;
- (4) RPJMA atau Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
- (5) isu-isu strategis yang berkembang;
- (6) kebijakan nasional dan
- (7) regulasi yang berlaku.

Dokumen RPK Bireuen seterusnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPK menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Oleh karenanya RPK Bireuen dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen yang perlu dipacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

RPK Bireuen Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu antara lain pada : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Indikator makro nasional dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun.
 - (2) Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,7 persen.

- (3) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,0-7,0 persen dan 3,6-4,3 persen pada tahun 2024.
 - (4) Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
 - (5) Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai 0,360-0,374.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Kabupaten Bireuen Tahap Keempat (Tahun 2020-2025):
- (1) Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat diharapkan meningkatkan Indeks Penerapan Syariat Islam 0,95 indeks.
 - (2) Meningkatnya nilai-nilai syariat islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat diharapkan meningkatkan persentase cakupan pembinaan syariat islam menjadi 100 persen.
 - (3) Meningkatnya mutu pendidikan keislaman diharapkan dapat meningkatkan persentase dayah yang terakreditasi menjadi 98 persen.
 - (4) Meningkatnya kerukunan umat beragama diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama menjadi nol kasus.
 - (5) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,5 indeks.
 - (6) Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat meningkatkan angka harapan lama sekolah menjadi 14,88 tahun.
 - (7) Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan meningkatkan angka harapan lama hidup menjadi 73 persen.
 - (8) Mengembangkan potensi pariwisata daerah diharapkan akan meningkatkan jumlah destinasi wisata menjadi 69 destinasi wisata.
 - (9) Mengurangi angka kemiskinan diharapkan Persentase jumlah penduduk miskin sejumlah 10,56 persen.
 - (10) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan diharapkan meningkatkan persentase organisasi pemuda yang aktif hingga 97 persen.

- (11) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan diharapkan meningkatkan jumlah PDRB sektor industri pengolahan menjadi 220 milyar rupiah.
- (12) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sejumlah 5 persen.
- (13) Memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah diharapkan akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi 69 persen.
- (14) Meningkatnya akses aliran irigasi diharapkan agar luas aliran irigasi menjadi 3.050 hektar.
- (15) Meningkatnya PDRB ADHB sektor pertanian menjadi 4.800 milyar rupiah.
- (16) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5 persen.
- (17) Meningkatnya perkembangan UMKM diharapkan jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan sejumlah 300 UMKM/Koperasi.
- (18) Menjaga stabilitas harga diharapkan akan menjaga tingkat inflasi pada angka 2 persen.
- (19) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah diharapkan agar persentase PAD terhadap pendapatan daerah menjadi 9,5 persen.
- (20) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diharapkan agar Indeks Ketentraman dan Ketertiban menjadi 1.
- (21) Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan agar indeks perencanaan menjadi 85.
- (22) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik diharapkan agar persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih menjadi 90 persen.
- (23) Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat diharapkan agar persentase PMKS yang mendapatkan penanganan menjadi 1,5 persen.
- (24) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan Indeks Pembangunan Gender menjadi 96.
- (25) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan agar Indeks Reformasi Birokrasi menjadi B.
- (26) Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen diharapkan agar Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen sejumlah 2 perbup.

- (27) Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan diharapkan agar persentase layanan pertanahan yang tertangani sejumlah 95 persen.
- (28) Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan agar Opini BPK menjadi WTP.
- (29) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif diharapkan agar persentase ranqanun yang disahkan menjadi Qanun menjadi 25 persen.
- (30) Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan diharapkan agar persentase kebijakan penelitian dan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan 60 persen.
- (31) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas diharapkan agar tingkat akuntabilitas kinerja menjadi BB.
- (32) Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat diharapkan agar jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal sejumlah 5 urusan.
- (33) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan diharapkan agar persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan menjadi 80 persen.
- (34) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar diharapkan agar Indeks Infrastruktur Dasar menjadi 80 persen.
- (35) Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung diharapkan agar luas kawasan lindung sejumlah 40.647,38.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (2020-2025) RPJP Kabupaten Bireuen adalah berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan kebijakan pembangunan ke III, maka arah kebijakan pembangunan ke IV ditujukan untuk memantapkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan tata ruang dan infrastruktur yang sudah melayani seluruh wilayah di Kabupaten Bireuen.

Arah kebijakan pembangunan pada periode IV ini disinkronkan dengan agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan sasaran mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun disertai dengan derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan iptekin sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial.

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 sebagian menunjukkan perbaikan. IPM Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebesar 72,33 lebih tinggi dari IPM Aceh sebesar 72,14 dan IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini Kabupaten Bireuen mencapai 0,296 lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,324 dan Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen mencapai 4,32 lebih baik dari TPT Aceh sebesar 6,30 persen dan TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen sebesar 13,25 lebih baik dari angka kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen tahun 2020 menurun menjadi -0,94 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang

pada tahun 2020 menurun menjadi -0,37 persen dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi -2,07 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen 4,13 persen lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Aceh (2,82 persen) dan pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

4. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;

Isu strategis tercantum dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 yang perlu disinergikan dengan isu strategis Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK Bireuen Tahun 2023-2026 antara lain peningkatan kualitas demokrasi, kualitas kelembagaan, tata kelola dan sumber daya aparatur; peningkatan kualitas penerapan syariat islam; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan dan kepemudaan; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim; peningkatan pertumbuhan ekonomi; pengembangan kemitraan dan peningkatan sumber pendanaan pembangunan; optimalisasi kemandirian pangan; penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran; pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis; optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan dan penanganan bencana; dan penguatan perdamaian secara berkelanjutan.

5. Isu-isu yang berkembang;

(1) Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026.

(2) Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta memberikan dukungan anggaran untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama.

(3) Dana Otsus

Penurunan dana Otsus mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi satu persen dari DAU nasional dan pada tahun 2028 diprediksikan tidak ada lagi. Dengan demikian, kedisiplinan pemanfaatan dana harus difokuskan sesuai dengan UU-PA Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018, yaitu: 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, 2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 3) Pengentasan Kemiskinan, 4) Pendanaan Pendidikan, 5) Sosial, 6) Kesehatan, 7) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan 8) Penguatan Perdamaian (6+2).

6. Kebijakan nasional;

(1) Dana wajib (*mandatory spending*) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-Undang, seperti dana wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

(2) Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meminta Pemerintah Daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit 8 persen dari DAU.

(3) Permendagri Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah untuk Penyusunan Tahun Anggaran 2022 mengamankan diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

7. Regulasi yang berlaku.

(1) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, maka pemerintah melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya menyebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa program pemulihan ekonomi daerah yang dimaksud terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dari besaran paling sedikit 25 persen untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20 persen dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15 persen.

(2) Pemilu dan Pilkada

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi

perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan pada Pasal 201 ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Pada Pasal 201 ayat (5) Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan pada Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 - 2026 dapat dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Bireuen menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, Rancangan RPA yang berlaku Tahun 2023-2026;
2. Bappeda Kabupaten Bireuen melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
3. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
4. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.

5. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi;
6. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yang telah disempurnakan sebagaimana huruf e di atas diajukan oleh Kepala Bappeda Bireuen kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
7. Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;

Dalam rangka pelaksanaan RPK Bireuen 2023-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPK memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Kabupaten. Dengan berpedoman pada Renstra dan RKPK, setiap Perangkat Kabupaten menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja). Renja inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan perangkat kabupaten.

1.2 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan penyusunan RPK Bireuen ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

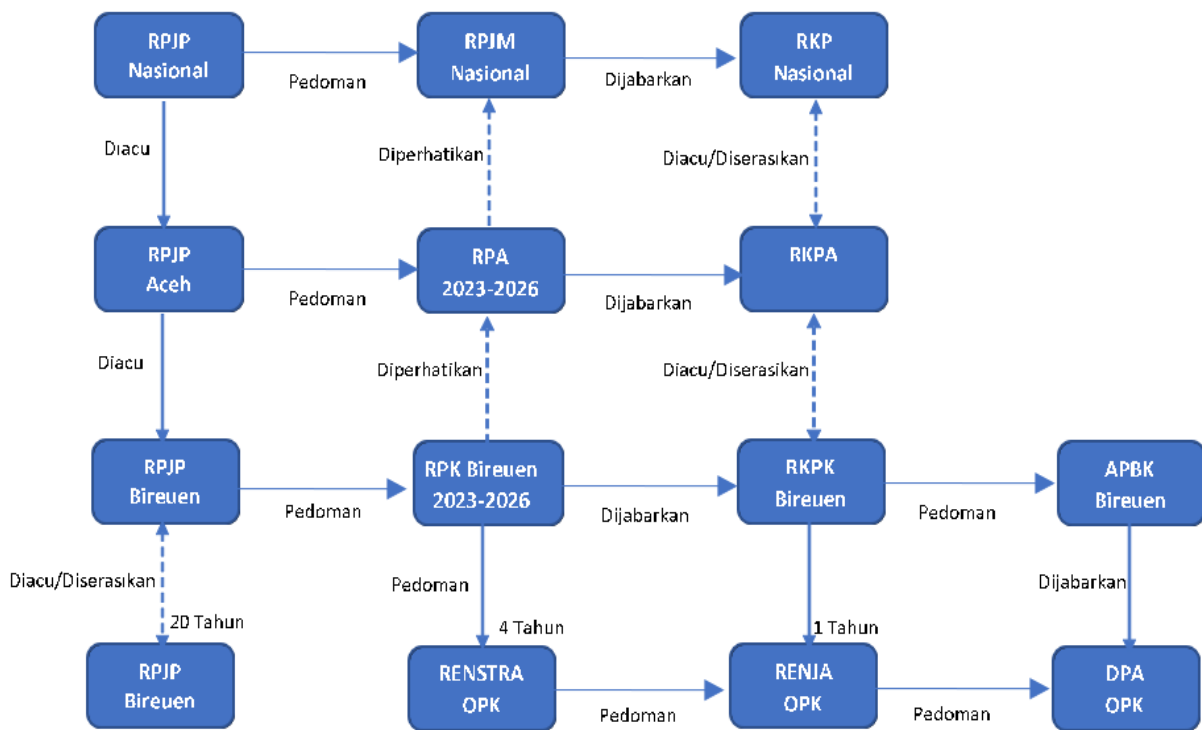
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPK merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPK harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPK merupakan dokumen perencanaan menengah daerah yang mengacu pada RPJP yang memiliki kurun waktu 20 tahun mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025, dan RPJP Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2012-2032. Dokumen RPK Kabupaten Bireuen 2023-2026 juga mengacu pada Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPK atau Renja PD sampai dengan tahun 2021, evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*), isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Bireuen dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Aceh dan RTRW Kabupaten Bireuen digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. RPJP Bireuen dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan diselarasikan dengan RTRW Kabupaten Bireuen;
2. RPK Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) tahun memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif tahun disusun dengan berpedoman pada RPJP Bireuen dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPA;
3. RPK Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Bireuen yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan

- SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 – 2026;
5. RPKK merupakan penjabaran dari RPK yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional dan RPA dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPK dan APBK;
 6. Rencana Kerja (Renja) SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan DPA-SKPK.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu, juga dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPK Bireuen tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Bireuen untuk kurun waktu empat tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen RPK Bireuen Tahun 2023-2026 bertujuan:

1. Sebagai kerangka logis pembangunan yang merupakan detail pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) tahun 2023-2026, termasuk program-program prioritas;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBK sejak RPK Kabupaten Bireuen ini disahkan hingga tahun 2026;
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen setelah RPK Bireuen ini disahkan hingga tahun 2026;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPK Bireuen Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sistematika penulisan pada dokumen RPK Bireuen disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPD Kabupaten Bireuen, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan data dan informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis

pembangunan Kabupaten Bireuen yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta evaluasi pelaksanaan indikator pada RPJM periode sebelumnya.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup deskripsi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini mencakup uraian terkait dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dalam empat tahun ke depan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam periode 2023-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu pada bab ini turut disampaikan penjelasan hubungan antar setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan terkait dengan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta menggambarkan kerangka pendanaan serta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dalam dokumen RPK Kabupaten Bireuen periode 2023-2026 yang memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang No.48 tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999. Secara astronomis, Kabupaten Bireuen terletak pada antara 04^o54'-05^o21' Lintang Utara dan 96^o20'-97^o21' Bujur Timur. Sementara jika berdasarkan geografis, Kabupaten Bireuen memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka.
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

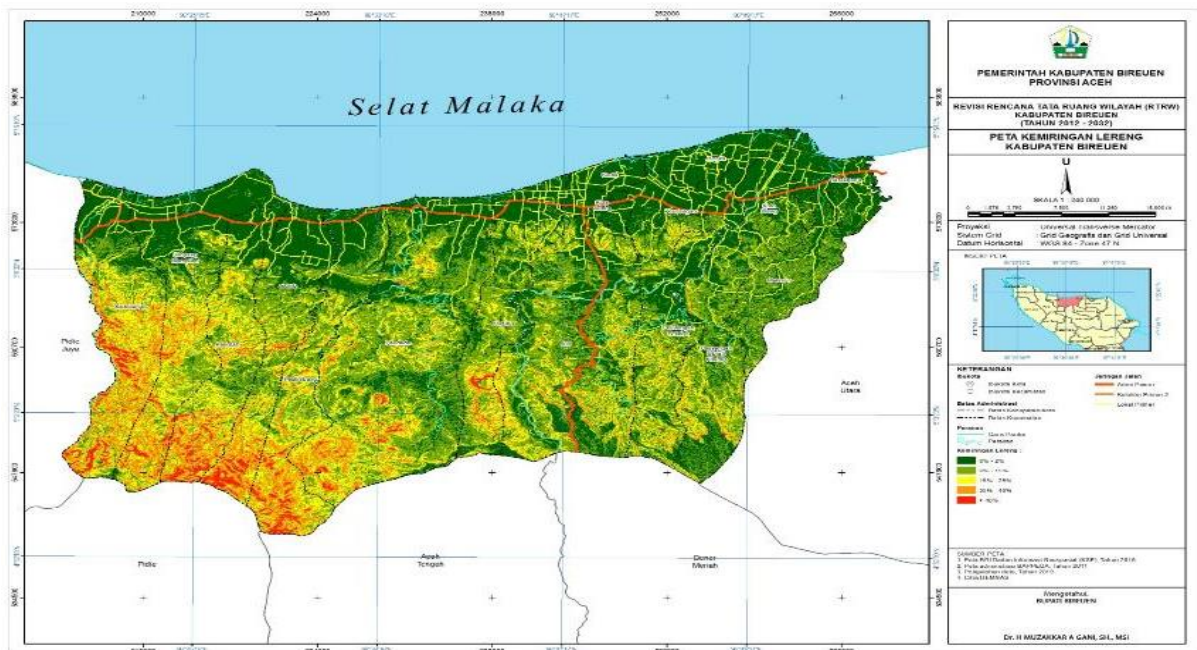
Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 179.844,80 hektar atau 3,40 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara administrasi Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 Kecamatan, dan 609 Gampong (desa).

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi, Kabupaten Bireuen memiliki pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan daerah pegunungan berada di sebelah selatan. Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-2 persen sampai dengan >40 persen, yang dikelompokkan atas 5 kelas kemiringan lahan yaitu 0-2 persen (datar), 2-15 persen (landai), 15-25 persen (agak curam), 25-40 persen (curam) dan >40 persen (sangat curam).

Kecamatan Peudada menjadi wilayah dengan kemiringan datar (0-2) persen terluas yaitu sebesar 9.019,55 hektar. Sementara Kecamatan Samalanga menjadi wilayah dengan kemiringan sangat curam (>40) persen

terluas yaitu mencapai 892,19 hektar. Adapun persentase kelas lereng terluas yaitu kelas landai (2-15) persen sebesar 38,85 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 13.450,68 hektar. Sedangkan persentase kelas lereng terendah yaitu kelas lereng datar (0-2) persen sebesar 2,05 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 9.019,55 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai kemiringan beserta luas wilayah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

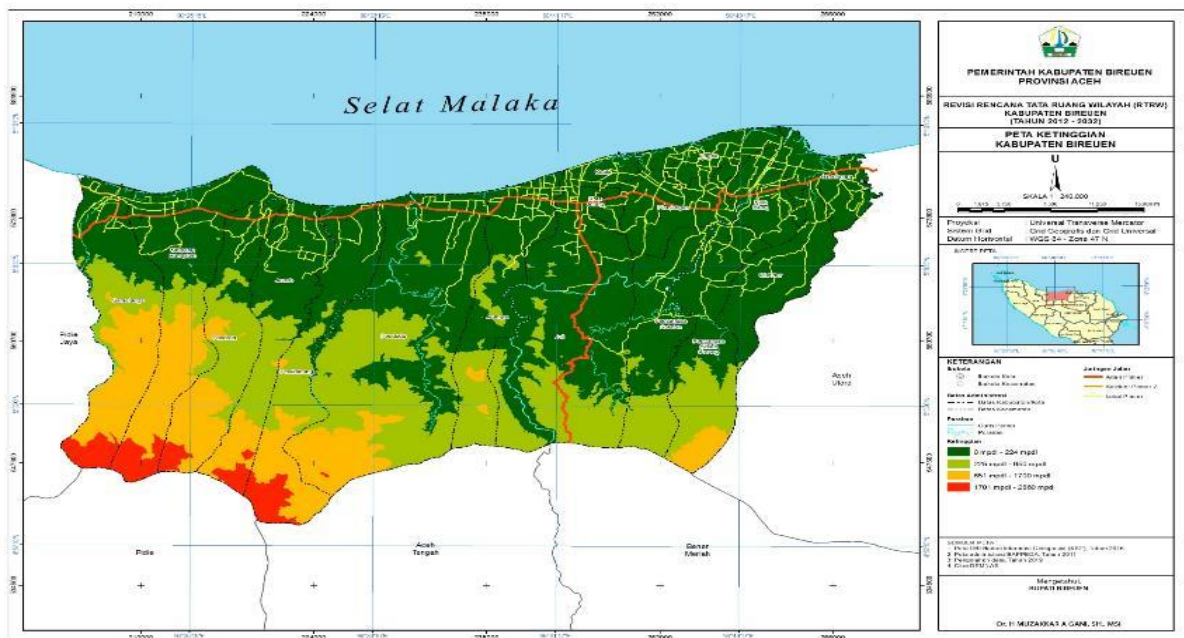
Gambar 2.1
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen

Tabel 2.1
Kondisi Kelereng di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)					Total Luas (Ha)
		Datar (0-2 %)	Landai (2-15 %)	Agak Curam (15-25 %)	Curam (25 – 40 %)	Sangat Curam (>40 %)	
1	Samalanga	3.426,31	2.892,27	3.647,51	3.280,81	892,19	15.768,66
2	Simpang Mamplam	6.566,18	3.691,75	3.007,01	2.175,66	328,07	15.772,04
3	Pandrah	2.434,44	3.319,29	2.965,06	2.088,96	593,21	11.400,97
4	Jeunieb	4.034,11	3.292,25	1.847,91	1.482,03	598,27	11.254,58
5	Peulimbang	3.295,96	3.641,61	2.965,08	2.238,70	645,80	12.787,15
6	Peudada	9.019,55	13.450,68	5.918,46	2.534,78	357,98	31.281,46
7	Juli	7.744,93	10.095,16	4.006,60	1.178,34	93,32	23.118,35
8	Jeumpa	4.266,08	4.325,91	1.630,17	560,37	131,24	10.913,76
9	Kota Juang	1.619,93	69,09	1,83	0,02	0,00	1.690,87
10	Kuala	1.670,24	39,24	1,09	0,00	0,00	1.710,56
11	Jangka	3.645,17	107,54	5,20	0,12	0,00	3.758,03
12	Peusangan	4.451,50	1.098,87	308,29	48,78	0,19	5.907,63
13	Peusangan Selatan	3.509,09	3.762,85	1.692,41	430,67	19,68	9.414,70
14	Peusangan Siblah Krueng	4.104,15	5.147,98	1.485,33	439,53	28,36	11.205,35
15	Makmur	2.999,67	3.563,43	277,89	15,01	1,35	6.857,36
16	Gandapura	4.243,62	499,45	19,76	3,32	0,00	4.766,15
17	Kuta Blang	2.842,87	958,82	63,64	4,62	0,18	3.870,13
	Total Luas (Ha)	3.689,85	69.873,78	29.843,25	59.956,19	16.481,73	179.844,80
	Persentase (%)	2,05	38,85	16,59	33,33	9,16	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Ketinggian lahan di Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-224 mdpl sampai dengan 1.701-2.860 mdpl yang dikelompokkan atas 4 kelas ketinggian lahan yaitu 0-224 mdpl (rendah), 225-650 mdpl (sedang), 651-1.700 mdpl (tinggi), dan 1.701-2.860 mdpl (sangat tinggi). Kecamatan Juli menjadi wilayah dengan ketinggian sedang (0-224 mdpl) terluas yaitu sebesar 16.165,86 ha. Sementara Kecamatan Peulimbang menjadi wilayah dengan ketinggian sangat tinggi (1.701-2.860 mdpl) terluas yaitu mencapai 1.444,59 hektar. Adapun persentase kelas ketinggian terluas yaitu ketinggian sedang (0-224 mdpl) sebesar 59,60 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Juli sebesar 16.165,86 hektar. Sedangkan persentase kelas ketinggian terendah yaitu kelas ketinggian sangat tinggi (1.701-2.860 mdpl) sebesar 2,85 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 20,71 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.2
Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.2
Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)				Total Luas (Ha)
		0 - 224	225 - 650	651-1700	> 1700	
1	Samalanga	4.747,86	2.769,15	5.439,11	1.182,96	14.139,09
2	Simpang Mamplam	8.158,30	1.575,68	4.719,31	1.315,38	15.768,66

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)				Total Luas (Ha)
		0 - 224	225 - 650	651-1700	> 1700	
3	Pandrah	3.215,10	3.940,70	3.698,77	546,41	11.400,97
4	Jeunieb	6.067,21	2.803,53	1.759,41	624,42	11.254,58
5	Peulimbang	5.139,33	3.029,18	3.174,05	1.444,59	12.787,15
6	Peudada	15.161,99	11.707,91	4.390,85	20,71	31.281,46
7	Juli	16.165,86	6.952,49	0	0	23.118,35
8	Jeumpa	6.841,13	3.822,96	249,67	0	10.913,76
9	Kota Juang	1.690,87	0	0	0	1.690,87
10	Kuala	1.710,56	0	0	0	1.710,56
11	Jangka	3.758,03	0	0	0	3.758,03
12	Peusangan	5.907,63	0	0	0	5.907,63
13	Peusangan Selatan	6.823,36	2.590,79	0,54	0	9.414,70
14	Peusangan Sibliah Krueng	6.325,96	3.604,33	1.275,06	0	11.205,35
15	Makmur	6.829,14	28,21	0	0	6.857,36
16	Gandapura	4.766,15	0	0	0	4.766,15
17	Kuta Blang	3.870,13	0	0	0	3.870,13
Total Luas (Ha)		107.178,62	42.824,94	24.706,77	5.134,47	179.844,80
Persentase (%)		59,60	23,81	13,74	2,85	100,00

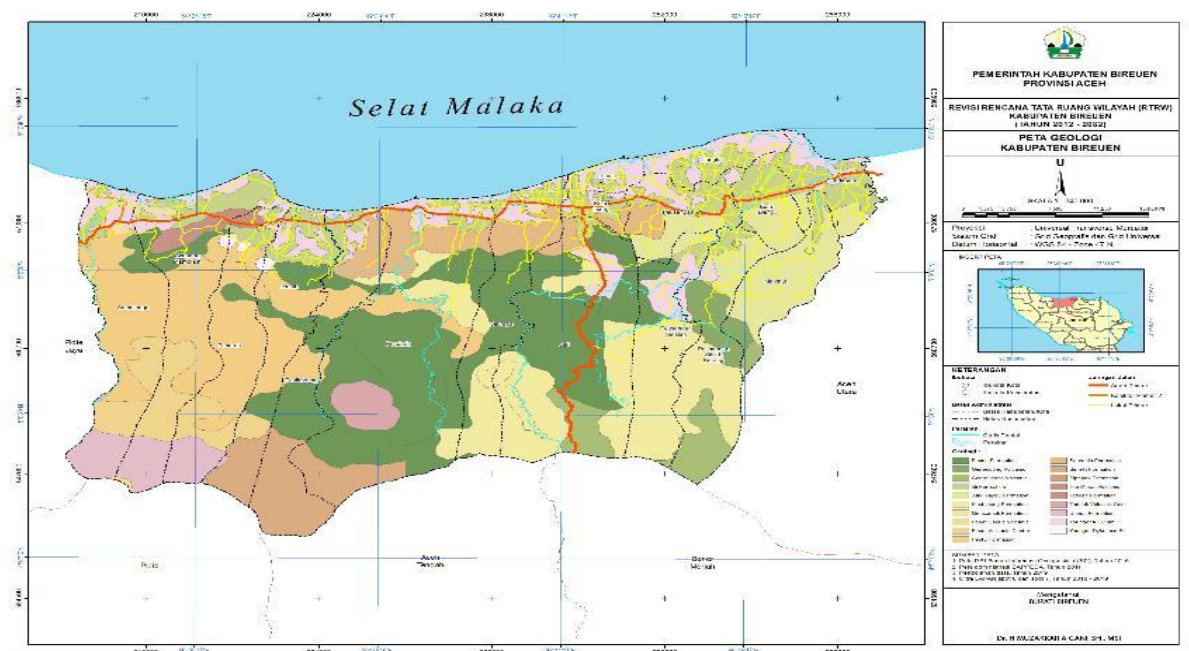
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.3 Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen terbagi menjadi beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Penampang geologi permukaan merupakan sebaran bebatuan lateral, vertikal sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi meliputi Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen. Sebaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen terdiri atas Baong Formation, Geireudong Volcanic, Georeudong Volcanic, Idi Formation, Julu Rayeu Formation, Keutapang Formation, Keuteupang Formation, Meucamplici Formation, Peuet Sague Volcanic, Peuet Volcanic Centre, Peutu Formation, Seureula Formation, Simelit Formation, Sipopok Formation, Teu Minas Volcanic, Totolan Formation, Tudeuk Volcanic Cent, Uneun Formation, Younger Alluvium, dan Younger Dyke and Sil.

Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan

perikehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin. Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat dibagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan kedalaman batuan dasar. Sebaran jenis geologi dengan luas terbesar adalah Baong Formation yaitu 16.620,91 hektar yang berada di Kecamatan Peudada. Sedangkan jenis geologi dengan luas wilayah terbanyak kedua adalah Peutu Formation sebesar 6.607,29 hektar yang berada di Kecamatan Samalanga. Jenis sebaran geologi dengan luas wilayah terendah adalah Seureula Formation sebesar 0,03 hektar dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Jeunieb dapat dilihat Gambar 2.3 dan Tabel 2.3.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.3
Peta Geologi di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.3
Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Batuan	Samalanga	Simpang Mamplam	Pandrah	Jeunieb	Peulimbang	Peudada	Juli	Jeumpa	Kota Juang	Kuala	Jangka	Peusangan	Peusangan Selatan	Peusangan Siblah Krueng	Makmur	Gandapura	Kuta Blang
1	Baong Formation	667,14	1.205,54	351,26	2.242,04	3.298,13	16.620,91	10.423,39	3.935,58	39,57	0	0	91,83	1.003,77	0	0	0	0
2	Geireudong Volcanic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,13	2.086,74	526,78	0	0
3	Georeudong Volcanic	0	0	0	0	0	0	1.987,22	0	0	0	0	0	108,13	2.529,74	359,78	0	0
4	Idi Formation	697,23	2.312,90	771,88	1.736,49	781,18	876,69	366,34	886,74	931,38	467,08	1.534,21	1.952,79	385,00	550,14	456,81	2.412,30	1.917,30
5	Julu Rayeu Formation	0	0	0	0	0	0	3,68	0	0	0	0	1.728,77	515,66	1.737,80	5.480,29	1.101,78	1.830,40
6	Keutapang Formation	0	0	0	0	0	0	841,62	223,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Keuteupang Formation	0	0	0	0	162,98	2.749,01	7.782,36	2.665,49	0	0	0	0	5.763,15	3.769,37	29,24	0	0
8	Meucampli Formation	192,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Peuet Sague Volcanic	20,27	85,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Peuet Volcanic Centre	2.565,24	2.515,97	1.597,10	607,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Peutu Formation	6.607,29	4.859,99	6.096,51	3.512,10	1.903,79	1.746,08	0	289,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Seureula Formation	0	0	0	0,03	1.642,80	2.960,13	712,88	1.957,79	437,01	0	0	1.073,66	0	0	0	0	0
13	Simelit Formation	0	0	0,29	2.023,91	4.361,62	2.751,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sipopok Formation	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

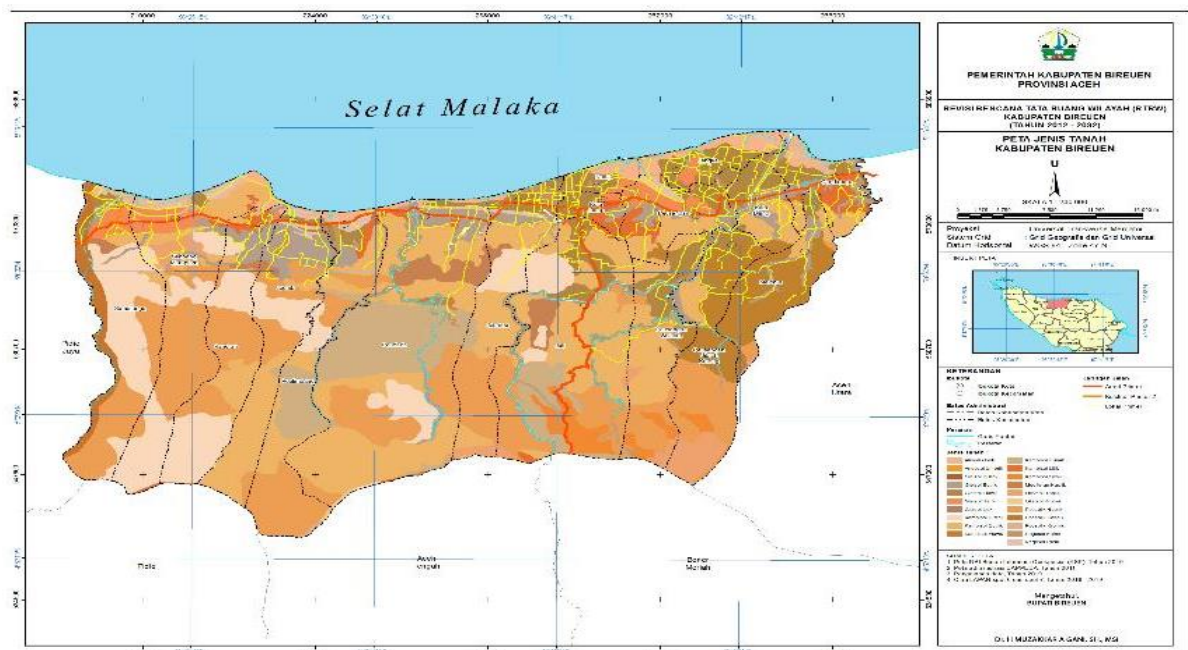
No	Jenis Batuan	Samalanga	Simpang Mamplam	Pandrah	Jeunieb	Peulimbang	Peudada	Juli	Jeumpa	Kota Juang	Kuala	Jangka	Peusangan	Peusangan Selatan	Peusangan Sibliah Krueng	Makmur	Gandapura	Kuta Blang
15	Teu Minas Volcanic	0	287,58	362,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Totolan Formation	0	1.038,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tudeuk Volcanic Cent	0	0	0	0	0	2.160,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Uneun Formation	1.907,71	1.804,80	1.720,79	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Younger Alluvium	1.481,78	1.566,04	245,31	930,81	636,64	1.416,39	1.000,87	955,40	282,91	1.243,48	2.223,82	1.060,59	1.544,85	531,56	4,47	1.252,06	122,43
20	Younger Dyke and Sil	0	90,35	255,42	108,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Luas (Ha)		14.139,09	15.768,66	11.400,97	11.254,58	12.787,15	31.281,46	23.118,35	10.913,76	1.690,87	1.710,56	3.758,03	5.907,63	9.414,70	11.205,35	6.857,36	4.766,15	3.870,13
Persentase (%)		7,86	8,76	6,33	6,25	7,11	17,39	12,85	6,06	0,94	0,95	2,09	3,28	5,23	6,23	3,81	2,65	2,15

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Bireuen terdiri dari tanah Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Di bagian utara wilayah ini didominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian selatan wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah Aluvial dan Latosol umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, jenis tanah Podsolik Merah Kuning sesuai untuk tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litosol mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi. Untuk lebih jelasnya terkait jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.4
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Samalanga	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Podsolik Kandik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.

No	Kecamatan	Jenis Tanah
2	Simpang Mamplam	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
3	Pandrah	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
4	Jeunieb	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
5	Peulimbang	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Podsolik Kromik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
6	Peudada	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
7	Juli	Andosol Umbrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
8	Jeumpa	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
9	Kota Juang	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
10	Kuala	Aluvial Gleik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
11	Jangka	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
12	Peusangan	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
13	Peusangan Selatan	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
14	Peusangan Siblah Krueng	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
15	Makmur	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
16	Kuta Blang	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
17	Gandapura	Aluvial Gleik, Gleisol Distrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, Tubuh Air.

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.5 Geomorfologi

Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Geomorfologi daerah di Kabupaten Bireuen dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

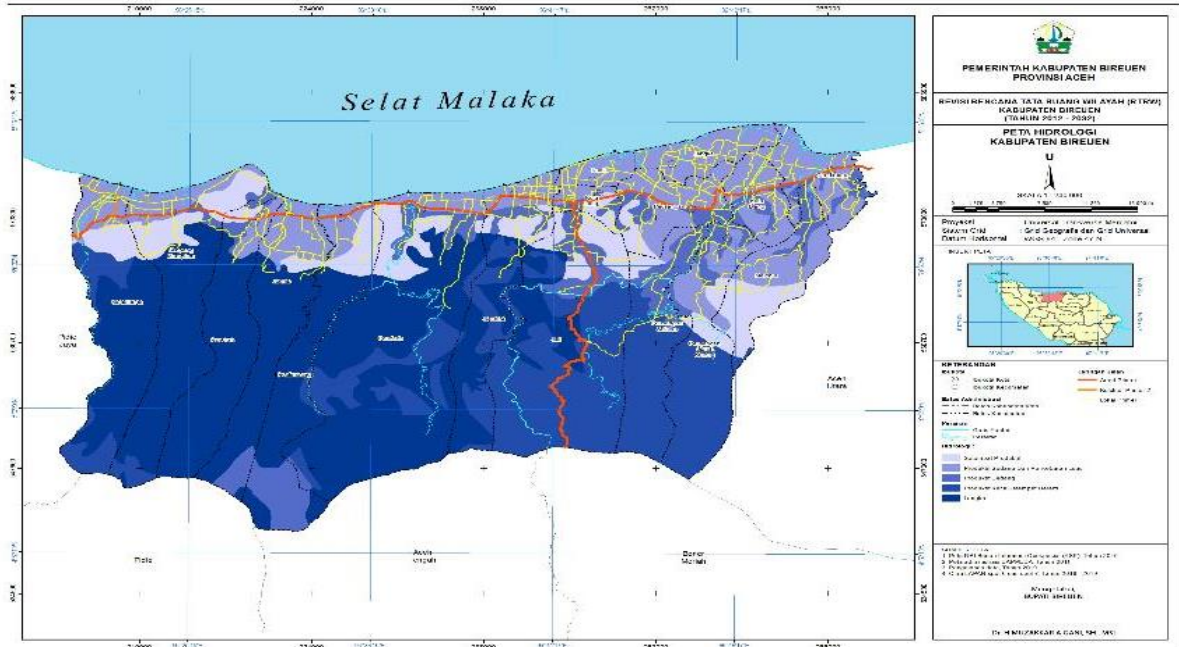
- 1) Daerah Pesisir (Utara) dengan struktur tanah berupa pasir, banyak di tumbuh pohon kelapa, tambak-tambak rakyat, pemukiman penduduk desa pantai, desa tambak, tempat pembenihan, daerah muara (umumnya dipakai tempat TPI dan PPI) dan beberapa kota-kota kecamatan berada di wilayah ini.
- 2) Daerah tengah didominasi persawahan, kebun-kebun penduduk, pemukiman penduduk dan ibu kota kabupaten.
- 3) Daerah Selatan adalah daerah berbukit atau dataran tinggi yang umumnya merupakan kawasan hutan, meliputi hutan lindung, dan kawasan budidaya.

2.1.1.6 Hidrologi

Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh, Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

Sebaran daerah air tanah langka di Kabupaten Bireuen tersebar di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, dan Kecamatan Jangka, dengan total luas sebaran daerah air tanah mencapai 493,17 Km². Sementara untuk air tanah setempat akuifer produktif tersebar di semua kecamatan dengan total luas sebaran mencapai 419,08 Km².

Kondisi hidrologi di Kabupaten Bireuen meliputi kondisi yang langka, produktif kecil setempat berarti, produktif sedang, produktif sedang dengan penyebaran luas, dan setempat produktif. Kondisi hidrologi dengan luas terbanyak adalah kondisi langka sebesar 20.799,28 ha yang berada di Kecamatan Peudada. Sedangkan kondisi hidrologi dengan luas wilayah terbanyak kedua adalah produktif kecil setempat berarti sebesar 15.333,48 ha yang berada di Kecamatan Juli, kondisi hidrologi dengan luas terendah adalah produktif kecil setempat berarti sebesar 309,21 ha yang berada di Kecamatan Peulimbang. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi hidrologi di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.



Gambar 2.5
Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen

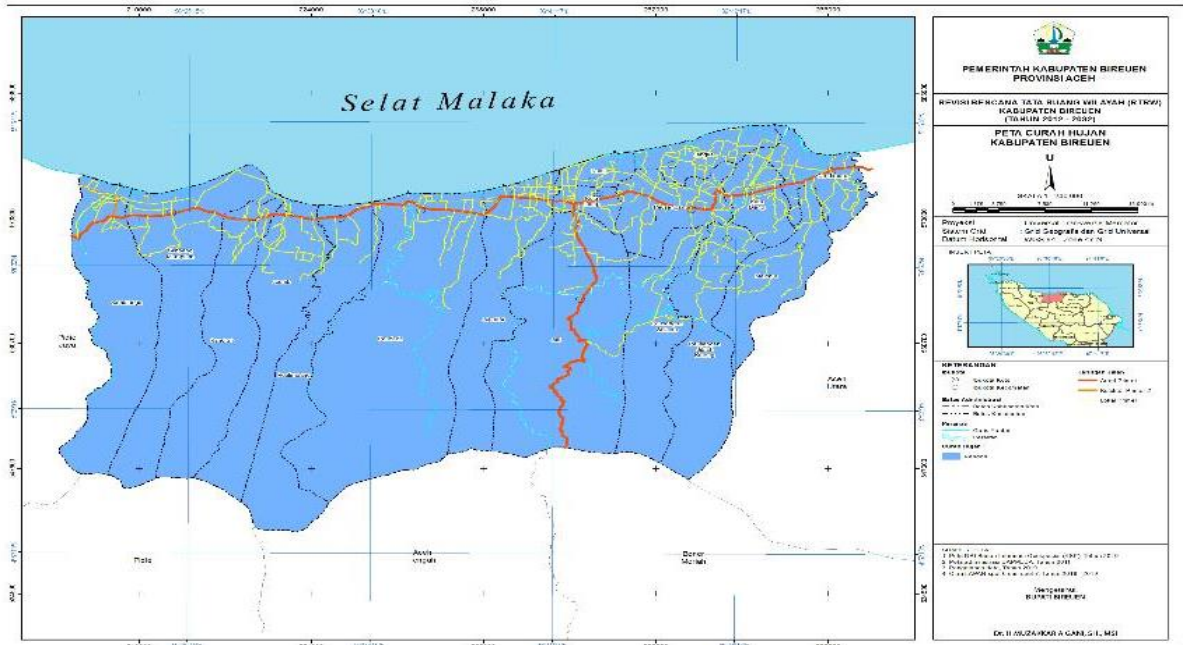
Tabel 2.5
Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Langka	Produktif Kecil Setempat Berarti	Produktif Sedang	Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas	Setempat Produktif	Total Luas (Ha)
1	Samalanga	7.965,94	2.755,98	0	2.108,26	1.308,91	14.139,09
2	Simpang Mamplam	9.315,67	671,37	548,11	2.200,40	3.033,12	15.768,66
3	Pandrah	9.597,38	16,72	514,06	899,29	373,52	11.400,97
4	Jeunieb	7.258,71	0	819,08	2.786,04	390,75	11.254,58
5	Peulimbang	6.828,05	309,21	2.507,01	1.483,05	1.659,84	12.787,15
6	Peudada	20.799,28	4.909,08	1.656,51	1.421,93	2.494,65	31.281,46
7	Juli	3.287,10	15.333,48	2.277,03	0	2.220,75	23.118,35
8	Jeumpa	4.301,45	3.204,58	733,59	1.592,62	1.081,53	10.913,76
9	Kota Juang	0	0	486,44	595,57	608,87	1.690,87
10	Kuala	0	0	0	1.710,56	0	1.710,56
11	Jangka	0	0	0	3.758,03	0	3.758,03
12	Peusangan	0	0	1.268,27	3.881,08	758,29	5.907,63
13	Peusangan Selatan	0	6.215,21	2.291,11	385,11	523,27	9.414,70
14	Peusangan Siblah Krueng	0	6.482,82	1.422,65	2.215,06	1.084,81	11.205,35
15	Makmur	0	159,36	1.021,22	3.064,44	2.612,33	6.857,36
16	Gandapura	0	0	862,00	3.904,15	0	4.766,15
17	Kuta Blang	0	0	779,09	3.091,05	0	3.870,13
Total Luas (Ha)		69.353,58	40.057,80	17.186,17	35.096,63	18.150,62	179.844,80

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

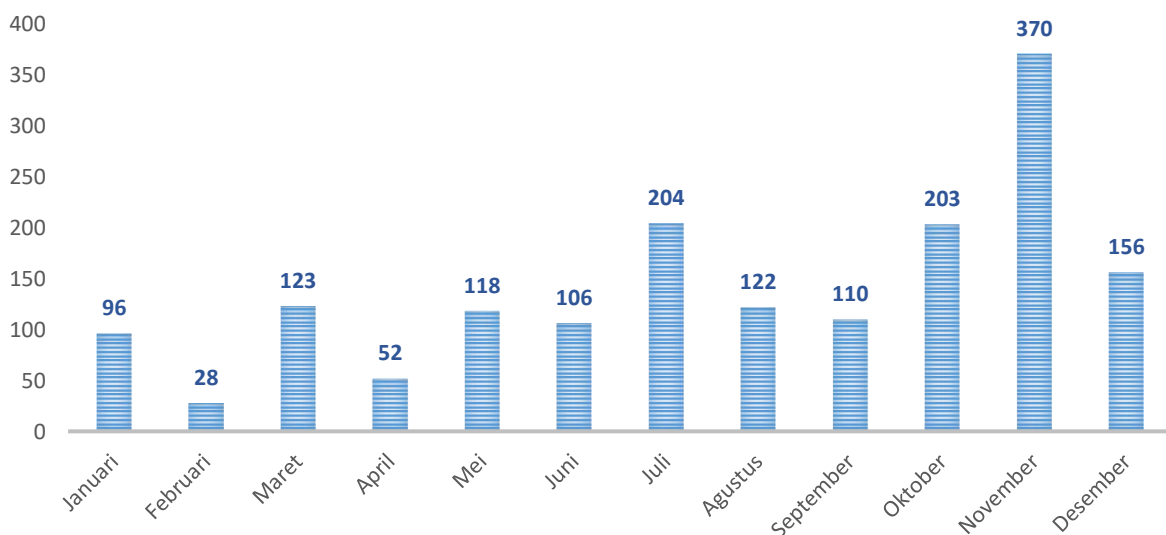
2.1.1.7 Klimatologi

Intensitas Curah hujan di Kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2021 memiliki rata-rata intensitas curah hujan mencapai 140,66 mm/bulan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kabupaten Bireuen selama tahun 2021 terjadi pada Bulan November, yaitu sebanyak 370 mm. Untuk lebih jelasnya terkait curah hujan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen

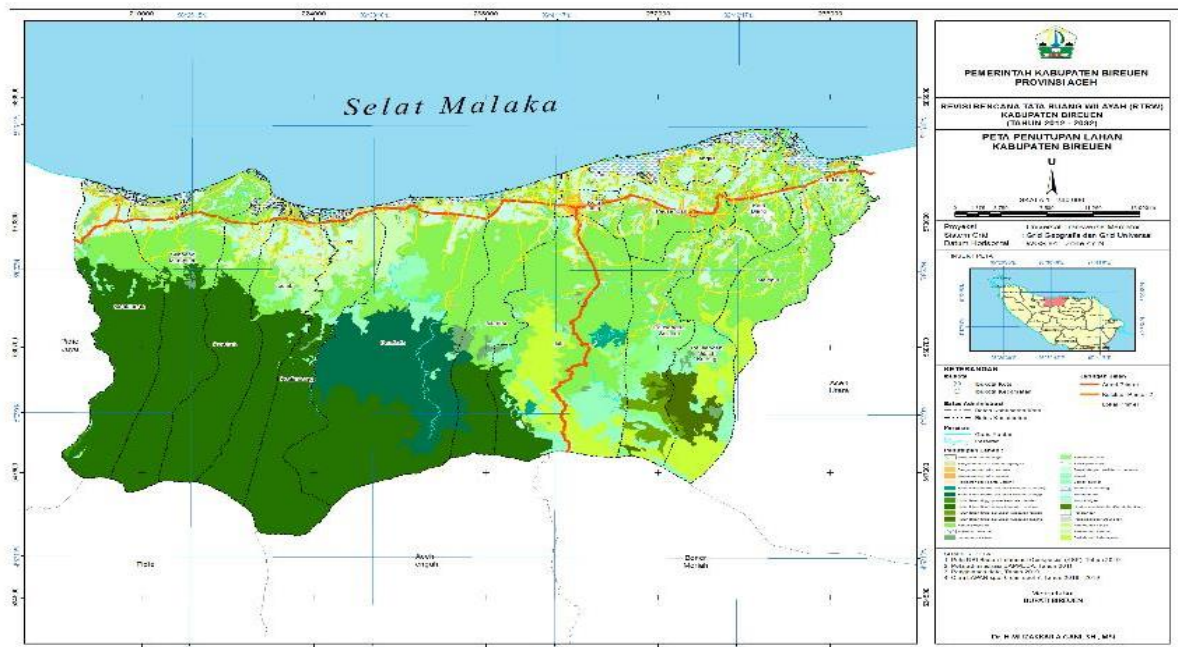


Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.7
Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten Bireuen

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 seluas 179.872,00 hektar, penggunaan lahan Kabupaten Bireuen terbagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung Kabupaten Bireuen seluas 33.707,94 hektar atau 10,34 persen, sebagian besar meliputi kawasan hutan lindung seluas 31.263,04 hektar atau 9,59 persen. Sedangkan kawasan budidaya seluas 146.164 hektar atau 44,83 persen dipergunakan antara lain untuk kawasan perkebunan seluas 65.864,75 hektar atau 20,20 persen, kawasan hutan produksi tetap seluas 32.497,9 hektar (9,97 persen), kawasan tanaman pangan seluas 15.656,36 hektar (4,80 persen), serta kawasan permukiman perdesaan seluas 12.115,47 hektar (3,72 persen). Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.6.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.8

Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.6

Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	Persen
A	Kawasan Lindung		
1	Badan Air	1.100,21	0,61
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
	- Kawasan Hutan Lindung	31.263,04	17,38
3	Kawasan Perlindungan Setempat	1.194,12	0,66

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	Persen
4	Kawasan Hutan Adat	28,89	0,02
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	121,68	0,07
B Kawasan Budi Daya			
1	Kawasan Hutan Produksi		
	- Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.009,64	2,23
	- Kawasan Hutan Produksi Tetap	32.497,90	18,07
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	2.324,55	1,29
3	Kawasan Pertanian		
	- Kawasan Tanaman Pangan	15.656,36	8,70
	- Kawasan Holtikultura	2.411,36	1,34
	- Kawasan Perkebunan	65.864,75	36,62
	- Kawasan Peternakan	67,59	0,04
4	Kawasan Perikanan		
	- Kawasan Perikanan Budi Daya	4.457,86	2,48
5	Kawasan Peruntukan Industri	672,65	0,37
6	Kawasan Permukiman		
	- Kawasan Permukiman Perkotaan	6.026,76	3,35
	- Kawasan Permukiman Perdesaan	12.115,47	6,74
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,18	0,03
Total Luas		179.872,00	100,00

Sumber: Interpretasi Citra (Spot 6) Tahun 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dikelompokkan dalam beberapa kawasan sebagai berikut:

A. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman berdasarkan penggunaan lahan termasuk ke dalam lahan terbangun yang meliputi bangunan permukiman kota, bangunan permukiman desa, area parkir dan lapangan, bangunan industri dan perdagangan (ruko, kios, dan warung), dan pekarangan. Selain itu juga, di dalamnya terdiri dari fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang menunjang kegiatan di dalamnya. Luas kawasan permukiman yaitu 18.142 ha atau 10,09 persen dari luas penggunaan lahan. Jika diklasifikasikan berdasarkan bangunan permukiman terbagi menjadi kota dan desa.

Kawasan permukiman perdesaan mendominasi permukiman di seluas 12.115,47 ha atau 66,78 persen dari luas permukiman, Secara umum bangunan permukiman baik kota maupun desa mengikuti pola jaringan jalan

yang ada. Wilayah yang berkembang sebagai kawasan permukiman terletak pada bagian tengah Perkotaan Bireuen.

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas hanya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen yaitu 6.026,76 ha atau 33,22 persen dari luas permukiman.

B. Kawasan Hutan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 yang termasuk lahan tidak terbangun sebagian besar adalah kawasan hutan dengan luas 67.771 hektar atau 15,76 persen dari luas penggunaan lahan. Kawasan hutan terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap. Sebagian besar kawasan hutan berlokasi tersebar di bagian Selatan Kabupaten Bireuen karena merupakan dataran yang cukup tinggi dengan kontur berbukitan.

Penggunaan lahan hutan yang paling luas lahan tinggi adalah kawasan hutan produksi tetap seluas 32.497,9 hektar serta kawasan hutan lindung seluas 31.263,04 ha atau 17,38 persen. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Samalanga seluas 8.293 hektar dan kemudian Kecamatan Simpang Mamplam dengan luas 5.197,51.

C. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah agraris. Penggunaan lahan tidak terbangun di Kabupaten Bireuen yang memiliki luasan yang cukup luas yaitu sawah dengan padi terus menerus seluas 15.656,36 ha atau 4,14 persen. Komoditas pangan unggulan Kabupaten Bireuen adalah padi yang merupakan pangan utama yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.

Penggunaan lahan padi sebagai pertanian lahan basah dibandingkan antara sebelum dengan sesudah inventarisasi dan identifikasi. Pada tahun 2019 diketahui, luas lahan sebelum dilakukan inventarisasi dan identifikasi terjadi penurunan luas dengan selisih 91,73 ha meliputi sawah dengan selisih 20,29 ha. Lokasi yang memiliki penurunan luas tertinggi yaitu Kecamatan Juli mencapai 46,25 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Sebelum Inven & Iden (Ha)	Setelah Inven & Iden (Ha)	Selisih (Ha)
1	Gandapura	1.135,85	1.161,92	26,07
2	Jangka	878,34	879,54	1,2
3	Jeumpa	1.014,20	1.015,43	1,23
4	Jeunieb	1.311,03	1.328,18	17,15
5	Juli	503,06	456,81	-46,25
6	Kota Juang	473,46	470,3	-3,16
7	Kuala	680,83	670,3	-10,53
8	Kuta Blang	960,85	967,02	6,17
9	Makmur	737,99	729,43	-8,56
10	Pandrah	511,32	521,66	10,34
11	Peudada	948,31	938,92	-9,39
12	Peulimbang	633,76	652,21	18,45
13	Peusangan	1.564,58	1.565,54	0,96
14	Peusangan Selatan	419,93	397,21	-22,72
15	Peusangan Sibliah Krueng	658,71	655,89	-2,82
16	Samalanga	1.230,55	1.214,57	-15,98
17	Simpang Mamplan	1.270,60	1.288,13	17,53
Jumlah		14.933,36	14.913,08	-20,29

Sumber: ATR/BPN Tahun 2019

D. Kawasan Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen yaitu termasuk lahan tidak terbangun meliputi perkebunan kakao, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan lain. Penggunaan lahan perkebunan yang seluas 65.864,75 hektar atau 17,43 persen. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bireuen yaitu Kakao, Karet, dan pinang. Disisi lain harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman keras di tingkat domestik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman semusim seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif dan lebih elastis di pasaran domestik.

E. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen yaitu termasuk kawasan budidaya dengan luas

67,59 hektar sekitar 0,02 persen dari total luas penggunaan lahan. Komoditas yang dibudidayakan bidang peternakan adalah lembu, kambing, domba dan unggas.

F. Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen yaitu termasuk kawasan budidaya dengan luas 4.457,86 hektar sekitar 1,18 persen dari total luas penggunaan lahan. Komoditas unggulan bidang perikanan budidaya adalah udang, bandeng, nila, lele dan kerapu.

G. Kondisi Kawasan Pesisir dan Hutan Mangrove

Kabupaten Bireuen merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan garis pantai 95,181 km. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, 11 di antaranya Kecamatan yang secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kecamatan tersebut, meliputi:

- Kecamatan Samalanga, meliputi Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan Meuliek.
- Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh, Rheum Timu, Blang Kuta Coh, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Blang. Teumulek, Blang Tambue, Keude Tambue, Meunasah Asan, Cureh Tunong, Cureh Baron, Peuneulek Baroh, Peuneulek Tunong, Ule kareung, Blang. Panyang, Calok dan Alue Luhop.
- Kecamatan Pandrah, meliputi: Gampong Alue Igeueh, Uteuen Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim.
- Kecamatan Jeunieb, meliputi Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.
- Kecamatan Peulimbang, meliputi Gampong Krueng Baro, Seuneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seuneubok Seumawe, Kuta Tring dan Padang kasab.
- Kecamatan Peudada, meliputi Gampong Sawang, Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reulet, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Kampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya.
- Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Blang Dalam, Lhak Mana, Mon Jambee, Batee Timoh, Lipah Rayek, Cot Geurundong, Lipah Cut dan Beurawang.

- Kecamatan Kuala, meliputi Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Weu Jangka, Ujong Blang Mesjid, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok dan Kareueng.
- Kecamatan Jangka, meliputi Gampong Alue Buya Pasi, Alue Buya, Pulo Iboih, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid. Jangka Keutapang, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Meunasah Oua, Bugak Mesjid, Pujot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala Ceurape.
- Kecamatan Peusangan, meliputi Gampong Pulo Naleung, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Pu'uk dan Cot Rabo Baroh.
- Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Jambo Kajeung, dan Kecamatan Gandapura, meliputi: Gampong Mon Keulayu, Mon Jambee, Samuti Aman, Samuti Makmur, Cot Mane, Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob.

Material penyusun pantai di Kabupaten Bireuen, termasuk ke dalam klasifikasi pantai bervegetasi dengan hamparan mangrove. Hutan mangrove adalah suatu ekosistem habitat daerah pantai yang harus dipertahankan keberadaannya sebagai penyedia sumber daya alam dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu tergenang air. Berdasarkan data di tahun 2021 Kabupaten Bireuen memiliki pesisir pantai yang ditumbuhi vegetasi mangrove dengan luasan 121,68 ha dengan presentase terhadap luas 0,03 persen.

Kabupaten Bireuen garis pantai yang cukup panjang, memiliki potensi pariwisata yang termasuk kedalam sub zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil seperti berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya. Dengan adanya pariwisata tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penduduk setempat dengan meningkatnya pendapatan, dan munculnya mata pencaharian baru.

Selain itu, sebagai lokasi yang berada dekat dengan laut, menjadikan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut hasil survey Statistik Perikanan Aceh tahun 2021 diketahui Kabupaten

Bireuen memiliki jumlah nelayan 7.449 orang, atau 1,69 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bireuen. Memiliki armada penangkapan ikan berjumlah 1.453 unit, sehingga dapat menghasilkan produksi 12.982 ton/tahun. Selain itu, Kabupaten Bireuen dikatakan melampaui kebutuhan konsumsi harian, dengan kata lain, mengalami surplus produksi. Kabupaten yang mengalami surplus produksi mensubstitusi kabupaten yang mengalami defisit produksi. Zona perikanan tangkap di Kabupaten ini yaitu Subzona Perikanan Pelagis, dan Demersal.

2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kabupaten Bireuen memiliki potensi perekonomian sekitar meliputi sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

A. Pertanian

Kabupaten Bireuen memiliki kawasan pertanian yang sangat luas, meliputi hampir setiap Kecamatan di Kabupaten Bireuen. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2,5 m x 2,5 m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap *subround* (empat bulanan) pada waktu panen petani. Pada tahun 2021, produksi padi tercatat sebesar 164.924 ton atau mengalami penurunan sebesar 10,82 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produktivitasnya meningkat sebesar 1,78 persen dari tahun sebelumnya menjadi 62,8 kuintal per hektar.

B. Perkebunan

Potensi perkebunan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, secara keseluruhan luas areal tanaman kelapa mencapai 16.570 hektar pada tahun 2021. Dengan luas areal yang meningkat dari tahun lalu, nilai produksi tahun 2021 juga mengalami sedikit peningkatan. Produksi terbesar selanjutnya adalah pinang dan kelapa sawit, yang hampir sama dengan produksi dari

tahun lalu, masing-masing sebesar 5.455 ton dan 4.216 ton. Perkebunan kelapa tersebar di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Simpang Mamplam.

C. Perikanan

Dalam sektor perikanan, Kabupaten Bireuen juga memiliki kawasan komoditi unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen yaitu budidaya udang windu, budidaya udang vannamei, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan kerapu, budidaya ikan nila, serta pengembangan garam. Lokasi budidaya ini tersebar di seluruh pesisir pantai di Kabupaten Bireuen, berupa tambak dan kolam yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen meliputi Kecamatan Gandapura, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Samalanga, dan Kecamatan Simpang Mamplam.

D. Kehutanan

Sebaran dan luasan hutan di Kabupaten Bireuen umumnya berada di daerah bagian Selatan dengan ketinggian 500 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah hutan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya di daerah ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- 1) Hutan Produksi, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng dan Kecamatan Makmur, dengan luas area hutan produksi 32.497,90 hektar.
- 2) Hutan Produksi Terbatas, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Peulimbang dan Kecamatan Peudada, luas area hutan produksi terbatas 4.009,64 hektar.
- 3) Hutan Adat, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Peudada, dengan luas area hutan kawasan budidaya 28,89 hektar.

2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana

A. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Bireuen merupakan daerah rawan kerentanan gerakan tanah. Rencana pengamanan/proteksi kawasan rawan bencana gerakan tanah seluas 9.426,89 hektar yang umumnya berada di wilayah selatan, yaitu:

- a. Kecamatan Samalanga seluas 48,57 hektar.
- b. Kecamatan Peulimbang seluas 1.047,75 hektar.
- c. Kecamatan Juli seluas 8.330,66 hektar.

Pada daerah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 persen dan > 40 persen, diperlukan penyelidikan kemantapan lereng secara rinci dan membangun bangunan pencegah gerakan tanah.

B. Kawasan Rawan Gempa

Potensi gempa yang ada di Kabupaten Bireuen mencakup seluruh Kabupaten. Terbagi atas klasifikasi kawasan rawan bencana gempa tinggi dan kawasan rawan bencana menengah.

Daerah yang dikategorikan rawan bencana gempa bumi tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Gandapura seluas 4.766,14 hektar
2. Kecamatan Jangka seluas 3.758,02 hektar
3. Kecamatan Jeumpa seluas 10.913,76 hektar
4. Kecamatan Jeunieb seluas 11.254,58 hektar
5. Kecamatan Juli seluas 23.062,57 hektar
6. Kecamatan Kota Juang seluas 1.690,87 hektar
7. Kecamatan Kuala seluas 1.710,56 hektar
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.870,13 hektar
9. Kecamatan Makmur seluas 6.857,36 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 11.400,97 hektar
11. Kecamatan Peudada seluas 31.281,45 hektar
12. Kecamatan Peulimbang seluas 12.787,15 hektar
13. Kecamatan Peusangan seluas 5.907,63 hektar
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 7.841,53 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 8.459,20 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 14.139,09 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 15.768,66 hektar.

Daerah yang dikategorikan rawan bencana gempa bumi menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Juli seluas 55,78 hektar.
- 2) Kecamatan Peusangan Selatan seluas 1.573,17 hektar.
- 3) Kecamatan Peusangan Siblih Krueng seluas 2.746,14 hektar.

C. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, khususnya banjir musiman terjadi di saat musim penghujan tiba terjadi pada daerah wilayah pesisir hilir sungai, sehingga terjadi genangan pada kondisi musim tertentu seluas 35.267,56 hektar antara lain:

1. Kecamatan Gandapura seluas 4.731,37 hektar.
2. Kecamatan Jangka seluas 2.941,80 hektar.
3. Kecamatan Jeumpa seluas 6.920,57 hektar.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 7.590,1 hektar.
5. Kecamatan Juli seluas 2.294,29 hektar.
6. Kecamatan Kota Juang seluas 653,25 hektar.
7. Kecamatan Kuala seluas 1.595,47 hektar.
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.520,95 hektar.
9. Kecamatan Makmur seluas 1.382,31 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 926,45 hektar.
11. Kecamatan Peudada seluas 3.335,47 hektar.
12. Kecamatan Peulimbang seluas 4.293,60 hektar.
13. Kecamatan Peusangan seluas 3.178,33 hektar.
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 713,96 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng seluas 172,14 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 8.430,92 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.215,47 hektar.

2.1.1.11 Demografi

A. Distribusi Penduduk

Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk 439.788 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan. Secara berturut-turut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Peusangan dengan jumlah 53.042 jiwa atau 12,06 persen, Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 47.789 jiwa atau 10,87 persen, Kecamatan Jeumpa dengan jumlah 38.382 jiwa atau 8,31 persen, dan Kecamatan Jangka dengan jumlah 30.270 jiwa atau 6,56 persen. Kecamatan

yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi tersebut, berada pada lokasi yang berdekatan yaitu pada sebelah timur atas Kabupaten Bireuen.

Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, secara berukuran dari terkecil meliputi Kecamatan Pandrah dengan jumlah 8.890 jiwa atau 2,02 persen, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berjumlah 12.066 jiwa atau 2,74 persen, dan Kecamatan Peulimbang berjumlah 12.232 jiwa atau 3,37 persen. Untuk lebih jelas terkait sebaran dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		Jiwa	Persen
1	Samalanga	28.086	6,39
2	Simpang Mamplam	27.413	6,23
3	Pandrah	8.890	2,02
4	Jeunieb	25.447	5,79
5	Peulimbang	12.232	2,78
6	Peudada	28.131	6,40
7	Juli	34.123	7,76
8	Jeumpa	37.277	8,48
9	Kota Juang	47.789	10,87
10	Kuala	18.925	4,30
11	Jangka	28.880	6,57
12	Peusangan	53.042	12,06
13	Peusangan Selatan	15.018	3,41
14	Peusangan Siblah Krueng	12.066	2,74
15	Makmur	15.777	3,59
16	Gandapura	23.933	5,44
17	Kuta Blang	22.759	5,17
Jumlah		439.788	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

B. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 179.844,80 hektar, dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 439.788 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata 3 jiwa/hektar. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 Tahun 2004 wilayah yang memiliki kepadatan < 150 jiwa/hektar termasuk ke dalam kepadatan rendah. Sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Bireuen secara keseluruhan termasuk ke dalam klasifikasi kepadatan penduduk rendah.

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 28 jiwa/hektar. Hal ini dipengaruhi peran Kecamatan Kota Juang yang menjadi ibu kota kecamatan di Kabupaten Bireuen. Untuk Kecamatan dengan kepadatan terendah memiliki jumlah 1 jiwa/hektar meliputi beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Klasifikasi
1	Samalanga	28.086	14.087,19	2	Rendah
2	Simpang Mamplam	27.413	15.772,05	2	Rendah
3	Pandrah	8.890	11.396,78	1	Rendah
4	Jeunieb	25.447	11.237,49	2	Rendah
5	Peulimbang	12.232	12.774,66	1	Rendah
6	Peudada	28.131	31.283,90	1	Rendah
7	Juli	34.123	23.118,35	1	Rendah
8	Jeumpa	37.277	10.886,02	3	Rendah
9	Kota Juang	47.789	1.690,87	28	Rendah
10	Kuala	18.925	1.724,56	11	Rendah
11	Jangka	28.880	3.748,92	8	Rendah
12	Peusangan	53.042	5.907,63	9	Rendah
13	Peusangan Selatan	15.018	9.414,70	2	Rendah
14	Peusangan Sibliah Krueng	12.066	11.205,35	1	Rendah
15	Makmur	15.777	6.857,36	2	Rendah
16	Gandapura	23.933	4.655,82	5	Rendah
17	Kuta Blang	22.759	3.870,13	6	Rendah
Jumlah		439.788	179.631,77	5	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

C. Komposisi Penduduk

Struktur atau komposisi penduduk yang diuraikan pada pembahasan ini adalah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi umur menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan pada tahun 2021, hampir seluruhnya memiliki jumlah lebih besar yaitu dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk perempuan memiliki jumlah 222.802 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 216.986 jiwa, sehingga rasio penduduk yang dihasilkan adalah 92. Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Jumlah	Jenis Kelamin		Rasio Jumlah	Jumlah Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	21.983	20.836	42.819	106
5-9	19.729	18.861	38.590	105
10-14	19.727	18.293	38.020	108
15-19	19.804	18.859	38.663	105
20-24	19.470	18.758	38.228	104
25-29	19.081	18.537	37.618	103
30-34	18.106	17.583	35.689	103
35-39	16.061	16.091	32.152	100
40-44	14.078	15.274	29.352	92
45-49	12.791	13.979	26.770	92
50-54	11.012	11.925	22.937	92
55-59	8.464	9.911	18.375	85
60-64	6.449	7.951	14.400	81
65-69	4.787	6.474	11.261	74
70-74	2.994	4.489	7.483	67
75+	2.450	4.981	7.431	49
Jumlah	216.986	222.802	439.788	92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Kabupaten Bireuen memiliki struktur usia penduduk terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu usia anak yaitu 0 – 14 tahun, usia produktif yaitu 15 – 64 tahun dan usia tidak produktif yaitu diatas 65 tahun. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bireuen termasuk ke dalam penduduk produktif yaitu 15 – 64 tahun mencapai 66,82 persen dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, memberikan dampak positif karena termasuk angkatan kerja. Dengan tingginya jumlah angka produktif memberikan kesempatan Kabupaten Bireuen dalam inovasi dan mengembangkan potensi-potensi secara maksimal.

D. Kondisi Sosial Penduduk

Menurut indentitas keanggotaan masyarakat struktur sosial masyarakat Bireuen adalah heterogen, masyarakat Bireuen terdiri dari berbagai etnis yang menetap di wilayah Bireuen. Secara budaya masyarakat Bireuen adalah homogen, masyarakat Bireuen memiliki budaya yang sama baik dalam pernikahan, kehidupan sosial dan adat istiadat dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk Bireuen adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah

sebanyak 443.870 jiwa pada tahun 2021. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 23 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 165 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 15 jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 310 jiwa.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Bireuen, ditinjau dari 3 fokus yakni kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Inflasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen
(Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2840,76	2917,98	3043,43	3161,08	3140,37
2	Pertambangan dan penggalian	231,64	217,44	220,44	226,98	243,01
3	Industri pengolahan	144,59	150,48	153,68	149,18	150,24
4	Pengadaan listrik dan gas	7,93	8,69	9,56	10,29	10,66
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,02	4,34	5,23	5,27	5,39

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Konstruksi	799,99	851,45	907,23	964,51	974,26
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2331,09	2486,09	2620,66	2490,31	2603,71
8	Transportasi dan pergudangan	899,62	907,90	940,25	740,85	927,50
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	97,28	103,45	111,07	107,05	107,25
10	Informasi dan komunikasi	256,58	261,01	270,88	303,00	327,95
11	Jasa keuangan dan asuransi	97,24	98,31	106,76	109,72	108,32
12	Real estate	280,36	295,57	315,48	313,74	323,47
13	Jasa perusahaan	26,29	27,67	29,09	30,02	30,59
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	705,36	752,90	791,11	790,06	831,15
15	Jasa pendidikan	156,67	166,32	178,59	183,00	185,85
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	203,29	217,33	232,85	246,85	271,12
17	Jasa Lainnya	115,21	119,21	129,11	130,70	133,66
	PDRB ADHK	9.197,93	9.586,14	10.065,43	9.962,58	10.374,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar 9,197 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 nilai PDRB ADHK menjadi 9,586 triliun rupiah dan 10.065 triliun. Tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 9,962 triliun. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK sudah mencapai 10,374 triliun rupiah. Selama lima tahun Bireuen telah mengalami kemajuan perekonomian dengan kenaikan PDRB ADHK sebesar 1,17 triliun rupiah. Kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan nilai PDRB ADHB, hal ini dikarenakan kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah produksi.

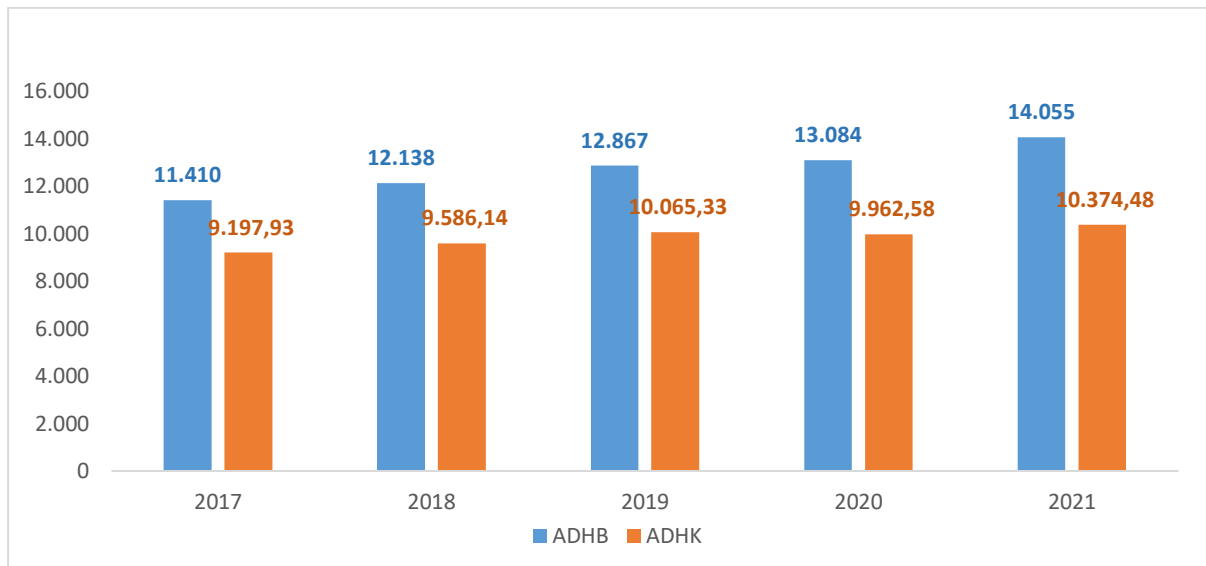
Sedangkan Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Bireuen selama tahun 2017-2021 mengalami tren yang naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 11,410 triliun rupiah dan pada tahun 2018 dan 2019 nilai PDRB ADHB menjadi 12,092 triliun rupiah dan 12,886 triliun. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai PDRB ADHB sudah mencapai 13,084 triliun rupiah dan 14,054 triliun rupiah. Selama kurun waktu lima tahun kenaikan nilai PDRB ADHB Bireuen tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,57 persen atau naik 0,79 triliun rupiah dari tahun 2018. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen
(milyar rupiah) Tahun 2017-2021

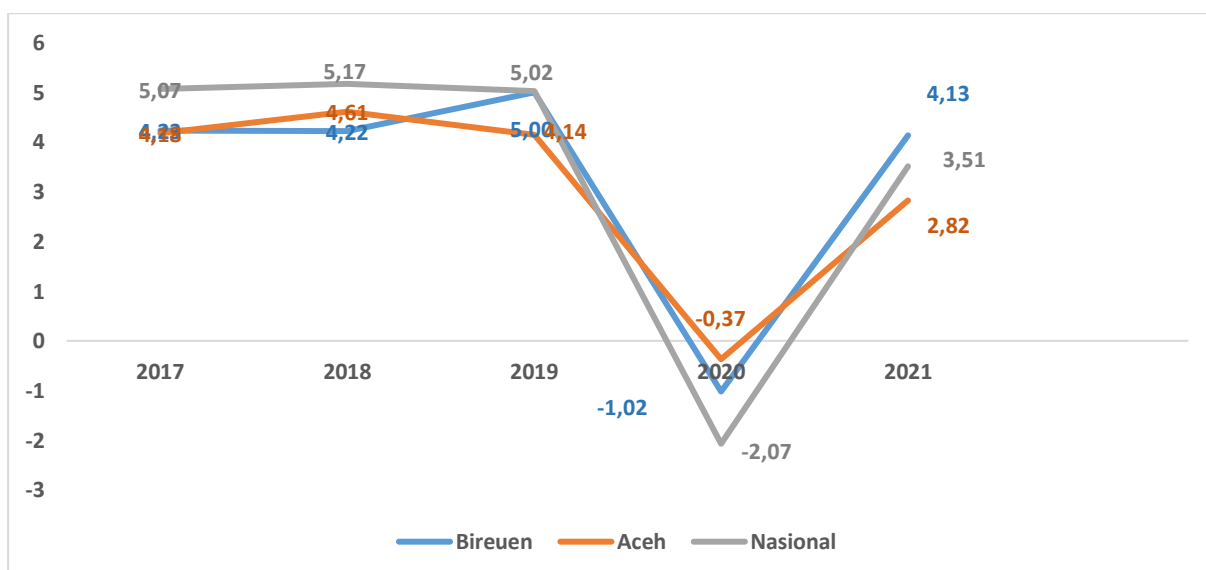
No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.831,72	4.015,05	4.267,36	4.525,25	4.725,31
2	Pertambangan dan penggalian	271,11	255,12	265,02	282,96	316,56
3	Industri pengolahan	191,25	200,30	201,45	198,07	210,60
4	Pengadaan listrik dan gas	7,84	8,66	9,60	10,19	10,07
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,39	6,98	8,67	8,90	9,00
6	Konstruksi	1.001,10	1.102,27	1.210,23	1.295,50	1.343,46
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.531,05	2.743,19	2.892,96	2.770,85	3.030,37
8	Transportasi dan pergudangan	1.023,04	987,77	1.004,72	811,83	1.042,16
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	130,33	143,21	160,51	160,33	149,26
10	Informasi dan komunikasi	275,40	272,33	285,85	315,86	333,96
11	Jasa keuangan dan asuransi	139,49	146,18	161,10	165,46	164,63
12	Real estate	356,55	385,17	420,64	430,72	439,22
13	Jasa perusahaan	35,82	39,25	42,80	45,22	47,08
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	967,22	1.086,68	1.171,23	1.215,38	1.309,58
15	Jasa Pendidikan	196,45	217,42	250,30	265,70	278,98
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	285,17	310,89	345,46	385,19	440,54
17	Jasa lainnya	160,99	172,05	188,96	196,95	203,77
	PDRB ADHB	11.410,92	12.092,52	12.886,85	13.084,37	14.054,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.9.

**Gambar 2.9****PDRB ADHK dan ADHB di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK yang disajikan secara berkala setiap tahun. Laju pertumbuhan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada PDRB ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar baru. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2021 mengalami perkembangan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2017 sebesar 4,23 persen dan turun menjadi 4,22 persen di tahun 2018. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,00. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi -1,02 persen. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bireuen kembali meningkat menjadi 4,13 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.10.

**Gambar 2.10****Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021**

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 disebabkan pulihnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi 21,56 persen terhadap PDRB dan sektor Transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi 7,42 persen. Untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB ADHB, pada tahun 2021 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu mencapai 33.62 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen
ADHB dan ADHK Tahun 2017-2021

No	Sektor	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	33,58	3,36	33,2	2,72	33,11	4,3	34,59	3,87	33,62	-0,66
2	Pertambangan dan penggalian	2,38	-2,62	2,11	-6,13	2,06	1,38	2,16	2,96	2,25	7,06
3	Industri pengolahan	1,68	2,72	1,66	4,08	1,56	2,13	1,51	-2,93	1,5	0,71
4	Pengadaan listrik dan gas	0,07	9,01	0,07	9,53	0,07	9,95	0,08	7,66	0,07	3,64
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,06	9,54	0,06	7,82	0,07	20,59	0,07	0,74	0,06	2,3
6	Konstruksi	8,77	5,54	9,12	6,43	9,39	6,55	9,9	6,31	9,56	1,01
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22,18	5,5	22,69	6,65	22,45	5,41	21,18	-4,97	21,56	4,55
8	Transportasi dan pergudangan	8,97	1,38	8,17	0,92	7,8	3,56	6,2	-21,21	7,42	25,19
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,14	6,1	1,18	6,35	1,25	7,36	1,23	-3,62	1,06	0,19
10	Informasi dan komunikasi	2,41	1,99	2,25	1,73	2,22	3,78	2,41	11,86	2,38	8,23
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,22	4,43	1,21	1,1	1,25	8,6	1,26	2,77	1,17	-1,28
12	Real estate	3,12	5,38	3,19	5,43	3,26	6,74	3,29	-0,55	3,13	3,1
13	Jasa perusahaan	0,31	5,08	0,32	5,24	0,33	5,11	0,35	3,2	0,33	1,93
14	Administrasi pemerintahan,	8,48	7,05	8,99	6,74	9,09	5,08	9,29	-0,13	9,32	5,2

No	Sektor	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	pertahanan dan jaminan sosial wajib										
15	Jasa Pendidikan	1,72	6,85	1,8	6,16	1,94	7,38	2,03	2,47	1,99	1,56
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	2,5	7,12	2,57	6,91	2,68	7,14	2,94	6,01	3,13	9,83
17	Jasa lainnya	1,41	5,5	1,42	3,47	1,47	8,3	1,51	1,23	1,45	2,27
	PDRB ADHB	100	4,23	100	4,22	100	5	100	-1,02	100	4,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tren peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK hingga tahun 2021 harus diakui sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 dan 2021

No	Sektor	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.161,08	3.140,37	3,87	-0,66
2	Pertambangan dan penggalian	226,98	243,01	2,96	7,06
3	Industri pengolahan	149,18	150,24	-2,93	0,71
4	Pengadaan listrik dan gas	10,29	10,66	7,66	3,64
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,27	5,39	0,74	2,3
6	Konstruksi	964,51	974,26	6,31	1,01
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.490,31	2.603,71	-4,97	4,55
8	Transportasi dan pergudangan	740,85	927,50	-21,21	25,19
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	107,05	107,25	-3,62	0,19
10	Informasi dan komunikasi	303,00	327,95	11,86	8,23
11	Jasa keuangan dan asuransi	109,72	108,32	2,77	-1,28
12	Real estate	313,74	323,47	-0,55	3,1
13	Jasa perusahaan	30,02	30,59	3,2	1,93
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	790,06	831,15	-0,13	5,2
15	Jasa Pendidikan	183,00	185,85	2,47	1,56

No	Sektor	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	
		2020	2021	2020	2021
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	246,85	271,12	6,01	9,83
17	Jasa lainnya	130,70	133,66	1,23	2,27
	PDRB	9.962,58	10.374,48	-1,02	4,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, bahkan saat efek dari Covid-19 sektor pertanian tetap tumbuh positif. Tahun 2021 PDRB sektor pertanian tumbuh negatif, sebagai akibat dari berkurangnya produksi komoditas pertanian dan meningkatnya PDRB sektor transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHK menurun selama kurun waktu tahun 2020-2021. Pada tahun 2021 nilai PDRB ADHK sektor pertanian telah tercatat sebesar 3,140 triliun. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurun waktu antara tahun 2020-2021, besaran kontribusi sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kabupaten Bireuen mengalami penurunan rata-rata 0,66 persen.

2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Kota Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Data inflasi tahun 2021 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi sebesar 1,97 persen, angka ini terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 (3,55 persen). Penurunan tingkat inflasi tahun 2021 hampir mendekati angka inflasi ideal (2 persen). Data BPS menyebutkan, tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2021 banyak disumbang terutama oleh tiga kelompok pengeluaran, yakni: makanan, minuman, dan tembakau 0,40 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,17 persen; dan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,10 persen. Sebaliknya ada tiga kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi, di antaranya: perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39 persen;

transportasi 0,25 persen; dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,03 persen.

Inflasi pada kelompok makanan-minuman utamanya disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, yakni: cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam, ikan segar, dan ikan diawetkan. Sebaliknya beberapa komoditas yang deflasi di antaranya: kendaraan bermotor dan emas perhiasan. Harga cabe sepanjang tiga bulan pertama 2021 memang sangat tinggi, yakni berada di kisaran Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilo, harga cabe ini bahkan sama dengan harga daging sapi. Iklim dan banjir juga menjadi penyebab penurunan inflasi dimana banyak daerah penghasil pangan gagal panen atau masa panennya tertunda.

Daya beli masyarakat juga terus tergerus akibat laju inflasi inti yang menurun ini yang disebabkan oleh penurunan harga kendaraan bermotor akibat penerapan kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan penurunan harga emas. Pada kendaraan bermotor di berbagai daerah misalnya, turun terutama di kelas 1.500 cc. Inflasi yang mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terbatas dan masih rendah. Inflasi yang rendah ini juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih terbatas, mencerminkan kinerja konsumsi rumah tangga pada komponen pertumbuhan ekonomi. Surutnya angka inflasi pada sepanjang tahun 2021 juga memberi gambaran bahwa optimisme publik meredup menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2021 dimana dari sisi konsumen misalnya, masih banyak orang yang menunggu, sedangkan dari sisi produsen, optimisme untuk ekspansi bisa kembali turun.

Tabel 2.15
Laju Inflasi Tahunan 2017-2021

No	Inflasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87
2	Aceh	4,25	1,84	1,69	3,54	0,71
3	Lhokseumawe	2,87	2,05	1,20	3,55	1,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi perlu dipikirkan oleh Pemerintah. Ada beberapa langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi yaitu pertama, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0 - 5,0 persen dengan strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran

distribusi, dan komunikasi efektif di masa pandemi Covid-19. Kedua, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga, memperkuat sinergi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional antara lain melalui program *food estate* serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Keempat, menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kelima, Pemerintah Daerah juga harus mampu menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkau pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan.

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 25,17 juta rupiah di tahun

2017, kemudian meningkat terus hingga menjadi 31,95 juta rupiah di tahun 2021. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi pada tahun 2021. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Secara umum laju pertumbuhan PDRB perkapita pada periode 2017-2021 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Namun laju pertumbuhan PDRB per kapita riil di 2021 sebesar 0,8 persen.

Tabel 2.16
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Bireuen 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB (milyar rupiah)					
	ADHB	11.410,92	12.092,52	12.886,85	13.084,37	14.054,53
	ADHK	9.197,93	9.586,14	10.065,43	9.962,58	10.374,48
2	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
	ADHB	25.177	26.190	27.324	29.981	31.958
	ADHK	20.294	20.762	21.342	22.828	23.590
	Laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (Persen)	2,02	2,31	2,79	-2,73	13,64
	Jumlah penduduk (orang)	453.224	461.726	471.635	436.418	439.788
	Pertumbuhan jumlah penduduk (Persen)	2,16	1,88	2,15	-0,07	0,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan indeks gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai Indeks gini berkisar antara 0 dan 1, koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data selama 5 (lima) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Indeks Gini di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bireuen	0,315	0,305	0,295	0,304	0,296
2	Aceh	0,329	0,325	0,319	0,319	0,324
3	Nasional	0,391	0,384	0,382	0,385	0,381

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Indeks gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan rendah karena sudah lebih kecil dari 0,3. Pada tahun 2017 sebesar 0,315 dan menurun menjadi sebesar 0,305 di tahun 2018. Angka ini kembali menurun 0,01 poin di tahun 2019 dengan gini ratio mencapai 0,295. Pada tahun 2020, indeks gini ratio menjadi 0,304, meningkat 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Namun indeks gini ratio 2021 kembali turun sebesar 0,008 dan diharapkan dapat terus menurun di tahun berikutnya. Dengan semakin menurunnya indeks gini ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bireuen semakin merata.

Bila dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Aceh indeks gini ratio Kabupaten Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,085 poin dari indeks gini ratio nasional memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,381. Angka ini menurun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Sementara itu, jika dibandingkan dengan indeks gini ratio September 2019 yang sebesar 0,382 naik sebesar 0,003 poin.

Dalam beberapa tahun terakhir angka indeks gini ratio Aceh juga cenderung meningkat yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh semakin bertambah. Tahun 2021, indeks gini rasio Aceh sebesar 0,323 yang angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang belum membaik, atau kesenjangan pendapatan masih di kategori sedang, walaupun angka ini masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,381.

2.1.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya

alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

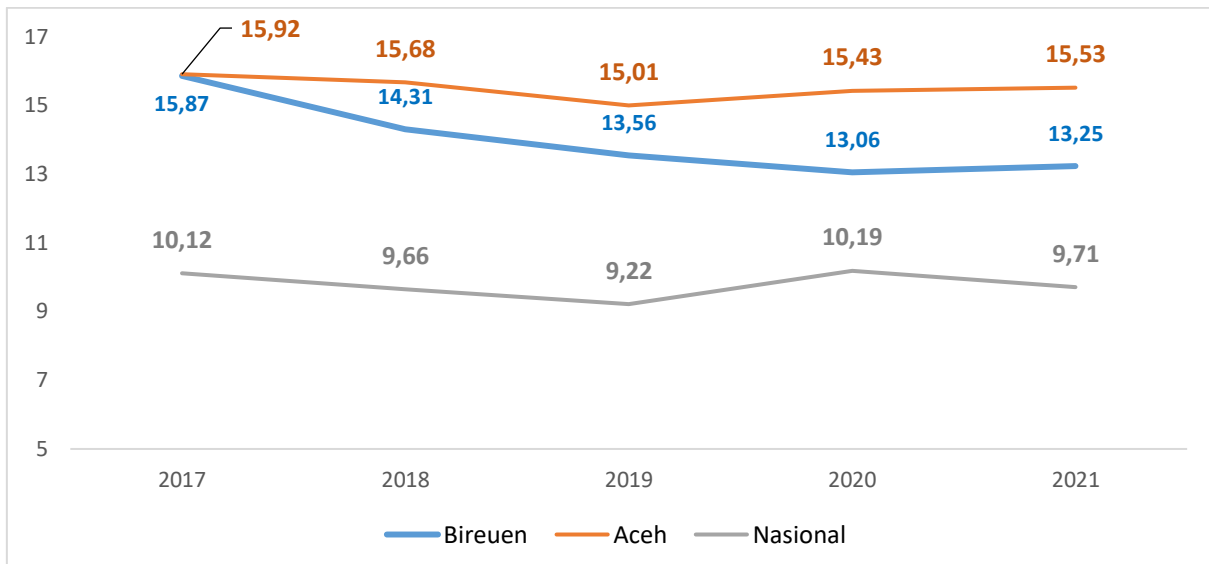
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan dimana komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sementara jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Selain itu efek dari pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk miskin, terutama di sektor-sektor yang menurun pertumbuhan ekonomi, seperti angkutan dan perdagangan.

1) Persentase Penduduk Miskin

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 63.020 orang (13,25 persen). Jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 600 orang dibandingkan dengan kondisi 2020 sebesar 62.420 orang (13,06 persen).



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.11
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

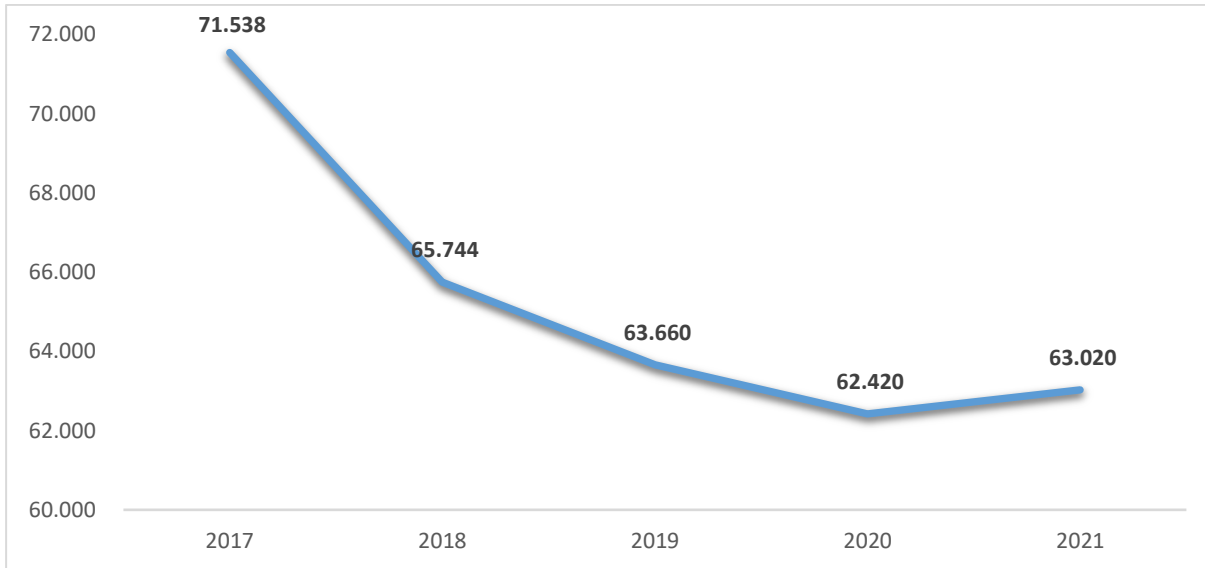
Gambar 2.11 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen masih bersifat fluktuatif sehingga persoalan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen dapat dikatakan masih bermasalah. Dibandingkan dengan Provinsi Aceh, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen lebih rendah, namun masih lebih tinggi dari angka persentase penduduk miskin nasional.

2) Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 63.020 orang (13,25 persen). Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2017-2021 cenderung bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.098 jiwa dari 70.440 jiwa menjadi 71.538 jiwa, akan tetapi turun kembali di tahun 2018 sebanyak 5.794 jiwa sehingga menjadi 65.744 jiwa, kemudian di tahun 2019 kembali turun sebanyak 2.084 jiwa menjadi 63.660 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 1.240 jiwa. Sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 menjadi 62.420 ribu jiwa. Namun pada tahun 2021

angka kemiskinan Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen menjadi 13,25 persen dengan jumlah penduduk miskin 63.020 ribu jiwa. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Secara persentase angka kemiskinan dan perhitungan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan sehingga perlu dikaji penyebab peningkatan dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang sehingga target RPK Kabupaten Bireuen dapat tercapai.

3) Garis Kemiskinan

Kemiskinan diukur dengan membandingkan nilai konsumsi kebutuhan makanan dan non makanan per kapita dengan garis kemiskinan. Jika konsumsi per kapita suatu rumah tangga lebih rendah dari garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut masuk kategori miskin.

Tren capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2017-2021 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Selama periode tahun 2017-2021 dimana pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar 335.314 rupiah terus meningkat sebesar 87.381 rupiah sehingga menjadi 422.685 rupiah pada tahun 2021. Namun untuk capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yang sebesar 422.685 rupiah per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar 541.109 rupiah perkapita perbulan. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk, dan ini terlihat dengan belum meningkatnya secara signifikan garis kemiskinan pada tahun 2021. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Statistik Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	335.314	358.399	393.198	410.203	422.685
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,87	14.31	13,56	13,06	13,25
3	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	71.538	65.744	63.600	62.420	63.020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen Periode September 2021 naik sebanyak 600 orang (dari 62.420 orang pada September 2020 menjadi 63.020 orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp. 422.685,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan. Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Bireuen harus menanggung beban rata-rata 4 sampai 5 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.113.425,00 /rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.19
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021		
		Bireuen	Aceh	Nasional
1	Garis Kemiskinan Rp./kap/bln)	422.685	541.109	486.168
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,25	15,33	9,71
3	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	63.020 ribu	834.24 ribu	26,50 juta

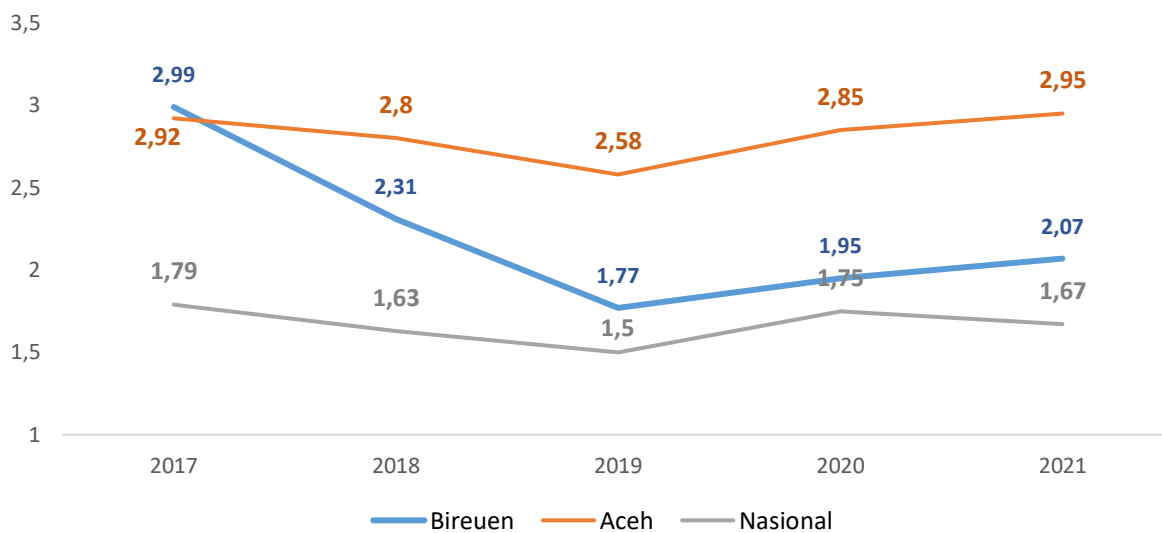
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan hal tersebut.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan(P2)

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.



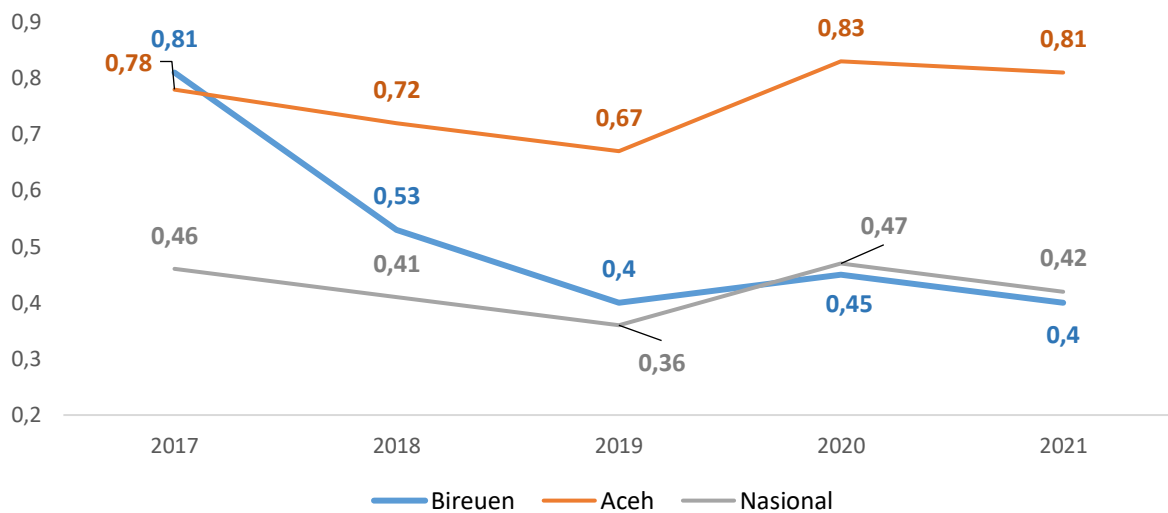
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.13
Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Dari Gambar 2.13 diatas indeks kedalaman kemiskinan penduduk Kabupaten Bireuen setiap tahunnya lebih rendah dari dari Provinsi Aceh namun masih di atas kedalaman kemiskinan nasional. Indeks kedalaman kemiskinan Bireuen meningkat dari tahun 2019. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Bireuen pada tahun 2021 sebesar 2,07 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,99.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.14
Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebesar 0,40 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,81 persen dan capaian P2 nasional sebesar 0,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bireuen.

Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama, karena garis kemiskinan di desa yang lebih tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengonsumsi makanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.

5) Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan *USD 1.9 PPP*. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai *US \$ 1,9 PPP* ≈ Rp10.195,6 per kapita per hari, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait kemiskinan ekstrem rapat terbatas strategi penanggulangan kemiskinan kronis. 21 juli 2021, diharapkan pemerintah daerah walaupun menghadapi pandemi Covid-19 ada upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem dan upaya ini tidak boleh berhenti agar target penurunan kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai nol persen.

Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di berbagai sector terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat terus diperkuat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan, serta upaya untuk melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Hal yang sama juga dikemukakan melalui arahan Wakil Presiden terkait kemiskinan ekstrem pada rapat pleno TNP2K koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dimana kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah

harus merumuskan manajemen pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk memastikan konvergensi dan ketepatan sasaran, mengoordinasikan percepatan sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan pemutakhiran DTKS yang terpadu, serta memastikan konvergensi program dan anggaran bantuan sosial dengan mempertajam program pemberdayaan, dengan tidak menyampingkan program infrastruktur penunjang, air bersih, sanitasi, dan perumahan.

Pemerintah Kabupaten juga diharapkan dapat menindaklanjuti pembangunan *social registry* dan mampu segera menuntaskan pemutakhiran DTKS dengan menggunakan metodologi terbaik untuk menjamin akurasi dan kekinian data. Pemerintah pusat akan berupaya mengonsolidasikan program dan anggaran kementerian Lembaga dan pemerintah daerah guna menghindari tumpang-tindih dan duplikasi agar memastikan semua program dan kegiatan yang dikelola dapat diprioritaskan pada 212 kabupaten/kota di tahun 2022.

Tabel 2.20
Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan BPS

Tahun	Kemiskinan Ekstrem			Kemiskinan BPS			Konversi GK Nasional ke \$PPP
	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan Konversi dari 1,9 \$PPP)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	
2012	238.288,5	11,7	28,50	267.408	11,96	29,13	2,13
2013	249.910,8	9,4	23,23	289.041	11,36	28,07	2,20
2014	261.647,7	7,9	19,86	318.514	11,25	28,28	2,31
2015	277.966,2	7,2	18,35	342.541	11,22	28,59	2,34
2016	284.184,9	6,5	16,76	364.527	10,86	28,01	2,44
2017	305.720,2	5,7	14,88	374.478	10,64	27,77	2,33
2018	316.736,1	4,7	12,42	401.220	9,82	25,95	2,41
2019	323.291,0	3,7	9,89	425.250	9,41	25,14	2,49
2020	345.355,6	3,9	10,54	454.652	9,78	26,42	2,50
2021	358.232,6	4,0	10,86	472.525	10,14	27,54	2,51

Sumber: BPS, Bank Dunia Tahun 2021 (diolah)

Dari Gambar 2.15. terlihat bahwa Kabupaten Bireuen yang berada pada kuadran pertama kiri atas dikategorikan sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem rendah (di bawah rata-rata) namun jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi (di atas rata-rata). Ada tiga kabupaten di Aceh yaitu Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur dengan kondisi persentase di bawah rata-rata namun jumlah penduduk miskin ekstrem di atas rata-rata.

Ada berbagai upaya Pendekatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

- Menjangkau rumah tangga miskin ekstrem yang belum menerima program
 - a. Memastikan rumah tangga miskin ekstrem masuk dalam DTKS
 - b. Menjadi prioritas penerima manfaat program
- Mengusulkan program khusus dan tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrem
 - a. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin ekstrem
 1. Lansia merupakan kelompok paling miskin dari seluruh penduduk
 2. Pengeluaran rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas sekitar 30 persen lebih tinggi dari rumah tangga yang tidak memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas.
 - b. Aset transfer sebagai modal sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin ekstrem
 - c. Penanganan kemiskinan wilayah untuk meminimalkan kantong kemiskinan

6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah daerah dengan mengadopsi strategi nasional mencoba menggunakan strategi utama penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program :

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

7) Tantangan Penanggulangan Kemiskinan selama pandemi

Pandemi memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen, ini terlihat dari adanya pembatasan mobilitas penduduk sebagai bagian dari upaya pencegahan Covid-19 yang memberikan pengaruh terhambatnya akses barang maupun jasa dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi berkontraksi minus 1,02 persen pada tahun 2020. Kelompok 40 terbawah atau kelompok rentan miskin dan UMK yang paling berdampak akibat hilangnya pendapatan bahkan mata pencarian sepanjang tahun 2020.

Selama pandemi, pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan semaksimal mungkin memanfaatkan cakupan DTKS. Selain dapat digunakan untuk menyasar bantuan selama pandemi, berbagai usulan data ini dapat digunakan sebagai data awal untuk pemutakhiran DTKS yang direncanakan di tahun 2021. Tantangan terbesar dalam masa pandemi yang berdampak luas adalah perlunya penyesuaian dan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, strategi mengurangi beban melalui berbagai

bantuan sosial dan strategi meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan. Di samping itu, penanganan kemiskinan juga harus bersifat multisektoral hal ini disebabkan karena kemiskinan dan kesejahteraan sangat dinamis. Penanganan Kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni tidak semata-mata terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses pendidikan. Kesehatan serta dimensi lain yang harus diperhatikan. Ini yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bireuen melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen.

2.1.2.1.6. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah salah satu bagian dari gambaran kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara angkatan kerja (*labour force*) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebanyak 233.321 orang yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki 139.564 orang dan angkatan kerja perempuan 93.757 orang. Penduduk angkatan kerja dibagi menjadi 223.237 orang bekerja dan 10.084 orang pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja meliputi, dengan masing-masing jumlah penduduk sebesar 26.005 orang bersekolah, 68.739 orang mengurus rumah tangga dan 25.952 orang melakukan kegiatan lainnya. Gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	139.564	93.757	233.321
	Bekerja	134.180	89.057	223.237
	Pengangguran Terbuka	5.384	4.700	10.084
2	Bukan Angkatan Kerja	31.004	89.692	120.696
	Sekolah	13.196	12.809	26.005
	Mengurus Rumah Tangga	2.514	66.225	68.739
	Lainnya	15.294	10.658	25.952
Total		170.568	183.449	354.017

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Sedangkan untuk angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 29.090 orang. Sedangkan untuk angkatan kerja paling sedikit berada pada kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 16.173 orang.

Tabel 2.23
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Angkatan kerja
1	15-19	13.571
2	20-24	26.156
3	25-29	29.090
4	30-34	28.030
5	35-39	27.622
6	40-44	26.295
7	45-49	23.341
8	50-54	21.742
9	55-59	16.173
10	60+	21.301
Jumlah		233.321

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

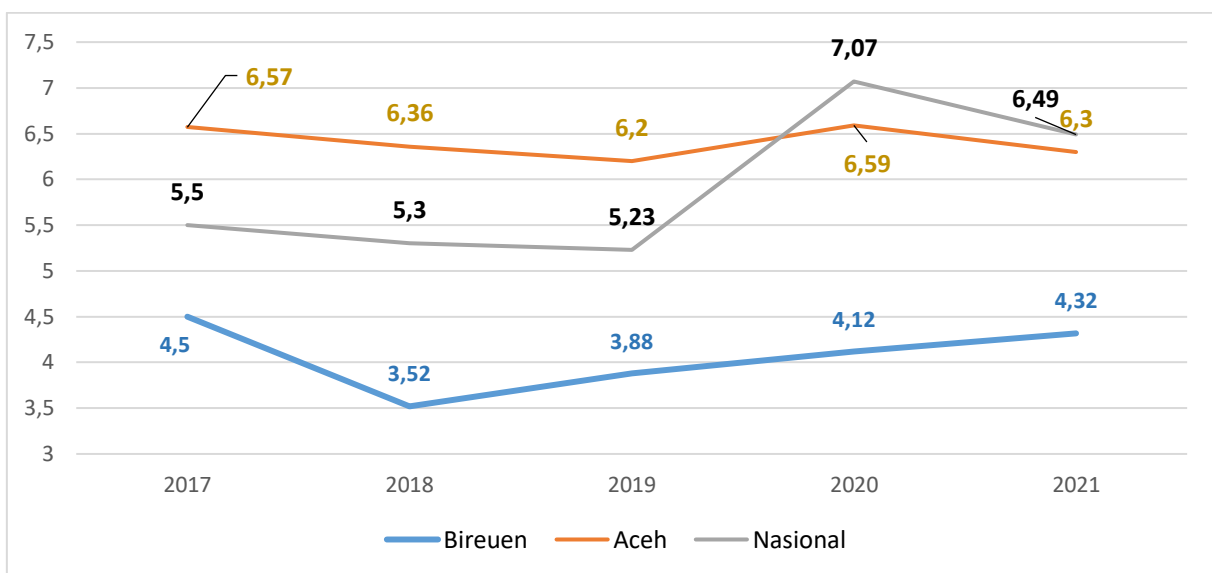
Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebanyak 10.084 orang, terdiri dari 5.384 orang laki-laki dan 4.700 orang perempuan. TPT Kabupaten Bireuen sebesar 4,32 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 4 orang angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja

Tabel 2.24
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	227.483	213.661	226.030	233.033	233.321
2	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	217.238	206.136	206.136	223.443	223.242
3	Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	Orang	10.245	7.525	7.525	9.590	10.079
4	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	95,5	96,48	96,12	95,88	95,68
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,61	64,96	67,1	67,06	65,91
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,5	3,52	3,88	4,12	4,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.321 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,68 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65,91 persen, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,32 persen. Hal ini disebabkan dorongan kenaikan pada TPT perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.16
Persentase Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

TPT Kabupaten Bireuen masih lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Aceh dan Nasional. Namun terjadi tren peningkatan TPT Kabupaten Bireuen

dari Tahun 2018 sebesar 3,52 terus meningkat setiap tahunnya menjadi 4,32 pada tahun 2021.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan indeks pembangunan manusia.

2.1.2.2.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *Mean Years School (MYS)* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun kebawah dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka rata-rata lama sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan, yaitu 9,16 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,29 tahun pada tahun 2021. Dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Indonesia juga masih di bawah Program Pendidikan Dasar, yaitu 8,54 tahun artinya penduduk Indonesia baru dapat menikmati pendidikan sampai tingkat dua SMP yaitu dua tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bireuen yang semakin meningkat. Namun demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sangatlah kecil, dari 9,16 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,29 tahun pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan hanya 0,13, angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk

usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,29 tahun atau telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.25
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Angka Rata-rata lama Sekolah		
		Bireuen	Aceh	Nasional
1	2017	9.16	8,98	8
2	2018	9.17	9,09	8,17
3	2019	9,27	9,18	8,34
4	2020	9,28	9,33	8,48
5	2021	9,29	9,37	5,54

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Dari Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebesar 9,29 tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Aceh sebesar 9,37 tahun dan lebih tinggi dari nasional sebesar 8,97 tahun.

2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan. Di tahun 2017 angka harapan lama sekolah sebesar 14,80 tahun ini terus meningkat di tahun 2021 sebesar 14,84. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.26
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	12,95	12,91	12,95	12,98	13,08
2	Aceh	14,13	14,27	14,3	14,31	14,36
3	Bireuen	14.80	14.81	14.82	14,83	14,84

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bireuen tahun 2021 (14,84 tahun) sudah lebih baik dari HLS Aceh (14,36 tahun) dan nasional (13,08 tahun). Namun HLS Bireuen masih dibawah HLS kabupaten terdekat, yaitu Lhokseumawe (15,21 tahun) dan Pidie Jaya (14,97 tahun).

2.1.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.27
Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57
2	Aceh	69,52	69,64	69,87	69,93	69,96
3	Bireuen	70,80	70,92	71,16	71,22	71,26

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan Provinsi Aceh, usia harapan hidup di Kabupaten Bireuen sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2017 angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 70,80, lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh di tahun yang sama sebesar 69,52 tahun dan lebih rendah dari nasional sebesar 71,06. Angka harapan hidup Kabupaten Bireuen di tahun 2021 meningkat mencapai 71,26 tahun jauh lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh yang hanya sebesar 69,96 tahun akan tetapi lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 71,57 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini didorong oleh akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang semakin baik. Disamping itu keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen.

2.1.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang bisa digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup manusia di

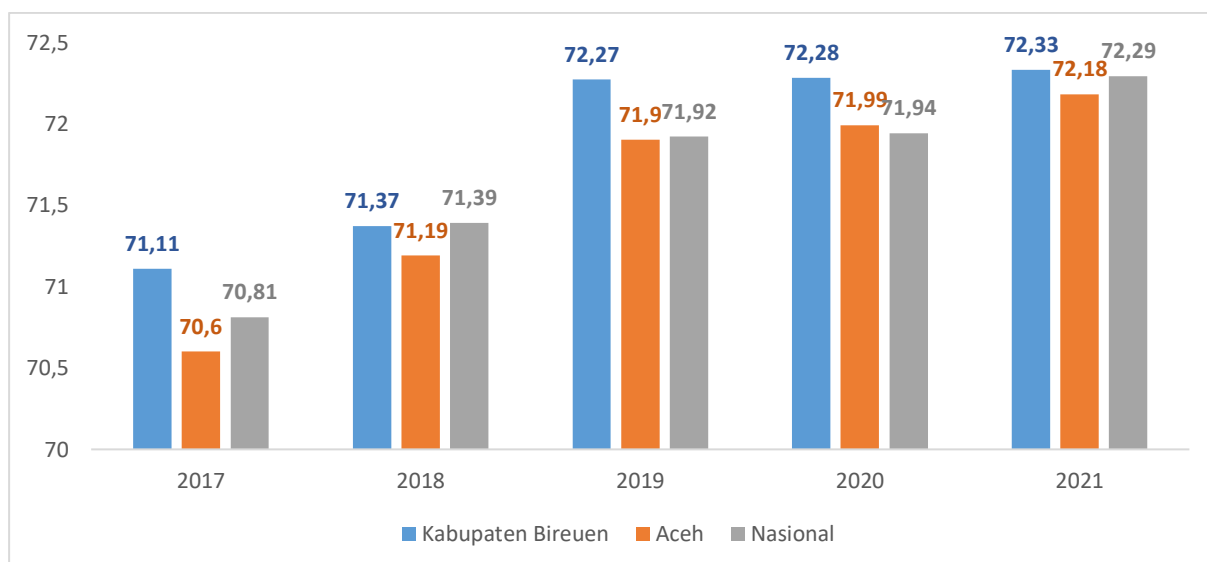
suatu wilayah yang terdiri dari komponen angka harapan hidup (*Life Expectancy at Age*), angka harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*), dan pengeluaran per kapita disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021
di Kabupaten Bireuen

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2017	71.11
2	2018	71.37
3	2019	72.27
4	2020	72.28
5	2021	72.33

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan Aceh dan nasional tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Bireuen mencapai 72,33, lebih tinggi dibandingkan angka IPM Aceh (72,18) dan IPM nasional (72,29).



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.17
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM 2017-2022 untuk tahun 2019 ditargetkan berada pada indeks 71,30 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan. Perbandingan IPM Bireuen dengan IPM kabupaten/kota lain di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
dalam Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	IPM Pengeluaran Per Kapita	Total
1	Banda Aceh	71,52	17,8	12,83	16,891	85,71
2	Lhokseumawe	71,64	15,21	11,11	11,39	77,57
3	Langsa	69,43	15,63	11,12	12,067	77,44
4	Sabang	70,56	14,13	11,18	11,378	76,11
5	Pidie Jaya	70,18	14,97	9,34	10,29	73,60
6	Aceh Besar	69,79	14,73	10,33	9,644	73,58
7	Aceh Tengah	68,86	14,28	9,86	10,78	73,37
8	Bener Meriah	69,26	13,47	10	11,118	73,27
9	Bireuen	71,26	14,84	9,29	8,867	72,33
10	Aceh Barat	67,99	14,61	9,55	9,593	71,67
11	Pidie	66,95	14,47	9	9,86	70,7
12	Aceh Jaya	67,19	13,99	8,71	9,666	69,84
13	Aceh Tamiang	69,63	13,76	8,91	8,367	69,48
14	Aceh Utara	68,81	14,71	8,64	8,201	69,46
15	Aceh Tenggara	68,22	14,01	9,67	8,03	69,44
16	Nagan raya	69,24	14,14	8,69	8,292	69,31
17	Aceh Singkil	67,43	14,32	8,68	8,776	69,22
18	Aceh Timur	68,74	13,04	8,21	8,577	67,83
19	Gayo Lues	65,53	13,78	8,4	8,856	67,56
20	Aceh Selatan	64,4	14,6	8,88	8,18	67,44
21	Aceh Barat Daya	65,06	13,65	8,67	8,428	66,99
22	Simeulue	65,28	13,9	9,48	7,148	66,41
23	Subulussalam	64,07	14,62	8,03	7,385	65,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Meskipun IPM Bireuen terus meningkat, namun tahun 2021 IPM Kabupaten Bireuen berada pada posisi sembilan dibandingkan kabupaten lain di Aceh. IPM Kabupaten Bireuen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pidie Jaya yang dengan nilai 73,60 dan Kota Lhokseumawe dengan IPM sebesar 77,57.

2.1.2.2.5 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid-19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Bireuen belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya cegah penularan Covid-19 di tahun 2021 ini. Tiga langkah ini mengadopsi langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dimana langkah *pertama* adalah memperketat disiplin protokol kesehatan untuk memastikan masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya *herd immunity* (kekebalan kelompok). *Kedua*, upaya 3T yaitu *testing* (pemeriksaan), *tracing* (pelacakan) dan *treatment* (perawatan) terus diperkuat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat yang positif dapat dideteksi lebih cepat, dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai standar. Sehingga menekan angka kasus aktif dan mengurangi angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.

Langkah *ketiga* jika kasus positif masih tinggi, adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi, akan sangat berpotensi meningkatkan angka penularan.

Mengutip dari situs Pemerintahan Aceh Info Covid-19 (Covid19.acehprov.go.id) tercatat sampai tanggal 19 Mei 2021 pukul 18.00 WIB tercatat untuk Provinsi Aceh yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 12.615 orang, dalam perawatan 1.636 orang, sembuh 10.467 orang dan meninggal 512 orang, suspek 9.096 orang, dan Probable 722 orang. Untuk Kabupaten Bireuen tercatat masyarakat Bireuen yang terkonfirmasi sebanyak 604 orang, dalam perawatan 39 orang, sembuh 541 orang, meninggal 24 orang, suspek 2.191 orang, dan Probable 17 orang.

Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Jumlah cakupan vaksin dosis 1 di

Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebanyak 203.681 orang (61,2 persen). Jumlah yang divaksin dosis 2 sebanyak 73.893 orang (22,2 persen), jumlah yang divaksin dosis 3 khusus tenaga kesehatan sebanyak 3.278 orang (69,9 persen).

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat islam. Perkembangan seni dan budaya Kabupaten Bireuen tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30

Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	89	122	142	142	152
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
3	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	10	10	10	13	13
4	Jumlah sanggar yang dibina	10	15	20	25	40
5	Jumlah sanggar dibawah naungan DKA	32	38	44	50	50

Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Ketersediaan grup kesenian dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah 89 grup kesenian meningkat menjadi 152 grup di tahun 2021. Kabupaten Bireuen membutuhkan gedung kesenian yang dapat menampung apresiasi dan kreatifitas anak-anak muda dalam bidang seni dan budaya. Gedung kesenian merupakan sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mewedahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Akan tetapi untuk mendukung pengembangan kesenian, hingga tahun 2021 belum tersedia gedung kesenian di Kabupaten Bireuen.

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi masih sangat minim, masih sebesar 61,54 persen dari jumlah karya budaya di Kabupaten Bireuen dan diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2026 dan even seni daerah yang dilaksanakan masih rendah.

2.1.2.3.2 Olahraga

Pembangunan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjaringan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi. Pembinaan terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi.

Tabel 2.31
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cabang olah raga	32	35	35	37	37
2	Jumlah gedung olah raga	1	1	1	4	4

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gedung olahraga di Kabupaten Bireuen juga perlu penambahan untuk menyalurkan bakat olah raga pemuda/pemudi disegala cabang olah raga.

Sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan bidang olahraga, ketersediaan fasilitas sarana prasarana olahraga di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan voli, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 9 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis. Jumlah atlet berprestasi di Pra Pora pada tahun 2021 sebanyak 328 atlet dari 500 atlet (65, 60 persen),

diharapkan target Pra Pora 2025 mencapai 66,76 persen dan 24 persen atlet berprestasi pada PORA 2026.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:

2.1.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok Usia 7-12 tahun					
	Bireuen	100,00	100,00	100,00	99,63	99,80
	Aceh	99,85	99,86	99,75	99,82	99,67
	Nasional	99,14	99,22	99,24	99,26	99,19
2	Kelompok Usia 13-15 tahun					
	Bireuen	99,17	99,45	99,00	99,05	98,49
	Aceh	98,09	96,49	98,52	98,49	98,42
	Nasional	95,08	95,36	95,51	95,74	95,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

APS merupakan tolak ukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dari Tabel 2.32 terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus berfluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan 7-12 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,80 lebih baik dari APS Aceh sebesar 99,67 dan nasional sebesar 99,19. Begitu juga untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 98,49 lebih baik dari Aceh di tahun yang sama 98,42 dan nasional 95,99. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terdapat 1 anak yang tidak bersekolah. Untuk tahun kedepan diharapkan semakin besar penduduk di Kabupaten Bireuen yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

A.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7 hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APM juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
	Bireuen	98,62	96,27	97,4	97,41	96,77
	Aceh	98,54	99,1	99,12	99,03	98,95
	Nasional	97,19	97,58	97,64	97,69	97,8
2	SMP/MTs	86,14	83,37	82,92	84,15	83,48
	Bireuen	86,14	83,37	82,92	84,15	83,48
	Aceh	86,31	86,38	86,48	86,87	86,95
	Nasional	78,4	78,84	79,4	80,12	80,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022 (diolah)

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat APM Kabupaten Bireuen Tahun 2017 sampai 2021 cenderung mengalami fluktuasi. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 98,62 persen di tahun 2017 menjadi 96,77 persen di tahun 2021 atau menurun sebesar 1,85 persen. Demikian pula untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2017 APM pada jenjang pendidikan ini adalah 86,14 persen, menurun menjadi 83,48 persen pada tahun 2021. APM Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 di tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs lebih rendah dari APM provinsi Aceh di tingkat yang sama sebesar 98,95 persen dan 86,96 persen. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

A.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang

bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.34
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	Tahun (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
	Bireuen	110,78	116,01	109,18	107,33	105,79
	Aceh	110,31	113,85	109,93	108,70	108,10
	Nasional	108,50	108,61	107,46	106,32	106,20
2	SMP/MTs					
	Bireuen	105,66	96,81	91,29	93,00	91,98
	Aceh	98,74	99,30	97,42	97,79	97,74
	Nasional	90,23	91,52	90,57	92,06	92,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti tingkat SD/MI tahun 2017 sebesar 110,78 persen, menurun menjadi 105,79 persen pada tahun 2021, lebih rendah dari provinsi Aceh sebesar 108,10 persen di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan jumlah murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk berumur 7-12 tahun hal ini disebabkan karena masih ada anak yang bersekolah sudah melewati batas usia sekolah di tingkat SD/MI. Tingkat APK SMP/MTs mengalami penurunan yaitu sebesar 13,68 persen yaitu dari 105,66 persen pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 91,98 persen pada tahun 2021, lebih rendah dari provinsi Aceh sebesar 97,78 persen di tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan Pesantren/Dayah. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat atas. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

A.4 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah (unit)	290	291	292	289	286
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	53.752	54.703	55.803	50.494	51.025
	Rasio (per 10.000 penduduk)	55.07	54.14	53.19	57,23	56,64
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah (unit)	112	119	121	126	128
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (orang)	25.101	25.566	26.017	23.631	26.036
	Rasio (per 10.000 penduduk)	44.62	46.55	50.00	53,31	49,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021 rasio ketersediaan sekolah mencapai rasio 56,64 per 10.000 penduduk usia 7-12 Tahun. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 51.025 orang tertampung di 286 gedung sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2021. Gedung Sekolah Tingkat Pertama (SMP/MTS) sebanyak 128 gedung. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebanyak 26.036 orang, tahun 2021 rasio untuk penduduk usia 13-15 tahun dan ketersediaan gedung sekolah adalah 49,16 per 10.000 penduduk.

A.5 Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan tahun 2021.

Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Samalanga	186	1630	1 : 8,76	288	4455	1 : 15,46
2	Simpang Mamplam	282	2377	1 : 8,42	149	1762	1 : 11,82
3	Pandrah	82	625	1 : 7,62	67	393	1 : 5,86
4	Jeunieb	219	2307	1 : 10,53	157	1567	1 : 9,98
5	Peulimbang	97	875	1 : 9,02	74	813	1 : 10,98
6	Peudada	271	2048	1 : 7,55	161	1201	1 : 7,45
7	Juli	303	2838	1 : 9,36	253	1797	1 : 7,10
8	Jeumpa	230	2717	1 : 11,81	188	1399	1 : 7,44
9	Kota Juang	425	6037	1 : 14,20	462	4248	1 : 9,19
10	Kuala	101	911	1 : 9,01	40	258	1 : 6,45
11	Jangka	217	1524	1 : 7,02	156	1004	1 : 6,43
12	Peusangan	560	4145	1 : 7,40	488	4248	1 : 8,70
13	Peusangan Selatan	145	956	1 : 6,59	87	463	1 : 5,32
14	Peusangan Siblah Krueng	134	764	1 : 5,70	99	429	1 : 4,33
15	Makmur	228	1401	1 : 6,14	138	743	1 : 5,38
16	Gandapura	196	1364	1 : 6,95	217	1619	1 : 7,46
17	Kuta Blang	165	1215	1 : 7,36	200	831	1 : 4,15
Jumlah		3.841	33.734	1 : 8,78	3.224	25470	1:8,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Dari Tabel 2.36 , dapat dilihat pada tahun 2021 bahwa rasio guru-murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 8,78 ini berarti satu orang guru melayani 8 sampai 9 murid, sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 1 : 8 yang berarti rata-rata satu orang guru melayani sekitar 8 sampai 9 orang murid. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 19 untuk SD/MI dan 1 : 17 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen.

A.6 Kompetensi Tenaga Pendidik

Dalam pemenuhan pelayanan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berupaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Kualitas tenaga kependidikan merupakan kemampuan tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya agar menghasilkan layanan yang optimal

pada pelaksanaan pendidikan. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Tabel 2.37
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Guru PNS, PAUD, SD Dan SMP (Orang)	3.433	3.420	3.186	3.170	3.091
2	Jumlah Guru Yang Telah Sertifikasi (Orang)	1.981	1.821	1.023	1.865	1.673
3	Jumlah Guru Lulus Sertifikasi (Orang)	350	275	230	225	231
4	Persentase Guru Sertifikasi Tiap Tahun (Persen)	57,7	53,25	32,11	58,83	54,12
5	Persentase Guru Lulus Sertifikasi /Lulus PPG (Orang)	17,67	15,1	22,48	12,06	13,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi ditandai dengan persentase guru yang lulus sertifikasi. Pada tahun 2021 jumlah guru yang berkompentensi sebanyak 54,12 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sejumlah 58,83 persen.

A.7 Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan, peraturan yang dijadikan pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Menurut Permendiknas No. 15 tahun 2010 terdapat 27 standar/Indikator yang menjadi patokan pelayanan yang harus dilaksanakan dalam memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dimana dari 27 indikator tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian SPM adalah sebanyak 14 indikator dan sisanya 13 indikator menjadi tanggung jawab satuan pendidikan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Capaian Indikator

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar untuk penentuan SPM. Berbagai data dasar yang terdapat ditingkat satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait indikator SPM tersebut diinput, diolah serta diinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab tingkat satuan pendidikan.

Tabel 2.38
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Nilai Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs)	100%	85%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	6,30%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	50,28%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (data diolah)

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 diatas dapat dijabarkan bahwa ada 3 jenis pelayanan dasar dibidang pendidikan adapun beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar

Target capaian yang dilaksanakan pada pendidikan dasar meningkat, hal ini dapat kita lihat dengan tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki di setiap kecamatan bahkan di daerah terpencil, jumlah peserta didik SD/MI tidak ada lagi yang melebihi 32 orang

dalam setiap rombongan dan Peserta didik SMP/MTs tidak ada yang melebihi 36 Orang setiap rombelnya, rasio sarana dan prasarana dengan siswa sudah memadai walaupun belum 100 % baik, Rasio guru siswa meningkat, Guru dikategori layak sudah mencapai 88 % dan Guru Profesional sudah mencapai 65 %.

Jumlah warga Negara 7-15 tahun yang sudah berpartisipasi atau terlayani dalam pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sudah mencapai 85 persen dengan rincian :

- a. Jumlah siswa SD dan MI seluruhnya sebesar 51.333 orang, dengan rincian negeri sebesar 48.836 orang dan swasta sebesar 2.497 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah siswa laki-laki sebesar 26.502 dan siswa perempuan sebesar 24.373 orang. Bila dirinci menurut usia maka usia <7 tahun sebesar 463 orang, usia 7-12 tahun sebesar 48.788 orang dan usia <12 tahun sebesar 2.082 orang
- b. Jumlah siswa SMP dan MTS seluruhnya sebesar 26.805 orang, dengan rincian negeri sebesar 17.890 orang dan swasta sebesar 8.915 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki SMP sebesar 10.212 orang dan perempuan SMP sebesar 8.830 orang, sedangkan di MTs siswa laki-laki sebesar 3.879 dan siswa perempuan sebesar 3.884 orang.

2. Pendidikan kesetaraan

Jumlah warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar kesetaraan masih belum terlayani sepenuhnya, disebabkan Dinas pendidikan tidak memiliki data yang akurat untuk pendidikan kesetaraan, untuk saat ini Dinas pendidikan hanya memiliki data Paket A, Paket B dan Paket C yang telah mendaftar ke setiap PKBM yaitu jumlah peserta didik seluruhnya yang terdaftar 1.444 dan yang mengikuti ujian Paket 563 orang dengan daya tampung 22 ruang kelas dan ini belum memadai. Jumlah tutor atau tenaga pengajar 79 orang.

3. Pendidikan Anak Usia dini

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020/2021, jumlah TK dan RA/BA sebanyak 424 unit, dengan rincian negeri sebesar 10 unit dan swasta sebesar 414 unit. Hal ini disebabkan karena TK dan RA/BA lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta. Jumlah siswa TK dan RA/BA sebesar 12.405 orang dengan rincian di negeri sebesar 773 dan swasta 11.632. Bila dirinci menurut kelompok maka siswa kelompok A sebesar 2.749 orang, dan

kelompok B sebesar 5.701 orang. Berdasarkan jenis kelamin, siswa laki-laki sebesar 6.455 orang (52,04 persen) dan perempuan sebesar 5.950 orang (47,96 persen) dan lulusan TK dan RA/BA sebesar 464 orang. Sedangkan guru TK dan RA/BA sebesar 1.731 orang, 3 orang (0,18 persen) adalah laki-laki dan 1.728 orang (99,82 persen) adalah perempuan.

B. Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dua faktor penting yang dapat mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan sarana kesehatan.

B.1 Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan

selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.39
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Kematian Ibu	
		Jumlah Kasus Kematian (orang)	Angka Kematian (per 100.000 KH)
1	2017	10	113
2	2018	13	152
3	2019	16	187
4	2020	12	142
5	2021	11	129

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif. Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2017 angka kematian ibu menunjukkan sebanyak 113 per 100.000 KH. Namun untuk tahun 2018 angka kematian ibu meningkat mencapai 152 per 100.000 KH. Pada tahun 2019 angka ini kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH yang menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Untuk Tahun 2020 angka kematian ibu menurun mencapai 142 per 100.000 KH dengan 12 kasus kematian. Pada tahun 2021 angka kematian ibu turun menjadi 129 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian mencapai 11 kasus.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta

tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

B.2 Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi ini dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.40
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Kematian Bayi	
		Jumlah Kematian (orang)	Angka Kematian (per 1.000 KH)
1	2017	108	12
2	2018	107	12
3	2019	123	14
4	2020	99	12
5	2021	110	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan angka kematian bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2017 terdapat 108 kasus bayi yang meninggal, dengan

angka kematian bayi 12 per 1.000 KH. Pada tahun 2021 angka kematian bayi kembali meningkat, dimana terdapat 110 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi 13 per 1.000 KH, artinya bahwa pada tahun 2021 di Kabupaten Bireuen terdapat 13 kematian bayi umur satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 110 kasus. Angka kematian bayi Kabupaten Bireuen lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 11 per 1.000 KH.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

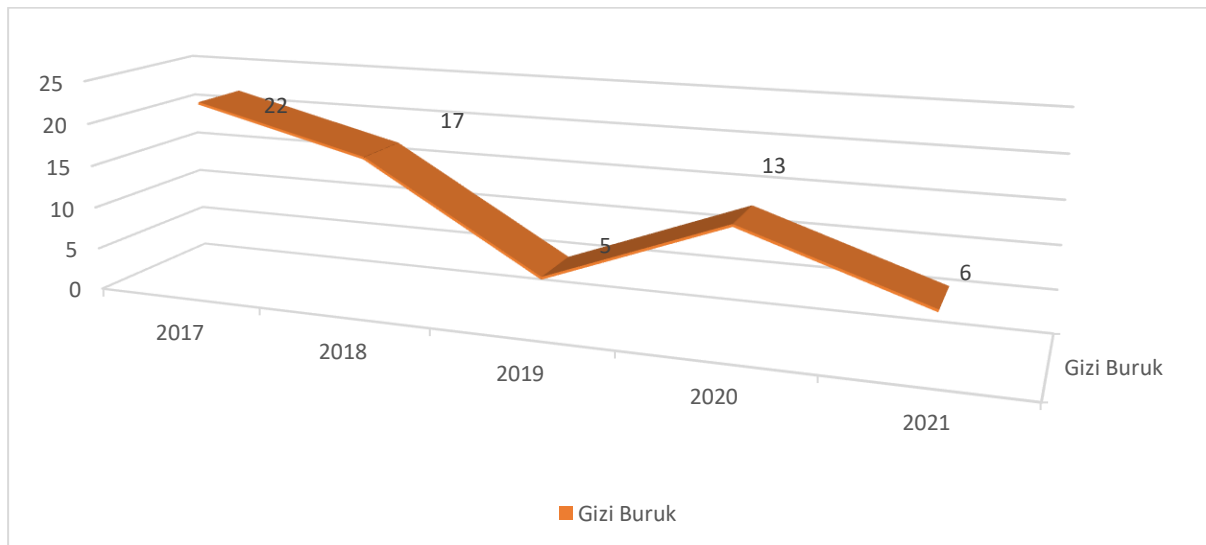
Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi *adalah UCI (Universal Child Immunization)*. Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Bireuen.

B.3 Gizi Buruk

Presentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun

dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Maka dari hal tersebut penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas Dinas Kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen berfluktuatif, dimana angka gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari angka gizi buruk tahun 2017 sejumlah 22 kasus dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 5 kasus, namun kemudian naik pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2021 menurun sebanyak 6 kasus.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

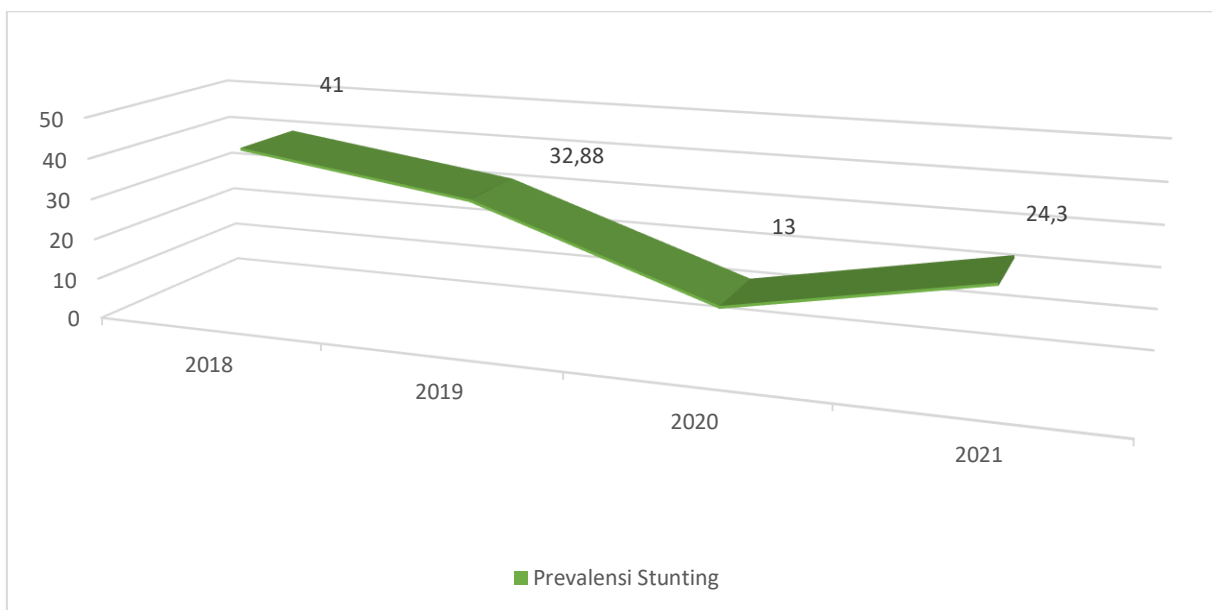
Gambar 2.18
Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

B.4 Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penurunan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan *stunting*. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi.

Sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintah pusat, penurunan *stunting* penting dilaksanakan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penurunan *stunting* telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan konvergensi penurunan *stunting* di kabupaten/kota, maka disusunlah Instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan *stunting*. Terdapat delapan aksi konvergensi/integrasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting*.



Sumber : Riset Kesehatan Dasar, SGGI Tahun 2022

Gambar 2.19
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Bireuen
Tahun 2018-2021

Prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 13, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 24,3. Angka ini masih lebih baik dari prevalensi *stunting* Aceh (33,2) dan nasional (24,4).

Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota, Direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dimana sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang merupakan salah satu prioritas nasional.

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu 160 Kabupaten/kota lokasi fokus tambahan intervensi *stunting* terintegrasi tahun 2021 mempunyai peran yang sangat berat dimasa yang akan datang, dimana peran kabupaten adalah :

1. Menetapkan target penurunan *stunting* di kabupaten.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
3. Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal.
4. Mengadakan rapat koordinasi.
5. Mengintegrasikan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan (RAD- PG).
6. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi.
7. Melakukan pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong.
8. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan *stunting*.
9. Menyusun kebijakan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
11. Melibatkan institusi non pemerintah.

Berbagai program penurunan *stunting* telah diselenggarakan namun belum efektif dan belum berada dalam skala yang memadai. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Bireuen, berupa :

- Intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan *stunting*
- Kebijakan dan program penurunan *stunting* belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah
- Kapasitas pelaksana program di daerah rendah
- Kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah masih belum optimal
- Perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* dan sosial masih rendah

Untuk menangani berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa hal untuk seperti:

- Menetapkan target penurunan *stunting* dan menjadikan penurunan *stunting* menjadi prioritas dalam RPJMD, RKPD dan Renja OPD
- Mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan strategi nasional dan strategi daerah
- Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal sebagai bentuk konvergensi lintas OPD, internalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, inovasi program.
- Integrasi strategi nasional dan strategi daerah percepatan penurunan *stunting* ke dalam RAD sebagai payung besar perbaikan gizi dengan fokus penurunan *stunting*
- Memberikan dukungan teknis penguatan untuk mendorong komitmen kabupaten dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kabupaten
- Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan system monitoring evaluasi dan manajemen data dan penilaian kinerja kabupaten
- Mengoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah (Dunia usaha, mitra pembangunan, perguruan tinggi)

B.5 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus melakukan perhitungan rasio penduduk terhadap sarana Pelayanan Kesehatan yang ada, dimana rasio ini menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana

pelayanan kesehatan ialah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu. Rasio ini berupa perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut.

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah. Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.41
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah sakit	6	6	6	6	6
	Rasio per satuan penduduk	1:75.537	1:76.954	1:78.606	1:72.736	1:73.298
2	Jumlah puskesmas	18	19	20	22	23
	Rasio per satuan penduduk	1:25.179	1:24.301	1:23.581	1:19.837	1:19.121
3	Jumlah pustu	47	50	55	51	48
	Rasio per satuan penduduk	1:9.643	1:9.234	1:8.575	1:8.557	1:9.162
4	Jumlah penduduk	453.224	461.726	471.635	436.418	439.788

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Sejak tahun 2017-2021 jumlah rumah sakit ada enam kemudian turun menjadi lima pada tahun 2021, terdiri dari satu rumah sakit daerah dan lima rumah sakit swasta. Angka rasio rumah sakit pada tahun 2021 adalah 1: 73.298, artinya satu rumah sakit melayani 73.298 jiwa, rasio puskesmas di pada tahun 2021 adalah 1:19.121 dan rasio pustu adalah 1: 9.162.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan

perawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya.

Rumah sakit juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung. Pengukuran pelayanan yang diberikan diukur dengan Indeks Kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat untuk RSUD dr. Fauziah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42
Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM (Persen)	71,41	84,85	-	-	80,93
2	Kategori	Kurang Baik	Baik	-	-	Baik

Sumber : RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Skor IKM RSUD Dr Fauziah meningkat pada tahun 2018 (84,85 persen) dibandingkan dengan tahun 2017 (71,41 persen). Tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan survei karena Covid-19. Pada tahun 2021 skor IKM menurun menjadi 80,93 persen.

Disamping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan

serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Tabel 2.43

Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1	Puskesmas Samalanga	Madya
2	Puskesmas Simpang Mamplam	Madya
3	Puskesmas Pandrah	Dasar
4	Puskesmas Jeunieb	Madya
5	Puskesmas Peulimbang	Madya
6	Puskesmas Peudada	Madya
7	Puskesmas Jeumpa	Madya
8	Puskesmas Kota Juang	Madya
9	Puskesmas Juli	Madya
10	Puskesmas Juli-2	Utama
11	Puskesmas Kuala	Madya
12	Puskesmas Peusangan	Madya
13	Puskesmas Peusangan Selatan	Utama
14	Puskesmas Peusangan Siblah Krueng	Dasar
15	Puskesmas Jangka	Madya
16	Puskesmas Kuta Blang	Madya
17	Puskesmas Makmur	Madya
18	Puskesmas Gandapura	Madya
19	Puskesmas Cot Ijue	Madya
20	Puskesmas Mon Kelayu	Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B.6 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter umum pada tahun 2021 adalah 1:15.706 jiwa, ini menunjukkan satu orang dokter umum melayani 15.706 penduduk. Angka rasio dokter di Kabupaten Bireuen belum mencapai tahap ideal dimana idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk.

Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah dokter spesialis yang ada hanya mencapai 55 orang dengan rasio 1 : 7.996 dengan artian satu orang dokter spesialis melayani 7.996 penduduk. Salah satu kendalanya ialah tidak semua fakultas kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya sudah A, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis.

Menurut WHO rasio ideal jumlah dokter gigi dengan penduduk yaitu 1:2.000. Sementara keberadaan dokter gigi di Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan jumlah penduduk masih di bawah rasio ideal yakni 1:109.947 dalam artian bahwa satu orang dokter gigi melayani 109.947 penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya menghasilkan lulusan dokter gigi adalah adanya keterlambatan dalam pendidikan profesi. Normalnya pendidikan profesi ditempuh dalam waktu 1,5-2 tahun. Namun kenyataannya hampir 50 persen mahasiswa menempuh pendidikan profesi lebih karena berbagai faktor, di antaranya mahasiswa ko-ass kesulitan mendapatkan profil pasien yang tepat sesuai kebutuhan atau persyaratan, di samping itu juga persoalan jadwal turut berkontribusi dalam memperlambat pendidikan profesi ini. Kesulitan yang umum dialami adalah jadwal ko-ass yang tidak tepat dengan pemeriksaan pasien karena kegiatan pasien, sementara ko-ass dibatasi waktu.

Tabel 2.44
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	50	250	34	30	28
2	Rasio Per Satuan Penduduk	1:9.064	1 : 1.846	1 : 12.872	1 : 16.011	1:15706
3	Jumlah Dokter Spesialis	35	42	54	55	55
4	Rasio per satuan penduduk	1:12.949	1;10.993	1 : 8734	1:7934	1:7.996
5	Jumlah Dokter Gigi	14	30	5	4	4
6	Rasio per satuan penduduk	1:32.373	1;15.390	1 : 94.327	1:109104	1:109.947
7	Jumlah Penduduk	453.224	461.728	471.635	436.418	439.788

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B.7 Fasilitas Kesehatan lainnya

Untuk mendukung pembangunan kesehatan, fasilitas kesehatan selain rumah sakit dan puskesmas juga memegang peranan penting. Sarana sediaan farmasi pendukung tersebut antara lain apotik dan toko obat berizin. Perkembangan jumlah sarana sediaan farmasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Sarana Sediaan Farmasi di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Toko Obat Berizin	27	27	26	27	30
2	Apotik	34	36	36	40	42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B.8 Capaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi, maka target SPM adalah 100 persen setiap tahunnya.

Jenis layanan kesehatan yang termasuk ke dalam SPM bidang kesehatan yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Kabupaten Bireuen tahun 2021 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.46
Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan			
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.936	9.570	107,09
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.530	8.546	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	8.124	7.779	96
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	39.692	30.410	77
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga segara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	50.598	39247	7,56
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	278.659	108.291	38,86
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga segara usialanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	63.918	54954	86
8	Pelayan Kesehatan Menderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	95.663	21.958	23
9	Pelayanan Kesehatan Menderita Diabetesmellitus	Jumlah warga negara penderita <i>diabetesmellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	13.061	11,218	85.9
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.139	1267	59,23
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	7.634	739	9,68
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi <i>virus</i> yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	20.016	12	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari 12 SPM bidang kesehatan, capaian pada tahun 2021 sebanyak 2 SPM mencapai target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu bersalin, sedangkan 10 SPM belum mencapai target 100 persen.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1 Prasarana Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Status/Kelas Jaringan Jalan						
	Jalan Nasional	Km	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
	Jalan Provinsi	Km	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	Jalan Kabupaten	Km	1.207,67	1.207,67	1.207,67	1207,67	1207,67
2	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten						
	Aspal	Km	642,35	651,72	649,58	668,56	707,26
	Kerikil/Pengerasan	Km	450,35	440,85	410,25	400,79	365,56
	Tanah	Km	115,1	102,84	102,84	118,71	112,66
3	Kondisi Jalan Kabupaten						
	Mantap	%	38,82	41,10	46,19	52,43	57,54
	Baik	Km	413,24	440,81	503,64	590,53	618,25
	Sedang	Km	55,63	55,53	54,23	44,7	76,69
	Rusak Ringan	Km	117,75	109,8	93,48	306,5	231,83
	Rusak Berat	Km	621,05	601,53	556,33	269,95	280,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tabel 2.47 di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 707,26 km, dimana terjadi peningkatan sepanjang 64,91 km dari tahun 2017. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan

beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Namun karena keterbatasan anggaran, perbaikan jalan ini masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari menurunnya ruas jalan dengan kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 84,79 Km.

Berdasarkan status/kelas jalan, selama lima tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan penambahan panjang ruas jalan dari tahun 2017-2021. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal pada tahun 2021 yakni sepanjang 707,26 km, kerikil sepanjang 365,56 km dan tanah 112,66 km. Secara garis besar, pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal yang mengalami penambahan. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada tahun 2021 sepanjang 618,25 Km.

Tabel 2.48
Proporsi Panjang dalam Kondisi Mantap Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bireuen	38,82	41,10	46,19	52,43	57,54
2	Aceh	63,00	67,00	77,00	79,00	77,00
3	Nasional	95,00	94,00	97,00	96,00	98,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun 2022

Kondisi jalan mantap di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2017, kondisi jalan mantap sebesar 38,82 persen meningkat menjadi 57,54 persen pada tahun 2021. Akan tetapi dibandingkan dengan proporsi jalan mantap provinsi dan nasional, angka ini masih lebih rendah. Proporsi jalan mantap provinsi sejumlah 77 persen dan jalan mantap nasional mencapai 98 persen pada tahun 2021.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

C.2 Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 686/2019 pada 17 Desember 2019. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Bireuen sejumlah 14.944 Ha yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Peusangan memiliki lahan budidaya terluas 1.668 hektar, Kecamatan Jeunieb 1.348 hektar dan Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.272 hektar.

Jaringan irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 126,420. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 meter dan 22,005 meter. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen

Tabel 2.49
Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Baku Sawah (Ha)
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Samalanga	7.260	20,608	41,852	69,720	1.220
2	Simpang Mamplam	11,025	33,300	33,297	77,622	1.272
3	Pandrah	5,946	30,970	34,910	71,826	494
4	Jeunieb	6,525	28,385	37,355	72,265	1.384
5	Peulimbang	2,675	8,510	10,820	22,005	649
6	Peudada	7,686	29,350	48,750	85,786	946
7	Jeumpa	3.030	17,931	16,250	37,211	995
8	Juli	9,233	97,652	50,950	157,835	420
9	Peusangan	5.090	7,411	6,300	18,801	1668
10	Peusangan Selatan	3,465	14,439	15,175	33,079	408
11	Peusangan Siblah Krueng	10,785	29,712	43,460	83,957	642
12	Makmur	11,425	21,220	21,935	54,580	844
13	Gandapura	15,416	63,814	47,190	126,420	1.159

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya. Panjang jaringan irigasi tersier di Kabupaten Bireuen mencapai 403.302 meter dengan jaringan terpanjang di Kecamatan Juli sepanjang 50.950 meter, Kecamatan Peudada sepanjang 48.750 meter, dan Gandapura 47.190 meter. Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2021 seperti terdapat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Kecamatan/Desa	Luas (Ha)	Kondisi (%)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Samalanga	275	18,00	35,00	28,00	19,00
2	Simpang Mamplam	1.438	32,22	11,11	25,00	31,67
3	Pandrah	325	20,25	3,75	23,75	52,25
4	Jeunieb	579	15,40	14,00	20,80	49,80
5	Peulimbang	310	15,00	20,00	20,00	45,00
6	Peudada	1.535	35,00	16,00	18,00	31,00
7	Jeumpa	369	37,50	9,50	21,50	31,50
8	Juli	300	25,00	5,00	10,00	60,00
9	Peusangan	304	31,67	7,33	5,33	55,67
10	Peusangan Selatan	625	24,00	7,67	19,33	49,00
11	Peusangan Siblah Krueng	1.714	25,25	10,25	20,50	44,00
12	Makmur	1.464	29,83	8,83	23,00	38,33
13	Gandapura	2.787	16,12	11,65	17,00	55,24
Jumlah/Rata-rata		12.025	25,02	12,31	19,40	43,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten sebagian besar dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada tahun 2021, dari total 12.025 hektar jaringan irigasi kewenangan kabupaten, sebanyak 25,02 persen dalam kondisi baik dan 12,31 persen dalam kondisi sedang. Sedangkan 19,40 persen dalam kondisi rusak ringan dan 42,27 dalam kondisi rusak berat

C.3 Cakupan Layanan Sanitasi Layak

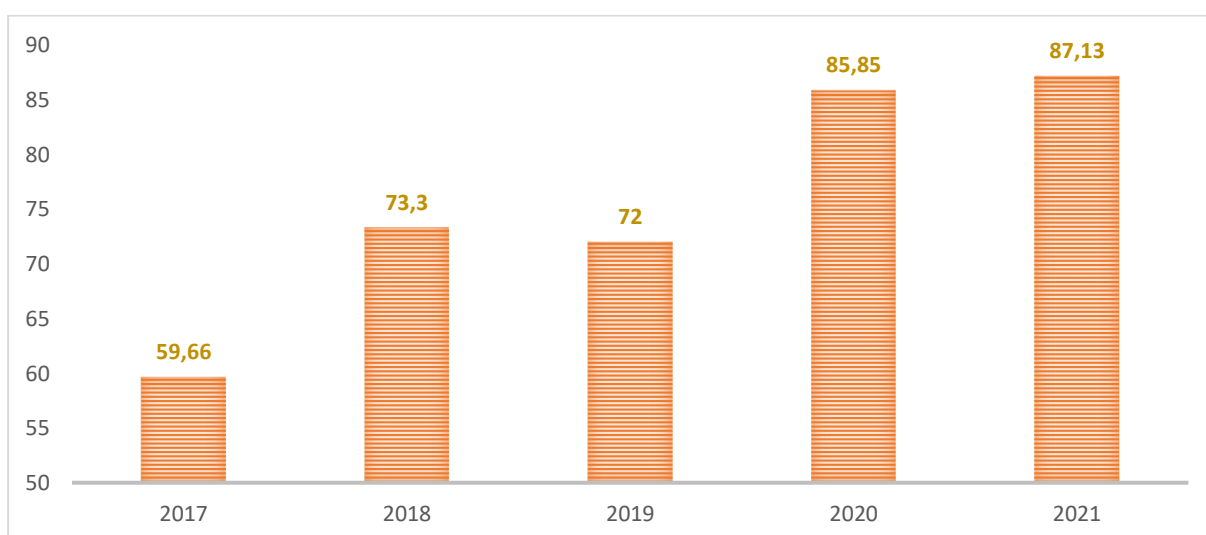
Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan

yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga.

Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bireuen menggunakan jamban/*Water Closet (WC)* dengan kepemilikan *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 87,13 persen. Akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.20
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak
Tahun 2017-2021

Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 59,66 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 87,13 persen.

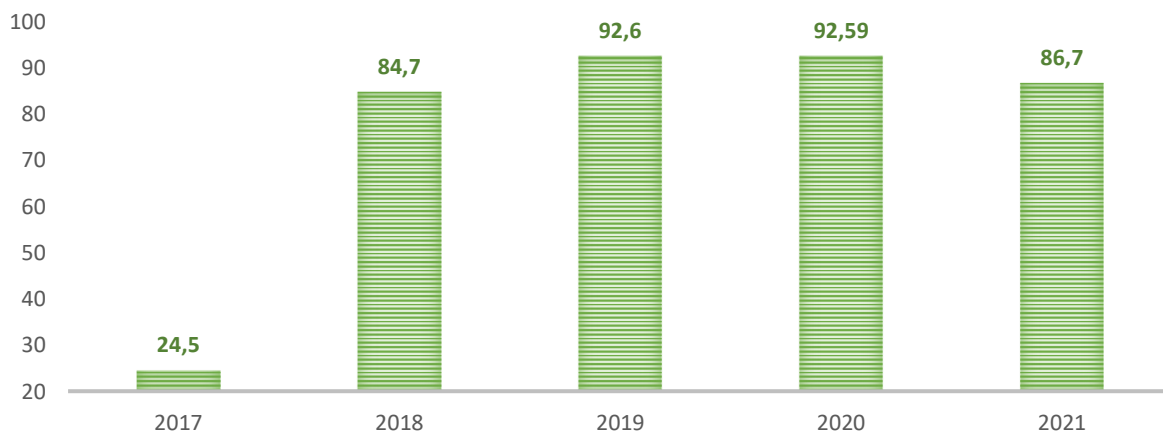
C.4 Drainase

Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering.

Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Kondisi genangan di kawasan perkotaan pada tahun 2021 seluas 691.790 m². Dari 65.732 meter saluran di kawasan tersebut, sebanyak 28,70 persen (18.862 meter).

C.5 Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup, kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang penyediaannya mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga Kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.21
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2017 hanya sebesar 24,5 persen meningkat menjadi 86,70 persen pada tahun 2021.

C.6 Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :

- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan substansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW. Kesesuaian usulan dan rekomendasi untuk pembangunan yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2019 hanya sebesar 37,5 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 mencapai 97,92 persen.

C.7 Jasa Konstruksi

Pembangunan di bidang jasa konstruksi bertujuan memimpin, membina, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kebinamargaan, irigasi, pengairan dan pembinaan jasa konstruksi menyelenggarakan dan mengelola penyuluhan dan bimbingan teknik, terutama dengan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi. Pada tahun 2021 tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat rendah, sebanyak 300 orang (3,33 persen) dari 9.000 orang jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten Bireuen.

C.8 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi OPD penanggung jawab SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Tabel 2.51
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Penyediaan Kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	86,70	Baru 94.700 Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki sarana air minum dari total 109.228 KK
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100	87,13	Baru 95.170 Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki jamban dari total 109.228 KK

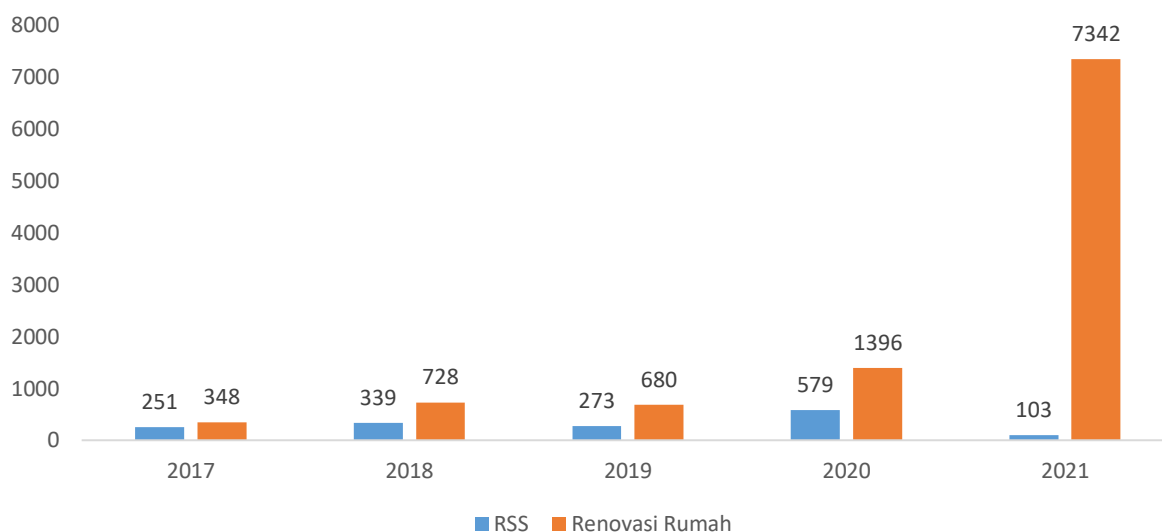
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2022.

Dari dua SPM pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum mencapai target 100 persen. Realisasi SPM pelayanan dasar air minum sebesar 86,7 persen dan sanitasi sebesar 87,13 persen.

D. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

D.1 Rumah Layak Huni dan Korban Bencana

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Penangan perumahan dilaksanakan berupa pembangunan dan renovasi. Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.22
Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen. Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 sejumlah 579 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun 2021 berjumlah 7.342 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi yaitu 10.494 unit. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 1.545 unit.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri juga terdiri dari penyelesaian rumah korban bencana. Jumlah rumah korban bencana yang masih perlu ditangani di Kabupaten Bireuen Tahun 2021 mencapai 240 unit.

D.2 Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh melalui pengurangan kawasan kumuh. Kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten adalah permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan dengan cara

pembangunan kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak. Pada tahun 2021, jumlah kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang difasilitasi mencapai 2 kawasan dari 6 kawasan perumahan.

Tabel 2.52
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021

Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Banda Aceh	21	797.56	22	462.73	20	451,4
Aceh Barat	15	175.49	12	152.29	12	152,29
Sabang	6	28.26	3	48.73	4	123,713
Aceh Besar	21	226.48	7	190.50	7	185,37
Langsa	14	90.14	9	87.66	18	359,398
Simeulue	5	97.92	3	97.92	1	29,55
Aceh Tamiang	6	61.83	3	61.66	41	348,12
Aceh Timur	10	567.90	10	567.90	20	538,85
Bireuen	29	1,031.72	29	1,031.72	38	588,9
Aceh Tenggara	52	563.89	52	563.89	52	563,89
Bener Meriah	10	337.25	10	337.25	10	337,25
Aceh Utara	7	62.97	7	62.97	7	62,97
Aceh Singkil	9	108.86	9	108.86	9	108,86
Aceh Barat Daya	41	561.44	41	561.44	33	832,51
Nagan Raya	4	108.33	4	108.33	43	108,33
Gayo Lues	30	69.34	30	69.34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206.10	12	206.10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208.50	5	81.30	17	120,87
Subulussalam	5	61.77	5	61.77	12	320,17
Aceh Tengah	23	189.59	23	189.59	14	187,37
Pidie	10	67.04	10	67.04	66	294,3
Aceh Selatan	5	55.40	5	55.40	8	120,1
Aceh Jaya	8	136.29	8	136.29	8	136,29
Aceh	362	5.814,07	319	5.310,68	484	6.245,94

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Kawasan kumuh Kabupaten Bireuen sesuai dengan SK Bupati Bireuen Nomor 756 Tahun 2021 sebanyak 38 kawasan dengan luas 588,9 hektar. Jumlah kawasan meningkat dari 29 kawasan menjadi 38 kawasan.

D. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis pelayanan dasar

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.53
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Perumahan Rakyat			Batas Waktu Capaian	
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien		Nilai Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15 Unit	14 Unit	93,33	2021
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	2021

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat belum mencapai target. Realisasi SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota mencapai angka 93,33 persen, sedangkan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah kab/kota 0 persen.

E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

E.1 Penegakan Perda

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayahul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di daerah.

Satpol PP pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 2.54

Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja (orang)	183	182	182	182	131
2.	Jumlah Wilayahul Hisbah (orang)	89	89	89	89	45
3.	Jumlah Penduduk (orang)	435.224	461.726	471.635	436.418	439.788
4.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,2	3,9	3,8	4,17	2,98
5.	Rasio Wilayahul Hisbah per 10.000 penduduk	2,04	1,9	1,88	2,04	1,02

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.54 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 rasio Polisi Pamong Praja adalah 4,2 per 10.000 dan Wilayahul Hisbah 2,04 per 10.000 dan pada tahun 2018 rasio Satpol PP adalah 3,9 dan Wilayahul Hisbah 1,9, tahun 2020 rasio Satpol PP dan WH sedikit meningkat yaitu 4,17 dan 2,04. Pada tahun 2021 Satpol PP dan WH menurun menjadi 2,98 dan 1,02. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pmda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E.2 Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun. Satuan Polisi Pamong Praja pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum diukur dengan jumlah kasus yang muncul dan yang diselesaikan setiap tahunnya. Jumlah kasus keamanan dan ketertiban tahun 2017-2021 dapat dilihat secara detil pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Bidang	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tramtibum	10	36	25	25	21
2	Penegakan Perda	70	57	41	56	42
3	Penegakan Perda Syariah	240	298	148	57	263
4	Penyelesaian Konflik	40	30	24	15	10

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Kasus pelanggaran syariat islam cenderung meningkat dari tahun 2020 sebanyak 57 kasus meningkat 263 kasus pada tahun 2021. Jumlah penanganan konflik sosial sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan karena sudah adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konflik dan sudah banyak konflik yang diselesaikan ditingkat gampong.

E.3 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhak diperoleh setiap

warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	100	99.63
2	Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	99.94
3	Pengawasan Tempat Wisata yang Islami	100	99.99
4	Pelaksanaan Eksekusi Bagi Pelanggar Qanun	100	99.99
5	Penyelesaian Kasus-kasus bagi Pelanggar Qanun	100	99.99
6	Pembinaan dan Koordinasi wilayatul Hisbah	100	99.27

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.56 hampir semua SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tercapai. Capaian 6 SPM tersebut sebesar 99,27 – 99,99 persen.

E.4 Pemilu

Pilkada tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2012 yang mencapai 80 persen.

F. Urusan Sosial

F.1 Persentase PMKS yang Tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud

komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran. Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa siaga bencana	23	23	23	23	23
2	Jumlah korban bencana yang ditangani	304	323	393	1029	3.607
3	Jumlah korban bencana	304	323	393	1029	3.607
4	Jumlah PSKS yang difasilitasi	6	6	6	6	6
5	Jumlah PSKS	7	7	7	7	7
6	Jumlah warga migran korban tindak kekerasan yang ditangani	-	97	97	-	-
7	Jumlah warga migran korban tindak kekerasan	-	97	97	-	-
8	Jumlah penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani	40	100	260	230	80
9	Jumlah penyandang rehabilitasi sosial	NA	NA	NA	4.578	4.578
10	Jumlah masyarakat yang diberikan jaminan sosial	NA	NA	NA	50.460	84.253
11	Jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS	NA	NA	NA	71.126	99.527

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.57, jumlah desa siaga bencana masih belum bertambah, pada tahun 2017- 2021 sebanyak 23 desa. Jumlah korban bencana yang

ditangani mencapai 100 persen setiap tahunnya, begitu juga dengan warga migran korban tindak kekerasan yang ditangani.

Jumlah PSKS yang difasilitasi sebanyak 6 dari 7 PSKS di Kabupaten Bireuen. Capaian terendah pada Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani hanya 80 orang dari 4.578 orang penyandang rehabilitasi sosial di Kabupaten Bireuen.

F.2 Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.58
Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Panti Asuhan	17	17	17	17	17
2	Panti Jompo	1	1	1	1	1
3	Rumah Aman	1	1	1	1	1
4	Rumah Tunggu Kelahiran	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah sarana sosial masih tetap sama yaitu 20 unit. Terdiri dari panti asuhan 17 unit, rumah jompo 1 unit, rumah aman 1 unit dan rumah tunggu kelahiran 1 unit.

F.3 Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.59
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten (%)			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4.576	149	3,26	Banyak penyandang disabilitas yang masih memerlukan program perlindungan kebutuhan dasar berdasarkan data yang ada. Hal ini kurang memadai dalam hal pendanaan dan berdampak pada pelayanan bagi disabilitas.
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	83.652	22	0,03	Minimnya alokasi anggaran bagi anak terlantar melalui APBK
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	25.997	301	1,16	Minimnya alokasi anggaran lanjut Usia terlantar melalui APBK
4	Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	23	23	100	
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	60	27,50	16,50	Belum maksimal Penanganan Korban Bencana Karena Luasnya areal yang Berdampak Bencana

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.321 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,68 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 96 pekerja dengan penurunan 75 persen dari tahun sebelumnya. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir yaitu SMA/ sederajat sebesar 40 persen (39 pekerja). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, penduduk yang bekerja paling banyak

berada di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 65.563 orang di tahun 2021.

Tabel 2.60
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja 15 tahun ke atas	227.483	213.661	226.030	233.033	233.321
2	Usia penduduk 15 tahun ke atas	320.673	327.589	335.609	347.501	354.017
3	Rasio angkatan kerja	0.71	0.65	0.67	0.67	0,66
4	Penempatan Tenaga Kerja	457	80	315	59	58
5	Jumlah Tenaga Kerja Belum Ditempatkan	4.932	4.964	4.684	4.963	4 934

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.60, capaian dari tahun 2017-2021, jumlah penempatan tenaga kerja jauh menurun. Pada tahun 2017 penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja sebanyak 457 orang. Kemudian turun pada tahun 2021 hanya menempatkan 58 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja belum ditempatkan juga meningkat. Tahun 2017 sebanyak 4.932 orang, pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.934 orang.

B. Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan

ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tabel 2.61
Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa						Jumlah Desa
		Sangat Rentan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Rentan Pangan	Kurang Tahan Pangan	Tahan Pangan	Sangat Tahan Pangan	
1	Samalanga	0	0	5	23	17	1	46
2	Simpang Mamplam	2	3	9	21	6	0	41
3	Pandrah	0	2	4	12	1	0	19
4	Jeunieb	2	1	3	31	4	2	43
5	Peulimbang	0	2	9	9	2	0	22
6	Peudada	0	10	12	21	9	0	52
7	Juli	1	4	8	20	3	0	36
8	Jeumpa	0	2	5	34	1	0	42
9	Kota Juang	0	3	0	16	4	0	23
10	Kuala	0	1	5	31	9	0	46
11	Jangka	0	0	3	14	3	0	20
12	Peusangan	0	0	4	46	17	2	69
13	Peusangan Selatan	2	6	5	7	1	0	21
14	Peusangan Sibbleh Krueng	0	5	7	8	1	0	21
15	Makmur	1	4	11	10	1	0	27
16	Gandapura	0	1	5	19	15	0	40
17	Kuta Blang	0	4	7	21	9	0	41
Jumlah/Total		8	48	102	343	103	5	609

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Terobosan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan diversifikasi pangan adalah dengan pembinaan Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan dilakukan dengan pengembangan sayur-sayuran, perikanan dan ternak. Jumlah KWT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KWT Aktif (klp)	24	27	35	48	79
2	KWT (klp)	53	58	66	79	110
3	Persentase KWT Aktif (%)	45,28	46,55	53,03	60,76	71,82

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Jumlah KWT di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada Tahun 2017 jumlah KWT sebanyak 53 kelompok, kemudian meningkat lebih dari dua kali pada tahun 2021. Peningkatan jumlah KWT diikuti dengan peningkatan jumlah KWT yang aktif. Pada tahun 2017, jumlah KWT aktif mencapai 24 KWT (45,28 persen), meningkat menjadi 79 KWT (71,82 persen) pada tahun 2021.

Untuk peningkatan ketersediaan pangan juga dilakukan dengan penganekaragaman konsumsi pangan. Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan skor mutu konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2021 skor PPH sebesar 79,4 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,7.

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor agroekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan

sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat atas dunia. Situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.

Tabel 2.63
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Gabah (Ton)	224.510,00	261.812,00	252.927,00	188.285,87	176.135,00
2	Ketersediaan Beras (Ton)	125.626,80	151.382,84	146.245,43	112.416,18	104.865,82
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	443.627,00	461.726,00	471.635,00	436.554,00	436.418,00
4	Total Konsumsi Beras (ton/Jiwa/Tahun)	61.664.153,00	52.636.764,00	53.766.390,00	101.367.838,80	101.336.259,60
5	Surplus/ Cadangan Pangan (Ton)	60.608,41	94.872,02	88.731,50	8.065,61	735,64

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.63 dapat dilihat bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 104.865,82 Ton/Tahun, turun dari total

ketersediaan beras penduduk tahun 2020 yaitu sebesar 112.416,18 ton/jiwa/tahun. Produksi gabah tahun 2021 sebesar 176.135,00 ton lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan luas lahan yang semakin berkurang. Namun dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan suatu daerah menyebabkan kerentangan terhadap kerawanan pangan.

C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Pengarustamaan Gender terus diupayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang responsif gender, anggaran responsif gender sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki laki:

- Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan,
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan,
- Mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan,
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Pengarustamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya Anggaran yang Responsif Gender pada setiap OPD teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender akan diukur dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* pada setiap dinas teknis. Penyediaan data terpilah gender dan anak salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.

Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan (ketimpangan) gender yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak yang dapat menimpa perempuan atau laki-laki. Isu gender terdapat di berbagai sektor pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya politik.

C.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial terutama persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.64

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	Bireuen	95,15	94,91	94,93	94,91	94,93
	Aceh	91,67	91,67	91,84	92,07	92,23
	Indonesia	95,15	90,99	91,07	91,06	91,27
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	Bireuen	53,02	53,07	57,90	57,98	58,06
	Aceh	66,28	66,6	63,31	63,47	63,47
	Indonesia	71,39	71,74	72,1	75,24	75,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

IPG Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 94,93 lebih tinggi dibandingkan IPG Aceh (92,23) dan nasional (91,27). Sedangkan Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Bireuen terus meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 IDG Kabupaten Bireuen sebesar 58,06 lebih rendah dibandingkan IDG Aceh (63,47).

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

C.2 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah. Begitu juga di Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat tiga orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.

Terkait jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 83,69 persen dari jumlah total pekerja perempuan 6.786 orang, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan 83,11 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesetaraan gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin kecil.

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dampak Covid-19 sangat besar terhadap perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan di bidang kesehatan baik sebagai perawat, bidan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah Covid-19 yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan berpengaruh pada keluarga. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dari berbagai aspek terhadap pembangunan.

Tabel 2.65
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pekerja Perempuan	6.786	6.568	8.791	5.453	5.466
2	Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	83.69	83.11	NA	NA	66
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	2.5	2.5	2.5	7,89	7,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

C.3 Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban.

Untuk mengantisipasi dan melindungi bagi korban KDRT, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyediakan rumah aman sebagai penitipan sementara selama proses penyelesaian masalah dan hukum.

Tabel 2.66
Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	62	72	89	62	77
2.	Jumlah Rumah Tangga	RT	104.643	106.606	108.833	108.833	108.833
3.	Rasio KDRT	Rasio	1:1.687	1:1.480	1:1.222	1:1755	1:1413

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.66 dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 terdapat 62 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2018 meningkat sebesar 72 kasus begitu juga pada tahun 2019 terdapat 89 kasus, sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 62 kasus dan tahun 2021 meningkat menjadi 77 kasus. Untuk menghindari agar kasus tersebut tidak terus meningkat, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang harus menjadi perhatian utama di berbagai bidang pada lintas sektor.

C.4 Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak, maka pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Bireuen telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak untuk menjadi sebagai pedoman dan acuan bagi OPD teknis dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Bireuen.

Tujuan utama dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Bireuen adalah :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Bireuen dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

- b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana bidang PPPA dalam mendorong pencapaian konsep Ramah Anak, pada level dinas

1. Penguatan Lembaga KLA
2. Inisiatif pembentukan gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Tim Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi program / kegiatan dengan dinas –dinas teknis terkait yang memberikan pelayanan pada anak-anak
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbup KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.
8. Menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana gampong untuk program RBRA ditingkat gampong.

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik ditingkat kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.

Kabupaten Bireuen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang. Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi di setiap sektor pembangunan di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.67
Data Kabupaten Layak Anak dan Gampong Layak Anak
di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2021

No	Indikator	Satuan	2020	2021
1	Gampong Layak Anak	Gampong	189	191
2	Jumlah Gampong	Gampong	609	609
3	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	31,03	31,36
4	Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Pratama

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Klasifikasi Kabupaten Layak anak :

- Pratama : Nilai 500-600
- Madya : Nilai 601-700
- Nindya : Nilai 701-800
- Utama : Nilai 801-900
- KLA : Nilai 1.000

KLA ini merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 2021, Kabupaten Bireuen masih termasuk klasifikasi peringkat pratama dengan skor 600. Belum mencapai target Kabupaten Layak Anak.

D. Pertanian

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak yaitu berupa tanah. Luas tanah secara keseluruhan dalam Kabupaten Bireuen 179.632 Ha dengan persil 204.776 bidang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah pemkab. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Bireuen mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Salah satu urusan yang merupakan kewenangan kabupaten di Aceh adalah urusan pertanian. Permasalahan di bidang pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat.

Beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Tabel 2.68
Cakupan Pelayanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Bersertifikat (bidang)	1	31	73	123
2	Jumlah Tanah Pemda (Bidang)	1.360	1.360	1.360	1.360
3	Persentase Bidang Tanah Pemkab yang Bersertifikat (%)	0,07	2,21	5,37	9,04
4	Redistribusi Tanah Terlantar (Ha)	0	16,05	172,98	201,66
5	Luas Tanah Terlantar (Ha)	1.096	1.096	1.096	1.096
6	Persentase Redistribusi Tanah Terlantar (%)	0,00	1,46	15,78	18,40

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.68 capaian dari tahun 2018-2021, jumlah tanah pemda yang bersertifikat dari Dinas Pertanahan hingga tahun 2021 mencapai 123 bidang (9,04 Persen), selain itu, terdapat tanah Pemkab yang sudah bersertifikat dari bidang Aset. Sehingga total bidang tanah milik Pemkab yang sudah bersertifikat sebanyak 385 bidang (28,30 persen). Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat.

Redistribusi tanah terlantar dimulai pada tahun 2019, dari 1.096 hektar tanah terlantar, sebanyak 16,05 hektar didistribusi pada tahun 2019, 172,98 hektar pada tahun 2020, kemudian meningkat seluas 201,66 hektar pada tahun 2021 (35,65 persen). Sisa tanah terlantar yang belum didistribusi sebanyak 705 hektar (64,35 persen).

E. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

E.1 Penanganan Sampah

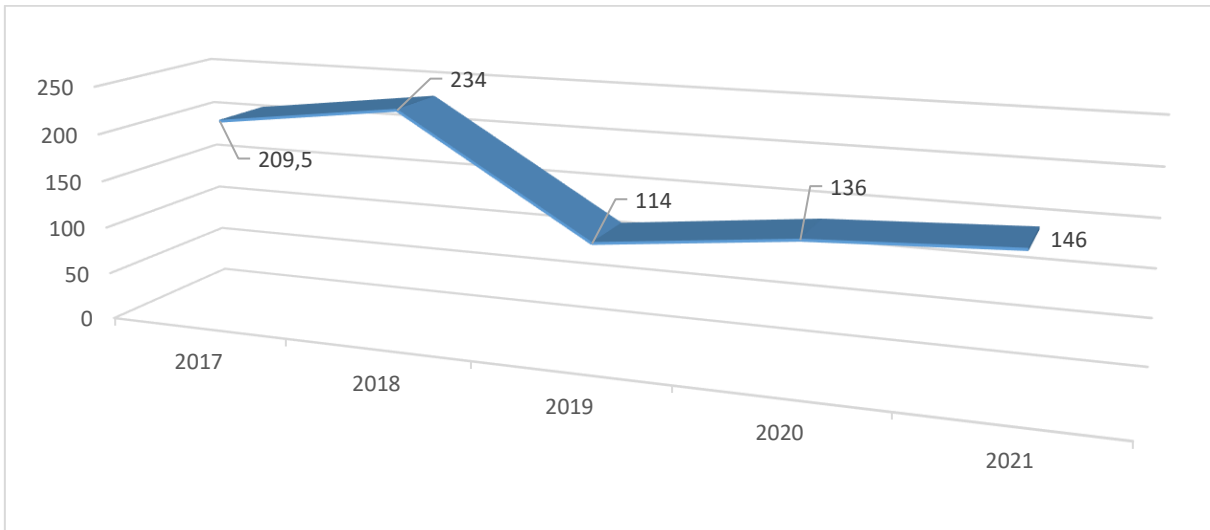
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis yang diakibatkan selama masa pandemik ini. Peningkatan daur ulang sampah melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS) menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah diantaranya ialah pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di *open dumping site*). Selain itu, semakin masifnya pencemaran danau, waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Rendahnya kepedulian dan empati masyarakat terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya menjadi dampak sosial yang ditimbulkan.

Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dibutuhkan perencanaan yang cukup akurat dalam menangani persampahan secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan sampah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga mengganggu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan mobilisasi pengangkutan sampah secara berkala.

Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi sebesar 9 persen terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan yang semakin dibutuhkan.

Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m³. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi penurunan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 114 m³. Berikut volume sampah yang dihasilkan selama tahun 2017-2021.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.23
Volume Sampah di Kabupaten Bireuen



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.24
Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu

Penanganan terhadap kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah kabupaten. Belum adanya prasarana yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah di kawasan TPA. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kerusakan lingkungan baik di TPA maupun kawasan sekitarnya. Penambahan akan prasarana dan sarana menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 sebanyak 22 unit. Jumlah ini belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen. Letak TPA Blang

Beururu yang berada di kawasan dengan topografi curam memerlukan prasarana jalan sehingga dapat memudahkan mobilisasi mobil pengangkut sampah.

Tabel 2.69
Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah mobil pengangkut sampah	17	18	20	20	22
2	Jumlah gerobak sampah	45	24	0	0	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

E.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH

tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Tabel 2.70
Luas RTH di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas RTH (ha)	4,3	204,94	204,94	204,94	204,94
2	Luas Wilayah Kota (ha)	1.690,87	1.690,87	1.690,87	1.690,87	1.690,87
3	Persentase (%)	0,25	12,12	12,12	12,12	12,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Luas RTH Kabupaten Bireuen terus meningkat pada tahun 2017 hanya 4,3 hektar, kemudian meningkat menjadi 204,9 hektar pada tahun 2021. Namun angka ini masih dibawah target 30 persen dari luas kota. RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa dikatakan hampir tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat lainnya dengan skala kecil sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen atau lebih dikarenakan kebun dan pekarangan rumah penduduk kota masih luas.

E.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu lingkungan memang sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, rusaknya lingkungan mempengaruhi taraf hidup manusia. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah membuat upaya yang disebut PPLH. Ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2021 di Kabupaten Bireuen belum terdata.

Tabel 2.71
Capaian MHA di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	9	10	6	8	14
2	Jumlah MHA yang dibina	-	-	-	4	4
3	Jumlah MHA	75	75	75	75	75
4	Jumlah Kampung Iklim	-	-	-	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PP Lingkungan Hidup adalah Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. Pada tahun 2021 telah dibina sebanyak 4 MHA dari 75 MHA yang ada di Kabupaten Bireuen.

Untuk mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup adalah dengan membentuk kampung iklim. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori ProKlim. Dalam peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Jumlah kampung iklim yang telah terbentuk di Kabupaten Bireuen sebanyak dua desa.

E.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Mulai tahun 2021 provinsi, kabupaten, dan kota diminta menetapkan target IKLH dan memasukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pedoman mengenai target dari masing-masing daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	IKA	70,00	70,00	84,96	80,30
2	IKU	80,17	87,50	87,99	85,05
3	IKTL	52,90	55,32	63,60	65,00
4	IKLH	66,21	69,38	77,33	75,61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Hasil pengukuran tahun 2020 IKLH Kabupaten Bireuen meningkat menjadi 75,61 dibandingkan kondisi tahun 2017 (66,21), namun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2020 (77,3). Kenaikan IKLH sebagai kontribusi dari meningkatnya nilai IKA dari 70,00 (2017) menjadi 80,30 (2020) dan IKU dari 80,17 (2017) menjadi 85,05 (2020) dan IKTL dari 52,90 (2017) menjadi 65,00 (2020). IKLH Kabupaten Bireuen masuk dalam kategori baik.

E.5 Penanganan Bencana

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana

akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Beberapa tahun terakhir Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kebakaran, banjir dan longsor, angin kencang dan orang hilang. Kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2017-2021 seperti pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Kejadian Bencana dan Penanganan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran	87	101	29	112	116
2	Banjir dan Longsor	8	11	4	20	10
3	Angin Kencang	-	4	15	5	15
4	Pencarian Orang Hilang	8	-	3	2	5
5	Jumlah kejadian bencana	103	116	51	139	146
6	Jumlah kejadian bencana Tertangani	98	111	49	135	141

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.73 diatas, jumlah kejadian bencana terus meningkat. Bencana kebakaran mengalami peningkatan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan banjir dan longsor, angin kencang dan kejadian orang hilang berfluktuasi. Penanganan bencana terus meningkat, pada tahun 2017 penanganan bencana mencapai 95 persen dan pada tahun 2021 mencapai 97 persen. Menurut data BNPB tahun 2017-2021, Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana rendah dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 168 dibawah indeks resiko bencana Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.

E.6 Capaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana pemerintah menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah kabupaten/kota. Standar ini disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sekaligus sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Kriteria penerima pelayanan dasar ini adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah.

Tabel 2.74
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	258.844	254.844	100	2021
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	436.418	436.418	100	2021
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	258.844	177.250	45	2021
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	111	105	95	2021

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mencapai sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bireuen fokus pada beberapa hal antara lain kepemilikan Kartu Keluarga (KK), penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran antara lain, sosialisasi ke seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama untuk membuat akta siswa juga menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki akta kelahiran dan kematian di kecamatan maupun desa.

Tabel 2.75
Jumlah KTP dan Akta yang di Terbitkan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kartu Tanda Penduduk	295.973	300.163	301.828	315.997	293.521
2.	Akta Kelahiran	23.001	18.614	129.067	186.617	202.209
3.	Akta Kematian	2.105	5.866	2.755	16.501	3.224
4.	Jumlah Penduduk	453.224	461.726	471.635	442.953	439.788

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

G.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus meningkat, seperti terdapat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM	609	609	609	609	609
2	Jumlah desa	609	609	609	609	609
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.76 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017-2021 jumlah kelompok binaan LPM dari 609 desa mencapai 100 persen, data ini menunjukkan bahwa kelompok LPM sudah 100 persen begitu juga pada tahun 2020 jumlah kelompok LPM tersebut masih berada pada posisi 100 persen, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembinaan Lembaga Permasyarakatan di desa dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

G.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat di tiap kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi. Berikut rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.77
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelompok PKK	609	609	609	609	609
2	Jumlah desa	609	609	609	609	609
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.77 dapat digambarkan bahwa tahun 2017 – 2021 jumlah kelompok binaan PKK 609 kelompok dari 609 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen atau sudah mencapai 100 persen yang telah dilakukan Pembinaan terhadap kelompok PKK yang ada diseluruh desa. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan dan Tim PKK Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPK terkait lainnya.

G.3 Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	633	623	626	626	633
2	Jumlah desa	609	609	609	609	609
3	Persentase Posyandu Aktif	103,9	102,3	102,7	102,7	103,9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.78 dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk mencapai 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017-2021 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana dan pihak kecamatan serta instansi terkait terus melakukan pembinaan agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat lebih ditingkatkan kembali.

Sesuai dengan peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan gampong, yang di dalamnya tercantum bahwa dana gampong dapat dipergunakan untuk kegiatan pelayanan di posyandu baik biaya operasional, insentif kader, maupun kebutuhan lainnya untuk meningkatkan kegiatan pelayanan posyandu ditingkat gampong.

G.4 Indeks Desa Membangun

Salah satu tolak ukur menghitung keberhasilan pembangunan gampong adalah dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Klasifikasi penilaian IDM adalah sebaagai berikut :

- Desa Mandiri/Swasembada : $IDM > 0,8155$
- Desa Maju/Prasembada : $0,8155 \geq IDM > 0,7072$
- Desa Berkembang/Madya : $0,7072 \geq IDM > 0,5989$
- Desa Tertinggal/Pra Madya : $0,5989 \geq IDM > 0,4907$
- Desa Sangat Tertinggal/Pratama : $0,4907 \geq IDM$

Tabel 2.79
Status Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Indeks Desa Membangun	0,5605	0,5774	0,5813
2	Status IDM	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.79, IDM Kabupaten Bireuen masuk status tertinggal. Pada tahun 2021 IDM sebesar 0,5813 lebih rendah dari IDM Aceh (0,6199) yang memiliki status berkembang.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk di kabupaten dengan mengeluarkan regulasi tentang penggunaan dana gampong untuk pelayanan KB di tingkat gampong.

Tabel 2.80
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Akseptor	62.912	70.981	61.867	34.884	36.563
2.	Jumlah PUS	78.802	83.348	78.803	56.406	59.315

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jumlah Peserta KB Aktif	62.912	70.981	61.867	34.884	36.563
4.	Rasio Akseptor terhadap PUS	79.84	85.16	78,58	61,84	61,64

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 59.315 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 36.563 orang (61,64 persen dari jumlah PUS). Dari data tersebut menggambarkan bahwa adanya kenaikan jumlah PUS dan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2021 di bandingkan tahun 2020. Rasio akseptor terhadap PUS menurun dari 61,84 pada tahun 2020 menjadi 61,64 pada tahun 2021.

I. Perhubungan

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang	28,135	29.670	30.820	31.000	36.500
2	Jumlah Angkutan Darat	Unit	1.295	1.302	1.340	1.340	1.345
3	Rasio	Persen	1 : 21	1:22	1 : 23	1 : 23	1 : 27
4	Jumlah Terminal Bis	Unit	5	5	4	4	4
5	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Peningkatan jumlah penumpang angkutan darat terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 36.500 orang dibandingkan tahun 2017 sejumlah 28.135 orang. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah empat unit hingga tahun 2021, dimana terdapat terminal Tipe B dengan wewenang provinsi yang masih

belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi. Salah satu cara indikator pembangunan di bidang perhubungan adalah kelancaran lalu lintas. Kelancaran lalu lintas adalah kondisi berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Indeks kelancaran lalu lintas diukur dengan membandingkan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen indeks kelancaran lalulintas Kabupaten Bireuen mencapai angka 0,59 pada tahun 2021. Dari jumlah volume kendaraan sebanyak 10.822 unit dan kapasitas jalan 18.299 km.

J. Komunikasi dan Informatika

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/per/m.kominfo/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah. Target pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen mulai pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIG di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar 82,35 persen atau sudah terlaksana di 14 kecamatan, yaitu : Gandapura, Kutablang, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuala, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunieb, Pandrah, Simpang Mamplam, Samalanga. Untuk mencapai target 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada, maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM lebih lanjut di 3 kecamatan lagi (17,65 persen).

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan di beberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan telekomunikasi di tempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 166 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil penilaian SPBE tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.82

Tabel 2.82
Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Nama Instansi	SPBE	Predikat
1	Aceh	3,19	Baik
2	Aceh Tamiang	2,62	Baik
3	Banda Aceh	2,62	Baik
4	Aceh Timur	2,25	Cukup
5	Bener Meriah	2,20	Cukup
6	Aceh Barat	2,10	Cukup
7	Bireuen	2,06	Cukup
8	Langsa	1,98	Cukup
9	Aceh Singkil	1,95	Cukup
10	Nagan Raya	1,76	Kurang
11	Lhokseumawe	1,54	Kurang
12	Sabang	1,53	Kurang
13	Simeulue	1,16	Kurang
14	Subulussalam	1,00	Kurang

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.82 indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,06. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Aceh dengan nilai 3,19 (baik). Kabupaten dengan indeks SPBE baik adalah Aceh Tamiang dan Banda Aceh. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Bireuen berada di peringkat ketujuh.

K. Persandian

Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Bireuen, persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tetapi hingga saat ini bidang urusan persandian belum melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan persandian mengingat tingkat kepentingan dan kebijakan anggaran sehingga urusan bidang persandian ini terlihat tidak aktif. Hingga tahun 2021 baru empat perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari total 52 perangkat daerah di Kabupaten Bireuen.

L. Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan

mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai pendukung pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran juga pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang digerakkan melalui pembangunan ekonomi koperasi.

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2.83
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	150	206	169	173	184
2	Jumlah koperasi tidak aktif	99	31	69	69	71
3	Jumlah koperasi	249	237	238	242	255
4	Persentase koperasi aktif	88,16	87,61	70,42	71,49	72,16

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.83 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 206 koperasi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan cukup drastis menjadi 169 koperasi pada tahun 2019, disebabkan terjadi pembubaran koperasi sebanyak 80 koperasi. Pembubaran tersebut di sebabkan kantor dan kepengurusan koperasi tersebut tidak ada lagi juga tidak pernah melaksanakan RAT lebih dari 2 (dua) tahun, meningkat 173 koperasi pada tahun 2020 dan kemudian meningkat lagi menjadi 186 koperasi aktif pada tahun 2021 dari 255 koperasi yang ada di Bireuen, hal ini disebabkan banyak koperasi sudah mulai membuat laporan setiap tahun setelah adanya sosialisasi setiap tahun. Untuk jumlah koperasi aktif terdiri dari 4 unit koperasi unit desa, 28 unit koperasi pegawai, 4 unit koperasi pasar, 3 unit koperasi karyawan dan 145 unit unit koperasi lainnya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha dapat mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif juga dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi tersebut dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Pemerintah

Kabupaten Bireuen terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi aktif diantaranya melakukan sosialisasi bagi para pengurus koperasi agar koperasi dapat berjalan baik, juga melakukan pendampingan untuk pengelolaan koperasi.

M. Penanaman Modal

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, kebijakan penanaman modal, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai maupun infratraktur sistem penanaman modal dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain kebijakan, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan.

Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi seseorang yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM sebanyak 60 perusahaan.

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin pada tahun 2021 mencapai 1.371 pelaku usaha. Jumlah peningkatan usaha yang memiliki izin sejumlah 121 usaha.

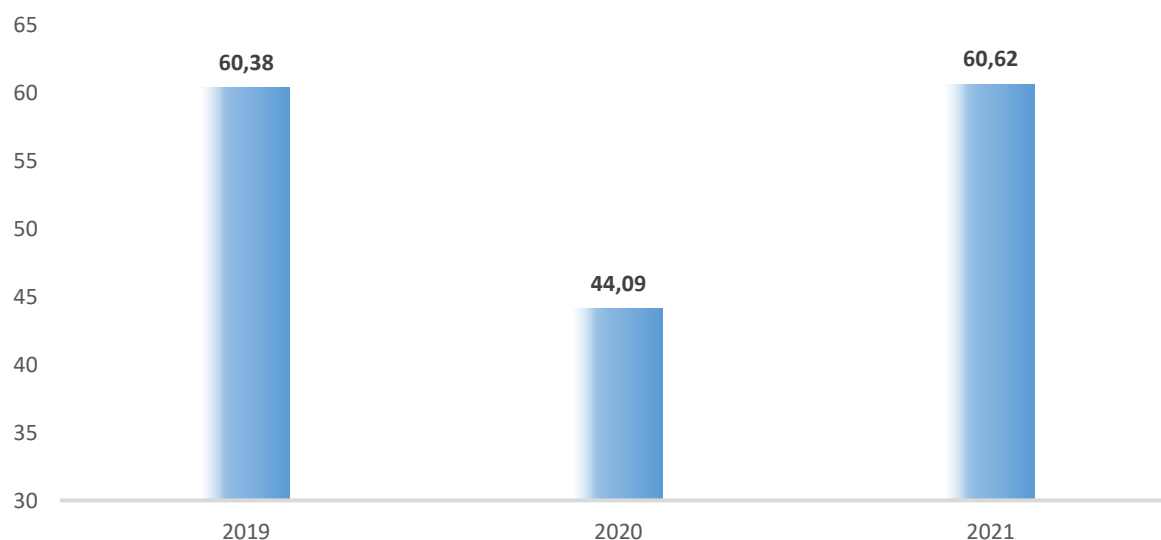
Perkembangan investasi di Kabupaten Bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang baik, hal ini di tandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

Tabel 2.84
Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PT	78	47	45	30	27
2	CV/Firma	161	112	118	111	55
3	Perseorangan	390	45	423	176	176
Total		629	204	586	317	258

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.84 jumlah perusahaan yang mendaftar menurut bentuk badan hukum terus menurun. Pada tahun 2017 mencapai 629 perusahaan turun menjadi 258 perusahaan pada tahun 2021. Dari segi komposisi perusahaan, tahun 2017 perusahaan terbanyak berbentuk perseorangan dengan jumlah 62 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 68 persen. CV/ Firma menurun dari 25,6 persen tahun 2017 menjadi 21,3 persen pada tahun 2021. Sedangkan PT menurun dari 12,4 persen menjadi 10,5 persen pada tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.25
Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021

Realisasi investasi berfluktuasi dari tahun 2019-2021, pada tahun 2021 realisasi investasi sebesar 60,62 milyar rupiah sedikit lebih tinggi dari realisasi investasi 2019 (60,38 milyar rupiah).

N. Kepemudaan dan Olahraga

N.1 Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Jumlah organisasi pemuda meningkat dari 23 unit tahun 2017 meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2021.

Tabel 2.85

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi pemuda	23	26	26	26	26
2	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	2	2	3	5	5
3	Jumlah Pemuda	160.205	162.400	165.865	165.865	165.865

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021, dari 165.865 pemuda, sebanyak 470 orang atau sebesar 0,28 persen termasuk dalam pemuda berprestasi. Terdiri dari atlet, duta wisata, paskibra, peserta MTQ dan lain-lain. Hasil ini lebih rendah dari capaian provinsi Aceh sebesar 1,96 persen.

N.2 Olahraga

Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjaringan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.86

Sarana Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sarana Olahraga	623	624	625	625	634
2	Jumlah Penduduk	453.224	461.726	471.635	436.418	439.788
3	Rasio Sarana Olahraga	1:727	1:740	1:754	1:698	1:694

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.86 bisa kita lihat jumlah sarana olahraga pada tahun 2020 sebanyak 634 unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 9 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis. Prasarana olahraga bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen. Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga.

Tabel 2.87**Capaian Prestasi Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cabang Olahraga	28	28	32	34	36
2	Jumlah Cabang Olahraga Memperoleh Medali	12	8	8	8	7
3	Jumlah Medali	43	29	29	29	130

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.87, prestasi olah raga Kabupaten Bireuen terus meningkat, pada tahun 2021 mendapat 130 medali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain prestasi olahraga, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan olahraga menggunakan Indeks Pembangunan Olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Nilai 0 – 0,499 = kategori rendah
2. Nilai 0,500 – 0,799 = kategori menengah
3. Nilai 0,800 – 1 = kategori tinggi

Hasil perhitungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Bireuen sebesar 0,287, termasuk kategori rendah. Diharapkan tahun 2026 nilai Indeks Pembangunan Olahraga lebih besar dari 0,5 (kategori sedang).

O. Kebudayaan

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat islam.

Tabel 2.88

Perkembangan Seni, Budaya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Grup Kesenian	106	122	138	138	141
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

P. Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan menyampaikan informasi melalui perpustakaan. Menyikapi perkembangan informasi dan pelestarian budaya baca maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017. Peningkatan status organisasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya budaya baca dalam masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus didokumentasikan.

Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu kota kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 3.321 anggota. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak terkadang melebihi daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2017 sebanyak 12.635 orang, dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 566 orang. Terjadi penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2021 mencapai 4.908 namun jumlah anggota meningkat mencapai 3.321 orang. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah anggota perpustakaan, namun jika dilihat dari data tahun 2021 minat untuk mengunjungi perpustakaan menurun. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakaan kabupaten sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Jumlah Anggota
1	2017	12.635 orang	566 orang
2.	2018	7.067 orang	527 orang
3	2019	5.022 orang	451 orang
4	2020	3.431 orang	2.462 orang
5	2021	4.908 orang	3.321 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Untuk memotivasi minat baca, penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua dapat tercapai.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku. Lokasi tersebut tersebar dalam 14 Kecamatan, sedangkan 3 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Dengan jumlah koleksi buku di mobil pustaka keliling terdiri dari 368 eksemplar dan motor pintar 346 Eksemplar.

Q. Kearsipan

Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

Tabel 2.90
Capaian Pembangunan Bidang Arsip
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perangkat Paerah yang mengelola arsip secara baku	6	8	8	5	7
2	Jumlah Perangkat Daerah	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021, jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku adalah 7 perangkat daerah dari total 52 perangkat daerah di Kabupaten Bireuen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator:

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi perikanan dan konsumsi ikan.

A. Produksi Perikanan.

Potensi sumber daya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk budidaya air payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak 4.945,6 hektar yang

dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 294 km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan kuartier. Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan tersedia akses jalan produksi tambak sepanjang 324 km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana diperlihatkan Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

Tahun	Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Jumlah Petani Tambak (Orang)	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani Kolam (Orang)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Nilai Produksi (Juta)
2017	5.095	4.945	4.665	141	150	674	11.727,50	447.750,00
2018	5.095	4.945	4.861	180	150	674	11.847,90	445.500,30
2019	5.095	4.945	4.863	195	150	678	12.386,20	481.217,20
2020	5.096	4.945,6	4.665	237	150	674	12.581,25	745.558,35
2021	5.096	4.945,6	4.861	238	150	674	13.074,00	671.256,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah ikan kerapu, udang windu dan bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2021 sebanyak 13.074,00 ton. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa kolam ikan, sawah (mina padi), danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 hektar belum dimanfaatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis) nya adalah Kecamatan Jangka dan hinterlandnya Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa).

Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat seperti yang terdapat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan
di Kabupaten Bireuen tahun 2017-2021

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bandeng	6.410	6.228	6.235	6.184	6.184
2	Udang	3.373	3.935	4.346	4.513	4.914,81
3	Lele	872	980	285,41	297,25	326,44
	Total	10.655	11.143	10.866	10.994	11.425

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih memerlukan perbaikan dan penambahan.

Untuk potensi sumber daya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai sepanjang 69 Km dengan luas laut 1.511 Km². Potensi produksi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2021 baru mencapai 13.074 ton/tahun (40,86 persen). Usaha Perikanan tangkap Kabupaten Bireuen hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan tangkap berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebalah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor perikanan ke depannya, namun sarana prasarannya masih jauh dari memadai.

Tabel 2.93
Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	11.056	11.063	12.809	13.160,14	12.982,68
2	Jumah PPI (Unit)	3	3	3	3	3
3	Jumlah Nelayan (Orang)	6.771	4.659	7.614	7.614	7.449
4	Jumlah Perahu (Unit)	2.715	2.351	1.728	1.728	1.453

Sumber : Badan Pusat Statistit Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.93 capaian dari tahun 2017-2021, jumlah produksi perikanan tangkap terus meningkat, volume produksi pada tahun mencapai 12.982,68 ton meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 11.056 ton. Peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah nelayan. Akan tetapi terjadi penurunan jumlah perahu pada tahun 2017 sebanyak 2.715 unit menurun hingga 1.453 unit pada tahun 2021.

B. Konsumsi Ikan.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata, tingkat konsumsi ikan di Indonesia tahun 2017 mencapai 47,12 kilogram (kg) perkapita pertahun. Untuk tahun 2021 meningkat menjadi 59,53 kg/kapita/tahun demikian juga dengan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen meningkat dari 37 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 44,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Berikut data konsumsi ikan Kabupaten Bireuen pertahunnya.

Tabel 2.94
Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	37	40,67	41,65	44,22	44,77
2	Target Nasional (Kg/kapita/tahun)	47,12	50,65	54	56,39	59,53
3	Persentase konsumsi ikan	78,52	80,29	77,13	80,67	75,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin

digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein.

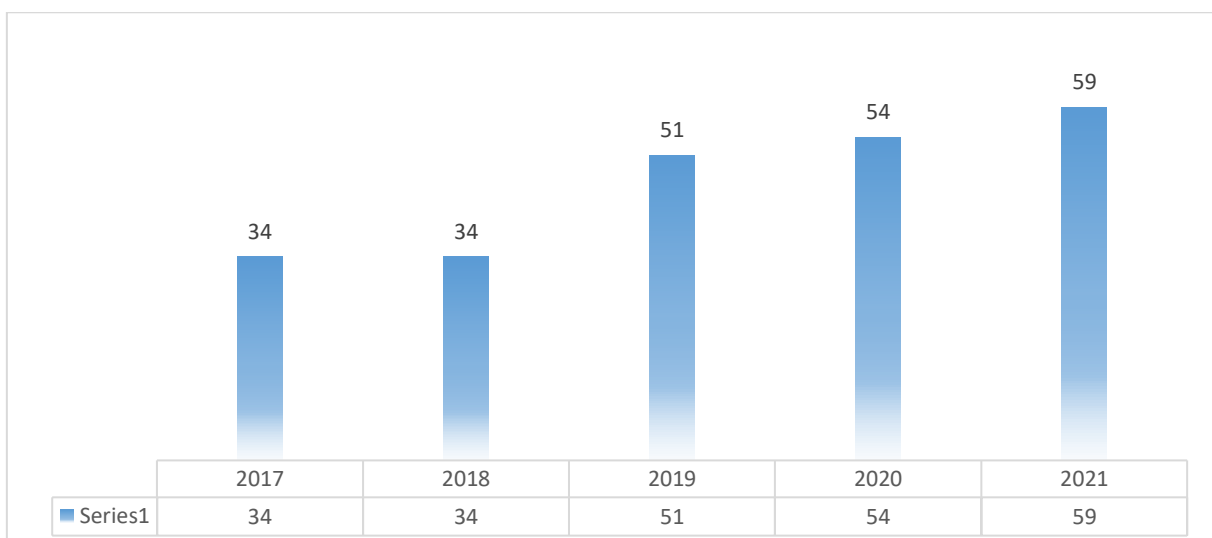
Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok lebih mandiri.

2.1.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata Aceh juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Aceh mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai di kenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata pantai.

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Perkembangan pariwisata suatu daerah dapat mendorong subsektor lain seperti akomodasi, restoran dan rumah makan, serta industri.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan. Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan.



Sumber : Badan Pusat Statistit Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.26
Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/ krueng, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata utama di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sejumlah 59 unit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian tempat wisata belum didukung oleh fasilitas penunjang seperti jalan, tempat ibadah, gazebo dan kios souvenir/jajanan. Jumlah destinasi wisata dengan kondisi baik sebanyak 6 destinasi (10,17 persen) dari 59 destinasi wisata di Kabupaten Bireuen.

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen di harapkan akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3.2.3 Pertanian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan.

A. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian secara umum merupakan penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Bireuen. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan di Kabupaten Bireuen adalah padi. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Tingkat produksi dan produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya digambarkan pada Tabel 2.95 dan Tabel 2.96

Tabel 2.95
Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Komoditas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi (ton)	224.510	261.812	252.927	184.944	164.924
2	Jagung (ton)	389	698	136	82.393	36.179
3	Kedelai (ton)	11.386	12.125	14.716	17	358

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.96
Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Komoditi Pangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi (kw/ha)	62,71	63,93	65,10	61,7	62,80
2	Jagung (kw/ha)	41,69	41,68	50,40	50,40	55
3	Kedelai (kw/ha)	14,85	15,58	8,50	11,20	13
4	Kacang Tanah (kw/ha)	16,80	15,81	16,8	17,10	17,40
5	Kacang Hijau (kw/ha)	15,76	15,53	16,6	17	18,20
6	Ubi Kayu (kw/ha)	192,43	199,68	252,2	253	260
7	Ubi Jalar (kw/ha)	157,20	158	190,5	195	75

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.96 dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditi pangan Kabupaten Bireuen adalah; padi 62,80 kw/ha, jagung 55,00 kw/ha, kedelai 13,00 kw/ha, kacang tanah 17,40 kw/ha, Kacang hijau 18,20 kw/ha, ubi kayu 260 kw/ha dan ubi jalar 75 kw/ha. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 - 2021 berfluktuatif, tetapi masih merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bireuen, kontribusai sektor pertanian pada tahun 2021 sebesar 33,62 persen

Capaian PDRB sektor perkebunan dari tanaman perkebunan tahunan relatif kecil karena dari 4 komoditas utama, yaitu: kelapa, pinang, kakao dan

karet, akan tetapi yang paling menonjol adalah kelapa dan pinang. Terdapat berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya.

Disisi lain harga komoditas tanaman perkebunan tahunan dipengaruhi harga di pasaran yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi minat petani dalam membudidayakan komoditi perkebunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman hortikultura seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif, lebih cepat menghasilkan dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman perkebunan tahunan masih didominasi tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Upaya peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum berproduksi optimal. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

Tabel 2.97
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama
di Kabupaten Bireuen

Tahun	Kelapa		Kakao		Karet		Pinang	
	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2017	15.283,9	1.104,8	2.730,8	648	1.213	908	9.072	1.290
2018	15.682,1	1.132,0	2.715,2	641	1.204	909	9.363,3	1.341
2019	15.720,1	1.132,0	2.677,2	630	1.203	900	5.498	787
2020	15.411,2	1.110	2.689,47	630	1.178,36	895	5.376,91	760
2021	15.417,9	1.110	2.684,38	625	1.358,10	900	5.455,32	780

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, produksi kelapa mencapai 15.417,9 ha pada tahun 2021, nilai produksi tahun 2021 sedikit meningkat dari tahun 2017 sebesar 15.283,9 ton. Produksi terbesar selanjutnya adalah pinang yang hampir sama dengan produksi dari tahun lalu, masing-masing sebesar 5.455,32 ton

Subsektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 12,30 persen atau sekitar 260 milyar rupiah yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karena didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber

daya manusia yang sangat menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanakan sistem integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan biogas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan ternak skala kecil juga telah ada dan ber SNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana prasarannya masih jauh dari memadai, teknologi pasca panen untuk pengolahan hasil masih belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

Tabel 2.98
Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Tahun	Padang Pengembalaan		Jumlah Pos IB (Unit)	Jumlah PUSKESWAN (Unit)	Jumlah RPH (Unit)	Jumlah TPU (Unit)	Jumlah Pasar Ternak (Unit)		Jumlah Pasar Daging (Unit)	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)					Ternak Besar & Kecil	Unggas	Ternak Besar & Kecil	Unggas
2017	853	14.501	8	8	2	3	2	7	2	8
2018	1.563	26.571	10	8	2	3	2	8	2	10
2019	781,95	9.383,40	10	8	2	3	2	8	2	10
2020	781,95	9.383,40	10	7	2	2	3	3	3	4
2021	31.271	155.669	10	8	2	58	6	2	3	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pembangunan bidang peternakan juga didukung oleh Puskesmas yang berjumlah delapan unit. Puskesmas berperan menjadi pusat kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan gangguan reproduksi, inseminasi buatan, penyuluhan, pengaman produk ternak, dan pemberantasan penyakit hewan. Jumlah kasus penyakit ternak di Kabupaten Bireuen tahun 2017 – 2021 seperti pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99
Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Kasus)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	31.735	22.595	29.330	6.657	13.476
2	Jumlah Kasus Penyakit Hewan	31.735	22.595	29.330	6.657	13.476

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Potensi subsektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging, dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Tahun	Ternak Besar (ekor)		Ternak Kecil (ekor)		Unggas (ekor)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam	Itik
2017	63.293	2.516	38.311	15.144	778.460	257.200
2018	64.798	1.940	36.537	16.672	779.105	181.890
2019	63.709	2.271	78.242	33.353	483.994	207.378
2020	63.920	2.661	70.976	25.339	536.087	396.901
2021	65256	2.459	73.525	26.614	928.619	402.512

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.101
Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Daging (kg)	2.810.920	5.637.779	4.964.189	2.187.372	1.114.095
2	Ayam Potong (kg)	4.781.700	4.363.834	4.805.719	4.512.200	1.905.769
3	Telur (butir)	15.201.384	14.996.832	15.973.261	15.601.726	14.216.708

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non pertanian yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir anak petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan ekonomi yang bersifat progresif yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi pertumbuhannya akan lebih tinggi.

B. Cakupan Bina Kelompok Tani

Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan sistem agribisnis, poktan dan gapoktan harus

menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitas melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak poktan dan gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha tani. Gapoktan yang berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.

Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Tabel 2.102
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

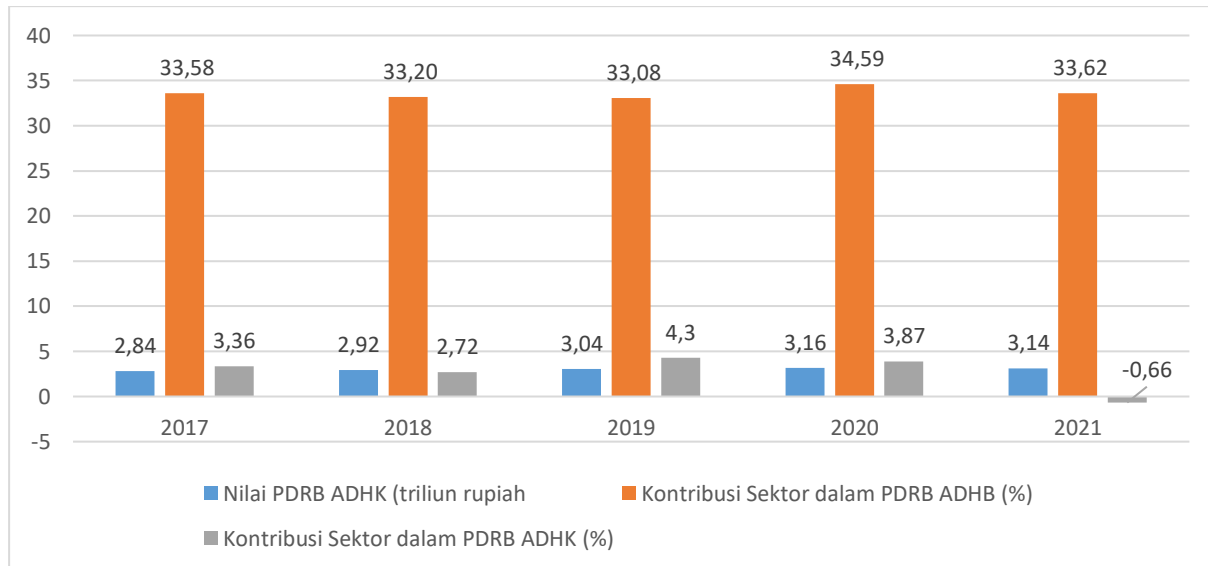
No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)	1.613	1.700	1.800	1.820	1.829
2	Jumlah kelompok tani (kelompok)	2.410	2.395	2.224	2.053	2.178
3	Persentase (%)	66,93	70,98	80,94	88,65	83,98

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.102 cakupan pembinaan kelompok tani yang dibina tahun 2017-2021 terus meningkat. Pada tahun 2017 kelompok tani yang dibina sejumlah 1.613 kelompok (66,93 persen), kemudian meningkat menjadi 1.829 kelompok (83,98 persen).

C. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.27
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

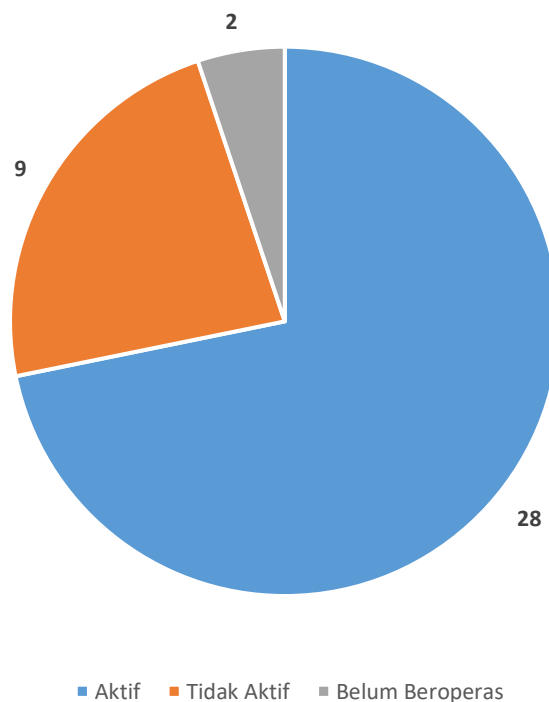
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi yaitu mencapai 33,62 persen (angka ini meningkat dari 33,58 persen di tahun 2017). Sedangkan pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurun pada tahun 2021 (-0,66 persen), angka ini lebih rendah daripada tahun 2017 (3,36 persen).

Nilai PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 3.140,37 milyar rupiah, meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (2.840,76 milyar rupiah).

2.1.3.2.4 Perdagangan

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. Sektor perdagangan termasuk kedalam lima besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen.

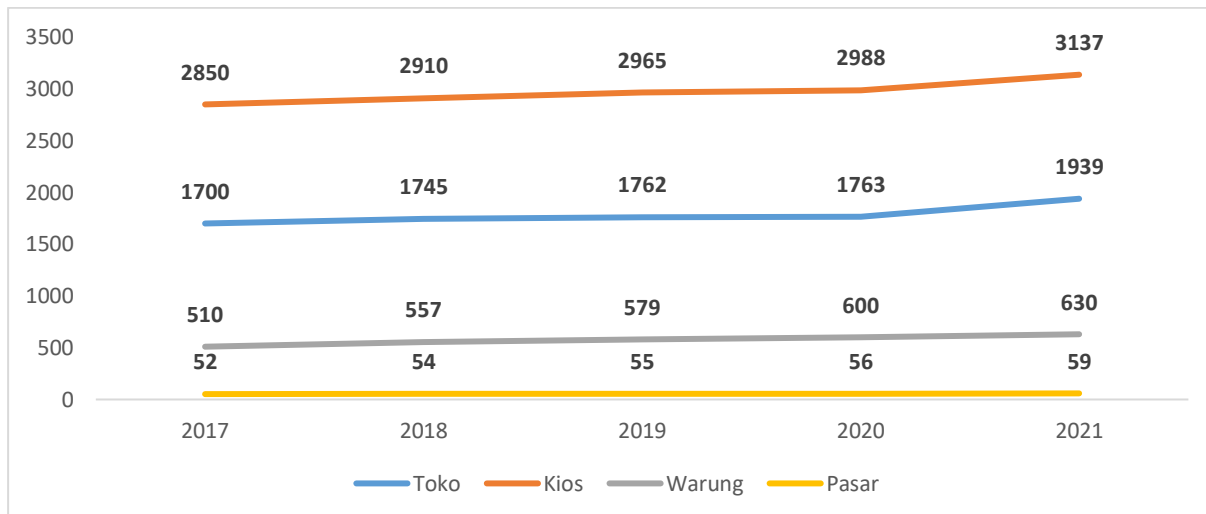
Jumlah pasar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebanyak 39 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 28 unit dalam kondisi aktif, sebanyak 9 unit tidak aktif dan 2 unit belum beroperasi.



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.28
Kondisi Pasar di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Pada tahun 2021, pedagang kecil masih menjadi yang utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen. Jumlah sarana dan prasarana perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 12,77 persen dari tahun 2017. Sarana perdagangan terbanyak berupa kios sebanyak 3.137 unit (54,4 persen), namun jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017. Peningkatan terbesar pada jumlah warung meningkat menjadi 630 unit pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2017 (510 unit). Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.

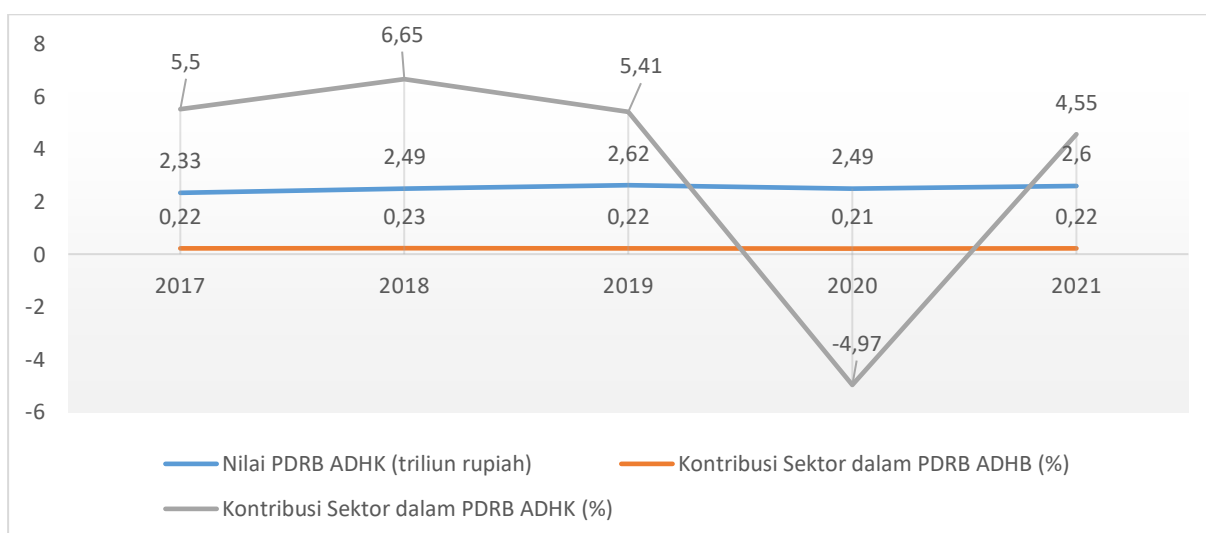


Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.29
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Pembangunan di bidang perdagangan diantaranya adalah pelaksanaan perlindungan konsumen, pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan jasa serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta standardisasi dan pengendalian mutu barang.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.30
Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada peringkat kedua yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2021 kontribusi sektor ini mencapai 21,56 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menurun pada tahun 2021 (4,55 persen), angka ini lebih rendah daripada tahun 2017 (5,5 persen). Sektor ini sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19.

Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 3.030,37 milyar rupiah, meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (2.531,05 milyar rupiah).

Implementasi dari perlindungan konsumen di Kabupaten Bireuen adalah pelaksanaan peraturan bupati atau surat edaran yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut dilaksanakan berupa tera dan tera ulang alat UTTP, pembinaan toko swalayan dan penyaluran LPG di wilayah Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2017-2020, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen mengimplementasikan satu produk hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan tahun 2021 sebanyak 3 produk hukum.

Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Pada tahun 2021 telah dilakukan tera ulang terhadap 433 UTTP dari 976 potensi UTTP di Kabupaten Bireuen.

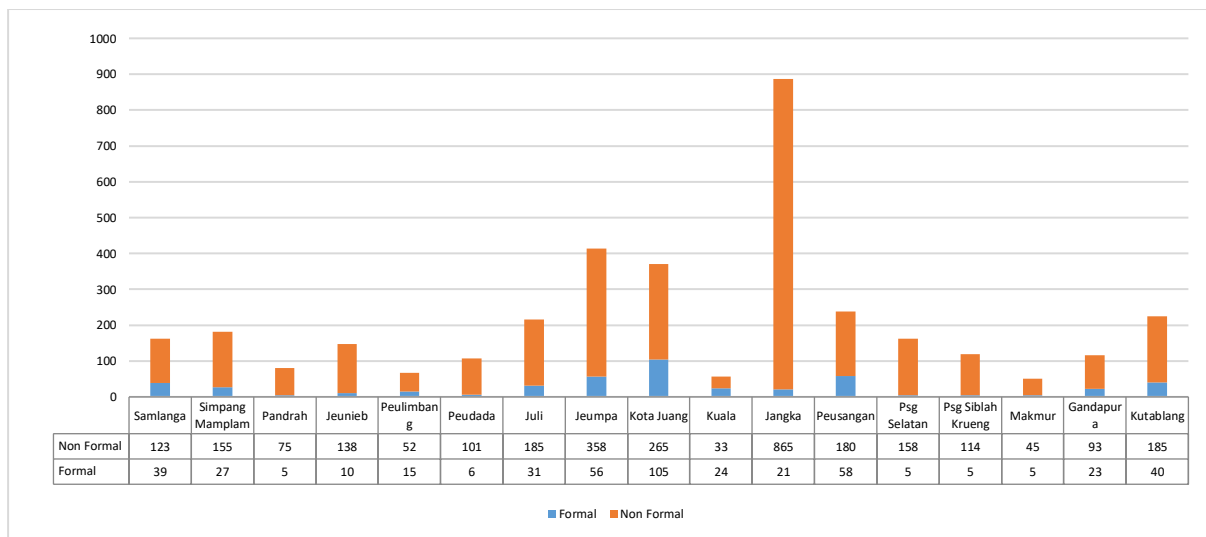
2.1.3.2.5 Perindustrian

A. Peranan Industri Kabupaten Bireuen

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di Kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Jumlah unit usaha industri kecil Bireuen pada tahun 2021 sejumlah 3.527 unit usaha yang terdiri dari 3.052 unit usaha non formal dan 475 unit usaha formal.

Pada Tahun 2021 jumlah unit usaha Formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan Kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha non formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan dan industri.

Jenis Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki persentase kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 49 persen. Sebanyak 61,11 persen dari jumlah unit usaha di Kabupaten Bireuen bergerak pada jenis industri tersebut. Sedangkan Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 40,75 persen. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

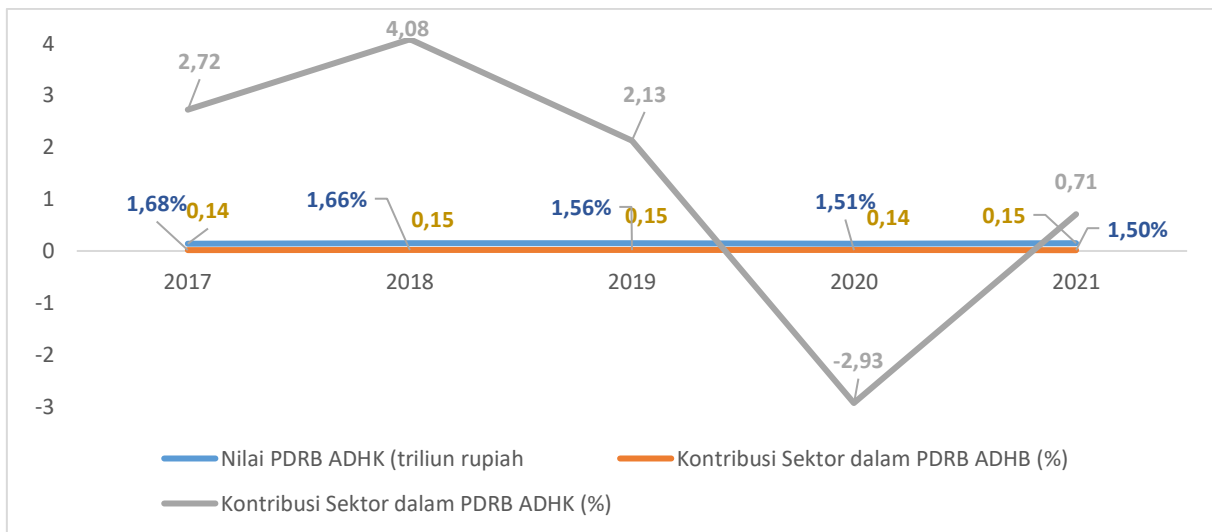
Gambar 2.31
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

B. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau

rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.32
Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

Sektor industri pengolahan selama ini belum memberikan kontribusi besar untuk pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Kontribusi sektor ini pada tahun 2021 mencapai 1,5 persen (angka ini turun dari 1,68 persen di tahun 2017). Sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan menurun pada tahun 2021 (0,71 persen), angka ini lebih rendah daripada tahun 2017 (2,72 persen). Sektor ini sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 (minus 2,93 persen) sebagai akibat pandemi Covid-19.

Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 150,24 milyar rupiah, meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (144,59 milyar rupiah).

2.1.3.2.6 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya

transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang dilaksanakan di daerah UPT Krueng Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Salah satu program untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan pencadangan tanah yang berasal dari lahan baru atau lahan yang sudah ditinggalkan dalam kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.103
Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SP yang aktif	3	3	3	3	3
2	Jumlah SP Binaan	7	7	7	7	7
3	Jumlah KK Mandiri	40	60	80	100	125
4	Jumlah KK tertampung dalam SP	335	335	335	335	335

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Jumlah Satuan Permukiman (SP) transmigrasi di Kabupaten Bireuen sebanyak 7 SP, dari jumlah tersebut sebanyak 3 SP dalam kondisi aktif. Jumlah KK yang tertampung dalam SP transmigrasi sebanyak 335 KK. Sebanyak 37,31 persen (125 KK) merupakan KK mandiri meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,94 persen.

2.1.3.3 Penunjang Urusan

2.1.3.3.1 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025 dengan Visi “*Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami*”. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumber daya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;

4. Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketersediaan dokumen RKPK memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian sasaran dan tujuan dengan terkoordinasi satu sama lain. Berdasarkan dokumen RKPK ini satuan kerja perangkat daerah akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

2.1.3.3.2 Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah Tabel 2.104 tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.104
Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD (%)	3,00	3,11	3,6	3,8	4,0

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	23,08	24,46	24,34	24,34	24,0
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	17,75	20,76	16,98	16,98	21,04
6	Penetapan APBD	Nomor 4 Tahun 2016	Nomor 7 Tahun 2017	Nomor 5 Tahun 2018	Nomor 5 Tahun 2019	Nomor 5 Tahun 2020
5	Tanggal	23 Desember 2016	29 Desember 2017	21 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Desember 2020

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.104 menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang cukup baik ini, hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017-2021 sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

2.1.3.3.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2021 berjumlah 7.752 orang dimana sekitar 66 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah tingkat S1/S2/S3 sebanyak 55,8 persen. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360 pegawai. Berikut adalah Tabel 2.105 tentang kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.105
Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten
Bireuen Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN Kabupaten Bireuen	8.656	8.306	8.208	8.221	7.752
2	Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	154 jam	NA	NA	NA	12,87 jam
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal	3.60	NA	NA	NA	23,32
4	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	10	16,07	15,13	24,14	23,32
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	30 jabatan	26 jabatan	28 jabatan	35 jabatan	33 jabatan
6	Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah	3576 jabatan	622 jabatan	659 jabatan	727 jabatan	35 jabatan
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	4.655	4.404	4.128	3.996	3.996

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tabel 2.105 memperlihatkan bahwa jumlah Aparat Sipil Negara di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai 2021 terjadi penurunan yaitu dari 8.656 orang menjadi 7.752 orang. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang berprofesi sebagai guru.

2.1.3.3.4 Kelitbangan

Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di dalam suatu daerah yang tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang diperlukan. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui website pemerintah. Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui

pelaksanaan kebijakan inovasi yang diharuskan pemerintah pusat. Dalam hal inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi SINOVIK yang diprakarsai KEMENPAN RB, demikian juga dengan kompetisi yang dipertandingkan KEMENDAGRI, Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi *New Normal Covid-19* dan *INNOVATION GOVERNMENT AWARD* dengan capaian peringkat 60 dari 415 Kabupaten se-Indonesia dengan skor indeks 2.906 dan termasuk kategori kabupaten sangat inovatif, untuk kompetisi KEMENRISTEK/BRIN Kabupaten Bireuen ikut Lomba Indeks Daya Saing Daerah dengan total indeks yang diperoleh 2,3092 kategori sedang serta untuk kompetisi PANGRIPTA NUSANTARA BAPPENAS Kabupaten Bireuen mendapat predikat terbaik 3 Provinsi Aceh dengan mendapatkan ANUGERAH MAJID IBRAHIM AWARD.

2.1.3.3.5 Pengawasan

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan siklus perencanaan serta penganggaran. Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	0	2	2	2	2
2	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan	52	52	52	52	52

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.3.3.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di sekretariat daerah dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SAKIP	C	C	C	CC	CC
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	C	CC
3	Jumlah SKPK menerapkan RB	-	-	-	10	11
4	Nilai LPPD	27.665	27.617	28.073	NA	NA
5	Kategori LPPD	Tinggi	Tinggi	Sedang	NA	NA
6	Jumlah Produk Hukum	764	581	606	766	872
7	TPID Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Perangkat Daerah yang terlibat kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Rumah Sakit dr. Fauziah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 30 tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerapkan reformasi birokrasi mulai tahun 2019. Jumlah SKPK yang menerapkan reformasi birokrasi pada tahun 2021 sebanyak 11 SKPK, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 10 SKPK. Indeks reformasi birokrasi mencapai kategori CC pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan kategori C, sedangkan kategori SAKIP Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sudah mencapai kategori CC sama dengan tahun sebelumnya.

2.1.3.3.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya

rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK) dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Qanun yang disahkan	7	6	5	6	8
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.3.3.8 Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 kecamatan. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat diantaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, pelaksanaan maulid, peringatan HUT RI, MoU Helsinki, musrenbang kecamatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat. Kinerja kecamatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Urusan	4	4	4	4	4
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	76	78,24	80,29	82	83,26

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pelaporan yang berbasis elektronik	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sebanyak 4 urusan yaitu : MTQ, maulid, perizinan dan non perizinan. Sebanyak 16 kecamatan melaksanakan semua urusan tersebut pada tahun 2021.

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di kecamatan dilaksanakan di semua kecamatan. Lembaga ekonomi yang diberdayakan adalah PKK dan BUMG. Pada tahun 2021 persentase lembaga ekonomi yang aktif sebanyak 83,29 persen, meningkat dari tahun 2020 (82 persen).

Penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan di kecamatan adalah kegiatan HUT RI dan peringatan MoU Helsinki. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut mencapai 100 persen tiap tahunnya. Pemberdayaan desa dikecamatan juga diharapkan agar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hampir semua desa telah memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.1.3.4.1 Pelaksanaan Syariat Islam

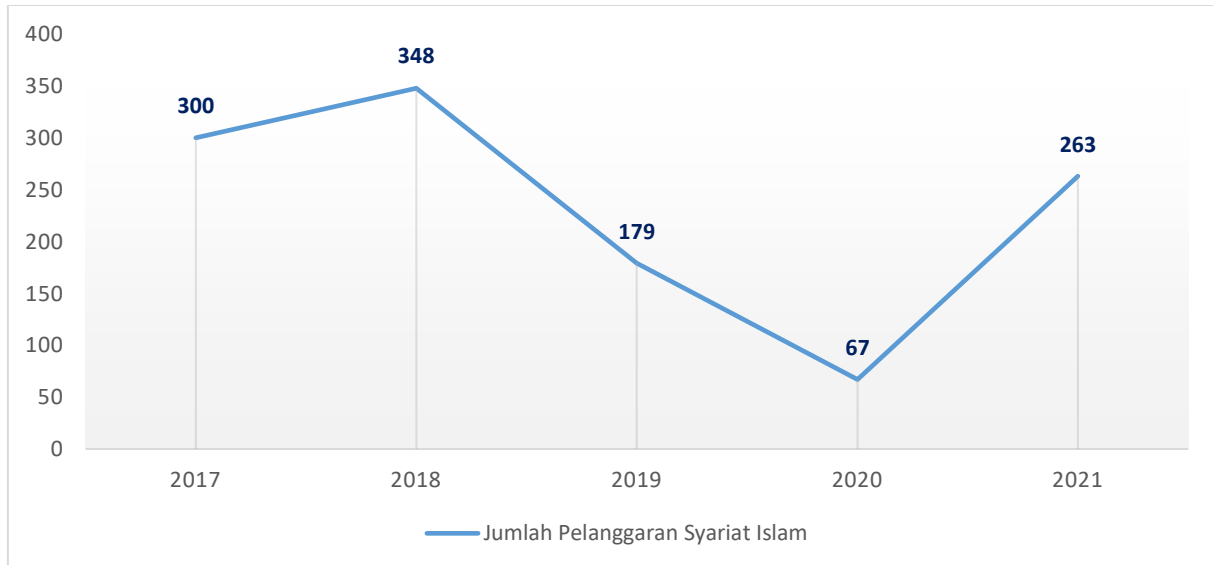
Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen no. 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri melalui Dinas Syari'at Islam dengan tujuan sebagai :

1. Pusat pendidikan islam (*Education Islamic Central*);
2. Rule model pendidikan dayah di Aceh;
3. Pusat rujukan islam di Aceh;
4. Menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;

5. Menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai
6. Wilayah yang adil dan makmur, dan
7. Menyusun road map Bireuen sebagai Kota Santri di Aceh

Demikian juga dengan penerapan syariat islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran syariat islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang pelanggaran syari'at, berikut adalah Gambar 2.33 tentang jumlah pelanggaran syariat islam di Kabupaten Bireuen.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.33
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

Dari Gambar 2.33 terlihat jumlah pelanggaran syariat islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 300 pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 348 pelanggaran dan menurun menjadi 67 pelanggaran pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai 263 kasus.

2.1.3.4.2 Pendidikan Dayah

Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki dayah saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya dayah tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran penting dalam mencetak generasi umat

dan kader dayah. Data jumlah dayah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110
Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dayah	126	126	145	155	176
2	Jumlah Guru dayah	3.943	3.519	4.845	5.445	7.071
3	Jumlah santri	23.403	23.403	38.062	38.631	43.341
4	Dayah Naik Kelas	-	-	117	117	46

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jumlah dayah terakreditasi meningkat dari 117 dayah pada tahun 2019 menjadi 156 dayah pada tahun 2021. Jumlah guru dayah sebanyak 7.071 orang dan jumlah santri sebanyak 43.341 orang. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah santri yang sangat signifikan hal ini disebabkan banyak siswa sekolah yang memilih pendidikan dayah. Jumlah dayah naik kelas menurun pada tahun 2021 hanya 46 dayah (26,14 persen), dibandingkan tahun 2019 sebanyak 117 dayah (66,48 persen).

Untuk meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.

Tabel 2.111
Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Tipe Dayah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	A+	0	0	6	6	8
2	A	3	3	13	13	16
3	B	29	29	24	24	37
4	C	31	31	31	31	48
5	D/Non Tipe	4	4	43	43	47
Total Dayah Terakreditasi		67	67	117	117	156

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.111 mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2021, jumlah dayah tipe A (Plus) di Kabupaten Bireuen sebanyak 8 dayah, tipe A sebanyak 16 dayah, tipe B sebanyak 37 dayah, tipe C sebanyak 48 dayah dan tipe D (non tipe) sebanyak 47 dayah. Jumlah dayah tipe D (non tipe) masih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi lainnya, sebanyak 47 dayah. Perlu pembenahan dalam penyelenggaraan pendidikan dayah tersebut agar dapat naik ke tipe A, B atau C.

2.1.3.4.3 Peningkatan Peran Ulama

Peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen diantaranya adalah Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU merupakan salah satu program utama MPU Aceh dan kabupaten/kota serta merupakan amanat dari Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 yang mengamanatkan MPU wajib mengadakan kegiatan kaderisasi ulama PKU yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan peran ulama dalam masyarakat dan bernegara.

Selain PKU, MPU juga diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi dan fatwa terkait perbedaan pendapat dan masalah keagamaan dalam masyarakat serta saran, masukan dan pertimbangan terkait dengan kebijakan daerah.

Tabel 2.112
Capaian Peningkatan Peran Ulama di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sidang	23	23	15	18	20
2	Sidang yang menghasilkan keputusan	13	6	3	11	8
3	Muzakarah	70	70	90	100	100
4	Kader Ulama	0	0	10	10	34
5	Sosialisasi	40	34	80	100	25
6	Rekomendasi	1	3	12	2	35
8	Rapat Koordinasi MPU	45	42	45	2	0

Sumber : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.112 peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen semakin baik. PKU yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019 (10 orang) meningkat menjadi 34 orang pada tahun 2021. Akan tetapi jumlah sidang

yang menghasilkan keputusan pada tahun 2021 sebanyak 8 dari 20 kali sidang, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang menghasilkan 13 keputusan dari 23 kali sidang.

2.1.3.4.4 Pendidikan Aceh

Pendidikan Aceh diharapkan dapat meningkatkan mutu dan menerapkan karakter islami dalam lingkungan pendidikan. Penerapan nilai-nilai islami untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju generasi selanjutnya yang islami. Berbagai bentuk penerapan pendidikan berkarakter islami diantaranya dengan pengajian di sekolah-sekolah.

Tabel 2.113
Capaian Pendidikan Aceh di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemberdayaan pendidikan berkarakter	40	35	35	60	60
2	Jumlah Sekolah SD/MI (Unit)	290	290	291	292	289
3	Jumlah Sekolah SMP/MTs (Unit)	112	112	119	121	126
4	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA (Unit)	64	64	68	69	70
5	Persentase (%)	8,58	7,51	7,32	12,45	12,37

Sumber : Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Tahun 2022

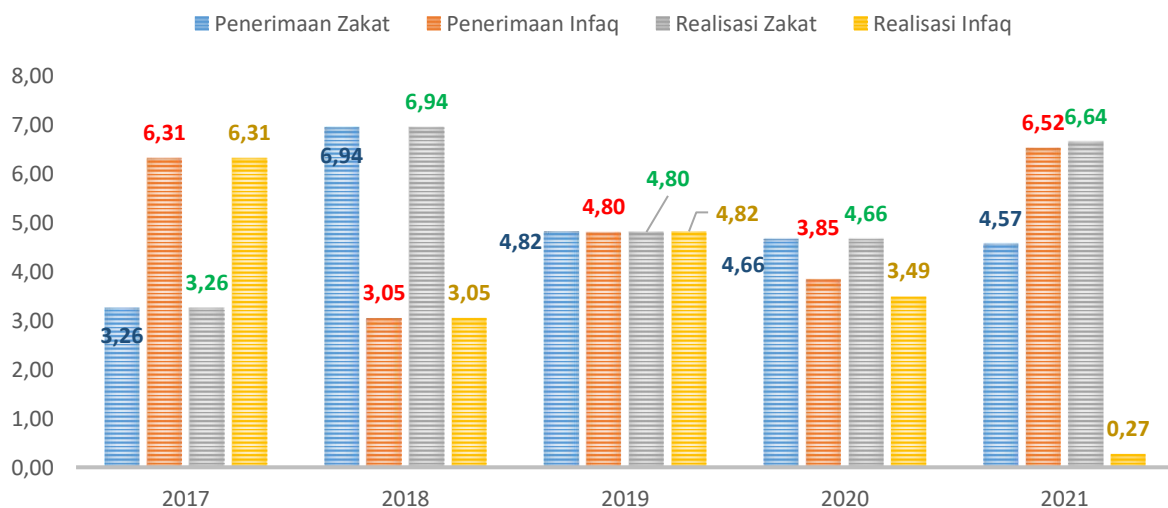
Dari Tabel 2.113 capaian dari tahun 2017-2021 jumlah pemberdayaan pendidikan berkarakter sejumlah 230 sekolah/madrasah. Pada tahun 2017 dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter sebanyak 8,58 persen, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 12,37 persen (60 Sekolah/madrasah). Total sekolah dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter hingga tahun 2021 mencapai 48,24 persen. Masih terdapat 51,76 persen sekolah/madrasah yang belum dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter islami.

2.1.3.4.5 Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi infaq dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar besumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta per bulan dikenakan zakat sebesar 2,5 persen per bulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta per bulan dikenakan infak sebesar 1 persen per bulan. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dzuafa. Berikut adalah gambaran potensi zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017- 2021.



Sumber :Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.34 **Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq** **di Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2021**

Penerimaan zakat di Kabupaten Bireuen berfluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 penerimaan zakat sedikit menurun menjadi 4,57 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 (4,66 milyar rupiah). Begitu juga dengan penerimaan infaq. Pada tahun 2021 penerimaan infaq meningkat menjadi 6,64 milyar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 (4,66 milyar rupiah).

Realisasi zakat dan infaq juga berfluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi zakat sebesar 6,52 milyar rupiah, meningkat dari tahun 2020 (3,85 milyar rupiah). Sedangkan realisasi infaq menurun drastis pada tahun 2021 (0,27 milyar rupiah) dibandingkan tahun 2020 (3,49 milyar rupiah).

2.1.3.4.6 Pelestarian Adat Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampông atau mukim dan masih berjalannya adat di kalangan masyarakat. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Bireuen terus berupaya untuk melestarikan adat yang ada dengan penerapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 jumlah pelestarian adat dengan menerapkan adat dalam pembangunan sebanyak 5 adat. Diharapkan kedepannya pelestarian adat akan meningkat menjadi 7 adat yang dilestarikan.

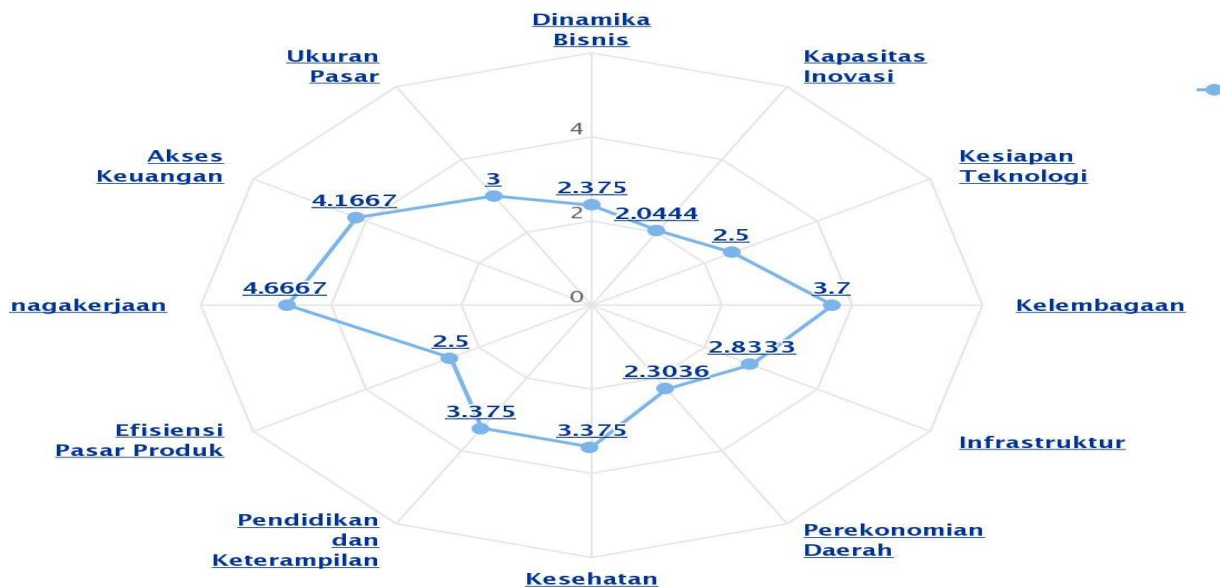
Beberapa adat yang diharapkan untuk dilestarikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bireuen adalah rapat turun sawah (*peusijuek blang*) *panglima laot*, *bu gatheng tuha peut*, *tuha lapan*, *keurani gampoeng*, *panglima hutan (pawang uteun)*, *hari pekan* dan *jaga pintoe ie*.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Hasil IDSD berdasarkan Skor Pilar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.35 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan pilar menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) pilar dari 12 (dua belas) pilar yang memiliki skor sangat tinggi (3.76-5), 5 (lima) pilar dengan skor tinggi (2.51-3.75), dan 5 (lima) pilar lainnya dengan skor sedang (1.26-2.50). Skor tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen sudah tinggi (3.05).



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.35
Spider Web Grafik Penilaian IDSD Berdasarkan Pilar di
Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Tiga pilar dengan skor sangat tinggi adalah pilar akses keuangan, pilar ketenagakerjaan, dan pilar kelembagaan. Sedangkan pilar dengan skor tinggi adalah pilar infrastruktur, pilar kesehatan, pilar pendidikan dan keterampilan, serta pilar ukuran pasar. Selanjutnya untuk pilar dengan skor sedang adalah pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi, pilar kesiapan teknologi, pilar perekonomian daerah serta pilar efisiensi pasar produk.

Kondisi Kabupaten Bireuen ditinjau dari sisi *Territorial Capital & Human Capital* berpeluang dalam meningkatkan daya saing secara regional dikarenakan secara geografis berada di segitiga emas ekonomi Aceh karena diapit oleh 5 (lima) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dan berada di jalur lintas jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh sehingga berfungsi sebagai persinggahan yang berbatasan langsung dengan lima kabupaten.

Ditinjau dari aspek *Resources*, Kabupaten Bireuen memiliki 3 perguruan tinggi swasta, salah satu diantaranya merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Aceh. Dengan fasilitas tersebut masyarakat Kabupaten Bireuen diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, hal ini juga di dukung dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) 1,27 persen menjadi 96 persen dari tahun 2021 yang sebesar 94.72 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bireuen sebesar 72,33 atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 72,29.

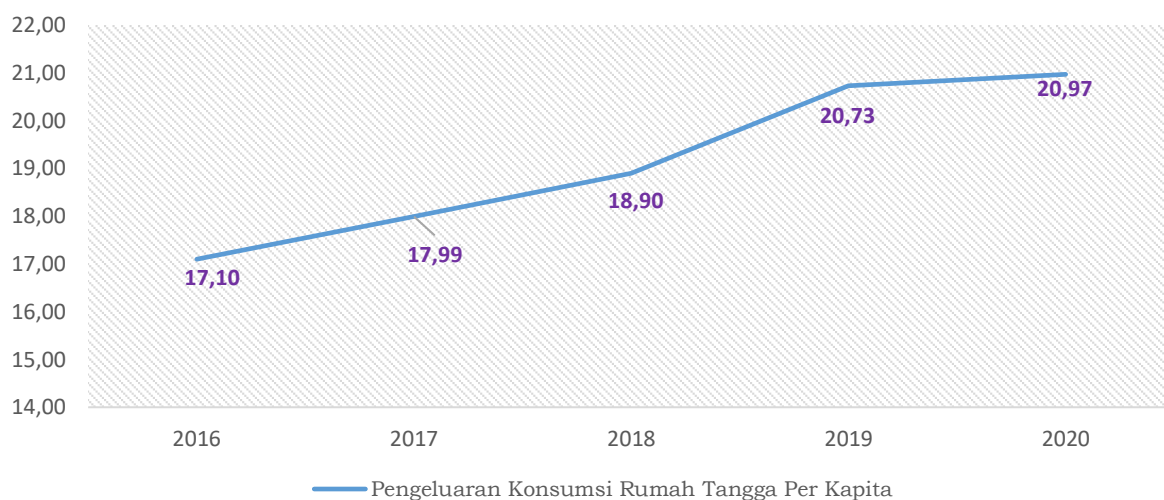
Ditinjau dari aspek ekonomi, jika dilihat dari sisi nilai tambah sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireuen periode 2017-2021, sektor pertanian masih menempati urutan pertama bagi perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga terdapat di urutan kedua perekonomian daerah ini. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 4,13 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 disebabkan pulihnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi 21,56 persen terhadap PDRB dan sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi 7,42 persen.

Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya Pangkalan Pendaraan Ikan (PPI) yaitu PPI Kuala Jangka, Kuala Jeumpa, Peudada, Jeunieb, Pandrah, dan Batee Iliek yang menjadi pangkalan sektor pendukung ekonomi daerah. Perikanan merupakan salah satu sektor andalan kabupaten ini, sekaligus menjadi alternatif pendapatan masyarakat. Infrastruktur ekonomi lainnya yang telah disiapkan yaitu Kawasan Industri Bireuen di Cot Batee Geulungku.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah mengukur pengeluaran rata-rata per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraaannya.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Bireuen dalam kurun waktu 2017-2021 terus meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Di tahun 2021 nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Bireuen sebesar 20,97 juta rupiah meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 17,1 juta rupiah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.36
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bireuen
(miliar rupiah) Tahun 2017-2021

Penduduk Kabupaten Bireuen sebagian termasuk kedalam kuintil ke-1 (Golongan 0-20 persen terkaya) itu sekitar 20,49 persen. Jika dilihat dari komposisinya, rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 240.673,00 (21,45 persen), ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp. 104.716,00 (9,33 persen), dan rokok sebesar Rp. 81.418,00 (7,26 persen). Untuk pengeluaran non makanan, rata-rata sekitar Rp. 194.734,00 (17,35 persen) digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.114
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan (Rp)	persen	Non Makanan (Rp)	persen	(Rp)	(%)
2017	524.697	59,18	361.865	40,82	886.562	100,00
2018	506.678	56,62	388.142	43,78	894.820	100,00
2019	527.577	58,15	379.761	41,84	907.338	100,00
2020	530.591	57,05	399.495	42,95	930.086	100,00
2021	687.257	61,24	434.937	38,76	1.122.194	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan 2.114 dapat kita lihat bahwa rata-rata persentase pengeluaran dari tahun 2017-2021 adalah pengeluaran untuk konsumsi makanan terus meningkat dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2021 konsumsi rumah tangga per kapita untuk makanan sebesar 687.257 rupiah (61,24 persen) meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5.24.697 rupiah (59,18 persen). Sedangkan konsumsi

non pangan/non makanan yang meningkat pada tahun 2021 yang sebesar 434.937 rupiah dibandingkan tahun 2017 sebesar 361.865 rupiah. Namun persentasenya semakin menurun.

2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

2.1.4.3.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.115
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kendaraan	154.104	165.254	165.254	178.353	125.142
2	Panjang Jalan	1.316,27	1.316,27	1.316,27	1.316,27	1.316,27
3	Rasio	1:117	1:125	1:125	1:135	1:95

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.115 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 di Kabupaten Bireuen cenderung menurun dimana tahun 2016 sebesar 1:117 pada tahun 2021 menjadi 1:95, hal ini disebabkan penurunan volume kendaraan.

2.1.4.3.2 Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan sebagai pengganti *Millennium Development Goals (MDGs)* yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan *MDGs* terkait peningkatan akses terhadap air bersih, *SDGs* menekankan pengelolaan sumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam *United Nations (UN)* diharuskan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan *SDGs*, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per detik). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Bireuen dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Tabel 2.116 akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.116
Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga Pelanggan PDAM	17.514	18.479	20.544	25.909	28.047
2	Jumlah Rumah Tangga	104.643	106.606	108.833	108.833	108.833*
3	Persentase RT Pelanggan PDAM	17	17	19	24	23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

*) data belum tersedia

Dari Tabel 2.116 diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 17.514 rumah tangga (RT) pelanggan di tahun 2017, hingga mencapai sebanyak 28.047 rumah tangga (RT) di tahun 2021. Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2021 tercatat mengalami kenaikan 23 persen di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bireuen perlu terus di tingkatkan sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

2.1.4.3.3 Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 107,15 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 116.620 pelanggan. Untuk jumlah pelanggan listrik terbesar terdapat pada rayon Bireuen sebanyak 51.127 pelanggan di tahun 2021. Pengguna listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RT Pengguna Listrik	103.975	107.560	110.747	116.620	119.138
2	Jumlah RT	104.643	106.606	108.833	108.833	108.833
3	Persentase RT pengguna listrik	99,36	100,00	101,76	107,15	109,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi kabel tanah, di sepanjang jalan nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-keperluan seperti berikut:

- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
- Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan

2.1.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.4.1 Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin, disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis izin dan lamanya proses perizinan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bekisar antara 3 hari kerja sampai dengan 14 hari kerja. Jenis-jenis perizinan dan lama proses pembuatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 seperti pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118
Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Jenis Perizinan	Tahun (Hari Kerja)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15	15	15	14	14
2	Izin Gangguan (HO)	14	14	14	-	-
3	Izin Tempat Usaha	3 .	3 .	3 .	-	-

No	Jenis Perizinan	Tahun (Hari Kerja)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Izin Usaha Kontruksi (IUJK)	3	3	3	3	3
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	3	3	-	-
6	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	-	-	-	7	7
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	3	-	-
8	Tanda Daftar Industri	3	3	3	-	-
9	Izin Reklame	3	3	3	14	14
10	Izin trayek	3	3	3	7	7
11	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	3	3	3	-	-
12	Izin Usaha Kepariwisata	3	3	3	7	7
13	Izin Usaha peternakan	3	3	3	7	7
14	Izin Usaha pertanian	3	3	3	7	7
15	Izin Usaha Pertambangan Daerah	-	-	-	-	-
16	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batu Bara	-	-	-	7	7
17	Izin Usaha Perbengkelan	3	3	3	7	7
18	Izin Usaha Sarang burung Walet				7	7
19	Izin Pemindahan Limbah	3	3	3	-	-
20	Izin Penangkapan Ikan	7	7	7	-	-
21	Izin Usaha Perikanan	3	3	3	7	7
22	Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT	3	3	3	-	-
23	Izin Bidang Penanaman Modal	3	3	3	4	4
24	Izin Bidang Kesehatan	-	-	-	3	3
25	Izin Usaha Industri	3	3	3	7	7
26	Izin Lokasi	3	3	3	14	14
27	Izin Penimbunan	3	3	3	-	-
28	Rekomendasi Izin Penimbunan BBM	-	-	-	13	13
29	Izin Usaha Perkebunan	-	-	-	7	7
30	Izin Usaha Operasional Pengilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras	3	3	3	7	7
31	Izin Kapal Pengangkut Ikan	3	3	3	-	-
32	Izin Pengelolaan air	3	3	3	13	13
33	Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi	3	3	3	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.118 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai 2021, lama waktu proses pembuatan izin Kabupaten Bireuen rata-rata membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang

burung walet, izin lokasi, izin penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (tiga belas) sampai 14 (empat belas) hari kerja.

2.1.4.4.2 Keamanan dan Ketertiban

Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 10 kasus pencurian dengan pemberatan, 85 kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus pencurian dengan kekerasan 7 kasus, kasus peganiayaan berat 1, 2 kasus pembunuhan, 10 kasus pemerkosaan, dan 1 kasus pemerasan/ancaman. Jumlah Kasus pidana di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 artinya sudah ada kesadaran dari masyarakat akan perbuatan yang tidak baik, diharapkan kedepan tidak ada kasus tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Jumlah tindak pidana menonjol menurut jenis di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Tindak Pidana	Tahun (kasus)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencurian dengan pemberatan	21	33	29	1	10
2	Pencurian kendaraan bermotor	91	84s	45	20	85
3	Pencurian dengan kekerasan	5	-	17	1	7
4	Penganiayaan berat	2	56	1	1	1
5	Kebakaran	-	-	-	-	-
6	Pembunuhan	3	1	1	1	2
7	Perkosaan	4	5	6	6	10
8	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-
9	Uang Palsu	1	-	-	1	-
10	Narkotika	95	74	-	1	-
11	Perjudian	5	1	-	2	2
12	Pemerasan/Ancaman	12	12	9	7	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

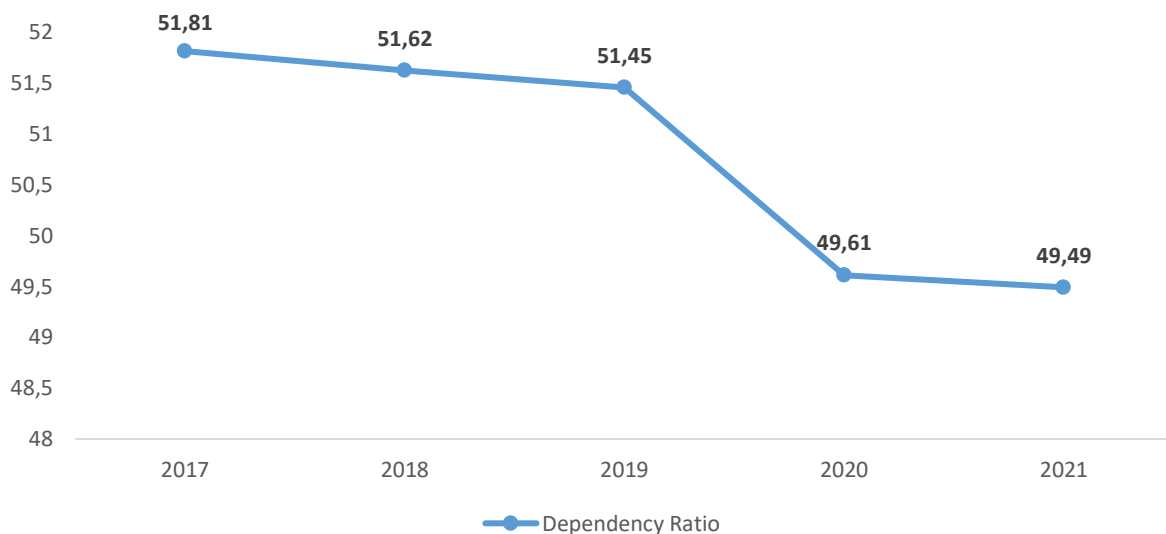
2.1.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan

profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.5.1 Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.37
Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Dari data rasio ketergantungan pada Gambar 2.37, komposisi penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 27,16 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 5,95 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 66,89 persen. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 49,49 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

2.1.4.5.2 Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia adalah mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah penduduk dengan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Jumlah Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

No	Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
1	Diploma I/II/III/Akademi	11.164	4,78
2	Universitas	34.181	14,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.2 Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Evaluasi TPB/SDGs dilaksanakan terhadap 4 (empat) pilar yang telah menjadi target penilaian capaian indikator pencapaian TPB/SDGs. Evaluasi dilakukan terhadap program/kegiatan dari OPD yang telah dituangkan dalam Renstra dan RPKP dan telah diterapkan dalam matriks pelaksanaan TPB/SDGs. Pada tahun 2021 ini evaluasi lebih ditekankan kepada realisasi fisik dan keuangan dari OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan dikarenakan terjadi review RPJM sehingga capaian target dari indikator juga ikut berubah.

Pencapaian hasil pelaksanaan awal TPB sesuai metadata dibagi menjadi 4 (empat) pilar yang akan di evaluasi yaitu :

❖ Pilar Pembangunan Sosial, mencakup di dalamnya
Goals 1 : Menghapus Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan

yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2017 mencapai 15,87 persen terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,62 persen yaitu 13,25 persen. Namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2020 sebesar 13,06 persen

Goals 2 : Menghapus Kelaparan

Berkaitan dengan pencapaian goals penghapusan kelaparan, tentang kecukupan pangan dan gizi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berimbas pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat, seperti kualitas pendidikan dan perekonomian. Dalam hal pemenuhan indikator ini terdapat pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, diantaranya program peningkatan ketahanan pangan dan beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Program pengelolaan perikanan budidaya, program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan perikanan tangkap merupakan pemenuhan indikator TPB pencapaian goals penghapusan kelaparan. Budidaya Perikanan ikan air tawar/tambak merupakan usaha rumah tangga, yaitu rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Goals 3 : Kesehatan dan Kesejahteraan

Pemberian makanan yang bergizi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup, kecerdasan dan tingkat kesehatan menjadi lebih baik. Gizi buruk pada ibu hamil menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan juga bisa menyebabkan stunting, yaitu tinggi badan rendah dibandingkan dengan usia anak. Kondisi anak dengan gizi buruk di Kabupaten Bireuen masih tergolong tinggi, umumnya terjadi di daerah pelosok. Anak dengan kondisi stunting turun pada tahun 2021 mencapai 24,4 persen dibandingkan dengan kondisi stunting pada tahun 2017 sebesar 41 persen, menurut data RISKESDAS dan SGGI. Namun angka ini masih belum mencapai target nasional 14 persen pada 2024.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-

sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh disetiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. AKI di Bireuen pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan berjumlah 129/100.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2017 berjumlah 113/100.000 kelahiran hidup.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penyebab angka kematian ibu, meskipun masih banyak faktor yang harus di perhatikan untuk menangani masalah ini, persoalan kematian yang sering terjadi selama ini diantaranya perdarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Ada beberapa kemungkinan factor lain yang menyebabkan secara tidak langsung diantaranya, pemberdayaan perempuan yang tidak baik, latar belakang pendidikan, serta sosial ekonomi keluarga dan lingkungan masyarakat

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Bireuen tertinggi ditahun 2021 dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu 13/1000 kelahiran hidup. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan angka kematian bayi tersebut, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bireuen. Salah satu faktor penyebab adanya kasus kematian bayi di Kabupaten Bireuen adalah adanya ibu risiko tinggi pada saat menjalani proses persalinan. Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam hal tersebut adalah menciptakan kesadaran para pelaku kesehatan, petugas puskesmas dan posyandu aspek positif pentingnya pengaduan masyarakat dalam upaya memperbaiki pelayanan yang selama ini telah diberikan, disisi lain angka kehamilan selama tahun 2021 dan masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut karena masyarakat banyak beraktifitas di rumah.

Goals 4 : Pendidikan Berkualitas

Goals TPB tentang pendidikan diimplikasikan pada program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan pencapaian APK dan APM dapat mencapai target. Indikator keberhasilan di bidang pendidikan dapat dilihat dari data APK dan APM yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau yang sederajat lainnya. Nilai APK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak anak pada usia jenjang sekolah tertentu yang bersekolah. Nilai APK tingkat SD di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yaitu 105,79 terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 110,78, di sebabkan ada anak putus sekolah. Nilai APK tingkat SMP pada 2021 yaitu 91,98 terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 105,75, karena banyak yang sudah mulai melirik sekolah pesantren. Untuk nilai APK tingkat SMA di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yaitu 96,71 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu 80,77 karena masyarakat sudah mengerti pentingnya sekolah.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM dapat mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dilihat dari persentase jumlah semua anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya.

APM Kabupaten Bireuen jenjang pendidikan usia 16 – 18 tahun atau jenjang SMA/sederajat tahun 2021 APM sedikit terjadi peningkatan menjadi 72,48 persen dibandingkan tahun 2017 masih 69,58 persen. APM untuk tingkat SMP/sederajat terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 83,48 persen dibandingkan pada tahun 2017 dengan pencapaian 86,14 persen. Terjadi peningkatan untuk nilai APM tingkat SD/MI 96,77 persen, tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 98,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses

terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Goals 5 : Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Komponen IPG adalah sama dengan IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

Indikator lain tentang gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Dari data dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswi lebih dominan dibandingkan dengan mahasiswa setiap tahunnya. Data tahun 2017 sangat jauh perbandingannya lebih dari tiga kali jumlah mahasiswi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Salah satu faktor penyebabnya adalah laki-laki sebagai tulang punggung keluarga dan mencari nafkah.

Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 mencapai 94,93 turun dibandingkan tahun 2017 sebesar 95,15. Sedangkan IDG tahun 2021 mencapai 58,06 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 53,02.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator SDGs tentang perempuan dan anak, selain berkaitan dengan jumlah pasangan usia subur dan KB aktif juga berkaitan dengan keselamatan dari tindak kekerasan. Data tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di BPS Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 dan 2021 meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari angka 62 di tahun 2017 mencapai angka 77 di tahun 2019.

❖ Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi :

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Setiap tahunnya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen selama ini terus mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah angka pertumbuhan

ekonomi Aceh atau nasional. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun . Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 persen pada tahun 2017, terus meningkat naik sampai pada tahun 2019 menjadi 5 persen, kemudian sempat turun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,13 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perhitungan dilakukan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Distribusi persentase perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen merupakan distribusi persentase PDRB menurut beberapa sektor lapangan usaha. Secara langsung pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor padat karya. Pencapaian TPB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen pada bidang pembangunan ekonomi masyarakat miskin diantaranya adalah bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lainnya.

Sektor usaha yang penyumbang persentase PDRB melalui ADHK terbesar adalah dari sektor usaha bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sedikit meningkat yaitu 33,62 di tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 33,58 persen diikuti oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 22,18 persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 21,56 persen di tahun 2021. Penyumbang persentase terkecil adalah dari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,06 persen pada tahun 2017 dan tahun 2021.

Pilar pembangunan ekonomi ini meliputi indikator-indikator yang tertuang dalam program dan kegiatan pada beberapa OPD seperti terdapat dalam matrik monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan indikator tentang tenaga kerja data yang ada pada OPD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

Goals 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada akses penggunaan energi listrik, salah satu indikatornya adalah angka penjualan listrik perbulan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perluasan pertumbuhan energi listrik untuk 2021 dengan daya terpasang mencapai 666.411.455 KW. Produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN pada tahun 2021 tercatat 327.242.276 KW. Listrik yang terjual 273.168.554 KWh.

Goals 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah pencari kerja yang terdaftar ini dapat menjadi satu indikasi bahwa angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi di Kabupaten Bireuen, dimana lapangan kerja/usaha masih sangat terbatas dan jumlah tenaga kerja yang terserap juga masih sedikit. Jumlah pencari kerja pada akhir tahun 2021 yang belum ditempatkan sebanyak 4.934 orang dimana pencari kerja laki-laki 2.663 orang dan pencari kerja perempuan 2.271 orang.

PDRB ADHK per kapita pada tahun 2021 meiningkat menjadi 23,590 juta rupiah dibandingkan tahun 2017 sebesar 20,294 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -2,73 persen.

Goals 9 : Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusi dan Inovatif

Pertumbuhan ekonomi didukung dengan pembangunan infrastruktur yang baik seperti pembangunan jalan, irigasi dan pasar. Salah satu indikator SDGs yaitu infrastruktur tangguh, industri inklusi dan inovatif, adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, yaitu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan jalan kereta api. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 1.207,67 Km, dimana seluruhnya berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten.

Dampak negatif dari pembangunan dan pertumbuhan penduduk berpengaruh pada perusakan lingkungan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta struktur tanah juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dimana rencana tata ruang adalah rencana pola ruang wilayah yang didistribusikan peruntukannya rencana ruang sebagai fungsi lindung dan rencana untuk ruang sebagai fungsi budidaya.

❖ Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi :

Goals 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Berdasarkan data dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terdapat beberapa sistem penyediaan air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Bireuen, yaitu; air kemasan, ledeng sampai rumah, ledeng eceran, pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, dan air hujan. Saat ini konsumsi air minum

masyarakat mulai sedikit beralih ke air kemasan, baik itu air kemasan dari perusahaan besar maupun berasal dari depot air minum isi ulang yang makin menjamur di Kabupaten Bireuen. Hanya saja air kemasan maupun isi ulang ini dikategorikan sebagai sumber air minum yang tidak layak karena harga persatuannya lebih mahal dalam penyediaannya.

Cakupan air minum layak dilihat dari persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2017 hanya sebesar 24,5 persen meningkat menjadi 86,70 persen pada tahun 2021, namun angka ini lebih rendah dari tahun 2020 tahun 2020 (92,59 persen).

Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 59,66 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 87,13 persen.

Goals 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Jumlah penduduk dan pertumbuhan permukiman perumahan mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bireuen tahun 2019 menurut data statistik berjumlah 108.833 rumah tangga. Sampah rumah tangga dan pasar yang terangkut melalui armada sampah per hari dari 17 kecamatan pada tahun 2021 sebanyak 146 m³ per hari. dengan armada pengangkut sampah berupa mobil sampah 22 unit dan gerobak pengangkut sampah 4 unit.

Akibat lingkungan alam yang terus dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan efek buruk bagi kelestarian sumber daya alam, berdampak kepada bencana yang dirasakan langsung oleh manusia. Musibah banjir dan tanah longsor kerap terjadi setiap tahunnya terutama pada musin penghujan, atau akibat intensitas curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan tahun 2021 sebanyak 140,66 mm/bulan.

Goals 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Pada sektor lain yang ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen adalah sektor perdagangan yang merupakan salah satu dari lima sektor utama pendukung perekonomian. Salah satu faktor penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah makin berkembangnya sarana perdagangan menurut jenisnya dan program dukungan untuk UKM dan koperasi mengalami peningkatan setiap tahun

Sarana perdagangan pasar/ market setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2017 berjumlah 52 sampai dengan tahun 2021 yaitu berjumlah 59. Untuk toko/store juga mengalami peningkatan dari 1.700 ditahun 2019 meningkat menjadi 1939 pada tahun 2021. Sarana kios juga mengalami peningkatan selama 5 tahun dari 2.850 pada tahun 2017 menjadi 3.137 pada tahun 2021. Sementara itu untuk sarana warung di tahun 2015 berjumlah 510 dan terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi 630.

Perkembangan usaha dagang baik kecil, menengah dan besar ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat baik yang disalurkan melalui anggaran APBK maupun anggaran ADG telah dapat dirasakan efeknya oleh masyarakat.

Goals 13 : Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana

Dampak bencana lainnya adalah luapan air sungai yang terjadi karena Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah semakin mengecil, akibat areal DAS telah dimanfaatkan untuk perkebunan dan pembangunan, juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber mata air. Pemanfaatan lahan juga tidak sesuai dengan yang sudah di desain dalam RTRW seperti harapan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen. Bencana yang juga sering terjadi adalah kebakaran hutan dan tempat tinggal. Penanganan bencana menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen. Jumlah kejadian Bencana Alam pada tahun 2021 sebanyak 149 kali, terdiri dari kebakaran, longsor, banjir, angin puting beliung dan pencarian orang hilang.

Goals 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut

Program pengelolaan perikanan budidaya, program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan perikanan tangkap merupakan pemenuhan indikator TPB pencapaian goals penghapusan kelaparan. Budidaya Perikanan ikan air tawar/tambak merupakan usaha rumah tangga, yaitu rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Luas areal tambak dari tahun 2017 sampai 2021 tidak menunjukkan tren peningkatan, pada tahun 2017 luas areal tambak 4.945 Ha tidak berubah hingga tahun 2021 . Untuk Petani Tambak terjadi peningkatan dari tahun 2017 berjumlah 4.665 orang menjadi 4.861 orang pada tahun 2021.

Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya merupakan efek dari semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar/tambak. Selain untuk di konsumsi juga untuk diolah menjadi hasil industri rumahan. Disamping itu permintaan pasar di luar daerah terhadap ikan tawar/tambak juga terus mengalami peningkatan.

Goals 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat

Berkaitan dengan pencapaian goals penghapusan kelaparan, tentang kecukupan pangan dan gizi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berimbas pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat, seperti kualitas pendidikan dan perekonomian. Dalam hal pemenuhan indikator ini terdapat pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, diantaranya program peningkatan ketahanan pangan dan beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Hasil produksi tanam padi dan palawija di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai 2021, ada yang terjadi tren penurunan dan ada yang terjadi tren peningkatan. luas tanam padi 43.646 hektar pada tahun 2017, kemudian turun menjadi seluas 46.193 hektar. Pada tahun 2018 menurun menjadi 38.837 hektar di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26.224 hektar pada tahun 2021 . Untuk luas tanam kedelai terjadi penurunan dari tahun 2017 berada di 111.2 hektar, menjadi 210.00 Hektar di tahun 2019 dan sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 266 hektar. Tanaman jagung 2.558 pada tahun 2017, sedikit meningkat menjadi 3.534 Hektar di tahun 2018 dan meningkat menjadi 11.742,90 hektar ditahun 2019. Pada tahun 2021 turun menjadi 8.117,5 hektar.

❖ Pilar Pembangunan Tata Kelola dan hukum

Goals 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh

Produk hukum berkaitan dengan legalitas status penduduk lain yang telah dilaksanakan adalah pemberian akta kelahiran dan akta kematian sebagai bukti status kependudukan bagi masyarakat. Akta tersebut dapat digunakan untuk pendataan penduduk dalam hal program penanganan kemiskinan. Penduduk miskin akan diberikan beberapa bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemberian akta pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa akta kelahiran sebanyak 45.000 KTP, KIA sebanyak 27.442 lembar, 30.029 lembar KK dan 7.608 SKPWNI.

Goals 17 : Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan

Dalam beberapa tahun ini pemerintah Kabupaten Bireuen ada bekerjasama dengan beberapa lembaga yang ada diantaranya adalah :

1. KOMPAK,

Merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten Bireuen dengan pemerintahan Pusat.

2. Pendamping Desa

Merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa yang membantu pemerintahan desa dalam menjalankan proses pemerintahan desa.

3. CSR adalah kepanjangan dari *Corporate Social Responsibility*.

Keberadaan CSR bukan lagi mencari keuntungan, tetapi diharapkan dapat memberi dampak tertentu. Dalam sebuah perusahaan, CSR adalah bagian dari tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan yang dapat memberikan banyak manfaat. Paling utama untuk hubungan masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMK periode sebelumnya

Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi pelaksanaan indikator pada RPJMK ini berdasarkan Perubahan RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah analisis GAP yang membandingkan kesenjangan antara target dan realisasi.

Beberapa Indikator pembangunan makro Kabupaten Bireuen sudah menunjukkan hasil yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia, indikator ini memiliki capaian 100,05 persen atau melebihi target yang telah ditentukan. Dari 72,29 yang ditargetkan, realisasi yang dicapai adalah 72,33. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), indikator ini memiliki capaian 137,7 persen atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu dari 3 persen yang ditargetkan, realisasi yang dicapai adalah 4,13. Tingkat inflasi, indikator ini memiliki capaian sebesar Rp. 134,3 persen atau melebihi target yang telah

ditentukan. Dari 3 persen target yang telah ditetapkan, realisasi yang mampu dicapai sebesar 1,97 persen. Selain itu ada beberapa indikator makro yang belum menunjukkan hasil yang baik diantaranya: persentase tingkat pengangguran terbuka, indikator ini memiliki capaian sebesar 92 persen atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 4 persen yang ditargetkan realisasi yang dicapai adalah 4,32 persen dan Persentase penduduk miskin dari 12, 56 persen ditargetkan meningkat menjadi 13,25 persen. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bireuen

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	4,13	3	3,3	Indikator Tujuan	Melebihi Target	Bappeda/ BPS	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,33	72,29	72,3	Indikator Tujuan	Melebihi Target	Bappeda/ BPS	
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,29	9,29	9,3	Indikator sasaran	Tercapai	PK	
4	Angka harapan hidup	Tahun	71,26	71,3	71,38	Indikator sasaran	Belum Tercapai	Dinkes dan RSUD Fauziah	
5	Persentase penduduk miskin	Persen	13,25	12,56	12,06	Indikator sasaran	Belum Tercapai	Bappeda/ BPS	
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,91*	94,91	94,92	Indikator sasaran	Tercapai	DPMGPKB	
7	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	92	95	Indikator sasaran	Melebihi Target	Disporapar	
8	Tingkat Inflasi	Persen	1,97	3	2,7	Indikator sasaran	Melebihi Target	Bappeda/ BPS	
9	Jumlah Mustahik	Orang	6.262	30.975	32.000	Indikator program	Belum Tercapai	Baitul Mal	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
10	Persentase organisasi wanita yang aktif	Persen	65	70	80	Indikator program	Belum Tercapai	DPMGPKB	
11	Persentase kasus kekerasan perempuan yang tertangani	Persen	100	90	95	Indikator program	Melebihi Target	DPMGPKB	
12	Cakupan penanganan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Persen	100	95	95	Indikator program	Melebihi Target	DPMGPKB	
13	Adanya ketersediaan sistem informasi keluarga penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Indikator program	Tercapai	DPMGPKB	
14	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	31	25	45	Indikator program	Melebihi Target	DPMGPKB	
15	Persentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Persen	100	85	90	Indikator program	Melebihi Target	DPMGPKB	
Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup									
16	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Orang	30	30	90	Indikator Program	Tercapai	DLHK	
Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
17	Persentase peningkatan akseptor KB aktif	persen	6,29	32	55	Indikator Program	Belum Tercapai	DPMGPKB	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
18	Persentase desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen	6,07	24,6	27,9	Indikator Program	Belum Tercapai	DPMGPKB	
Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah									
19	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Koperasi	0	0	20	Indikator Program		DPPKUKM	Tidak ada pada tahun 2021
Urusan pemerintahan bidang perpustakaan									
20	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	4.819	7.038	14.318	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas Perpus Arsip	
Urusan pemerintahan pilihan									
Urusan pemerintahan bidang perdagangan									
21	Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Indikator Program	Tercapai	DPPKUKM	
Urusan pemerintahan bidang transmigrasi									
22	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi	Persen	0	0	39,35	Indikator Program		Disnakertrans	Tidak ada pada tahun 2021
23	Persentase UPT mandiri	Persen	50	50	50	Indikator Program	Tercapai	Disnakertrans	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
	Unsur pendukung urusan pemerintah								
	Sekretariat Daerah								
24	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	persen	100	90	100	Indikator Program	Melebihi Target	SETDA	
II	Aspek Layanan Umum								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C*	CC	CC	Indikator Tujuan	Belum Tercapai	SETDA	
2	Persentase dayah yang terakreditasi	Persen	88,64	93	95	Indikator Sasaran	Belum Tercapai	Disdik Dayah	
3	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	Perbup	1	1	1	Indikator Sasaran	Tercapai	DPPKUKM	
4	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama	Kasus	0	1	0	Indikator Sasaran	Melebihi Target	Bakesbangpol	
5	Jumlah bidang urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal	Urusan	5	5	5	Indikator sasaran	Tercapai	Bappeda	
6	Opini BPK	Opini	WTP*	WTP	WTP	Indikator sasaran	Tercapai	BPKD dan Inspektorat	
7	Indeks Perencanaan	Indeks	99,8	80,5	82.25	Indikator sasaran	Melebihi Target	BAPPEDA	
8	Persentase Raqan yang disahkan menjadi Qanun	Persen	23	20	65	Indikator sasaran	Melebihi Target	Sekretariat DPRK	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
9	Persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Persen	50	20	50	Indikator sasaran	Melebihi Target	BAPPEDA	
10	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor	CC*	B	B	Indikator sasaran	Belum Tercapai	Seluruh SKPK	
11	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	58,33	70	75	Indikator Tujuan	Belum Tercapai	Dinas PUPR, Dishub, Perkim, DLHK, dan Dinas Pertanahan	
12	Indeks Infrastruktur	Indeks	69,04	69	70	Indikator sasaran	Melebihi target	Dinas PUPR, Perkim dan Dishub	
13	Luas kawasan lindung	Ha	40.647,38	40.647,38	40.647,38	Indikator sasaran	Tercapai	DLHK	
14	Luas daerah aliran irigasi	Ha	2.878,22	2.878,22	2.878,22	Indikator sasaran	Tercapai	Dinas PUPR	
15	Persentase pelayanan pertanahan yang tertangani	Persen	80	85	94,12	Indikator sasaran	Belum Tercapai	Dinas Pertanahan	
16	Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, dan tanah)	Indeks	71,27	80	81	Indikator sasaran	Belum Tercapai	DLHK	
17	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1,72	1,3	1,1	Indikator Tujuan	Belum Tercapai	Satpol PP & WH,	
18	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen	77,9	77,9	80,05	Indikator sasaran	Tercapai	Bankesbangpol	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
19	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	Persen	0,8	0,8	0,9	Indikator sasaran	Tercapai	Dinsos dan BPBD	
Unsur Kekhususan									
20	Cakupan pembinaan Syariat Islam	Indeks	100	94,91	100	Indikator Tujuan	Melebihi Target	DSI	
21	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	0,95	0,97	0,95	Indikator Sasaran	Belum Tercapai	DSI	
22	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	609	609	Indikator Program	Tercapai	DSI	
23	Persentase kasus pelanggaran qanun yang diselesaikan	Persen	100	90	92	Indikator Program	Melebihi Target	Satpol PP dan WH	
24	Persentase Sidang yang menghasilkan keputusan	sidang	40	90	90	Indikator Program	Melebihi Target	Sekreteriat MPU	
25	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	Indikator Program	Belum Tercapai	Seluruh Kecamatan	Tidak ada pada tahun 2021
26	Jumlah Pembinaan Adat dan Adat Istiadat	Pembinaan	3	3	7	Indikator Program	Tercapai	MAA	
Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
Urusan pemerintahan bidang pendidikan									
27	Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan pendidikan berkarakter	Persen	100	50	55	Indikator Program	Melebihi Target	MPA	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
28	Jumlah Dayah naik kelas	Dayah	46	135	135	Indikator Program	Belum Tercapai	Disdik Dayah	
29	APM Pendidikan dasar 9 tahun	Nilai	83,06	99,38	99,43	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	
30	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal	Persen	-	-	75	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	Tidak ada pada tahun 2021
31	Persentase Guru yang Berkompetensi	Persen	54,12	80	86	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	
Urusan pemerintahan bidang kesehatan									
32	Indeks Kepuasan Masyarakat	SKOR	A	B	B	Indikator Program	Melebihi Target	Dinkes & RSUD dr. Fauziah	Data dinkes belum masuk
33	Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar	PKM	19	20	20	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinkes	
34	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	98,39	80	85	Indikator Program	Melebihi Target	RSUD dr. Fauziah	
35	Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang Diawasi	Sarana	422	187	196	Indikator Program	Melebihi Target	Dinkes	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
36	Jumlah UKBM yang Aktif	UKBM	970	-	1.749	Indikator Program		Dinkes	Tidak ada dalam perencanaan 2021
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang									
37	Jumlah aparatur jasa konstruksi yang bersertifikat	Orang	-	175	400	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
38	Persentase KK yang memiliki sanitasi layak	Persen	3,09	2,8	3.20	Indikator Program	Melebihi Target	Dinas PUPR	
39	Persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang tertangani banjir	Persen	40	60	70	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
40	Persentase Gedung Pemerintah yang terbangun	Persen	30	40	45	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
41	Persentase Gedung Pemerintah dan lingkungannya yang terpelihara	Persen	-	-	80	Indikator Program		Dinas PUPR	Tidak ada pada tahun 2021
42	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Persen	79,36	60	70	Indikator Program	Melebihi Target	Dinas PUPR	
43	Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	51,19	60	63	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
44	Cakupan akses air minum	Persen	86,7	75	80	Indikator Program	Melebihi Target	Dinas PUPR	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
45	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	Persen	226	70	75	Indikator Program	Melebihi Target	Dinas PUPR	
Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman									
46	Jumlah rumah layak huni	Unit	14	175	352	Indikator Program	Belum Tercapai	Perkim	
47	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	9,26	57	50	Indikator Program	Melebihi Target	Perkim	Indikator Penurunan
48	Persentase kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak	Persen	33,33	45	47	Indikator Program	Belum Tercapai	Perkim	
49	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang memiliki sertifikasi	Pengembang perumahan	-	-	2	Indikator Program		Perkim	Tidak ada pada tahun 2021
Urusan pemerintahan bidang sosial									
50	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persen	-	-	75	Indikator Program		Dinsos	Tidak ada pada tahun 2021
51	Persentase terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin	Persen	85	80	85	Indikator Program	Melebihi Target	Dinsos	
52	Persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial masyarakat	Persen	85,71	80	85	Indikator Program	Melebihi Target	Dinsos	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
53	Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial	Persen	43,02	80	85	Indikator Program	Belum tercapai	Dinsos	
54	Tertanganinya sandang dan pangan korban bencana	Persen	79	90	95	Indikator Program	Belum tercapai	Dinsos	
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
Urusan pemerintahan bidang pertanahan									
55	Persentase Tanah yang bersertifikat	Persen	28,3	54	66	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas Pertanahan	
56	Adanya aplikasi sistem informasi pertanahan	Ada/ Tidak	-	-	Ada	Indikator Program		Dinas Pertanahan	Tidak ada pada tahun 2021
57	Persentase Penatagunaan Tanah sesuai dengan peruntukannya	Persen	-	-	55	Indikator Program		Dinas Pertanahan	Tidak ada pada tahun 2021
58	Persentase pengadaan tanah yang difasilitasi	Persen	80	80	90	Indikator Program	Tercapai	Dinas Pertanahan	
59	Persentase masyarakat terdampak yang disantuni	Persen	0	95	95	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas Pertanahan	
60	Persentase tanah terlantar dan absente yang didistribusi	persen	35,65	54	66	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas Pertanahan	
61	Persentase kasus konflik dan sengketa yang tertangani	Persen	80	80	85	Indikator Program	Tercapai	Dinas Pertanahan	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup									
62	Indeks Kualitas Air	Indeks	0,65	0<1	0<1	Indikator Program	Tercapai	DLHK	
63	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Kasus	-	-	2	Indikator Program		DLHK	Tidak ada pada tahun 2021
64	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	45	88	90	Indikator Program	Belum Tercapai	DLHK	
Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
65	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	97,5	95,2	98	Indikator Program	Melebihi Target	Disdukcapil	
66	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	68,75	95	98	Indikator Program	Belum Tercapai	Disdukcapil	
67	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	99,67	95	98	Indikator Program	Melebihi Target	Disdukcapil	
68	Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	2	Indikator Program	Tercapai	Disdukcapil	
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa									
69	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan penataan gampong	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Indikator Program	Tercapai	DPMGPKB	
70	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan dan Sistem pengelolaan keuangan yang baik	Persen	85	85	87	Indikator Program	Tercapai	DPMGPKB	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
71	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga	5	4	5	Indikator Program	Melebihi Target	DPMGPKB	
Urusan pemerintahan bidang perhubungan									
72	Persentase pelayanan lalu lintas	Persen	57,9	65	70	Indikator Program	Belum Tercapai	Dishub	
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika									
73	Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	Peringkat	85	97	97	Indikator Program	Belum Tercapai	Diskominsan	
74	Indeks SPBE	Nilai	2,06	1,8	2,6	Indikator Program	Melebihi Target	Diskominsan	
Urusan pemerintahan bidang statistik									
75	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persen	100	100	100	Indikator Program	Tercapai	Diskominsan	
Urusan pemerintahan bidang persandian									
76	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Tingkat		I+	II	Indikator Program	Belum Tercapai	Diskominsan	Terkendala SDM
Urusan pemerintahan bidang kebudayaan									
77	Peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir	Persen	40	50	60	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
78	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kelompok	20	25	45	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	
79	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen	12,5	70	80	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas PK	
80	Persentase museum yang dikelola	Persen	100	100	100	Indikator Program	Tercapai	Dinas PK	
Urusan pemerintahan bidang perpustakaan									
81	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	4.819	7.038	14.318	Indikator Program	Belum Tercapai	Dinas Perpus Arsip	
Unsur pendukung urusan pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
83	Cakupan Rekomendasi/ Naskah Dinas yang terselesaikan	persen	100	90	100	Indikator Program	Melebihi Target	Setda Bag; Keistimewaan Aceh dan Kesra, hukum, Perekonomian dan SDA, Adm. Pembangunan, Organisasi dan Pemerintahan	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
84	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	persen	100	90	100	Indikator Program	Melebihi Target	Setda Bag;, Pemerintahan, organisasi, Umum, dan Prokopim	
Sekretariat DPRK									
85	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	23	60	65	Indikator Program	Belum tercapai	Sekretariat DPRK	
Unsur penunjang urusan pemerintahan									
Perencanaan									
86	Persentase Kesesuaian Penganggaran antara APBD dengan RPJM	Persen	100,99	90	95	Indikator Program	Melebihi Target	BAPPEDA	
87	Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBK	Dokumen	99,04	100	100	Indikator Program	Belum tercapai	BAPPEDA	
Keuangan									
88	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	persen	94,75	97	98	Indikator Program	Belum Tercapai	BPKD	
89	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	persen	99,9	100	100	Indikator Program	Belum Tercapai	BPKD	
Kepegawaian									
90	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	persen	95,81	70	80	Indikator Program	Melebihi target	BKPSDM	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
	Pendidikan dan pelatihan								
91	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih	persen	75,5	80	85	Indikator Program	Belum Tercapai	BKPSDM	
	Penelitian dan pengembangan								
92	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	persen	98	85	90	Indikator Program	Melebihi target	BAPPEDA	
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan								
	Inspektorat daerah								
93	Persentase Kepatuhan dalam Pelaporan Keuangan dan kinerja	persen	92,3	75	80	Indikator Program	Melebihi Target	Inspektorat	
94	Penurunan Jumlah Kasus Kesalahan Prosedur Pengelolaan Dana APBK	kasus	0	6	4	Indikator Program	Belum Tercapai	Inspektorat	Tidak terlaksana tahun 2021
	Unsur Kewilayahan								
	Kecamatan								
95	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	persen	100	75	75	Indikator Program	Melebihi Target	Seluruh Kecamatan	
96	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	99,65	90	90	Indikator Program	Melebihi Target	Seluruh Kecamatan	
97	Cakupan koordinasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks	100	80	80	Indikator Program	Melebihi Target	Seluruh Kecamatan	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
	Unsur Pemerintahan Umum								
	Kesatuan bangsa dan politik								
98	Persentase peserta partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen	81,8	87	92	Indikator Program	Belum Tercapai	Bankesbangpol	
	Aspek Daya Saing Daerah								
99	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,91	67,09	67,1	Indikator Tujuan	Belum Tercapai	Disnakertrans	
100	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,32	4	3,95	Indikator Sasaran	Belum Tercapai	Disnakertrans	
101	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Milyar Rupiah	4.525,30	4.441,60	4.725,31	Indikator Sasaran	Melebihi target	Distanbun	
102	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM dan Koperasi	133	230	315	Indikator Sasaran	Belum Tercapai	DPPKUKM	
103	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Juta Rupiah	150,24	235,98	248,89	Indikator Sasaran		DPPKUKM	Belum ada data
104	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	8,77	8,15	8,29	Indikator Sasaran	Melebihi target	BPKD	
105	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	93	95	Indikator sasaran	Melebihi target	Disporapar	
106	Jumlah destinasi wisata	Destinasi	59	54	65	Indikator sasaran	Melebihi target	Disporapar	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
	Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat								
107	Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/Darurat Bencana dan Penanganan Bencana	Persen	100	100	100	Indikator Program	Tercapai	BPBD	
108	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	Persen	92,8	100	100	Indikator Program	Belum Tercapai	BPBD	
	Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar								
	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja								
109	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	16	160	224	Indikator Program	Belum tercapai	Disnakertrans	
110	Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Orang	58	150	200	Indikator Program	Belum tercapai	Disnakertrans	
111	Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Orang	58	50	70	Indikator Program	Melebihi Target	Disnakertrans	
	Urusan pemerintahan bidang pangan								
112	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	Persen	103	33,25	34,55	Indikator Program	Melebihi Target	DPKP	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
113	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor	71,6*	80,2	84,6	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
114	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	9,49	50	66	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
115	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	87	80	85	Indikator Program	Melebihi Target	DPPKUKM	
Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah									
116	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Koperasi		20	20	Indikator Program		DPPKUKM	Tidak ada pada tahun 2021
117	Persentase Koperasi yang mendapat pengawasan	Persen	-	20	20	Indikator Program		DPPKUKM	Tidak ada pada tahun 2021
118	Persentase Koperasi yang dinilai	Persen	-	12	12	Indikator Program		DPPKUKM	Tidak ada pada tahun 2021
119	Persentase pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen	8,15	14	21	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
120	Persentase Koperasi Aktif	Persen	72,94	74,38	78.51	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
121	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	15	50	125	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
122	Jumlah UMKM yang naik kelas	UMKM	3	3	6	Indikator Program	Tercapai	DPPKUKM	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
Urusan pemerintahan bidang penanaman modal									
123	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin	Pelaku Usaha	680	630	630	Indikator Program	Melebihi Target	DPMPTSP	
124	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin	Persen	80	30	60	Indikator Program	Melebihi Target	DPMPTSP	
125	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Persen	100	85	90	Indikator Program	Melebihi Target	DPMPTSP	
126	Jumlah Realisasi Investasi	Perusahaan/ Pelaku usaha	186	400	700	Indikator Program	Belum tercapai	DPMPTSP	
127	Persentase partisipan/ma-syarakat yang mengurus izin berbasis elektronik	Persen	62	50	75	Indikator Program	Melebihi Target	DPMPTSP	
Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga									
128	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	100	93	95	Indikator Program	Melebihi Target	Disporapar	
129	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali di even provinsi	Persen	24	20	25	Indikator Program	Melebihi Target	Disporapar	
130	Persentase kepramukaan yang aktif	Persen	100	100	100	Indikator Program	Tercapai	Disporapar	
Urusan pemerintahan pilihan									
Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan									
131	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12.983	13.000	62.600	Indikator Program	Belum tercapai	DPKP	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
132	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.074	13.500	64.500	Indikator Program	Belum tercapai	DPKP	
133	Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	-	-	55	Indikator Program		DPKP	Tidak ada pada tahun 2021
134	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	153	1.400	6.500	Indikator Program	Belum tercapai	DPKP	
Urusan pemerintahan bidang pariwisata									
135	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	35,59	85	90	Indikator Program	Belum tercapai	Disporapar	
136	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	0	70	75	Indikator Program	Belum tercapai	Disporapar	
137	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen	3	50	55	Indikator Program	Belum tercapai	Disporapar	
Urusan pemerintahan bidang pertanian									
138	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao	Persen	3,37	5	5	Indikator Program	Belum tercapai	Distanbun	
139	Jumlah PDRB sektor pertanian	Triliun Rupiah	3,1	4.6	4.8	Indikator Program	Belum tercapai	Distanbun	
140	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	100	75	80	Indikator Program	Melebihi Target	Distanbun	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
141	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok	10	8	9	Indikator Program	Melebihi Target	Distanbun	
Urusan pemerintahan bidang kehutanan									
142	Rasio RTH yang Tertangani	persen	12,12	30	40	Indikator Program	Belum tercapai	DLHK	
Urusan pemerintahan bidang perdagangan									
143	Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki perizinan dan pendaftaran	Persen	80	50	50	Indikator Program	Melebihi Target	DPPKUKM	
144	Persentase pengelolaan sarana perdagangan yang berfungsi	Persen	71,79	30	30	Indikator Program	Melebihi Target	DPPKUKM	
145	Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Indikator Program	Tercapai	DPPKUKM	
146	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen di kecamatan	Persen	44,36	100	100	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	
147	Jumlah produk unggulan daerah	Produk unggulan	2	2	4	Indikator Program		DPPKUKM	Belum ada data
Urusan pemerintahan bidang perindustrian									
148	Jumlah pelaku usaha industry	Pelaku usaha	3.054	1.592	1.600	Indikator Program	Melebihi Target	DPPKUKM	
149	Tersedianya data industry dalam Sistem Industri Nasional (SINAS)	Ya/ Tidak	Tidak	Ya	Ya	Indikator Program	Belum tercapai	DPPKUKM	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Interpretasi	SKPK	Keterangan
Unsur penunjangg urusan pemerintahan									
Keuangan									
150	Persentase Realisasi PAD	Persen	101,74	100	100	Indikator Program	Melebihi Target	BPKD	
Unsur pemerintahan umum									
Kesatuan bangsa dan politik									
151	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	82,4	83	93	Indikator Program	Belum tercapai	Bankesbangpol	
152	Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Persen	50	70	70	Indikator Program	Belum tercapai	Bankesbangpol	
153	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	84,6	87	92	Indikator Program	Belum tercapai	Bankesbangpol	
154	Persentase deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	75	60	75	Indikator Program	Melebihi Target	Bankesbangpol	

BAB II

GAMBARAN UMUM

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan dengan hal tersebut untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Struktur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah, dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu: (1). Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan (2). Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum komponen APBK Bireuen terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung; serta (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang dikompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran umum tentang ketercapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen, serta implementasi program dan kegiatan pembangunannya. Berdasarkan perkembangan APBK Bireuen sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap kemampuan APBK Kabupaten Bireuen.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 4 (empat) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bireuen, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBK maka analisis kinerja pelaksanaan APBK dilakukan terhadap APBK serta analisis kinerja pelaksanaan APBK yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBK tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBK setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBK disajikan berikut ini.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Terdapat perbedaan pada struktur Pendapatan Daerah yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun

2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu terdapat rincian lain berupa dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian juga terdapat rincian pada transfer antar daerah yang tidak terdapat pada PP 58 Tahun 2005. Lebih lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019:

- 1) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Pendapatan transfer yang berasal dari (a). pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan; (b). pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain pendapatan.

Kinerja APBK Kabupaten Bireuen tahun 2015 hingga tahun 2021 menunjukkan tren realisasi komponen pendapatan yang berfluktuatif, baik komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah. Realisasi pendapatan terendah pada tahun 2015 dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari objek pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat, dan transfer dana perimbangan. Realisasi pendapatan tertinggi tahun 2017 seiring meningkatnya penerimaan retribusi daerah, penerimaan dari transfer dana perimbangan, serta pendapatan hibah.

Terjadinya defisit anggaran pada tahun 2015, 2017, dan 2018 dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja yang tidak berimbang dengan realisasi pendapatan. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang cenderung optimis. Sementara itu, surplus anggaran terjadi pada tahun 2016, 2018, 2020, dan 2021, hal ini disebabkan realisasi belanja lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Lebih lanjut pertumbuhan realisasi pendapatan daerah disajikan secara serial dalam dua tabel terpisah dikarenakan adanya perubahan struktur pendapatan pada PP Nomor 12 Tahun 2019. Mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018

Kode	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)				Rata-Rata pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	PENDAPATAN	1.667.681.314.398,74	1.837.712.229.968,30	2.109.498.338.090,95	1.753.502.126.161,49	2,70%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173.972.782.734,16	186.162.575.752,23	192.929.858.236,27	179.476.248.778,22	1,22%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.648.407.313,00	16.536.779.057,00	19.705.519.346,00	19.816.013.640,00	4,47%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.862.066.190,00	13.510.255.196,00	10.889.296.091,00	10.000.884.640,00	-12,22%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.869.061.663,00	4.916.471.188,70	4.954.350.869,68	4.963.058.317,00	0,64%
1.1.4	Pendapatan Zakat	-	4.059.969.268,00	3.256.090.814,37	6.938.076.478,50	46,64%
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.593.247.568,16	147.139.101.042,53	154.124.601.115,22	137.758.215.702,72	0,62%
1.2	Dana Perimbangan	984.896.515.695,00	1.120.470.574.800,00	1.156.115.277.116,00	1.064.479.927.363,00	3,01%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26.200.824.745,00	24.712.964.929,00	25.181.784.393,00	17.223.780.413,00	-11,79%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	780.023.926.000,00	816.856.418.000,00	802.506.877.000,00	781.884.222.840,00	0,13%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.671.764.950,00	278.901.191.871,00	328.426.615.723,00	265.371.924.110,00	18,22%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	508.812.015.969,58	531.079.079.416,07	760.453.202.738,68	509.545.950.020,27	4,86%

Kode	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)				Rata-Rata pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	
1.3.1	Pendapatan Hibah	92.936.000,00	288.629.000,00	72.176.001.923,00	39.356.243.050,00	8357,20%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	30.839.462.560,58	43.250.464.506,07	37.216.925.374,68	44.720.852.970,27	15,49%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351.220.439.000,00	361.336.571.000,00	506.313.644.584,00	425.468.854.000,00	9,01%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	126.659.178.409,00	126.203.414.910,00	144.746.630.857,00	-	-28,56%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen
Tahun 2019-2022

Kode	Uraian	Tahun (Rp.)				Rata-Rata pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021*	2022**	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.942.346.689.900,92	1.893.665.166.449,81	1.890.020.475.615,56	1.895.844.382.365,00	-0,80%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.528.834.490,69	162.162.621.716,81	149.096.313.132,56	183.559.608.297,00	6,22%
4.1.1	Pajak Daerah	22.232.789.426,00	18.756.911.441,00	22.193.937.966,00	29.900.000.000,00	12,47%
4.1.2	Retribusi Daerah	11.219.360.112,00	10.227.641.020,00	9.601.101.550,00	13.226.666.000,00	7,60%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.972.440.041,00	4.971.510.774,00	4.229.816.175,00	6.500.000.000,00	12,91%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	118.104.244.911,69	128.206.558.481,81	113.071.457.441,56	133.932.942.297,00	3,32%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.733.382.606.477,23	1.675.263.514.878,00	1.711.567.663.286,00	1.709.237.610.572,00	-0,44%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.347.115.543,00	1.612.867.695.658,00	1.584.294.016.415,00	1.563.669.533.753,00	-0,42%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.107.652.778.543,00	1.046.763.645.623,00	1.101.399.572.786,00	1.121.371.634.753,00	0,51%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	22.696.675.000,00	8.370.650.000,00	27.803.658.000,00	-	23,01%
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	102.211.815.035,00	-	-	0,00%
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	453.997.662.000,00	455.521.585.000,00	455.090.785.629,00	442.297.899.000,00	-0,86%

Kode	Uraian	Tahun (Rp.)				Rata-Rata pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021*	2022**	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.035.490.934,23	62.395.819.220,00	127.273.646.871,00	145.568.076.819,00	20,07%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	149.035.490.934,23	47.395.819.220,00	31.877.305.889,00	38.050.898.188,00	-27,19%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	15.000.000.000,00	95.396.340.982,00	107.517.178.631,00	182,89%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.435.248.933,00	56.239.029.855,00	29.356.499.197,00	3.047.163.496,00	-43,39%
4.3.1	Pendapatan Hibah	52.435.248.933,00	56.239.029.855,00	13.850.488.597,00	3.047.163.496,00	-48,71%
4.3.1.1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	-	-	13.850.488.597,00		0,00%
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	-	-		0,00%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	15.506.010.600,00		0,00%
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	-	-	15.506.010.600,00		0,00%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2020

*Angka Sementara

**Penetapan APBK 2022

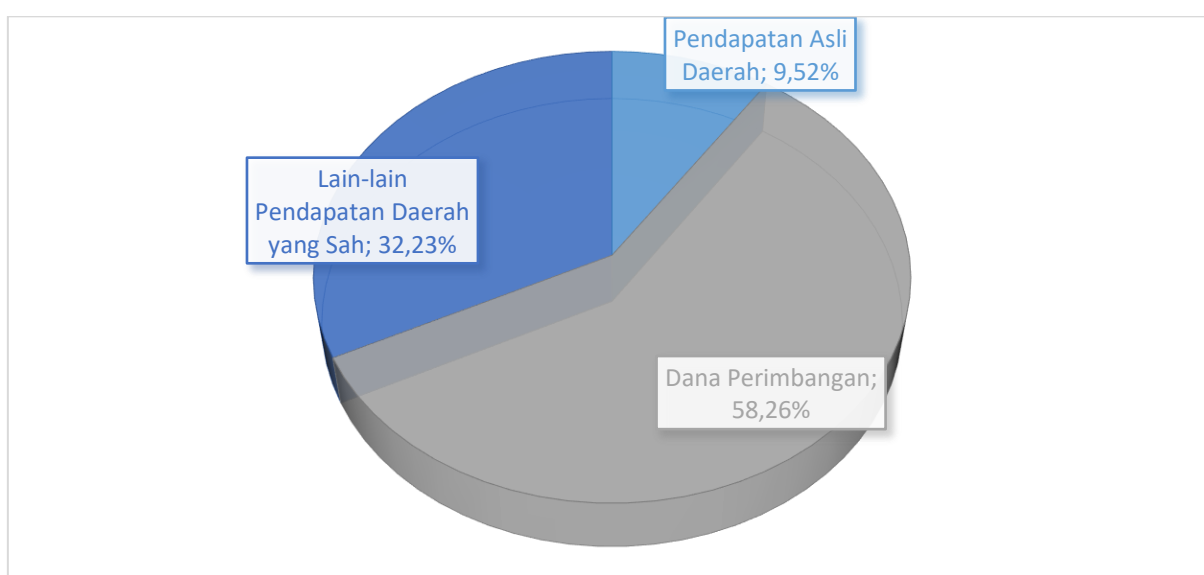
Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung menurun rata-rata 0,80 persen tiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2022, hal ini disebabkan dari beberapa sumber pendapatan yang mengalami penurunan yang relatif besar antara lain dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah (dari sumber pendapatan hibah) yang mengalami penurunan sebesar -43,93 persen, selanjutnya dari sumber penerimaan pendapatan bagi hasil yaitu sebesar -27,19 persen. Sementara itu terdapat juga pertumbuhan pendapatan yang relatif besar yaitu dari sumber Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 23,01 persen, disusul dari sumber bantuan keuangan (pendapatan transfer antar daerah) sebesar 182,89 persen serta yang mengalami pertumbuhan pendapatan dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 12,91 persen. Demikian halnya pendapatan asli daerah Kabupaten Bireuen selama 4 tahun tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,22 persen. Sementara itu pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penurunan rata-rata sebesar -0,42 persen setiap tahunnya selama Tahun 2019-2021.

Menurunnya pertumbuhan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah ini dikarenakan besarnya penurunan penerimaan pada kelompok pendapatan hibah sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan rata-rata sebesar 48,71 persen, sementara untuk pendapatan dari sumber pendapatan hibah pemerintah pusat, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak diperoleh lagi sejak tahun 2022.

Memperlihatkan gambaran pendapatan daerah berdasarkan struktur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan menurun sebesar 0,8 persen setiap tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pendapatan yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan yang sangat baik dari tahun 2019 yaitu sebesar 6,22 persen setiap tahunnya, demikian juga pada kelompok pendapatan transfer yang menurun rata-rata sebesar 0,44 persen. Meskipun tahun 2021 masih merupakan angka sementara dan sedangkan untuk tahun 2022 merupakan angka yang terdapat dalam penetapan APBK tahun 2022, namun Pemerintah Kabupaten Bireuen tetap optimis target yang telah ditetapkan terealisasi.

Sementara itu adanya perubahan struktur pendapatan daerah pada kelompok pendapatan transfer yang mana pada PP Nomor 12 Tahun 2019

memberi rincian pada DBH, DAU, dan DAK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 293 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah dalam pendapatan transfer pada transfer pemerintah pusat. dana perimbangan dirinci lagi menjadi dana transfer umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan dana transfer khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut ini disajikan gambar rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.



Gambar 3. 1
Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2022

Dari Gambar 3.1 diatas tergambar bahwa rata-rata proporsi komponen pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 58,26 persen. Disusul oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 32,23 persen dan pendapatan asli daerah sebesar 9,52 persen dari seluruh total pendapatan.

Rincian dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Satu satu komponen pendapatan yang tidak mengalami perubahan pada PP nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah PAD, sehingga dapat kita lihat pertumbuhannya dari awal pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. Rata-rata perkembangan PAD selama periode RPJM 2017-2022 yaitu mengalami kontraksi sebesar -0,22 persen, hal ini disebabkan oleh kontraksinya penerimaan dari sumber lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar -2,25 persen. Namun demikian juga terdapat

pertumbuhan yang positif yaitu komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan. Pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 10,03 persen, disusul oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 7,82 persen, pendapatan retribusi daerah meningkat rata rata sebesar 5,36 persen tiap tahun dan pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,25 persen setiap tahunnya sepanjang tahun 2017-2022.

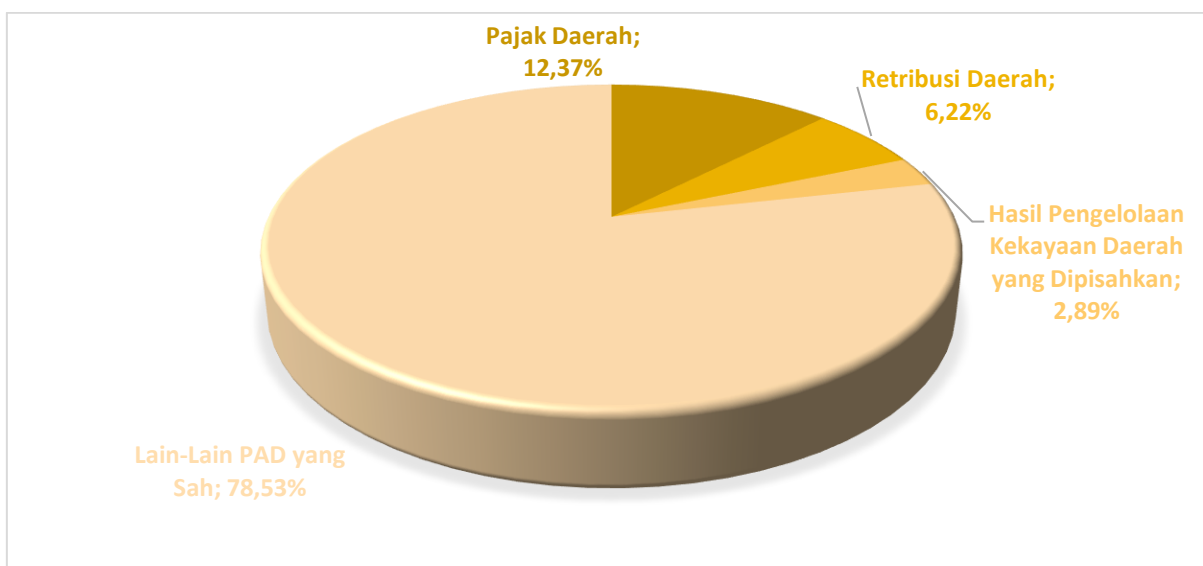
Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2022

Kode	Uraian	Tahun (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.109.498.338.090,95	1.753.502.126.161,49	1.942.346.689.900,92	1.893.665.166.449,81	1.890.020.475.615,56	1.895.844.382.365,00	(1,70)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.929.858.236,27	179.476.248.778,22	156.528.834.490,69	162.162.621.716,81	149.096.313.132,56	183.559.608.297,00	(0,22)
4.1.1	Pajak Daerah	19.705.519.346,00	19.816.013.640,00	22.232.789.426,00	18.756.911.441,00	22.193.937.966,00	29.900.000.000,00	10,03
4.1.2	Retribusi Daerah	10.889.296.091,00	10.000.884.640,00	11.219.360.112,00	10.227.641.020,00	9.601.101.550,00	13.226.666.000,00	5,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.954.350.869,68	4.963.058.317,00	4.972.440.041,00	4.971.510.774,00	4.229.816.175,00	6.500.000.000,00	7,82
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	157.380.691.929,59	144.696.292.181,22	118.104.244.911,69	128.206.558.481,81	113.071.457.441,56	133.932.942.297,00	(2,25)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020

*Angka Sementara

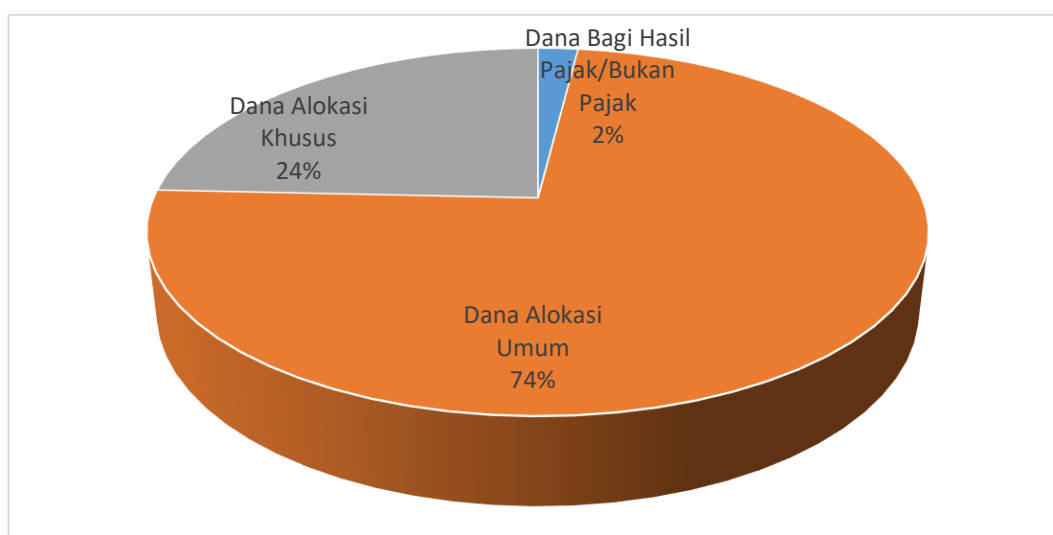
**Penetapan APBK 2022



Gambar 3. 2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

2. Dana Perimbangan

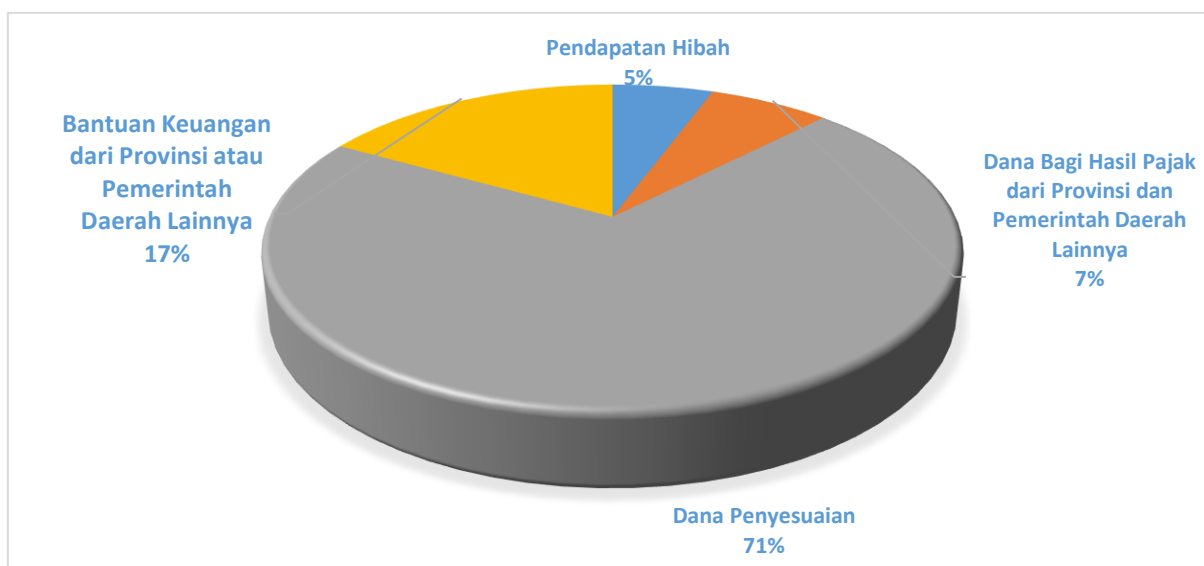
Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2017-2022 berasal dari dana alokasi khusus sebesar 24,29 persen dan dana alokasi umum sebesar 73,74 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,97 persen merupakan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.



Gambar 3. 3
Rata-rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain pendapatan yang sah berasal dari dana penyesuaian sebesar 70,87 persen dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 17 persen, sisanya 7 persen dari dana bagi hasil dan 5 persen dari pendapatan hibah.

**Gambar 3. 4****Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020****3.1.1.2 Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Kabupaten Bireuen dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Terdapat perbedaan pada struktur belanja daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada klasifikasi belanja daerah, perbandingan antara struktur belanja daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbedaan Struktur Belanja Daerah Dalam APBK

PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. Belanja Operasi, dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Bunga; 4) Belanja Subsidi; 5) Belanja Hibah; dan 6) Belanja Bantuan Sosial. b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga d. Belanja Transfer, dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan.	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a. Belanja pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja modal; d. Bunga; e. Subsidi; f. Hibah; g. Bantuan sosial; h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan i. Belanja tidak terduga.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional. Besarnya belanja daerah di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan.

Pertumbuhan realisasi belanja daerah disajikan secara serial dalam dua tabel terpisah dikarenakan adanya perubahan struktur pendapatan pada PP Nomor 12 Tahun 2019. Mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2015-2018

Kode	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	
2	BELANJA	1.607.649.017.634,41	1.936.610.656.833,08	2.068.972.376.645,53	1.761.174.172.771,00	4,14
2.1	Belanja Tidak Langsung	971.051.833.992,41	1.289.014.973.917,33	1.230.335.915.880,13	1.192.022.484.204,00	8,36
2.1.1	Belanja Pegawai TL	733.948.025.605,41	788.379.887.911,43	662.479.425.064,00	677.205.417.699,00	(2,11)
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	10.598.900.000,00	29.880.000.000,00	25.825.676.199,13	8.865.547.000,00	34,23
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.692.500.000,00	4.442.450.000,00	3.270.500.000,00	3.292.000.000,00	(31,49)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	3.981.914.697,00	1.449.635.688,00	2.470.185.000,00	3,4
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	220.814.051.387,00	460.358.608.308,90	536.265.945.929,00	499.380.567.755,00	39,36
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	998.357.000,00	1.972.113.000,00	1.044.733.000,00	808.766.750,00	9,31
2.2	Belanja Langsung	636.597.183.642,00	647.595.682.915,75	838.636.460.765,40	569.151.688.567,00	(0,30)
2.2.1	Belanja Pegawai L	98.659.998.489,00	93.981.696.028,00	103.037.323.088,00	91.699.940.516,00	(2,04)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.110.660.961,00	250.246.082.538,00	325.319.046.357,90	316.661.888.135,00	10,96
2.2.3	Belanja Modal	300.826.524.192,00	303.367.904.349,75	410.280.091.319,50	160.789.859.916,00	(8,24)
	Surplus/(defisit)	60.032.296.704,33	(98.898.426.864,78)	40.525.961.445,42	(7.672.046.609,51)	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2019-2022

Kode	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021*	2022**	
5	BELANJA	1.926.156.612.167,83	1.888.989.860.025,61	1.937.283.863.121,00	1.907.943.598.823,00	(0,30)
5.1	BELANJA OPERASI	1.088.376.440.066,83	1.037.105.248.459,61	1.063.344.673.227,00	1.137.829.784.831,00	1,61
5.1.1	Belanja Pegawai	751.753.772.202,00	758.415.670.316,00	680.990.356.966,00	755.476.087.272,00	0,54
5.1.2	Belanja Barang	322.146.099.437,70	265.690.742.391,16	316.413.849.135,00	301.580.980.234,00	(1,04)
5.1.5	Belanja Hibah	12.157.150.000,00	10.709.700.000,00	48.549.052.272,00	63.156.881.425,00	123,83
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.319.418.427,13	2.289.135.752,45	17.391.414.854,00	17.615.835.900,00	219,91
5.2	BELANJA MODAL	295.399.475.653,00	235.210.628.805,00	333.443.438.545,00	236.314.823.091,00	(2,58)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	15.317.233.340,00	266.580.000,00	2.375.333.501,00	346,39
5.3.1.1	Belanja Tidak Terduga	-	15.317.233.340,00	266.580.000,00	2.375.333.501,00	346,39
5.4	BELANJA TRANSFER	542.380.696.448,00	601.356.749.421,00	540.229.171.349,00	531.423.657.400,00	(0,31)
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil	3.200.611.607,00	3.299.645.000,00	3.772.239.120,00	7.546.593.600,00	39,16
5.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	539.180.084.841,00	598.057.104.421,00	536.456.932.229,00	523.877.063.800,00	(0,58)
	Surplus/ (defisit)	16.190.077.733,09	4.675.306.424,20			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2020

*Angka Sementara

**Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.5 diperoleh gambaran periode tahun 2015-2018 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,14 persen. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,36 persen. Komponen belanja tidak langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja bantuan keuangan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,36 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2017 sebesar Rp. 536,265,945,929.00 berarti terdapat kenaikan sebesar Rp. 75,907,337,620.10.

Sedangkan dari data realisasi belanja langsung terjadi penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 0,30 persen. Walau demikian secara bertahap terjadi penurunan komponen belanja pegawai rata-rata sebesar 2,04 persen selama periode 2015-2018. Kondisi ini mendorong peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Berdasarkan Tabel 3.6 diperoleh gambaran periode Tahun 2019-2022 yang mana telah berlakunya PP Nomor 12 Tahun 2019 sehingga komponen belanja mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar 0,30 persen setiap tahunnya. Komponen Belanja Daerah yang paling besar pertumbuhannya adalah komponen Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata kenaikan sebesar 346,39 persen, pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2020. Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang stagnan sebesar 1,61 persen setiap tahun dengan kontribusi terbesar dari belanja bantuan sosial yang tumbuh rata-rata sebesar 219,91 persen tiap tahun. Perubahan komponen belanja hanya pada klasifikasi saja, sehingga jika dilihat pertumbuhan dari tahun 2015 hingga tahun 2022 maka didapatkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 1,92 persen setiap tahunnya.

3.1.1.3 Pembiayaan

Definisi pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Bireuen terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan pembiayaan kabupaten terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBK tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan cermat dan rasional;
2. Penyertaan modal kepada BUMD;
3. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.7 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 3.7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

Kode	Uraian	Tahun (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	
6	PEMBIAYAAN DAERAH (netto)	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	57.020.716.671,47	70.237.117.406,91	70.412.423.831,11	12.099.216.458,00	17,71
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	58.020.716.671,47	73.210.266.966,91	74.912.423.831,11	12.099.216.458,00	18,82
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	58.020.716.671,47	73.210.266.966,91	74.912.423.831,11	12.099.216.458,00	18,82
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir							
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			1.000.000.000,00	2.973.149.560,00	4.500.000.000,00	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	
6.2.5	Pemayaran Pokok Utang	-	-	-	473.149.560,00			
	Pemberian Pinjamam Daerah							
	Pebayaran Kegiatan Lanjutan							

Kode	Uraian	Tahun (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	
	Pengeluaran Perhitunagn Pihak ketiga							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	65.409.761.280,98	58.020.714.671,47	73.210.794.404,56	74.912.423.831,11	13.028.283.811,77	-	

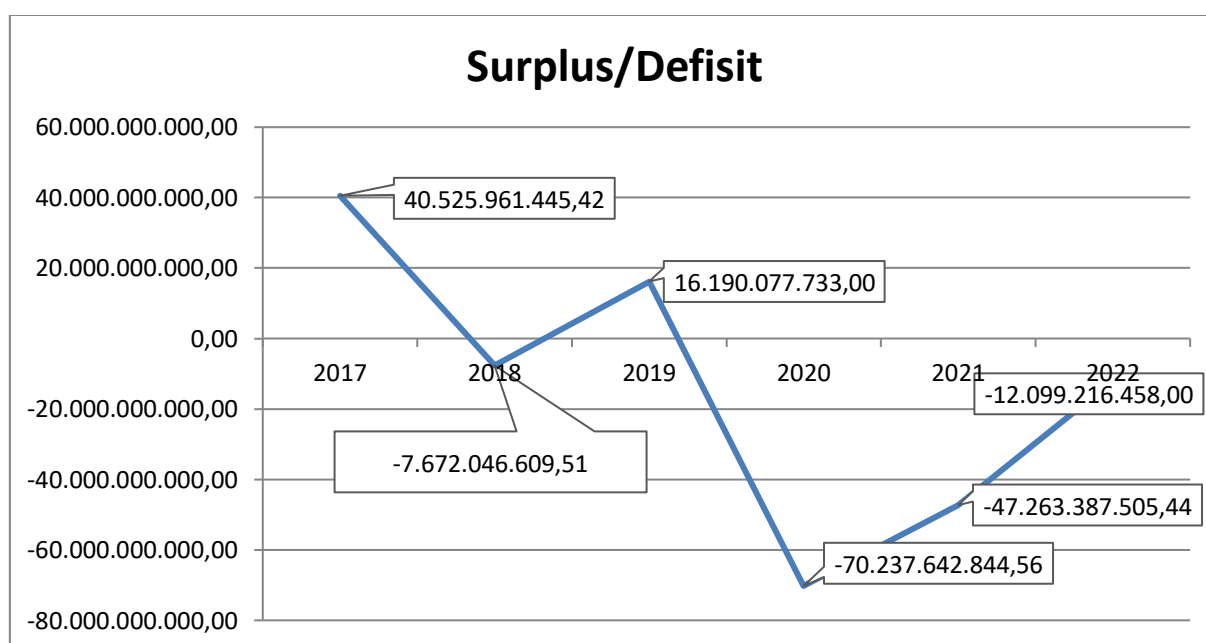
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020

*Angka Sementara

**Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dan semakin meningkat dengan kenaikan rata rata sebesar 17,71persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 18,82 persen.

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2017-2022 defisit terjadi pada tahun 2018, 2021, dan 2022. Sementara itu pada tahun 2017-2018 terjadi surplus, hal ini disebabkan karena realisasi belanja Kabupaten Bireuen lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan Kabupaten Bireuen pada tahun 2017-2018 tersebut. Selengkapnya gambar selisih pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 5
Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Pelampauan pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBK sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBK dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBK merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*.

3.1.2. Neraca Daerah

Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan ekuitas dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja, utang kelebihan pembayaran transfer, utang transfer bagi hasil pajak, utang transfer dana otsus, utang jangka pendek lainnya; 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bireuen serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca kabupaten merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Untuk tahun 2015-2021 aset Kabupaten Bireuen menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 7,09 persen. Rata-rata pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Bireuen dari komponen aset lancar tumbuh negatif sebesar -6,16 persen. Rata-rata pertumbuhan investasi jangka

panjang 5,67 persen. Sementara untuk Aset tetap rata-rata pertumbuhan sebesar 5,50 persen. Untuk rata rata pertumbuhan jumlah aset lainnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tumbuh sebesar 26,62 persen. Kewajiban pemerintah Kabupaten Bireuen untuk jangka pendek rata-rata mengalami penurunan yaitu sebesar 11,21 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Bireuen untuk jangka panjang rata-rata tidak mengalami perubahan. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,83 persen. Secara lengkap terkait neraca Kabupaten Bireuen dapat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

Kode	Uraian	Tahun (Rp.)						Rata-Rata pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET	2.335.073.157.416,85	2.459.340.619.281,32	2.826.169.035.794,03	2.850.283.924.349,81	3.163.869.086.138,26	3.269.871.809.410,21	7,09
1.1.	Aset Lancar	199.465.177.011,05	113.456.116.953,52	152.998.835.406,03	120.750.442.798,58	134.375.756.497,91	117.252.555.039,07	-6,16
1.2	Investasi Jangka Panjang	39.225.096.040,00	41.168.210.138,00	43.012.556.445,00	44.726.731.715,00	47.045.883.740,33	51.622.425.580,78	5,67
1.3	Aset Tetap	1.833.729.067.884,66	2.039.373.549.579,66	2.131.194.558.461,64	1.995.311.483.295,68	2.246.380.353.416,47	2.371.433.781.945,81	5,50
1.4	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
1.5	Aset Lainnya	262.653.816.481,14	265.342.742.610,14	498.963.085.481,36	689.495.266.540,55	736.067.092.483,55	729.563.046.844,55	26,62
2	KEWAJIBAN	125.066.152.733,32	144.900.278.885,11	148.633.841.116,59	88.019.779.138,87	68.277.442.297,51	66.091.637.063,40	-9,60
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	125.066.152.733,32	144.900.278.885,11	148.633.841.116,59	88.019.779.138,87	61.462.138.161,51	59.276.332.927,40	-11,21
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	6.815.304.136,00	6.815.304.136,00	0,00
3	EKUITAS DANA	2.210.007.004.683,53	2.314.440.340.396,21	2.677.535.194.677,44	2.762.264.145.210,94	3.095.591.643.840,75	3.203.780.172.346,81	7,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.335.073.157.416,85	2.459.340.619.281,32	2.826.169.035.794,03	2.850.283.924.349,81	3.163.869.086.138,26	3.269.871.809.410,21	7,09

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, selama tahun 2015-2020 jumlah aset mengalami perkembangan, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,09 persen. Aset tersebut terdiri atas: aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen); Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan); dana cadangan; aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, asset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang memberikan informasi tentang hutang pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2015-2020 berfluktuasi dan terus menurun rata-rata 9,6 persen tiap tahunnya. Ekuitas Dana mengalami peningkatan dengan rata-rata 7,83 persen setiap tahunnya.

Informasi aset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Karena tujuan menggunakan rasio tersebut dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Analisi Rasio Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar (current ratio)	1,59	0,78	1,03	1,37	2,19	1,98
2	Rasio cepat (quick ratio)	1,44	0,58	0,79	1,14	1,93	1,67
3	Rasio total hutang terhadap total aset	5,66	6,26	5,55	3,18	2,21	2,06
4	Rasio hutang terhadap modal	5,36	5,89	5,26	3,09	2,16	2,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

A. Rasio Likuiditas

1. Rasio Lancar (*current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka

pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.10 rasio lancar pada tahun 2017 adalah sebesar 1,03 dan tahun 2020 sebesar 1,98.

Tabel 3.10
Current Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 (Rp. Juta)

No	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
1	2015	199.465,18	125.066,15	1,59
2	2016	113.456,12	144.900,28	0,78
3	2017	152.998,84	148.633,84	1,03
4	2018	120.750,44	88.019,78	1,37
5	2019	134.375,76	61.462,14	2,19
6	2020	117.252,56	59.276,33	1,98

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 3.11, quick rasio pada tahun 2017 sebesar 0,79 serta periode tahun 2020 quick rasio sebesar 1,67. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya hanya saja belum efisien dalam memanfaatkan aset yang dimiliki.

Tabel 3.11
Quick Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	Quick Ratio
1	2015	199.465,18	18.928,90	125.066,15	1,44
2	2016	113.456,12	28.900,78	144.900,28	0,58
3	2017	152.998,84	35.983,06	148.633,84	0,79
4	2018	120.750,44	20.563,63	88.019,78	1,14
5	2019	134.375,76	15.992,67	61.462,14	1,93
6	2020	117.252,56	18.487,62	59.276,33	1,67

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (*Total debt to equity ratio*)

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 5,55 dan pada tahun 2020 sebesar 2,06. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva cukup besar. Walaupun demikian, tren pertumbuhannya semakin menurun dari tahun ketahun.

Tabel 3.12
Total Debt to Equity Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

No	Tahun	Hutang	Ekuitas	Total Debt To Equity Ratio
1	2015	125.066,15	2.210.007,00	5,66
2	2016	144.900,28	2.314.440,34	6,26
3	2017	148.633,84	2.677.535,19	5,55
4	2018	88.019,78	2.762.264,15	3,18
5	2019	68.277,44	3.095.591,64	2,21
6	2020	66.091,64	3.203.780,17	2,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2017 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar 5,26 serta periode tahun 2020 sebesar 2,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih tinggi diatas nilai modal yang dimiliki Kabupaten Bireuen.

Tabel 3.13
Total Debt to Asset Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No	Tahun	Hutang	Aktiva	Total Debt To Asset Ratio
1	2015	125.066,15	2.335.073,16	5,36
2	2016	144.900,28	2.459.340,62	5,89
3	2017	148.633,84	2.826.169,04	5,26
4	2018	88.019,78	2.850.283,92	3,09
5	2019	68.277,44	3.163.869,09	2,16
6	2020	66.091,64	3.296.871,81	2,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 202 (diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bireuen merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari transfer baik pusat maupun provinsi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan arah dan strategi terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bireuen selama 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja OPD pengampu syarat-syarat untuk mendapatkan sumber dana;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi untuk dana perimbangan dan kecamatan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet;
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan;
 - f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;

- c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik di provinsi maupun pusat;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
 - c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

3.2.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program- program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Adapun belanja tidak langsung yang terdiri dari beberapa komponen yaitu belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan pada PP 12 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer yang mana pada dasarnya sama hanya berbeda pada klasifikasinya saja. Kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional;

4. Pendukungan terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG`s) dan *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
5. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah;
6. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
7. Pemenuhan anggaran penanganan Covid-19;
8. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

Proporsi penggunaan belanja disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah/pendapatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya penggunaan belanja diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga jika terjadi penurunan pendapatan, maka belanja yang harus disesuaikan adalah belanja untuk pembangunan.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan untuk pembayaran utang jangka pendek. Pembiayaan yang termuat dalam APBK Bireuen terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten. Pada sisi penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan dengan belanja merupakan surplus/defisit belanja. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja kabupaten dengan jumlah pendapatan kabupaten.

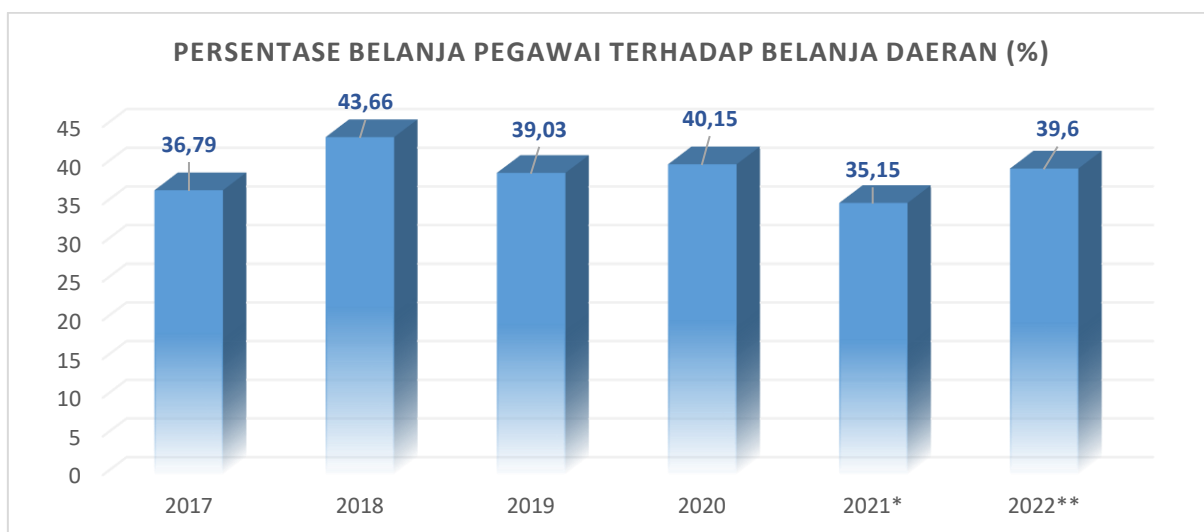
3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bireuen pada periode tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan

anggaran keuangan Kabupaten Bireuen antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan kebutuhan pembangunan. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Kebijakan umum keuangan Kabupaten Bireuen yang tergambar dalam pelaksanaan APBK yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja Kabupaten mengacu pada aturan yang melandasinya baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan daerah dalam konteks Aceh yang disebut Qanun. Anggaran pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah Kabupaten dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten dalam bentuk alokasi dana.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tujuan penghitungan persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah adalah untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Data belanja pegawai di sini adalah penjumlahan dari belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Persentase ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angkanya maka semakin besar proporsi APBK yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil proporsi APBK yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Gambar persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3. 6**

**Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (%)**

Persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukkan trend penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, namun untuk tahun 2022 yang mana merupakan angka proyeksi pada penetapan APBK TA 2022 merupakan tahun pertama Kabupaten Bireuen menerapkan perampingan birokrasi dengan adanya perubahan sistem organisasi dari struktural menjadi fungsional. Level struktural hanya menjadi dua level saja yakni eselon II dan eselon III, untuk eselon IV semua dialihkan dengan yang berbasis kompetensi sehingga konsekwensi yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah anggaran gaji pegawai yang harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut

Tabel 3.14

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2017	765,516,748,152.00	2,068,972,376,645.53	36.79
2	2018	768,905,358,215.00	1,761,174,172,771.00	43.66
3	2019	751,753,772,202.00	1,926,156,612,167.83	39.03
4	2020	758,415,670,316.00	1,888,989,860,025.61	40.15
5	2021*	680,990,356,966.00	1,937,283,863,121.00	35.15
6	2022**	755,476,087,272.00	1,907,943,598,823.00	39.60
Rata -Rata				38.96

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020 (diolah)

*Angka sementara

**Angka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, 2022

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja pegawai paling besar di tahun 2018 yaitu sebesar 43,66 persen dari total belanja daerah, sedangkan Tahun 2021 merupakan belanja yang paling rendah persentasenya yaitu 35,15 persen dibandingkan tahun-tahun lainnya, namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan pegawai.

Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan mengalami peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, ini menggambarkan perencanaan dan penganggaran telah berjalan maksimal dengan mencermati segala petunjuk pemerintah atasan dalam penetapan kebijakan.

3.2.5. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja kabupaten. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten. Analisis pembiayaan dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi sisa lebih perhitungan dan pembiayaan kabupaten untuk mengukur kinerja APBK.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2017 sampai 2022 pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	PENDAPATAN DAERAH	2.109.498.338.090,95	1.753.502.126.161,49	1.942.346.689.900,92	1.893.665.166.449,81	1.890.020.475.615,56	1.895.844.382.365,00
2	BELANJA DAERAH	2.068.972.376.645,53	1.761.174.172.771,00	1.926.156.612.167,83	1.888.989.860.025,61	1.937.283.863.121,00	1.907.943.598.823,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	1.000.000.000,00	2.973.149.560,00	4.500.000.000,00	-
A	Defisit Riil	40.525.961.445,42	(7.672.046.609,51)	15.190.077.733,09	1.702.156.864,20	(51.763.387.505,44)	(12.099.216.458,00)

Sumber : Laporan Realisasi Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020 (diolah)

*Angka Sementara

**Angka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	58.020.716.671,47	73.210.266.966,91	74.912.423.831,11	12.099.216.458,00
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir						
3	Koreksi						
B	Total Realisasi Penerimaan	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	58.020.716.671,47	73.210.266.966,91	74.912.423.831,11	12.099.216.458,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020 (diolah)

*Angka Sementara

**Angka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2017 sampai 2022, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2021 yaitu Rp 74.912.423.831,11 dan Posisi SiLPA terendah pada Tahun 2017 sebesar Rp 25.156.799.835,56. analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun (Rp)						Rata-rata pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	25.156.799.835,56	65.692.761.280,98	58.020.716.671,47	73.210.266.966,91	74.912.423.831,11	12.099.216.458,00	0,19%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020

*Angka Sementara

**Angka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan kabupaten adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, masing-masing permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kabupaten untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga isu-isu strategis yang muncul dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan,

sehingga perlu dilakukannya penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten.

Perumusan permasalahan dan isu strategis pada ruang lingkup Rencana Pembangunan Kabupaten yang menjadi prioritas utama dari Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bireuen

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bireuen merupakan kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gempa dan kawasan banjir, namun sistem mitigasi bencana Kabupaten Bireuen masih lemah.

Kabupaten Bireuen memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,77 persen di tahun 2021 dan penyebaran penduduk masih bertumpu pada kecamatan yang dekat dengan ibu kota Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai.

Masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 meningkat 4,13 persen lebih tinggi dari tahun 2020 yang terimbas *covid-19*, namun angka ini masih rendah dibandingkan dengan kondisi normal sebelum *covid-19* (tahun 2019) yang tumbuh 5,00 persen dan target RPJP Kabupaten Bireuen untuk pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5 persen pada tahun 2025;
- 2) Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen relatif tinggi dan mengalami kenaikan di tahun 2021 mencapai 13,25 persen, di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Selain itu indeks kedalaman kemiskinan Bireuen meningkat pada tahun 2021 mencapai 2,07 dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,95, sementara di tahun 2021 angka kedalaman kemiskinan nasional sebesar 1,67. Meningkatnya angka kemiskinan dan angka kedalaman kemiskinan di Bireuen pada tahun 2021 yang disebabkan pandemi *Covid-19*;

- 3) Meskipun IPM Bireuen terus meningkat sebesar 72,33 pada tahun 2021, namun IPM Kabupaten Bireuen masih berada pada posisi sembilan dibandingkan kabupaten lain di Aceh. IPM Kabupaten Bireuen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pidie Jaya dengan nilai 73,6 dan IPM Kota Lhokseumawe sebesar 77,57;
- 4) Masih terdapat ketimpangan pendapatan, (ditunjukkan dengan Indeks Gini) sebesar 0,296 pada tahun 2021, turun dari tahun sebelumnya (0,304), namun belum mencapai indeks gini sebelum *covid-19* tahun 2019 (0,295). Namun demikian Kabupaten Bireuen tetap menargetkan angka ketimpangan terus menurun;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi sebesar 4,32 persen, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,88 pada tahun 2019 dan 4,12 pada tahun 2020.

4.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

- 1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 9,29 masih dibawah rata-rata lama sekolah provinsi Aceh sebesar 9,37;
- 2) Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bireuen tahun 2021 (14,84 tahun) sudah lebih baik dari HLS Aceh (14,63 tahun) dan nasional (13,08 tahun). Namun HLS Bireuen masih dibawah HLS kabupaten terdekat, yaitu Lhokseumawe (15,21 tahun) dan Pidie Jaya (14,97 tahun);
- 3) Masih rendahnya cakupan vaksin *Covid-19* pada tahun 2021 sebesar 22,2 persen vaksin dosis 2.

4.1.2.3 Seni dan Budaya

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana gedung kesenian, sampai tahun 2021 belum tersedia gedung kesenian di Kabupaten Bireuen;
- 2) Minimnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dari jumlah karya budaya di Kabupaten Bireuen masih sebesar 61,54 persen dan diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2026 dan even seni daerah yang dilaksanakan masih rendah.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

4.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

- 1) Pendidikan
 - Jumlah guru yang memiliki kompetensi masih rendah, dari 3.091 guru, baru 1.673 guru yang telah sertifikasi atau sekitar 54,12 persen;

- Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 96,77 persen dan tingkat SMP/MTs sebesar 83,48 persen lebih rendah dari angka APM Provinsi Aceh 98,95 persen untuk SD/MI dan 86,95 persen untuk SMP/MTs.
- 2) Kesehatan
- Masih tingginya angka kematian ibu dan anak, angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 129 per 100.000 KH, angka ini masih jauh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, target AKI adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sedangkan angka kematian bayi Kabupaten Bireuen mencapai 13 per 1.000 KH masih lebih tinggi dari angka kematian bayi Provinsi Aceh sebesar 10 per 1.000 KH;
 - Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting 24,3 masih belum mencapai target nasional dalam RPJMN sebesar 14 persen.
- 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bireuen meningkat dari 29 kawasan pada tahun 2013 mencapai 38 kawasan pada tahun 2021 dengan seluas 588,9 hektar. Luas kawasan kumuh Kabupaten Bireuen menduduki peringkat kedua terluas di Aceh, dibawah Aceh Barat Daya (832,51 hektar);
 - Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Bireuen berdasarkan data BDT tahun 2017 sebanyak 10.361 unit dan telah dibangun sebanyak 1.545 Unit.
- 4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Rendahnya penyediaan infrastruktur dasar, jumlah cakupan sanitasi layak baru mencapai 87,13 persen dan air minum layak sebesar 86,70 persen pada tahun 2021, belum memenuhi target SPM sebesar 100 persen;
 - Kondisi jalan mantap di Kabupaten Bireuen masih rendah, hanya 57,54 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan proporsi jalan mantap provinsi sejumlah 77 persen, sedangkan jalan mantap nasional mencapai 98 persen;
 - Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat rendah, sebanyak 300 orang (3,33 persen) dari 9.000

orang jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten Bireuen.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kasus keamanan dan ketertiban meningkat, tahun 2021 kasus keamanan dan ketertiban sebanyak 336 kasus meningkat dari tahun 2020 sebanyak 153 kasus;
- Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak mencapai 77,27 persen lebih rendah dibandingkan pemilu tahun 2012 sebesar 80 persen.

6) Sosial

- Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dari lima indikator kinerja SPM bidang sosial, satu indikator mencapai target;
- Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti hanya mencapai 3,26 persen.

4.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja sebesar 65,91 persen pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2017 yang mencapai 70,61persen.

2) Pangan

- Masih tingginya persentase desa rawan pangan, tahun 2021 terdapat 8 desa dengan kategori sangat rentan pangan dan 48 desa rentan pangan. Total desa dengan kategori sangat rentan pangan dan rentan pangan mencapai 56 desa (9,2 persen) dari total desa di Kabupaten Bireuen;
- Cadangan pangan cenderung menurun dari tahun 2017 sebesar 60.608,41 ton menjadi 735,64 ton pada tahun 2021.

3) Pertanahan

- Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang belum bersertifikat dari 1.360 bidang tanah.

4) Kepemudaan dan Olahraga

- Jumlah pemuda berprestasi pada tahun 2021 masih sangat rendah, hanya 0,26 persen lebih rendah dibandingkan Aceh sebesar 1,96 persen;

- Indeks pembangunan olah raga Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 masih dalam kategori rendah dengan nilai 0,287.

5) Lingkungan Hidup

- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Bireuen 75,21 dengan kondisi "baik". Nilai IKLH tersebut masih lebih rendah dari IKLH Provinsi Aceh yaitu sebesar 75,54;
- Rendahnya pengelolaan sampah, volume sampah meningkat pada tahun 2021 mencapai 146 m³ dibandingkan tahun 2020 (136 m³) dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Luas RTH mencapai 12,12 persen untuk menjaga luas RTH tersebut perlu dilakukan pemeliharaan;
- Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana rendah dengan trend indeks resiko bencana (IRB) sebesar 168 dibawah indeks resiko bencana Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.

6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks Pemberdayaan Gender masih rendah pada tahun 2021 sebesar 58,06 lebih rendah dibandingkan Indeks Pemberdayaan Gender Aceh sebesar 63,47;
- Gampong Layak Anak mencapai 189 gampong (31 persen) dari total 609 gampong di Kabupaten Bireuen;
- Masih tingginya angka KDRT, mencapai 77 kasus pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 (62 kasus);
- Indeks Desa Membangun Kabupaten Bireuen masuk status tertinggal. Pada tahun 2021 IDM sebesar 0,5813 lebih rendah dari IDM Aceh (0,6199).

7) Komunikasi dan Informatika

- Indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,06. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Aceh dengan nilai 3,19 (baik).

4.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

- Masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata. Destinasi wisata yang memiliki fasilitas yang memadai dan kondisi baik sebesar 10,17 persen dari 59 destinasi wisata.

2) Pertanian

- Masih rendahnya produksi pertanian. Produksi jagung Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 mencapai 36.179 ton, turun dari tahun 2020 yang mencapai 82.393 ton. Produksi padi juga menurun pada tahun 2021 menjadi 164,924 ton turun dari tahun 2020 yang mencapai 184.944 ton. Hal ini mempengaruhi cadangan pangan Kabupaten Bireuen;
- Produktivitas tanaman perkebunan menurun, seperti tanaman kakao dari 648 kg/hektar (2017) menjadi 625 kg/hektar pada tahun 2021 dan tanaman pinang turun dari 1.290 kh/hektar (2017) menjadi 780 kg/hektar pada tahun 2021;
- Dari total 12.025 hektar jaringan irigasi kewenangan kabupaten, sebanyak 25,02 persen dalam kondisi baik dan 12,31 persen dalam kondisi sedang. Sedangkan 62,67 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat.

3) Kelautan Perikanan

- Potensi perikanan cukup besar namun belum dikelola dengan baik. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai produksi perikanan budidaya hanya sebesar 671,25 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 745,55 milyar rupiah;
- Produksi hasil perikanan tangkap menurun. Pada tahun 2021 sebesar 12.982, 68 ton dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebesar 13.160,14 ton.

4) Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

- Pengelolaan Pasar belum optimal, masih terdapat 2 pasar yang belum beroperasi, 9 pasar tidak aktif dari total 39 pasar di Kabupaten Bireuen;
- Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UKM, terdapat 27,84 persen koperasi yang tidak aktif;
- Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bireuen masih sangat rendah, pada tahun 2021 sebesar 1,5 persen (angka ini turun dari 1,68 persen di tahun 2017).

5) Transmigrasi

- Belum semua Satuan Permukiman transmigrasi aktif, dari 7 SP sebanyak 3 SP (42,85 persen) dalam kondisi aktif.

4.1.3.4 Penunjang Urusan

1) Keuangan

- Pengelolaan PAD belum optimal, persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2021 hanya sebesar 8,77 persen, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan pendapatan daerah dari pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

2) Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori CC pada tahun 2021 dan baru diterapkan di 11 SKPK dari 52 SKPK di Kabupaten Bireuen dan diharapkan dapat mencapai katagori B sesuai dengan target pada RPJPD;
- Tingkat Akuntabilitas Kinerja masih kategori CC pada tahun 2021 diharapkan dapat mencapai katagori BB sesuai dengan target pada RPJPD.

3) Pengawasan

- Masih rendahnya level maturitas SPIP (level 2) masih di bawah target nasional level SPIP tahun 2019 (level3).

4.1.3.5 Fokus Layanan Keistimewaan dan Kekhususan

1) Syariat Islam

- Kasus pelanggaran syariat islam cenderung meningkat dari tahun 2020 (57 kasus) menjadi 263 kasus pada tahun 2021. Demikian juga dengan kasus konflik yang muncul di masyarakat meningkat dari tahun 2020 (8 kasus) menjadi 15 kasus pada tahun 2021;
- Jumlah personil Satpol PP dan WH rendah 176 orang pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2020 (271 orang);
- Jumlah dayah naik kelas tahun 2021 masih rendah, sebanyak 39 dayah naik kelas (22,15 persen), lebih rendah dari hasil akreditasi tahun 2019 (66,48 persen);
- Jumlah sidang MPU yang menghasilkan keputusan pada tahun 2021 sebanyak 8 kali, lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebanyak 13 sidang yang menghasilkan keputusan;
- Masih terdapat 51,76 persen sekolah/madrasah yang belum melaksanakan pendidikan berkarakter islami.

2) Baitul Mal

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk peningkatan kesejahteraan. Realisasi infaq menurun drastis pada tahun 2021 (0,27 milyar rupiah) dibandingkan tahun 2020 (3,49 milyar rupiah).

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

4.1.4.1 Investasi

- 1) Rencana investasi tahun 2021 sebesar 60,62 milyar rupiah, diharapkan akumulasi rencana investasi sampai akhir tahun perencanaan RPK Bireuen mencapai 259,91 milyar rupiah.
- 2) Pengurusan perizinan masih membutuhkan waktu yang lama. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang burung walet, izin lokasi, izin penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima belas) hari kerja.

4.1.4.2 Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan tahun 2021 sebesar 49,49 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah disinergikan dengan isu nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Isu strategis tersebut menjadi solusi terhadap permasalahan kekinian dan dengan harapan juga dapat menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kabupaten Bireuen memperhatikan isu strategis nasional dan isu strategis provinsi.

4.2.1 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah

4.2.2 Isu Strategis Aceh

Isu strategis Aceh terdiri dari:

- 1) Peningkatan kualitas demokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana dan sumber daya aparatur;
- 3) Penguatan adat istiadat dan peningkatan kualitas penerapan syariat islam;
- 4) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- 5) Pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
- 6) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- 7) Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- 8) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- 9) Pengembangan kemitraan dan peningkatan sumber pendanaan pembangunan;
- 10) Optimalisasi kemandirian pangan;
- 11) Penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran;
- 12) Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis;
- 13) Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan dan penanganan bencana;

14) Penguatan perdamaian secara berkelanjutan.

4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan memperhatikan isu-isu nasional dan provinsi serta saran dan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Maka rumusan isu strategis Kabupaten Bireuen untuk pembangunan tahun 2023-2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pembangunan pada tahun 2023-2026 masih akan dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada fluktuasinya pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai upaya untuk pengendalian *Covid-19* melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment* dan pemberian stimulus bagi masyarakat terkena dampak. Untuk mencapai kondisi *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Cakupan vaksinasi yang rendah masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bireuen, baik vaksinasi Covid-19 maupun cakupan imunisasi dasar pada anak. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memulai program vaksinasi *Covid-19* sejak Februari 2021. Dinas Kesehatan menghitung waktu yang diperlukan sekitar 20 bulan untuk memvaksinasi target sasaran sebanyak 332.996 orang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses vaksinasi yaitu ketersediaan dan permintaan vaksin, distribusi yang memadai, kapasitas rantai dingin (*cold chain equipment*) untuk penyimpanan vaksin, adanya tenaga vaksinator yang dipersiapkan dengan matang, kesiapan masyarakat dan komunikasi resiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi.

Selain isu covid, percepatan penurunan stunting masih menjadi isu prioritas bidang kesehatan di Kabupaten Bireuen. Dimana percepatan penurunan stunting merupakan upaya pemerintah kabupaten Bireuen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh

sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi untuk dapat memenuhi target pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Selanjutnya target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, permasalahan di bidang kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, ini ditunjukkan dengan masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan terus berfluktuatif selama beberapa dekade terakhir.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 mencapai angka 13,06 persen, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 13,25 persen. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data BPS tahun 2021 tercatat 63.020 jumlah penduduk miskin yang disebabkan dari jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin semakin meningkat. Penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan masuk ke dalam kategori rentan dan sewaktu-waktu dapat kembali jatuh miskin saat terjadi guncangan, selain itu jumlah penduduk yang tidak miskin dan masuk ke dalam kategori rentan semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial.

Percepatan penanganan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi semua pihak. Pada dasarnya upaya penanggulangan angka kemiskinan dapat difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di berbagai sektor terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih serta ekonomi produktif masyarakat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.

3. Peningkatan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang menjadi permasalahan penting bagi Kabupaten Bireuen. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.

Disamping itu meningkatnya angka kemiskinan kehidupan sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor ketenagakerjaan formal maupun informal ke kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima secara sosial. Tindak kriminal yang semakin meningkat seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan. Begitu juga dengan kasus ketentraman dan ketertiban umum lainnya, seperti kasus pelanggaran syariat islam.

Untuk menangani permasalahan diatas, perlu dipersiapkan secara bersama kesiagaan dan kemampuan berbagai pihak terutama Satpol PP dan WH, karena dari berbagai permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum umumnya adalah pelanggaran perda dan qanun syariat islam, kondisi tahun 2021 jumlah personel Satpol PP dan WH berkurang (176 orang) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan deteksi dini konflik juga diharapkan dapat mengurangi kasus konflik yang mungkin terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi salah satu daerah yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2022, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mulai menjalankan penyusunan tahapan-tahapan bagi terselenggaranya Pemilu 2024.

Pemilu 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan dapat dikendalikan dan diatasi. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis pelaksanaan pemilu 2024 harus menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar pemetaan persoalan di setiap tahapan bukan hanya berkutat pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau semua unsur.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan memegang salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa serta menguasai pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang baik dan layak akan memacu minat peserta didik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang berdampak semakin

tinggi pula kualitas SDM dan tingkat keterampilan dari hasil pendidikan tersebut dan memperbesar peluang kesempatan kerja. Mengacu pada indikator yang telah disajikan pada bab sebelumnya, bahwa harapan lama sekolah sudah sangat baik namun rata-rata lama sekolah masih berada di angka 9,29 tahun masih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,37 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebesar 9,29 tahun yang artinya jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas hanya tamat SMP.

Selain itu fokus bidang Pendidikan adalah uji kompetensi guru masih rendah pembenahan mutu pendidikan berupa akreditasi sekolah disegala jenjang pendidikan, peningkatan mutu tenaga administrasi sekolah. Belum meratanya penyebaran tenaga pengajar/pendidik (guru) mata pelajaran atau bidang studi pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bireuen menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Dalam hal kepemimpinan di setiap sekolah juga menjadi perhatian utama, dimana harus diterapkannya kompetisi dan kompetensi kepala sekolah agar kualitas sekolah semakin meningkat. Di samping itu diperlukan sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus, sekolah berasrama, sekolah kejuruan perlu mendapat perhatian lebih.

5. Optimalisasi Ketahanan Pangan

Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan, kemandirian daerah dalam pemenuhan pangan harus mampu mempunyai kemampuan untuk mencegah bencana dan krisis serta mengantisipasi, menyangga, menampung atau memulihkannya secara tepat waktu, efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan sistem mata pencaharian dalam menghadapi ancaman yang berdampak pada pertanian, pemenuhan nutrisi, ketahanan pangan, dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan isu yang sifatnya multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup segala aspek yang melingkupinya. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu menjadi

pertimbangan dalam memperkuat ketahanan pangan adalah sistem produksi, jalur distribusi, dan pola konsumsi.

Ketahanan pangan merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu (1) ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), (2) kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan (3) pemanfaatan pangan (*food utilization*). Ini berarti bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Dengan demikian, kuat atau lemahnya ketahanan pangan akan sangat tergantung dari sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut.

Perlindungan dan pemberdayaan petani harus mampu diprioritaskan oleh daerah, ada beberapa upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui strategi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal;
- 2) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan
- 3) Mitigasi kerawanan pangan.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan. Upaya ini diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu: untuk menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya.

6. Pemulihan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dalam lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan kinerja yang meningkat, namun gejolak perekonomian global mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen di tahun 2020. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Sinergi dalam pemulihan ekonomi daerah harus mampu diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi daerah secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen yang

ada di Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, hal ini di karenakan pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Bireuen harus memahami struktur ekonomi yang ada, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBK dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Bireuen. Sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan ada kecenderungan luasan lahan pertanian mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Bireuen, jika dikelola dengan baik akan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian di Kabupaten Bireuen menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Mulai dari turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, perubahan iklim yang tidak menentu, hingga sulitnya memenuhi kebutuhan pupuk saat musim tanam. Selain itu, para petani belum mampu mengolah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah. Sektor industri yang berkaitan dengan pertanian masih belum berkembang secara optimal, sebagian besar produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Sektor yang juga memberikan kontribusi besar setelah pertanian adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,56 persen pada tahun 2021. Dengan kontribusi yang cukup tinggi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga dapat menjadi sektor potensial memperkuat perekonomian Kabupaten Bireuen. Terlebih jika terdapat upaya yang sistematis dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.

Selain itu investasi merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan iklim investasi yang baik, pemenuhan adanya ketersediaan informasi tentang peta potensi investasi, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah dan transparan. Selanjutnya mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha kecil, pemberian insentif, ketenteraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, dan pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah.

Sektor lain yang perlu untuk dikembangkan adalah pariwisata. Hal ini dimungkinkan karena ada kecenderungan kontribusi pariwisata yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pengelolaan pariwisata secara benar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan minat masyarakat Kabupaten Bireuen bidang pariwisata sangat penting dilakukan.

7. Perluasan Kesempatan Kerja

Rendahnya angka pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu daerah demikian juga sebaliknya. Namun pada kenyataannya belum mencerminkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya. Konsep pengangguran disini diartikan sebagai penduduk yang memasuki usia kerja (15-65 tahun) yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, putus asa dan sudah punya pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Secara umum upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bireuen cukup berhasil, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja meskipun tidak semua mampu terserap. Karena dalam perjalanannya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masih belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 4,32 persen, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,88 pada tahun 2019 dan 4,12 pada tahun 2020. Angka TPT ini menunjukkan kondisi yang belum membaik, dan perlu ada upaya dari pemerintah untuk peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/ *training* pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi, termasuk mengirimkan tenaga kerja untuk mendapatkan bimbingan teknis, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra-sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus.

8. Penanganan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen, hal ini sebagai langkah pemerintah untuk melakukan pemerataan

desa-desa tertinggal dan terpencil. Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni pelayanan dasar seperti air minum dan sanitasi serta konektivitas. Untuk cakupan penggunaan air minum dan sanitasi pada tahun 2021 masih belum memenuhi target SDGs. Cakupan Sanitasi mencapai 87,13 persen dan air minum sebesar 86,7 persen.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu yang terus mencuat saat ini. Pengembangan permukiman di perkotaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman (*safe*), nyaman (*comfortable*), damai (*peaceful*) dan sejahtera (*prosperous*) serta berkelanjutan (*sustainable*).

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Permasalahan yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat dari adanya urbanisasi salah satunya adalah munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ialah suatu kawasan hunian yang mempunyai mutu yang sangat tidak layak untuk dihuni, yang disertai tanda-tanda diantaranya terletak pada lahan yang tidak selaras dengan peruntukan/tata ruang, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam lingkup luasan yang terbatas, rentan akan penyakit sosial dan lingkungan, serta rendahnya mutu bangunan yang dimiliki, tidak memadainya prasarana lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Strategis

Di bidang pembangunan infrastruktur, permasalahan yang paling menonjol adalah kondisi jalan yang masih kurang bagus, terutama yang menghubungkan daerah-daerah sentra produksi dan kawasan pedalaman.

Menurut Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kabupaten Bireuen akan dilintasi jaringan jalan bebas hambatan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lhokseumawe – Sigli, dengan exit tol yang berada di

Kabupaten Bireuen. Aksesibilitas yang mudah dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang ada. Terbangunnya infrastruktur jalan yang berkualitas akan membuka keterisolasian daerah dari ketertinggalan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong percepatan perputaran barang dan jasa, dan sekaligus berdampak signifikan terhadap percepatan perekonomian. Selain itu, Kabupaten Bireuen yang memiliki lokasi berdekatan dengan pantai, berpotensi menjadi kawasan rawan bencana tsunami. Salah satu lokasi yang pernah terjadi bencana tsunami yaitu Gampong Kuala Raja. Dalam mengantisipasi bencana tsunami yang ada, diperlukan pembangunan jaringan jalan, dan jembatan di daerah untuk dijadikan jalur evakuasi, dimana jalur evakuasi tersebut harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen. Dalam sektor transportasi jumlah angkutan umum semakin, hal ini dikarenakan semakin mudahnya orang membeli kendaraan bermotor sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap mode angkutan untuk meningkatkan jumlah penumpang.

Selain itu ketaatan terhadap tata ruang perlu lebih diperhatikan, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang akan menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW.

10. Penataan Lingkungan hidup dan Kebencanaan

Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran. Sampah yang membusuk menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen yang dilakukan sekarang hanya sekedar memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota dengan cara yang tidak memenuhi standar. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat pengolahan akhir belum sesuai digunakan, yang sesuai adalah tempat pembuangan akhir sampah.

Kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu kawasan rawan bencana. Tingkat kapasitas Kabupaten Bireuen dalam penanggulangan bencana masih rendah. Selama 5 tahun terakhir tidak ada penurunan indeks resiko bencana dengan skor indeks 168. Potensi bencana yang dihadapi Kabupaten Bireuen adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Peningkatan peran pemerintah kabupaten diperlukan dengan berbagai upaya, diantaranya : perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Selain itu untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya dengan melihat kualitas lingkungan yaitu kualitas air, udara, dan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Bireuen sudah termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih lebih rendah dari provinsi Aceh.

11. Penguatan Nilai-Nilai Syariat Islam, Adat dan Budaya Islami

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen, jika dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, maka Kabupaten Bireuen memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dimana para ulama di Kabupaten Bireuen telah mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan pandangan-

pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada kepemimpinan Bupati Bireuen saat ini.

Pada saat ini pelaksanaan pemerintahan juga telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik dan disamping itu dalam penyesuaian pelaksanaan syariat islam sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan syariat islam secara kaffah. Namun masih ditemukan permasalahan penguatan nilai-nilai syariat islam, sosial, adat dan budaya dimana kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an yang akan membawa dampak kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan syariat islam dalam kehidupan manusia.

Kemudian timbul beberapa persoalan lain menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya daerah-daerah di Aceh yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syariat Islam. Pemahaman dan implementasi syariat yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya.

Isu strategis lain dalam penerapan syariat islam terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia serta peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat Islam. Untuk hal tersebut perlu pembinaan dan peran pemuda dalam pelaksanaan syariat islam terutama dengan peningkatan pemberdayaan karang taruna yang ada dan adanya sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Juga menjadi perhatian yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan instrument hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi), untuk itu perlu penyusunan regulasi dalam penguatan syariat Islam.

12. Optimalisasi Penerapan Pengarusutamaan Gender

Optimalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan isu strategis lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen. Implementasi PUG diharapkan akan menjadi strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, dengan disertakannya perspektif gender dalam setiap langkah penyusunan kebijakan. Implementasi PUG memiliki peran penting dalam terciptanya kebijakan yang lebih berkualitas dan relevan

dengan kebutuhan. Tercapainya kesetaraan melalui kebijakan yang responsif gender menjadi bagian penting dari upaya perwujudan pembangunan sosial. Hal ini karena kesetaraan gender merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan welfare state.

Pemerintah Kabupaten Bireuen menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian integral dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023 – 2026 dengan harapan komitmen Pemerintah tersebut dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu bentuk dari pelayanan yang optimal adalah memberikan pelayanan publik dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Adapun strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh aspek pembangunan. Selain itu perhatian terhadap perempuan dan anak harus lebih diperhatikan

13. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah dan juga peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja terutama pemuda yang memiliki minat untuk berwirausaha. Pembinaan kepemudaan agar terhindar dari kasus NAPZA juga menjadi hal penting di bidang kepemudaan.

Selain itu Aceh akan menjadi Tuan Rumah PON tahun 2024 dan Kabupaten Bireuen mendapat kesempatan untuk pelaksanaan cabang sepak bola dan bola tangan, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini infrastruktur dan fasilitas keolahragaan (seperti; stadion, lapangan dan GOR) beserta penunjangnya masih terbatas dan minim pemeliharaan. Di samping itu kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet juga masih membutuhkan perbaikan secara terus menerus agar atlet Aceh terutama Kabupaten Bireuen memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

14. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan Pembangunan

Tujuan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir rencana pembangunan. Tujuan RPK ini perlu dirumuskan agar dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ini harus bersifat makro, dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, lintas sektor sesuai dengan tupoksi perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Selanjutnya, indikator tujuan ini harus didukung oleh beberapa sasaran dengan indikator yang tepat dan terukur serta dapat menjawab permasalahan kekinian daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu strategis yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen dalam empat tahun mendatang. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD. Pada akhir tahap RPJPD ini diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami” dapat terwujud. Target Indikator makro Kabupaten Bireuen untuk tahap terakhir RPJPD adalah: Pertumbuhan Ekonomi 2.5-5 persen, PDRB Perkapita Rp 27-30 Juta, Indeks Pembangunan Manusia 72.28-73.5 persen, Kemiskinan 12.56-10.56 persen, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) : 4-3.5 persen, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) 67-69 persen.

5.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan menjadi rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang dapat dicapai dengan dukungan dari outcome program-program yang mendukung pencapaian sasaran. Dalam RPJPD Kabupaten Bireuen, kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun disertai dengan derajat

kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat Islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan IPTEKIN sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, Sasaran Pokok Pembangunan Lima Tahunan ke IV (2020-2025) adalah sebagai berikut:

- A. Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Sejahtera, ditandai dengan:
1. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya harapan lama sekolah;
 2. Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan, yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup;
 3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, yang ditandai dengan menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
 4. Mengurangi angka kemiskinan, yang ditandai dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin.
 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB sektor pertanian.
 6. Meningkatnya perkembangan UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya persentase UMKM yang naik kelas;
 7. Terjaganya stabilitas harga, yang ditandai dengan stabilnya tingkat inflasi;
 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB sektor industri pengolahan;
 9. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah;

10. Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen, yang ditandai dengan adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
 11. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar, yang ditandai dengan meningkatnya persentase jalan di Kabupaten Bireuen dalam kondisi baik;
 12. Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung, yang ditandai dengan tidak berkurangnya luas kawasan lindung;
 13. Meningkatnya akses aliran irigasi yang ditandai dengan bertambahnya luas aliran irigasi;
 14. Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase layanan pertanahan yang tertangani;
 15. Mengembangkan potensi pariwisata daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata.
- B. Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, ditandai dengan:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih, yang ditandai dengan Opini WTP dari BPK;
 2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Perencanaan;
 3. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase ranqanun yang disahkan menjadi qanun;
 4. Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan;
 5. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang ditandai dengan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik;
 6. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik, yang ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih;
 7. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase PMKS yang tertangani;
 8. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang ditandai dengan indeks pembangunan gender;

9. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya persentase organisasi pemuda yang aktif;
 10. Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat, yang ditandai dengan jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal;
- C. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireuen yang Islami, ditandai dengan:
1. Meningkatnya nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, yang ditandai dengan persentase cakupan pembinaan Syariat Islam;
 2. Meningkatnya mutu pendidikan keislaman, yang ditandai dengan meningkatnya persentase dayah yang terakreditasi;
 3. Meningkatnya kerukunan umat beragama, yang ditandai dengan menurunnya jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama.

Berbagai sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kaitan tujuan, sasaran, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran beserta target nilainya disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026 Kabupaten Bireuen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penerapan Syariah Islam	Persen	76	87	90	92	95	95
		Meningkatnya Nilai-nilai Syariah Islam dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat pelanggaran Syariah Islam yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman	Persentase tipe dayah yang naik kelas	persen	26,10	36,50	41,30	46,00	51,30	51,30
		Meningkatnya Tatanan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami	Jumlah kearifan lokal yang dilestarikan	urusan	5	18	18	18	18	18
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	B
		Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Bertanggung Jawab	Opini BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	2	2	3	3	3
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	CC	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,06	2,14	2,26	2,35	2,47	2,47
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	58,30	76,67	78,33	80,00	81,67	81,67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	Persen	69,00	73,33	76,67	80,00	83,33	83,33
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah Pola Ruang dan Struktur Ruang	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	Persen	57,54	60,19	62,94	64,41	65,88	65,88
			Persentase kesesuaian usulan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi yang dikeluarkan	persen	97,90	98,00	98,50	99,00	100,00	100,00
		Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan hutan)	persen	75,61	76,37	76,75	77,13	77,51	77,51
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	indeks	168	166	164	162	160	160
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,13	4,50	4,80	5,00	5,20	5,20
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	persen	33,62	33,85	33,89	33,93	33,97	33,97
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	persen	21,56	21,95	22,15	22,35	22,55	22,55
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	0,71	1,01	1,16	1,31	1,46	1,46
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	persen	8,77	9,49	9,83	10,12	10,47	10,47

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
		Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah	Jumlah destinasi wisata	destinasi	59	63	70	75	80	80
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	indeks	0,581	0,643	0,665	0,682	0,707	0,707
		Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah peningkatan investasi	Rp. (Milyar)	60,62	63,06	64,32	65,61	66,92	259,91
		Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi	Laju inflasi	Persen	1,97	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
5	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	indeks	72,33	72,70	73,10	73,50	73,90	73,90
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	9,29	9,31	9,32	9,33	9,34	9,34
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,84	15,04	15,10	15,16	15,22	15,22
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Angka harapan hidup	tahun	71,26	71,92	72,46	73,00	73,54	73,54
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	indeks	0,287	0,385	0,427	0,450	0,501	0,501
			Persentase pemuda berprestasi	persen	0,26	0,66	0,86	1,06	1,2	1,2
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,06	58,20	58,27	58,35	58,42	58,42
			Kabupaten Layak Anak	peringkat	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,05	3,10	3,15	3,17	3,20	3,20
6	Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan		Indeks Gini	indeks	0,296	0,290	0,287	0,284	0,281	0,281
		Mengurangi Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	persen	13,25	12,25	11,75	11,25	10,75	10,75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	persen	24	40	48	56	62	62
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	79,4	85,7	88,8	91,9	95,0	95,0
7	Menurunkan Angka Pengangguran		Persentase tingkat pengangguran terbuka.	persen	4,32	3,80	3,65	3,50	3,35	3,35
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,91	67,73	68,37	69,00	69,63	69,63
8	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Kasus Ketentraman dan Ketertiban	indeks	1,72	<1	<1	<1	<1	<1
		Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase konflik yang diselesaikan	persen	50	60	65	70	72	72
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik	Tingkat partipasi masyarakat dalam pemilihan umum	persen	77,91	0	80,00	0	0	80,00

5.3 Penyeragaman RPK Bireuen dengan RPA dan RPJMN Tahun 2020-2024

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam SEB MDN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tentang Penyeragaman RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka RPK Bireuen Tahun 2023-2026 diselarasikan dengan RPA 2023-2026 dan RPJMN 2020-2024. Penyeragaman ini dititikberatkan pada target makro pembangunan yang direncanakan di dalam RPK Bireuen dan RPA serta yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Target pencapaian indikator makro pembangunan kabupaten harus sinergi dengan target provinsi serta mendukung pencapaian target nasional. Target makro pembangunan RPK Bireuen dengan RPA dan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Penyelarasan Indikator Makro RPK Bireuen dengan RPA dan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPA						RPK Bireuen							
		Realisasi dan Target					Realisasi dan Target						Realisasi dan Target							
		2020*	2021*	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,69	5,9	6,1	6,2	-0,37	2,79	6	3,6	3,75	3,85	4,25	-1,02	4,13	4,35	4,50	4,80	5,00	5,20
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9	8,55	8,15	15,43	15,53	11,43	15,03	14,53	14,03	13,53	13,06	13,25	12,90	12,25	11,75	11,25	10,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	3,8	3,4	3,1	6,59	6,3	6	5,48	5,36	5,24	5,12	4,12	4,32	3,95	3,80	3,65	3,50	3,35
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	71,94	72,29	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	71,99	72,18	73	72,58	72,78	72,98	73,18	72,28	72,33	72,50	72,70	73,10	73,50	73,90
5	Rasio Gini*	0,385	0,381	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,319	0,323	0,31	0,307	0,304	0,301	0,298	0,304	0,296	0,293	0,290	0,287	0,284	0,281

*) Angka Realisasi

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk setiap tahunnya selama periode Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan ini harus sejalan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan akan dilaksanakan selama empat tahun (2023-2026). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	1.1.1	Peningkatan pemahaman aqidah dan akhlak serta penegakan syariat Islam	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan, sarana dan prasarana serta SDM pelaksana syariat Islam
		1.2	Meningkatnya mutu pendidikan Keislaman	1.2.1	Peningkatan manajemen dayah dan kemandirian dayah	Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana dayah
		1.3	Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat yang islami	1.4.1	Penerapan budaya dan adat istiadat lokal	Meningkatkan pelestarian adat dan budaya islami
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	2.1	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggung jawab	2.1.1	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP
		2.2	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP	2.2.1	Meningkatkan kualitas pengawasan yang berbasis resiko	Peningkatan kapasitas SDM pengawasan serta penyediaan dan pelaksanaan regulasi
		2.3	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	2.3.1	Pemenuhan mutu pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik yang didukung SDM berkualitas
		2.4	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	2.4.1	Menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan kualitas data dan SDM yang didukung sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	3.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	3.1.1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar	Pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		3.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang	3.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Peningkatan proporsi kemantapan jalan
				3.2.3	Membentuk dan memberdayakan Forum Penataan Ruang (FPR)	Peningkatan kesesuaian pola ruang RTRW
		3.3.	Terwujudnya pengembangan sistem pembangunan ekologis yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan	3.3.1.	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas	Pengendalian kualitas lingkungan hidup
		3.4	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penurunan resiko bencana	3.4.1	Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan bencana	Mitigasi dan penanganan kebencanaan
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	4.1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, peternakan dan perikanan
		4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan industri	4.2.1	Meningkatkan PDRB sektor perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
				4.2.2	Meningkatkan PDRB sektor industri	Peningkatan fasilitasi sektor industri
		4.3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	4.3.1	Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah	Pemanfaatan teknologi dan sosialisasi untuk peningkatan PAD
		4.4	Berkembangnya potensi pariwisata daerah	4.4.1	Meningkatkan potensi pariwisata dan sektor lainnya	Peningkatan sarana prasarana dan SDM wisata daerah
		4.5	Meningkatnya kemandirian desa		Pengembangan kemandirian Desa	Pemberdayaan masyarakat desa
		4.6	Meningkatnya nilai investasi	4.5.1	Penguatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		6.2	Menjaga stabilitas tingkat inflasi	6.2.1	Peningkatan pengawasan distribusi barang dan perlindungan konsumen	Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah
5	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	5.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat	5.1.1	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Peningkatan kualitas pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta kesempatan belajar
		5.2	Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	5.2.1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan
		5.3	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan olah raga	5.3.1	Meningkatkan kualitas kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan prestasi pemuda dalam pembangunan
				5.3.2	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olah raga
		5.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.4.1	Meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan perempuan	Peningkatan pengarusutamaan gender
				5.4.2	Meningkatkan kualitas hidup layak anak	Peningkatan kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana mendukung gampong layak anak
		5.5	Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	5.1.1	Meningkatkan kualitas inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Peningkatan kualitas SDM dan kebijakan pelaksanaan inovasi
6	Menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan	6.1	Mengurangi angka kemiskinan	6.1.1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Optimalisasi pemanfaatan ZISWAF untuk penduduk miskin
		6.2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	6.2.1	Meningkatkan penanganan sosial masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		6.3	Meningkatnya ketahanan pangan	6.3.1	Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan	Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman pangan
7	Menurunkan angka pengangguran	7.1	Meningkatnya kesempatan kerja	7.1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi angkatan kerja
8	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	8.1	Optimalisasi ketentraman dan ketertiban	8.1.2	Meningkatkan penegakan ketertiban dan ketentraman umum	Peningkatan sosialisasi dan penindakan pelanggaran qanun serta perkara kepada masyarakat
		8.2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik	8.2.1	Memperkuat Pendidikan politik masyarakat dan parpol	Sosialisasi pelaksanaan pemilu dan pilkada berkualitas kepada pemilih pemula dan masyarakat secara umum termasuk disabilitas

6.2. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bireuen merupakan arahan untuk mencapai suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada suatu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Kebijakan pembangunan dijabarkan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas kebijakan tahunan untuk dijabarkan dalam renstra setiap tahun perencanaan dan menjadi acuan untuk penentuan tema pembangunan di dalam RKPD setiap tahunnya. Indikasi Kebijakan Pembangunan Prioritas Tahunan disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

Tahun	Kebijakan Pembangunan
2023	Pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan SDM serta daya saing daerah
2024	Mengembangkan infrastruktur strategis dan daya saing SDM untuk mendukung sektor unggulan daerah dan menyukseskan pemilihan umum serentak.
2025	Memantapkan tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan serta pengembangan kawasan berwawasan lingkungan.
2026	Meningkatkan daya saing dan kemandirian fiskal daerah yang didukung oleh SDM yang inovatif dan berbudaya.

6.3 Program Prioritas

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta pagu indikatif tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 - 2026

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tataan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penerapan Syariat Islam	76 Persen	87 Persen		90 Persen		92 Persen		95 Persen		95 Persen		
1 1	Meningkatnya Nilai-nilai Syariah Islam dalam Tataan Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang Mengadakan Pengajian Rutin	609 Gampong	609 Gampong	8.628.000.000	609 Gampong	9.479.957.950	609 Gampong	10.160.174.598	609 Gampong	10.788.582.413	609 Gampong	39.056.714.961	Dinas Syariat Islam
	Program Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Sidang yang Menghasilkan Keputusan	40 Persen	45 Persen	414.600.000	50 Persen	759.200.000	50 Persen	414.600.000	60 Persen	827.350.000	60 Persen	2.415.750.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
1 2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman	Persentase Tipe Dayah yang Naik Kelas	26,1 Persen	36,5 Persen		41,3 Persen		46,0 Persen		51,3 Persen		51,3 Persen		
	Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah Terakreditasi	156 Dayah	161 Dayah	11.792.000.000	164 Dayah	11.845.000.000	167 Dayah	12.400.000.000	167 Dayah	12.200.000.000	167 Dayah	48.237.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
1 3	Meningkatnya Tataan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami	Jumlah Kearifan Lokal yang Dilestarikan	5 Adat	18 adat		18 adat		18 adat		18 adat		18 adat		
	Program Sekretariat Majelis Adat Aceh	Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal	5 urusan	8 urusan	464.000.000	8 urusan	510.400.000	8 urusan	561.440.000	8 urusan	617.584.000	8 urusan	2.153.424.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	5 Lembaga	5 Lembaga	1.580.000.000	5 Lembaga	1.428.000.000	5 Lembaga	1.079.550.000	5 Lembaga	1.134.942.500	5 Lembaga	5.222.492.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	61,54 Persen	76,92 Persen	496.250.000	84,62 Persen	578.812.500	92,31 Persen	617.753.000	100 Persen	658.640.000	100 Persen	2.351.455.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	71 Persen	73 Persen	183.750.000	74 Persen	192.937.500	76 Persen	202.584.000	77 Persen	212.713.000	77 Persen	791.984.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC		B		B		B		B		
2	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Bertanggung Jawab	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	10.153.000.000	Ada	11.968.300.000	Ada	11.965.130.000	Ada	12.161.643.000	Ada	46.248.073.000	Sekretariat DPRD

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	94,75 Persen	95,50 Persen	547.821.264.732	96 Persen	547.370.710.902	96,50 Persen	547.630.955.379	97 Persen	544.307.755.278	97 Persen	2.187.130.686.291	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	99,9 Persen	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	2.140.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	2	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	2 Level	2 Level		2 Level		3 Level		3 Level		3 Level		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	84,71 Persen	90 Persen	1.675.000.000	90 Persen	1.841.400.000	90 Persen	2.024.540.000	90 Persen	2.226.988.000	90 Persen	7.767.928.000	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan	100 Persen	100 Persen	645.000.000	100 Persen	709.500.000	100 Persen	780.450.000	100 Persen	858.495.000	100 Persen	2.993.445.000	Inspektorat
2	3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	CC	B		B		B		BB		BB		
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	89,16 Persen	90 Persen	130.000.000	90,20 Persen	137.000.000	90,40 Persen	142.000.000	90,60 Persen	148.000.000	90,60 Persen	557.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	68,75 Persen	89,50 Persen	135.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	157.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	612.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan	Ada	Ada	145.000.000	Ada	154.500.000	Ada	162.100.000	Ada	169.860.000	Ada	631.460.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada	Ada	30.000.000	Ada	32.000.000	Ada	34.000.000	Ada	36.000.000	Ada	132.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	805.000.000	100 Persen	875.500.000	100 Persen	937.000.000	100 Persen	1.011.100.000	100 Persen	3.628.600.000	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	425.000.000	100 Persen	467.500.000	100 Persen	510.000.000	100 Persen	544.000.000	100 Persen	1.946.500.000	Kecamatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	915.674.300.748	100 Persen	932.049.559.210	100 Persen	959.764.703.961	100 Persen	990.532.637.876	100 Persen	3.798.021.201.795	Semua SKPK
2	4	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,06 Indeks	2,14 Indeks		2,26 Indeks		2,35 Indeks		2,47 Indeks	2,47 Indeks		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi e-Government yang Digunakan SKPK	75 Aplikasi	78 Aplikasi	300.000.000	80 Aplikasi	130.000.000	82 Aplikasi	461.500.000	84 Aplikasi	194.575.000	84 Aplikasi	1.086.075.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85 Peringkat	86 Peringkat	700.000.000	87 Peringkat	440.000.000	88 Peringkat	700.000.000	90 Peringkat	550.000.000	90 Peringkat	2.390.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ada	Ada	200.000.000	Ada	230.000.000	Ada	260.000.000	Ada	300.000.000	Ada	990.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	1.465.500.000	Ada	2.120.050.000	Ada	2.299.055.000	Ada	1.662.960.500	Ada	7.547.565.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	99,04 Persen	100 Persen	1.729.000.000	100 Persen	1.864.400.000	100 Persen	2.028.440.000	100 Persen	2.282.784.000	100 Persen	7.904.624.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	13,50 Persen	21,20 Persen	100.000.000	25 Persen	100.000.000	28,20 Persen	100.000.000	32,70 Persen	100.000.000	32,70 Persen	400.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	Persentase SKPK yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	4 Persen	27 Persen	185.000.000	50 Persen	203.500.000	73 Persen	223.850.000	96 Persen	246.235.000	96 Persen	858.585.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai Manajemen ASN	95,81 Persen	96 Persen	920.812.902	96 Persen	1.032.894.192	97 Persen	1.156.183.611	98 Persen	1.291.801.972	98 Persen	4.401.692.677	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	23,32 Persen	34,15 Persen	3.091.387.098	34,15 Persen	3.450.525.808	53,11 Persen	3.713.578.389	61,71 Persen	3.797.386.603	61,71 Persen	14.052.877.898	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	58,33 Persen	76,67 Persen		78,33 Persen		80 Persen		81,67 Persen		81,67 Persen			
3	1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	69 Persen	73,33 Persen		76,67 Persen		80 Persen		83,33 Persen		83,33 Persen		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Air Minum	86,7 Persen	88 Persen	5.373.288.000	89 Persen	5.519.486.640	90 Persen	5.770.460.972	91 Persen	6.139.393.240	91 Persen	22.802.628.852	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	87,13 Persen	88 Persen	5.025.397.000	89 Persen	5.161.158.910	90 Persen	5.394.216.855	91 Persen	5.736.812.035	91 Persen	21.317.584.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani	14 Unit	24 Unit	740.000.000	24 Unit	800.000.000	24 Unit	800.000.000	24 Unit	800.000.000	96 Unit	3.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	90,39 Hektar	20 Hektar	1.585.000.000	20 Hektar	1.872.000.000	20 Hektar	1.829.825.000	13,4 Hektar	1.930.963.750	73,4 Hektar	7.217.788.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	9,26 Persen	8,95 Persen	1.620.000.000	8,63 Persen	1.400.000.000	8,32 Persen	1.500.000.000	8,11 Persen	1.500.000.000	8,11 Persen	6.020.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah Pola Ruang dan Struktur Ruang	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	57,54 Persen	60,19 Persen		62,94 Persen		64,41 Persen		65,88 Persen		65,88 Persen		

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	51,19 Persen	53,57 Persen	80.409.257.016	56,02 Persen	80.501.198.032	57,33 Persen	80.312.757.934	58,64 Persen	83.463.395.831	59,99 Persen	324.686.608.813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	3,33 Persen	4,44 Persen	350.000.000	5,55 Persen	360.850.000	6,66 Persen	380.435.000	7,77 Persen	400.678.500	7,77 Persen	1.491.963.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,59 Persen	0,55 Persen	2.332.264.000	0,53 Persen	2.604.264.000	0,52 Persen	4.310.764.000	0,51 Persen	2.560.264.000	0,51 Persen	11.807.556.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	97,90 Persen	98 Persen		98,50 Persen		99 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	660.500.000	Sesuai	706.550.000	Sesuai	739.205.000	Sesuai	759.125.500	Sesuai	2.865.380.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang Terbangun	30 Persen	31,67 Persen	14.306.508.000	33,33 Persen	14.281.833.400	35 Persen	15.095.925.070	36,67 Persen	15.950.721.323	36,67 Persen	59.634.987.793	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	0 Persen	5 Persen	2.876.350.000	7,50 Persen	2.513.985.000	10 Persen	3.395.383.500	12,50 Persen	3.524.921.850	12,50 Persen	12.310.640.350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi PSU yang Layak	33,33 Persen	33,33 Persen	705.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	2.955.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	71,30 Persen	71,87 Persen	1.050.000.000	72,10 Persen	1.085.000.000	72,33 Persen	1.105.500.000	72,55 Persen	1.122.050.000	72,55 Persen	4.362.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	440.000.000	Dinas Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani	0 kasus	1 kasus	150.000.000	1 kasus	150.000.000	1 kasus	170.000.000	1 kasus	170.000.000	4 kasus	640.000.000	Dinas Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	35,65 Persen	51,74 Persen	180.000.000	67,82 Persen	180.000.000	83,91 Persen	216.000.000	100 Persen	211.040.000	100 Persen	787.040.000	Dinas Pertanahan
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Peruntukannya	0 Persen	25 Persen	50.000.000	50 Persen	50.000.000	75 Persen	60.000.000	100 Persen	86.400.000	100 Persen	246.400.000	Dinas Pertanahan
	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Persentase Tanah yang Bersertifikat	28,30 Persen	37,13 Persen	700.000.000	41,54 Persen	700.000.000	45,96 Persen	860.000.000	50,03 Persen	882.400.000	50,03 Persen	3.142.400.000	Dinas Pertanahan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Tidak ada	Ada	150.000.000	Ada	150.000.000	Ada	180.000.000	Ada	209.200.000	Ada	689.200.000	Dinas Pertanahan

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani	20 Persen	40 Persen	80.000.000	60 Persen	80.000.000	80 Persen	96.000.000	100 Persen	108.240.000	100 Persen	364.240.000	Dinas Pertanahan
3	3	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	69,39 Persen	72,05 Persen		72,43 Persen		72,73 Persen		73 Persen		73 Persen		
	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62 Persen	63,28 Persen	295.600.000	63,36 Persen	325.160.000	63,46 Persen	335.676.000	63,56 Persen	408.943.600	63,56 Persen	1.365.379.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	Persentase RTH yang Ditangani	12,12 Persen	12,12 Persen	220.000.000	12,12 Persen	307.000.000	12,12 Persen	318.700.000	12,12 Persen	325.570.000	12,12 Persen	1.171.270.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0 Persen	25 Persen	50.000.000	25 Persen	55.000.000	25 Persen	60.500.000	25 Persen	66.550.000	25 Persen	232.050.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Dibina	6,67 Persen	9 Persen	30.000.000	13 Persen	33.000.000	13 Persen	36.300.000	13 Persen	39.930.000	48 Persen	139.230.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Gampong Iklim	2 Gampong	4 Gampong	315.500.000	6 Gampong	327.050.000	8 Gampong	339.755.000	10 Gampong	353.730.500	10 Gampong	1.336.035.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.500.000	100 Persen	66.550.000	100 Persen	73.205.000	100 Persen	255.255.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	45 Persen	50 Persen	8.244.400.000	55 Persen	8.958.840.000	60 Persen	9.354.724.000	65 Persen	9.840.196.400	65 Persen	36.398.160.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-	Ada	250.000.000	Ada	150.000.000	Tidak Ada	0	Tidak Ada	0	Ada	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	4	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	168 Indeks	166 Indeks		164 Indeks		162 Indeks		160 Indeks		160 Indeks	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	1.855.000.000	100 Persen	1.640.000.000	100 Persen	1.465.000.000	100 Persen	1.345.000.000	100 Persen	6.305.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran	92,8 Persen	94 Persen	2.020.000.000	95 Persen	2.650.000.000	96 Persen	2.100.000.000	96 Persen	2.660.000.000	96 Persen	9.430.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	445.000.000	100 Persen	489.500.000	100 Persen	538.450.000	100 Persen	592.295.000	100 Persen	2.065.245.000	Dinas Sosial

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,13 Persen	4,50 Persen		4,80 Persen		5 Persen		5,20 Persen		5,20 Persen			
4	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	33,62 Persen	33,85 Persen		33,89 Persen		33,93 Persen		33,97 Persen		33,97 Persen		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Rata- rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (Kelapa, Karet dan Kakao)/ Persentase Rata- rata Peningkatan Populasi Ternak	3,26 Persen/3 Persen	3 Persen/ 3 Persen	4.385.000.000	3 Persen/ 3 Persen	3.875.000.000	3 Persen/ 3 Persen	4.330.750.000	3 Persen/ 3 Persen	4.513.437.500	12 Persen/ 12 Persen	17.104.187.500	Dinas Pertanian dan Perkebunan/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Pening- katan Produksi HPT	3,1 Triliun Rupiah/1,3 4 Persen	3,1 Triliun/ Rupiah/2 Persen	11.025.000.000	3,3 Triliun Rupiah/2,5 Persen	9.150.000.000	3,4 Triliun Rupiah/2,5 Persen	11.825.000.000	3,5 Triliun Rupiah/3 Persen	11.450.000.000	3,5 Triliun Rupiah/10 Persen	43.450.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	100 Persen	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	1.200.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	83,98 Persen	85 Persen	4.288.000.000	87 Persen	4.350.000.000	89 Persen	4.585.000.000	91 Persen	4.725.000.000	91 Persen	17.948.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.983 Ton	13500 Ton	1.595.000.000	14000 Ton	1.736.500.000	14500 Ton	1.848.325.000	15000 Ton	1.965.741.250	57000 Ton	7.145.566.250	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.074 Ton	14000 Ton	2.165.000.000	14500 Ton	2.712.500.000	15000 Ton	3.988.125.000	15500 Ton	3.077.531.250	15500 Ton	11.943.156.250	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Persen	60 Persen	100.000.000	65 Persen	100.000.000	70 Persen	100.000.000	75 Persen	100.000.000	75 Persen	400.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	25,02 Persen	26,17 Persen	15.425.057.000	27,76 Persen	17.387.808.710	29,36 Persen	19.812.699.145	30,95 Persen	21.429.953.085	30,95 Persen	74.055.517.940	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	480.000.000	100 Persen	550.000.000	100 Persen	603.000.000	100 Persen	663.000.000	100 Persen	2.296.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	21,56 Persen	21,95 Persen		22,15 Persen		22,35 Persen		22,55 Persen		22,55 Persen	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	72,16 Persen	70 Persen	100.000.000	75,47 Persen	100.000.000	75,92 Persen	120.000.000	76,36 Persen	140.000.000	76,36 Persen	460.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	64,13 Persen	66,67 Persen	175.000.000	70 Persen	175.000.000	73,17 Persen	175.000.000	95,24 Persen	175.000.000	95,24 Persen	700.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Jumlah UMKM	0,8 Persen	0,5 Persen	150.000.000	0,5 Persen	200.000.000	0,5 Persen	200.000.000	0,5 Persen	100.000.000	2 Persen	650.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	yang Diberdayakan												
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	0,02 Persen	0,03 Persen	700.000.000	0,03 Persen	550.000.000	0,04 Persen	742.000.000	0,05 Persen	738.019.000	0,05 Persen	2.730.019.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	5,66 Persen	33,96 Persen	60.000.000	52,83 Persen	60.000.000	76,42 Persen	60.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	260.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	17,39 Persen	17,95 Persen	75.000.000	20 Persen	75.000.000	20,49 Persen	80.000.000	20,95 Persen	85.000.000	20,95 Persen	315.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Dinilai	13,59	15,38 Persen	45.000.000	16 Persen	45.000.000	17,07 Persen	50.000.000	17,62 Persen	55.000.000	17,62 Persen	195.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	11, 11 Persen	33,33 Persen	45.000.000	55,55 Persen	45.000.000	77,77 Persen	60.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	230.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	0 Persen	5,26 Persen	55.000.000	5,26 Persen	55.000.000	5,26 Persen	85.000.000	5,26 Persen	100.000.000	21,05 Persen	295.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	71,79 Persen	75,60 Persen	1.470.000.000	82,93 Persen	1.340.000.000	85,37 Persen	1.250.000.000	87,80 Persen	1.170.000.000	87,80 Persen	5.230.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	0,71 Persen	1,01 Persen		1,16 Persen		1,31 Persen		1,46 Persen		1,46 Persen		

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	7,57 Persen	12,90 Persen	350.000.000	15,17 Persen	316.980.932	17,57 Persen	216.980.932	19,98 Persen	151.980.932	19,98 Persen	1.035.942.796	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Tidak Ada	Ada	105.000.000	Ada	115.000.000	Ada	145.000.000	Ada	200.000.000	Ada	565.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	153 Ton	300 Ton	157.000.000	350 Ton	164.000.000	400 Ton	164.000.000	450 Ton	173.000.000	1.500 ton	658.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
4	3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,77 Persen	9,49 Persen		9,83 Persen	10,12 Persen		10,47 Persen		10,47 Persen		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	101,74 Persen	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	6.712.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	4	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah	Jumlah Destinasi Wisata	59 Destinasi	63 Destinasi		70 Destinasi	75 Destinasi		80 Destinasi		80 Destinasi		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	10,17 Persen	19,05 Persen	400.000.000	21,43 Persen	425.000.000	26,25 Persen	451.250.000	26,25 Persen	478.812.500	26,25 Persen	1.755.062.500	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	35,59 Persen	49,21 Persen	130.000.000	51,34 Persen	143.000.000	54,67 Persen	157.300.000	57,50 Persen	173.030.000	57,50 Persen	603.330.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	21 Persen	40 Persen	280.000.000	50 Persen	308.000.000	59 Persen	338.800.000	69 Persen	372.680.000	69 Persen	1.299.480.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	13,10 Persen	17,86 Persen	105.000.000	20,24 Persen	150.250.000	22,46 Persen	115.762.500	22,46 Persen	151.550.000	22,46 Persen	522.562.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	126.000.000	100 Persen	132.300.000	100 Persen	138.915.000	100 Persen	145.860.000	100 Persen	543.075.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	0	100 Persen	70.000.000	100 Persen	77.000.000	100 Persen	84.700.000	100 Persen	93.170.000	100 Persen	324.870.000	Dinas Sosial
4	5	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,581 Indeks	0,643 Indeks		0,665 Indeks		0,682 Indeks		0,707 Indeks		0,707 Indeks	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	83,26 Persen	92,29 Persen	425.000.000	95,24 Persen	467.500.000	96,58 Persen	510.000.000	96,70 Persen	544.000.000	96,70 Persen	1.946.500.000	Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	975.000.000	100 Persen	1.064.500.000	100 Persen	1.148.000.000	100 Persen	1.223.000.000	100 Persen	4.410.500.000	Kecamatan
	Program Penataan Desa	Adanya Fasilitas Permasalahan Gampong dan Pendataan Gampong	Ada	Ada	1.318.153.000	Ada	1.449.968.300	Ada	1.594.965.130	Ada	1.754.461.643	Ada	6.117.548.073	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	85 Persen	86 Persen	300.000.000	87 Persen	315.000.000	88 Persen	330.750.000	90 Persen	347.287.500	90 Persen	1.293.037.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	6	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Peningkatan Investasi	60,62 Milyar Rupiah	63,06 Milyar Rupiah	64,32 Milyar Rupiah	65,61 Milyar Rupiah	66,92 Milyar Rupiah	259,91 Milyar Rupiah						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada	Ada	85.000.000	Ada	95.000.000	Ada	100.000.000	Ada	130.000.000	Ada	410.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	50.000.000	10 Pelaku Investasi	128.927.119	10 Pelaku Investasi	110.000.000	10 Pelaku Investasi	110.000.000	40 Pelaku Investasi	398.927.119	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	1.371 Pelaku Usaha	1.500 Pelaku Usaha	350.000.000	1.700 Pelaku Usaha	480.000.000	2.000 Pelaku Usaha	450.000.000	2.200 Pelaku Usaha	490.000.000	2.200 Pelaku Usaha	1.770.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	60 Perusahaan	80 Perusahaan	410.000.000	90 Perusahaan	430.000.000	100 Perusahaan	460.000.000	110 Perusahaan	490.000.000	110 Perusahaan	1.790.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada	Ada	185.000.000	Ada	200.000.000	Ada	200.000.000	Ada	200.000.000	Ada	785.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	7	Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi	Laju Inflasi	1,97 Persen	1-3 Persen		1-3 Persen		1-3 Persen		1-3 Persen		1-3 Persen		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya	Ya	700.000.000	Ya	700.000.000	Ya	700.000.000	Ya	750.000.000	Ya	2.850.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5		Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	72,33 Indeks	72,70 Indeks		73,10 Indeks		73,50 Indeks		73,90 Indeks		73,90 Indeks		
5	1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat	Rata-Rata lama Sekolah	9,29 Tahun	9,31 Tahun		9,32 Tahun		9,33 Tahun		9,34 Tahun		9,34 Tahun		

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	83,06 Persen	85,55 Persen	105.598.625.863	88,11 Persen	105.861.509.855	90,76 Persen	106.964.976.564	93,48 Persen	107.156.593.472	93,48 Persen	425.581.705.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	100 Persen	100 Persen	105.000.000	0	0	100 Persen	105.000.000	0	0	100 Persen	210.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	54,12 Persen	68,28 Persen	971.250.000	69,64 Persen	971.250.000	71,04 Persen	971.250.000	72,46 Persen	971.250.000	72,46 Persen	3.885.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4.819 Orang	7.173 Orang	200.000.000	8.173 Orang	220.000.000	9.173 Orang	242.000.000	10.173 Orang	266.200.000	10.173 Orang	928.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Harapan Lama Sekolah	14,84 Tahun	15,04 Tahun		15,1 Tahun		15,16 Tahun		15,22 Tahun		15,22 Tahun			
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	48,24 Persen	67,62 Persen	194.189.446	77,87 Persen	203.616.562	88,73 Persen	212.893.678	100 Persen	222.140.794	100 Persen	832.840.480	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
5	2	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Angka harapan hidup	71,26 Tahun	71,92 Tahun		72,46 Tahun	73 Tahun		73,54 Tahun		73,54 Tahun			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	16,67 Persen/100 Persen	25 Persen/100 Persen	83.916.869.686	33,33 Persen/100 Persen	85.948.368.686	41,66 Persen /100 Persen	90.455.400.660	50 Persen/100 Persen	98.151.845.743	50 Persen/100 Persen	358.472.484.775	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar/ Persentase Pemerataan SDM	90 Persen/98,39 Persen	100 Persen/100 Persen	2.340.000.000	100 Persen/100 Persen	2.474.000.000	100 Persen/100 Persen	2.616.400.000	100 Persen/100 Persen	2.767.790.000	100 Persen/100 Persen	10.198.190.000	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	422 Unit	430 Unit	303.240.000	442 unit	314.240.000	455 unit	330.340.000	469 unit	348.050.000	469 unit	1.295.870.000	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang Aktif	970 UKBM	1.069 UKBM	442.934.040	1.123 UKBM	446.835.751	1.179 UKBM	446.835.751	1.238 UKBM	446.835.751	1.238 UKBM	1.783.441.293	Dinas Kesehatan	
5	3	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Pemuda Berprestasi	0,26 Persen	0,66 Persen		0,86 Persen		1,06 Persen		1,20 Persen		1,20 Persen		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	19,23 Persen	10 Persen	600.000.000	10 Persen	630.000.000	10 Persen	661.500.000	10 Persen	566.556.032	40 Persen	2.458.056.032	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	100 Persen	100 Persen	350.000.000	100 Persen	360.000.000	100 Persen	384.000.000	100 Persen	382.400.000	100 Persen	1.476.400.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
		Indeks Pembangunan Olah Raga	0,287 Indeks	0,385 Indeks		0,427 Indeks		0,450 Indeks		0,501 Indeks		0,501 Indeks			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	34 Cabor	36 Cabor	11.327.046.161	37 Cabor	8.268.398.469	38 Cabor	9.231.818.392	40 Cabor	8.668.409.312	40 Cabor	37.495.672.334	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	58,06 Indeks	58,20 Indeks		58,27 Indeks		58,35 Indeks		58,42 Indeks		58,42 Indeks		
		Program Pengarustaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	65 Persen	73 Persen	275.000.000	76 Persen	242.500.000	80 Persen	261.750.000	84 Persen	282.925.000	84 Persen	1.062.175.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	204.014.800	100 Persen	331.650.000	100 Persen	364.815.000	100 Persen	401.296.500	100 Persen	1.301.776.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	399.850.200	100 Persen	332.601.500	100 Persen	365.861.650	100 Persen	402.447.815	100 Persen	1.500.761.165	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi Keluarga	Ada	Ada	260.150.000	Ada	286.165.000	Ada	314.781.500	Ada	346.259.650	Ada	1.207.356.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	61,89 Persen	66 Persen	4.522.057.200	70 Persen	4.974.262.920	74 Persen	5.471.689.212	78 Persen	6.018.858.134	78 Persen	20.986.867.466	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina	6,07 Persen	8 Persen	4.026.540.000	9 Persen	4.429.194.000	11 Persen	4.872.113.400	13 Persen	5.359.324.740	13 Persen	18.687.172.140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya		Nindya		Nindya		Utama		Utama		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa yang Dibina BKMT	2,79 Persen	2,79 Persen	720.000.000	2,79 Persen	792.000.000	2,79 Persen	871.200.000	2,79 Persen	958.320.000	11,17 Persen	3.341.520.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	31 Persen	45 Persen	120.000.000	47 Persen	132.000.000	48 Persen	145.200.000	50 Persen	159.720.000	50 Persen	556.920.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
5	5	Meningkatnya Daya Saing Daerah	3,05 Indeks	3,1 Indeks		3,15 Indeks		3,17 Indeks		3,20 Indeks		3,20 Indeks		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	98 Persen	100 Persen	670.000.000	100 Persen	720.000.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	2.930.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6		Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan	0,296 Indeks	0,290 Indeks		0,287 Indeks		0,284 Indeks		0,281 Indeks		0,281 Indeks		
6	1	Mengurangi Angka Kemiskinan	13,25 Persen	12,25 Persen		11,75 Persen		11,25 Persen		10,75 Persen		10,75 Persen		
	Program Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Jumlah Mustahik	6.262 Orang	8.304 Orang	10.409.143.755	8.304 Orang	10.510.594.545	8.304 Orang	10.600.695.945	8.304 Orang	10.688.196.545	33.216 Orang	42.208.630.790	Sekretariat Baitul Mal
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	0 Persen	25 Persen	100.000.000	50 Persen	110.000.000	75 Persen	121.000.000	100 Persen	133.100.000	100 Persen	464.100.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pembangunan	Persentase SP yang Aktif	42,85 Persen	42,85 Persen	150.000.000	42,85 Persen	165.000.000	42,85 Persen	181.500.000	42,85 Persen	199.650.000	42,85 Persen	696.150.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kawasan Transmigrasi														
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK Mandiri	37,31 Persen	41,79 Persen	150.000.000	47,76 Persen	165.000.000	57,73 Persen	181.500.000	59,70 Persen	199.650.000	59,70 Persen	696.150.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	106 Persen	100 Persen	3.287.867.024	100 Persen	3.287.867.024	100 Persen	3.616.653.726	100 Persen	3.978.319.099	100 Persen	14.170.706.873	Sekretariat Daerah	
6	2	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	24 Persen	40 Persen		48 Persen		56 Persen		62 Persen		62 Persen		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Difasilitasi	85,71 Persen	87,71 Persen	700.000.000	88,71 Persen	739.000.000	88,71 Persen	811.000.000	89,71 Persen	835.200.000	89,71 Persen	3.085.200.000	Dinas Sosial	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	205.000.000	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangani	43,02 Persen	43,06 Persen	780.000.000	43,08 Persen	899.950.000	43,10 Persen	1.049.945.000	43,12 Persen	1.004.939.500	43,12 Persen	3.734.834.500	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	84,65 Persen	84,65 Persen	1.917.420.000	84,65 Persen	1.587.212.000	84,65 Persen	1.535.533.200	84,65 Persen	1.683.470.000	84,65 Persen	6.723.635.200	Dinas Sosial	
6	3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,4 Skor	85,7 Skor		88,80 Skor		91,90 Skor		95 Skor		95 Skor		

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	103 Persen	105 Persen	3.100.000.000	105 Persen	3.235.500.000	106 Persen	3.367.275.000	106 Persen	3.400.000.000	106 Persen	13.102.775.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase KWT Aktif	72 Persen	75 Persen	1.365.000.000	77 Persen	1.395.750.000	79 Persen	1.480.537.500	81 Persen	1.569.564.375	81 Persen	5.810.851.875	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	9 Persen	13 Persen	125.000.000	16 Persen	125.000.000	19 Persen	175.000.000	22 Persen	175.000.000	22 Persen	600.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	87 Persen	88 Persen	175.000.000	89 Persen	183.750.000	90 Persen	192.937.500	91 Persen	202.584.375	91 Persen	754.271.875	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
7	Menurunkan Angka Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,32 Persen	3,80 Persen		3,65 Persen		3,50 Persen		3,35 Persen		3,35 Persen		
7	1 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,91 Persen	67,73 Persen		68,37 Persen		69 Persen		69,63 Persen		69,63 Persen		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Memiliki Kompetensi	40,97 Persen	41 Persen	530.000.000	42 Persen	783.000.000	43 Persen	861.300.000	44 Persen	947.430.000	44 Persen	3.121.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan	60,42 Persen	62 Persen	90.000.000	63 Persen	99.000.000	64 Persen	108.900.000	65 Persen	119.790.000	65 Persen	417.690.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi	12 Persen	12 Persen	50.000.000	12 Persen	55.000.000	12 Persen	60.500.000	12 Persen	66.550.000	48 Persen	232.050.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban	1,72 Indeks	<1 Indeks		<1 Indeks		<1 Indeks		<1 Indeks		<1 Indeks		
8	1	Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Konflik yang Diselesaikan	50 Persen	60 Persen		65 Persen		70 Persen		72 Persen		72 Persen	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,25 Persen	23 Persen	350.499.999	24 Persen	193.021.064	25 Persen	211.168.170	25 Persen	232.284.994	25 Persen	986.974.227	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	64 Persen	68 Persen	351.000.000	70 Persen	138.600.000	72 Persen	97.364.636	74 Persen	103.882.868	74 Persen	690.847.504	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada	Ada	221.830.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	110.000.000	Ada	531.830.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	75 Persen	80 Persen	334.500.000	82 Persen	85.250.000	85 Persen	91.012.500	87 Persen	97.213.125	87 Persen	607.975.625	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPK (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program Dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPK			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Penanganan Konflik Sosial														
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen	2.100.000.000	100 Persen	2.256.595.000	100 Persen	2.923.679.250	100 Persen	3.102.043.162	100 Persen	10.382.317.412	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
8	2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	77,91 Persen	0 Persen		80 Persen		0 Persen		0 Persen		80 Persen		
	Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	81,8 Persen	85 Persen	8.391.972.746	87 Persen	14.515.689.394	89 Persen	1.040.918.000	90 Persen	989.085.500	90 Persen	24.937.665.640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang otonomi daerah, dimana tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggara pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing. Pada dasarnya wujud keuangan Negara pemerintah pusat hampir sama dengan wujud keuangan negara pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan Negara pada pemerintah pusat yang sama dengan komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan daerah pada pemerintahan daerah.

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila ada selisih (gap) antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah di masa yang akan datang, terkait dari sumber penerimaan adalah dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman serta penerimaan piutang daerah.

Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan untuk pemanfaatannya, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik serta pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.

Berkenaan dengan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok hutang dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan fungsi layanan atau kebutuhan dasar masyarakat yang mendapatkan penugasan khusus dari Kepala Daerah.

Demi mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta tujuan pembangunan daerah. Program prioritas dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Suatu program prioritas, kinerjanya merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja

Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan empat tahun kedepan.

Kerangka pendanaan keuangan kabupaten meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan kabupaten dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Prediksi kemampuan keuangan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama empat tahun dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026.

7.1.1.1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi berdasarkan potensi daerah. Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban kabupaten, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu

pada prinsip-prinsip penganggaran, proyeksi belanja Tahun Anggaran 2023-2026, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, beberapa komponen kerangka pendanaan daerah mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, perubahan tersebut didasari kepada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 memang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode RPJMD tahun 2017-2022 yang lalu. Salah satunya adalah penurunan alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (DOKA) dari dua persen menjadi satu persen mulai tahun 2023. Tentunya hal ini harus dicermati dalam proses penyusunan perencanaan empat tahun ke depan.

Proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 merupakan perkiraan atau proyeksi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 2017-2022, dimana rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 1,01 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang baru mulai menggeliat setelah pandemi Covid-19 dan ditargetkan terus positif serta inflasi yang berada dikisaran rata-rata 2 persen, dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah untuk tahun 2023-2026 diperkirakan sebesar 1,9 persen. Rincian pertumbuhan tersebut terdiri dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan tumbuh optimis rata-rata sebesar 5,30 persen. Perkiraan proyeksi pertumbuhan dari Pendapatan Transfer sebesar 1,42 persen, namun untuk komponen DAU diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 0,98 persen dengan asumsi adanya peningkatan jumlah penduduk sebagai komponen formulasi penghitungan DAU. Untuk proyeksi pertumbuhan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan meningkat sebesar 44,44 persen tiap tahunnya.

7.1.1.1.1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 7.1 dapat dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2023-2026, untuk pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 5,42 persen, restribusi daerah sebesar 5,09 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 7,33 persen dan Lain-Lain PAD Yang Sah 5,22 persen. Rata -rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,30 persen.

Untuk mencapai pengelolaan PAD yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah yang berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan restribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.

Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

KODE	URAIAN	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.945.097.875,00	193.419.557.875,00	203.040.143.875,00	214.766.339.975,00	5,30
4.1.01.	Pajak Daerah	30.200.000.000,00	32.166.000.000,00	33.774.300.000,00	35.377.020.000,00	5,42
4.1.02.	Retribusi Daerah	12.198.000.000,00	12.807.900.000,00	13.448.295.000,00	14.156.541.000,00	5,09
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.617.500.000,00	6.179.250.000,00	7,33
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	136.547.097.875,00	143.195.657.875,00	150.200.048.875,00	159.053.528.975,00	5,22

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

Tabel 7.2
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

KODE	URAIAN	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	44,44
4.3.01.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	44,44
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	44,44

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

Oleh karena itu perlu peningkatan kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan, salah satunya melalui peningkatan PAD. Masih terdapat potensi penerimaan daerah yang dapat dikejar dengan serius seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah dan diharapkan SKPK teknis untuk memaksimalkan pengusulan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah maupun sumber-sumber pendanaan lainnya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Aceh dan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD dan bermaksud melakukan Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bireuen dengan sumber dana APBK Bireuen Tahun Anggaran 2022.

7.1.1.1.2. Proyeksi Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Pendapatan masih sangat besar terutama di pendapatan transfer. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari dana perimbangan sebagai upaya peningkatan fiskal daerah. Proyeksi pendapatan transfer dari pusat dari tahun 2023-2026 mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 4,37 persen.

Pada pendapatan transfer antar daerah, persentase dana DOKA mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2022 seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari tahun 2023. Dengan berkurangnya dana DOKA tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan prioritas di Kabupaten Bireuen. Untuk proyeksi pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3
Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

KODE	URAIAN	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.751.498.502.044,40	1.770.541.146.308,40	1.797.378.132.474,20	1.826.982.624.382,72	1,42
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.659.688.912.728,00	1.676.637.596.308,00	1.698.429.227.473,80	1.722.638.827.982,32	1,25
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.196.575.558.601,00	1.215.685.858.331,00	1.238.616.342.009,80	1.265.942.195.293,32	1,90
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.955.873.000	17.464.550.000	18.337.777.000	19.621.421.000	5,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	815.826.175.040,00	823.808.936.790,00	831.728.226.158,00	840.029.858.420,00	0,98
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	152.131.399.000,00	156.695.340.000,00	164.530.108.000,00	176.047.215.500,00	5,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.662.111.561,00	217.717.031.541,00	224.020.230.851,80	230.243.700.373,32	2,84
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	24.000.000.000	25.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	4,06
4.2.01.05	Dana Desa	439.113.354.127,00	435.951.737.977,00	432.812.885.464,00	429.696.632.689,00	-0,72
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.809.589.316,40	93.903.550.000,40	98.948.905.000,40	104.343.796.400,40	4,37
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.051.000.000,00	39.953.550.000,00	43.948.905.000,00	48.343.796.400,00	8,33

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

7.1.1.2. Proyeksi Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan

Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Disamping itu, secara lebih rinci kebijakan belanja daerah Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 diarahkan pada:

1. Pemanfaatan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Prioritas belanja daerah difokuskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Untuk belanja reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif;

4. Adanya belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar;
5. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung, serta pembangunan gedung pemerintah yang dianggap mendesak termasuk penyediaan fasilitas serta rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
6. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2027 serta peningkatan penerimaan terhadap beberapa pos pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 7.4
Proyeksi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
	BELANJA DAERAH	1.947.300.832.048	1.976.580.791.670	2.014.805.962.085	2.058.908.896.379	1,88
	BELANJA OPERASI	1.156.302.510.759	1.182.552.836.289	1.206.076.602.669	1.233.950.059.318	2,19
	Belanja Pegawai	764.794.889.759	780.376.257.363	794.920.298.602	811.434.533.458	1,99
	Belanja Barang dan Jasa	310.119.449.328	316.380.643.821	326.644.450.260	337.533.434.977	2,87
	Belanja Hibah	63.420.019.054	67.468.419.435	65.817.787.823	65.914.143.580	1,36
	Belanja Bantuan Sosial	17.968.152.618	18.327.515.670	18.694.065.984	19.067.947.303	2,00
	BELANJA MODAL	244.770.004.752	249.223.978.725	266.123.431.373	283.836.230.686	5,09
	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.596.957.606	20.227.500.000	20.064.182.763	20.507.489.644	1,54
	Belanja Tidak Terduga	19.596.957.606	20.227.500.000	20.064.182.763	20.507.489.644	1,54
	BELANJA TRANSFER	526.631.358.931	524.576.476.656	522.541.745.280	520.615.116.731	-0,38

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

7.1.1.3. Proyeksi Pembiayaan

Sedangkan Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Proyeksi SILPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jika dilihat dari tren besaran SiLPA pada periode tahun sebelumnya bertambah dengan rata-rata 19 persen setiap tahunnya. Penyebab utama tingginya SiLPA pada tahun 2017-2020 adalah perubahan kebijakan yang mewajibkan tersedianya juknis untuk penyaluran bantuan keuangan provinsi dan refocusing program/kegiatan akibat covid-19 pada tahun 2020. Disamping itu SiLPA ini juga terjadi akibat gagal dan sisa tender serta efisiensi penggunaan anggaran pada periode tersebut.

Selanjutnya proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA berdasarkan data historis SiLPA sebelumnya ditetapkan untuk SiLPA yang tidak mengikat tahun 2023-2026 sebesar minus 2 (dua) persen per tahun yang bersumber dari efisiensi pengelolaan anggaran. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 7.5
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
6	PEMBIAYAAN	8.857.232.128,84	8.620.087.486,26	8.387.685.736,54	8.159.932.021,81	-2,70
6.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.857.232.128,84	11.620.087.486,26	11.387.685.736,54	11.159.932.021,81	1,88
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.857.232.128,84	11.620.087.486,26	11.387.685.736,54	11.159.932.021,81	2,13
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1,92
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2,65

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

7.1.2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2023-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,87 persen dari Rp. 1.964.932.899.446,67 pada realisasi tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp. 2.061.908.896.380 pada Tahun 2026. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja operasi, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Peruntukan kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar untuk menunjang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya penggunaan kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 790.998.321.285 dan terus meningkat sampai Rp.824.958.837.061 pada tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.6 berikut ini.

Tabel 7.6
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi 2021*	Proyeks				Pertumbuhan (%)
			2023	2024	2025	2026	
1	Pendapatan	1.890.020.475.616	1.938.443.599.919,40	1.968.010.704.183,40	2.006.418.276.349,20	2.050.748.964.357,72	1,90
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	
3	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.912.423.831	11.857.232.128,84	11.620.087.486,26	11.387.685.736,54	11.159.932.021,81	-2,00
	Total Penerimaan	1.964.932.899.447	1.950.300.832.048	1.979.580.791.670	2.017.805.962.086	2.061.908.896.380	1,87
	Dikurangi :						
4	Belanja Operasi	1.063.344.673.227	1.156.302.510.759	1.182.552.836.289	1.206.076.602.669	1.233.950.059.318	2,19
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	897.088.226.219,67	790.998.321.289	794.027.955.381	808.729.359.417	824.958.837.061	1,41

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen berisi program-program baik untuk mencapai pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 7.7
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bireuen
Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.889.607.179	100 Persen	2.958.853.122	100 Persen	3.039.971.152	100 Persen	3.146.054.960	100 Persen	12.034.486.413	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah Terakreditasi	156 Dayah	161 Dayah	11.792.000.000	164 Dayah	11.845.000.000	167 Dayah	12.400.000.000	167 Dayah	12.200.000.000	167 Dayah	48.237.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	941.100.467	100 Persen	976.555.255	100 Persen	1.003.376.150	100 Persen	1.028.678.286	100 Persen	3.949.710.158	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	48,24 Persen	67,62 Persen	194.189.446	77,87 Persen	203.616.562	88,73 Persen	212.893.678	100 Persen	222.140.794	100 Persen	832.840.480	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	372.454.508.026	100 Persen	376.994.519.689	100 Persen	381.706.045.031	100 Persen	386.258.615.372	100 Persen	1.517.413.688.118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	83,06 Persen	85,55 Persen	105.598.625.863	88,11 Persen	105.861.509.855	90,76 Persen	106.964.976.564	93,48 Persen	107.156.593.472	93,48 Persen	425.581.705.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	100 Persen	100 Persen	105.000.000	0 Persen	0	100 Persen	105.000.000	0 Persen	0	100 Persen	210.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	54,12 Persen	68,28 Persen	971.250.000	69,64 Persen	971.250.000	71,04 Persen	971.250.000	72,46 Persen	971.250.000	72,46 Persen	3.885.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	61,54 Persen	76,92 Persen	496.250.000	84,62 Persen	578.812.500	92,31 Persen	617.753.000	100 Persen	658.640.000	100 Persen	2.351.455.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	71 Persen	73 Persen	183.750.000	74 Persen	192.937.500	76 Persen	202.584.000	77 Persen	212.713.000	77 Persen	791.984.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	13,10 Persen	17,86 Persen	105.000.000	20,24 Persen	150.250.000	22,46 Persen	115.762.500	22,46 Persen	151.550.000	22,46 Persen	522.562.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	126.000.000	100 Persen	132.300.000	100 Persen	138.915.000	100 Persen	145.860.000	100 Persen	543.075.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	115.194.035.500	100 Persen	117.107.624.733	100 Persen	121.378.484.148	100 Persen	127.707.657.125	100 Persen	481.387.801.506	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	16,67 Persen	25 Persen	67.500.000.000	33,33 Persen	69.036.517.680	41,66 Persen	71.793.343.614	50 Persen	77.203.444.716	50 Persen	285.533.306.010	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	90 Persen	100 Persen	340.000.000	100 Persen	374.000.000	100 Persen	411.400.000	100 Persen	452.540.000	100 Persen	1.577.940.000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	422 Unit	430 Unit	303.240.000	442 unit	314.240.000	455 unit	330.340.000	469 unit	348.050.000	469 unit	1.295.870.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang Aktif	970 UKBM	1.069 UKBM	442.934.040	1.123 UKBM	446.835.751	1.179 UKBM	446.835.751	1.238 UKBM	446.835.751	1.238 UKBM	1.783.441.293	Dinas Kesehatan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	132.534.481.895	100 Persen	133.179.807.396	100 Persen	142.805.025.572	100 Persen	152.276.509.772	100 Persen	560.795.824.635	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	16.416.869.686	100 Persen	16.911.851.006	100 Persen	18.662.057.046	100 Persen	20.948.401.027	100 Persen	72.939.178.765	RSU dr. Fauziah Bireuen	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi Serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	98,39 Persen	100 Persen	2.000.000.000	100 Persen	2.100.000.000	100 Persen	2.205.000.000	100 Persen	2.315.250.000	100 Persen	8.620.250.000	RSU dr. Fauziah Bireuen	
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	12.833.435.560	100 Persen	13.511.533.328	100 Persen	14.220.716.856	100 Persen	14.962.539.737	100 Persen	55.528.225.481	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	25,02 Persen	26,17 Persen	15.425.057.000	27,76 Persen	17.387.808.710	29,36 Persen	19.812.699.145	30,95 Persen	21.429.953.085	30,95 Persen	74.055.517.940	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Air Minum	86,7 Persen	88 Persen	5.373.288.000	89 Persen	5.519.486.640	90 Persen	5.770.460.972	91 Persen	6.139.393.240	91 Persen	22.802.628.852	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	87,13 Persen	88 Persen	5.025.397.000	89 Persen	5.161.158.910	90 Persen	5.394.216.855	91 Persen	5.736.812.035	91 Persen	21.317.584.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	71,30 Persen	71,87 Persen	1.050.000.000	72,10 Persen	1.085.000.000	72,33 Persen	1.105.500.000	72,55 Persen	1.122.050.000	72,55 Persen	4.362.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang Terbangun	30 Persen	31,67 Persen	14.306.508.000	33,33 Persen	14.281.833.400	35 Persen	15.095.925.070	36,67 Persen	15.950.721.323	36,67 Persen	59.634.987.793	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	0 Persen	5 Persen	2.876.350.000	7,50 Persen	2.513.985.000	10 Persen	3.395.383.500	12,50 Persen	3.524.921.850	12,50 Persen	12.310.640.350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	51,19 Persen	53,57 Persen	80.409.257.016	56,02 Persen	80.501.198.032	57,33 Persen	80.312.757.934	58,64 Persen	83.463.395.831	59,99 Persen	324.686.608.813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	3,33 Persen	4,44 Persen	350.000.000	5,55 Persen	360.850.000	6,66 Persen	380.435.000	7,77 Persen	400.678.500	7,77 Persen	1.491.963.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	660.500.000	Sesuai	706.550.000	Sesuai	739.205.000	Sesuai	759.125.500	Sesuai	2.865.380.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.056.155.204	100 Persen	3.692.695.578	100 Persen	3.402.868.732	100 Persen	3.603.753.771	100 Persen	13.755.473.285	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani	14 Unit	24 Unit	740.000.000	24 Unit	800.000.000	24 Unit	800.000.000	24 Unit	800.000.000	96 Unit	3.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Program Kawasan Permukiman	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	90,39 Hektar	20 Hektar	1.585.000.000	20 Hektar	1.872.000.000	20 Hektar	1.829.825.000	13,4 hektar	1.930.963.750	73,4 hektar	7.217.788.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	9,26 Persen	8,95 Persen	1.620.000.000	8,63 Persen	1.400.000.000	8,32 Persen	1.500.000.000	8,11 Persen	1.500.000.000	8,11 Persen	6.020.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi PSU yang Layak	33,33 Persen	33,33 Persen	705.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	750.000.000	33,33 Persen	2.955.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.054.945.377	100 Persen	4.297.129.285	100 Persen	4.321.664.802	100 Persen	4.568.576.452	100 Persen	17.242.315.916	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	1.855.000.000	100 Persen	1.640.000.000	100 Persen	1.465.000.000	100 Persen	1.345.000.000	100 Persen	6.305.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran	92,8 Persen	94 Persen	2.020.000.000	95 Persen	2.650.000.000	96 Persen	2.100.000.000	96 Persen	2.660.000.000	96 Persen	9.430.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.649.678.217	100 Persen	4.838.242.569	100 Persen	5.036.377.717	100 Persen	5.261.305.054	100 Persen	19.785.603.557	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen	2.100.000.000	100 Persen	2.256.595.000	100 Persen	2.923.679.250	100 Persen	3.102.043.162	100 Persen	10.382.317.412	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.337.701.443	100 Persen	3.341.201.047	100 Persen	3.425.707.414	100 Persen	3.600.022.440	100 Persen	13.704.632.344	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11		
	Daerah Kabupaten/Kota															
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Difasilitasi	85,71 Persen	87,71 Persen	700.000.000	88,71 Persen	739.000.000	88,71 Persen	811.000.000	89,71 Persen	835.200.000	89,71 Persen	3.085.200.000	Dinas Sosial		
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	205.000.000	Dinas Sosial		
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangani	43,02 Persen	43,06 Persen	780.000.000	43,08 Persen	899.950.000	43,10 Persen	1.049.945.000	43,12 Persen	1.004.939.500	43,12 Persen	3.734.834.500	Dinas Sosial		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	84,65 Persen	84,65 Persen	1.917.420.000	84,65 Persen	1.587.212.000	84,65 Persen	1.535.533.200	84,65 Persen	1.683.470.000	84,65 Persen	6.723.635.200	Dinas Sosial		
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	445.000.000	100 Persen	489.500.000	100 Persen	538.450.000	100 Persen	592.295.000	100 Persen	2.065.245.000	Dinas Sosial		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	-	100 Persen	70.000.000	100 Persen	77.000.000	100 Persen	84.700.000	100 Persen	93.170.000	100 Persen	324.870.000	Dinas Sosial		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.648.599.611	100 Persen	3.821.568.702	100 Persen	4.269.834.100	100 Persen	4.646.255.869	100 Persen	16.386.258.282	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi	40,97 Persen	41 Persen	530.000.000	42 Persen	783.000.000	43 Persen	861.300.000	44 Persen	947.430.000	44 Persen	3.121.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	60,42 persen	62 Persen	90.000.000	63 Persen	99.000.000	64 Persen	108.900.000	65 Persen	119.790.000	65 Persen	417.690.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang difasilitasi	12 persen	12 Persen	50.000.000	12 Persen	55.000.000	12 Persen	60.500.000	12 Persen	66.550.000	48 Persen	232.050.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	0 Persen	25 Persen	100.000.000	50 Persen	110.000.000	75 Persen	121.000.000	100 Persen	133.100.000	100 Persen	464.100.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase SP yang Aktif	42,85 Persen	42,85 Persen	150.000.000	42,85 Persen	165.000.000	42,85 Persen	181.500.000	42,85 Persen	199.650.000	42,85 Persen	696.150.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK Mandiri	37,31 Persen	41,79 Persen	150.000.000	47,76 Persen	165.000.000	57,73 Persen	181.500.000	59,70 Persen	199.650.000	59,70 Persen	696.150.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	5.125.660.167	100 Persen	5.213.621.387	100 Persen	5.283.268.307	100 Persen	5.405.038.772	100 Persen	21.027.588.633	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	103 Persen	105 Persen	3.100.000.000	105 Persen	3.235.500.000	106 Persen	3.367.275.000	106 Persen	3.400.000.000	106 Persen	13.102.775.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase KWT Aktif	72 Persen	75 Persen	1.365.000.000	77 Persen	1.395.750.000	79 Persen	1.480.537.500	81 Persen	1.569.564.375	81 Persen	5.810.851.875	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	9 Persen	13 Persen	125.000.000	16 Persen	125.000.000	19 Persen	175.000.000	22 Persen	175.000.000	22 Persen	600.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	87 Persen	88 Persen	175.000.000	89 Persen	183.750.000	90 Persen	192.937.500	91 Persen	202.584.375	91 Persen	754.271.875	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.983 Ton	13.500 Ton	1.595.000.000	14.000 Ton	1.736.500.000	14.500 Ton	1.848.325.000	15.000 Ton	1.965.741.250	57.000 Ton	7.145.566.250	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.074 Ton	14.000 Ton	2.165.000.000	14.500 Ton	2.712.500.000	15.000 Ton	3.988.125.000	15,500 Ton	3.077.531.250	15,500 Ton	11.943.156.250	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Persen	60 Persen	100.000.000	65 Persen	100.000.000	70 Persen	100.000.000	75 Persen	100.000.000	75 Persen	400.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	153 Ton	300 Ton	157.000.000	350 Ton	164.000.000	400 Ton	164.000.000	450 Ton	173.000.000	1.500 ton	658.000.000	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.192.494.035	100 Persen	2.250.069.301	100 Persen	2.308.689.261	100 Persen	2.368.373.252	100 Persen	9.119.625.849	Dinas Pertanian
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	440.000.000	Dinas Pertanian
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani	0 kasus	1 kasus	150.000.000	1 kasus	150.000.000	1 kasus	170.000.000	1 kasus	170.000.000	4 kasus	640.000.000	Dinas Pertanian
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	35,65 Persen	51,74 Persen	180.000.000	67,82 Persen	180.000.000	83,91 Persen	216.000.000	100 Persen	211.040.000	100 Persen	787.040.000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Peruntukannya	0 Persen	25 Persen	50.000.000	50 Persen	50.000.000	75 Persen	60.000.000	100 Persen	86.400.000	100 Persen	246.400.000	Dinas Pertanahan	
	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase Tanah yang Bersertifikat	28,30 Persen	37,13 Persen	700.000.000	41,54 Persen	700.000.000	45,69 Persen	860.000.000	50,03 Persen	882.400.000	50,03 Persen	3.142.400.000	Dinas Pertanahan	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Tidak ada	Ada	150.000.000	Ada	150.000.000	Ada	180.000.000	Ada	209.200.000	Ada	689.200.000	Dinas Pertanahan	
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani	20 Persen	40 Persen	80.000.000	60 Persen	80.000.000	80 Persen	96.000.000	100 Persen	108.240.000	100 Persen	364.240.000	Dinas Pertanahan	
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.686.788.097	100 Persen	3.992.686.629	100 Persen	3.964.467.117	100 Persen	4.127.666.008	100 Persen	15.771.607.851	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	80,30 Persen	81,53 Persen	295.600.000	63,36 Persen	325.160.000	63,46 Persen	335.676.000	63,56 Persen	408.943.600	63,56 Persen	1.365.379.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang Ditangani	12,12 Persen	12,12 Persen	220.000.000	12,12 Persen	307.000.000	12,12 Persen	318.700.000	12,12 Persen	325.570.000	12,12 Persen	1.171.270.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0 Persen	25 Persen	50.000.000	25 Persen	55.000.000	25 Persen	60.500.000	25 Persen	66.550.000	25 Persen	232.050.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan	Persentase MHA yang Dibina	6,67 Persen	9 Persen	30.000.000	13 Persen	33.000.000	13 Persen	36.300.000	13 Persen	39.930.000	48 Persen	139.230.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH														
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Gampong Iklim	2 Gampong	4 Gampong	315.500.000	6 Gampong	327.050.000	8 Gampong	339.755.000	10 Gampong	353.730.500	10 Gampong	1.336.035.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.500.000	100 Persen	66.550.000	100 Persen	73.205.000	100 Persen	255.255.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	45 Persen	50 Persen	8.244.400.000	55 Persen	8.958.840.000	60 Persen	9.354.724.000	65 Persen	9.840.196.400	65 Persen	36.398.160.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-	Ada	250.000.000	Ada	150.000.000	Tidak Ada	0	Tidak Ada	0	Ada	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	5.046.259.470	100 Persen	5.234.091.219	100 Persen	5.280.988.439	100 Persen	5.966.372.083	100 Persen	21.527.711.211	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	89,16 Persen	90 Persen	130.000.000	90,20 Persen	137.000.000	90,40 Persen	142.000.000	90,60 Persen	148.000.000	90,60 Persen	557.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	68,75 Persen	89,50 Persen	135.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	157.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	612.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan	Ada	Ada	145.000.000	Ada	154.500.000	Ada	162.100.000	Ada	169.860.000	Ada	631.460.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada	Ada	30.000.000	Ada	32.000.000	Ada	34.000.000	Ada	36.000.000	Ada	132.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	65 Persen	73 Persen	275.000.000	76 Persen	242.500.000	80 Persen	261.750.000	84 Persen	282.925.000	84 Persen	1.062.175.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	204.014.800	100 Persen	331.650.000	100 Persen	364.815.000	100 Persen	401.296.500	100 Persen	1.301.776.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa yang Dibina BKMT	2,79 Persen	2,79 Persen	720.000.000	2,79 Persen	792.000.000	2,79 Persen	871.200.000	2,79 Persen	958.320.000	11,17 Persen	3.341.520.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	31 Persen	45 Persen	120.000.000	47 Persen	132.000.000	48 Persen	145.200.000	50 Persen	159.720.000	50 Persen	556.920.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	399.850.200	100 Persen	332.601.500	100 Persen	365.861.650	100 Persen	402.447.815	100 Persen	1.500.761.165	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	8.373.698.420	100 Persen	8.777.723.901	100 Persen	9.094.616.604	100 Persen	9.425.353.675	100 Persen	35.671.392.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
		Program Penataan Desa	Adanya Fasilitas Permasalahan Gampong dan Pendataan Gampong	Ada	Ada	1.318.153.000	Ada	1.449.968.300	Ada	1.594.965.130	Ada	1.754.461.643	Ada	6.117.548.073	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	85 Persen	86 Persen	300.000.000	87 Persen	315.000.000	88 Persen	330.750.000	90 Persen	347.287.500	90 Persen	1.293.037.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	5 Lembaga	5 Lembaga	1.580.000.000	5 Lembaga	1.428.000.000	5 Lembaga	1.079.550.000	5 Lembaga	1.134.942.500	5 Lembaga	5.222.492.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	Program Pengendalian Penduduk	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi Keluarga	Ada	Ada	260.150.000	Ada	286.165.000	Ada	314.781.500	Ada	346.259.650	Ada	1.207.356.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Akseptor KB	61,89 Persen	66 Persen	4.522.057.200	70 Persen	4.974.262.920	74 Persen	5.471.689.212	78 Persen	6.018.858.134	78 Persen	20.986.867.466	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina	6,07 Persen	8 Persen	4.026.540.000	9 Persen	4.429.194.000	11 Persen	4.872.113.400	13 Persen	5.359.324.740	13 Persen	18.687.172.140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.626.763.240	100 Persen	3.218.190.094	100 Persen	3.583.526.998	100 Persen	3.923.643.544	100 Persen	14.352.123.876	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,59	0,55 Indeks	2.332.264.000	0,53 Indeks	2.604.264.000	0,52 Indeks	4.310.764.000	0,51 Indeks	2.560.264.000	0,51 Indeks	11.807.556.000	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.615.255.938	100 Persen	2.735.146.857	100 Persen	2.846.880.809	100 Persen	2.963.576.720	100 Persen	11.160.860.324	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85	86 Peringkat	700.000.000	87 Peringkat	440.000.000	88 Peringkat	700.000.000	90 Peringkat	550.000.000	90 Peringkat	2.390.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi e-Government yang Digunakan SKPK	75 Aplikasi	78 Aplikasi	300.000.000	80 Aplikasi	130.000.000	82 Aplikasi	461.500.000	84 Aplikasi	194.575.000	84 Aplikasi	1.086.075.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ada	Ada	200.000.000	Ada	230.000.000	Ada	260.000.000	Ada	300.000.000	Ada	990.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase SKPK yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	4 Persen	27 Persen	185.000.000	50 Persen	203.500.000	73 Persen	223.850.000	96 Persen	246.235.000	96 Persen	858.585.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.341.135.319	100 Persen	4.194.999.999	100 Persen	4.011.526.748	100 Persen	4.701.511.684	100 Persen	17.249.173.750	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada	Ada	85.000.000	Ada	95.000.000	Ada	100.000.000	Ada	130.000.000	Ada	410.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	50.000.000	10 Pelaku Investasi	128.927.119	10 Pelaku Investasi	110.000.000	10 Pelaku Investasi	110.000.000	40 Pelaku Investasi	398.927.119	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	1.371 Pelaku Usaha	1.500 Pelaku Usaha	350.000.000	1.700 Pelaku Usaha	480.000.000	2.000 Pelaku Usaha	450.000.000	2.200 Pelaku Usaha	490.000.000	2.200 Pelaku Usaha	1.770.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	60 Perusahaan	80 Perusahaan	410.000.000	90 Perusahaan	430.000.000	100 Perusahaan	460.000.000	110 Perusahaan	490.000.000	110 Perusahaan	1.790.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada	Ada	185.000.000	Ada	200.000.000	Ada	200.000.000	Ada	200.000.000	Ada	785.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.100.300.338	100 Persen	3.069.719.212	100 Persen	3.200.380.141	100 Persen	3.338.373.484	100 Persen	12.708.773.175	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	19,23 Persen	10 Persen	600.000.000	10 Persen	630.000.000	10 Persen	661.500.000	10 Persen	566.556.032	40 Persen	2.458.056.032	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	34 Cabor	36 cabor	11.327.046.161	37 Cabor	8.268.398.469	38 Cabor	9.231.818.392	40 Cabor	8.668.409.312	40 Cabor	37.495.672.334	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	100 Persen	100 Persen	350.000.000	100 Persen	360.000.000	100 Persen	384.000.000	100 Persen	382.400.000	100 Persen	1.476.400.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	10,17 Persen	19,05 Persen	400.000.000	21,43 Persen	425.000.000	26,25 Persen	451.250.000	26,25 Persen	478.812.500	26,25 Persen	1.755.062.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	35,59 Persen	49,21 Persen	130.000.000	51,34 Persen	143.000.000	54,67 Persen	157.300.000	57,50 Persen	173.030.000	57,50 Persen	603.330.000	Dinas Pemuda, OlahRaga dan Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	21 Persen	40 Persen	280.000.000	50 Persen	308.000.000	59 Persen	338.800.000	69 Persen	372.680.000	69 Persen	1.299.480.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11		
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.389.034.021	100 Persen	1.530.432.130	100 Persen	1.685.583.753	100 Persen	1.855.870.429	100 Persen	6.460.920.333	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
		Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal	5 urusan	8 urusan	464.000.000	8 urusan	510.400.000	8 urusan	561.440.000	8 urusan	617.584.000	8 urusan	2.153.424.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.261.570.762	100 Persen	3.380.617.494	100 Persen	3.504.796.201	100 Persen	3.649.276.072	100 Persen	13.796.260.529	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4.819 Orang	7.173 Orang	200.000.000	8.173 Orang	220.000.000	9.173 Orang	242.000.000	10.173 Orang	266.200.000	10.173 Orang	928.200.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	13,5 Persen	21,20 Persen	100.000.000	25 Persen	100.000.000	28,20 Persen	100.000.000	32,70 Persen	100.000.000	32,70 Persen	400.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	30.865.658.644	100 Persen	31.494.918.459	100 Persen	31.549.270.095	100 Persen	32.715.758.019	100 Persen	126.625.605.217	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (Kelapa, Karet dan Kakao)	3,26 Persen	3 Persen	2.685.000.000	3 Persen	2.300.000.000	3 Persen	2.577.000.000	3 Persen	2.677.000.000	12 Persen	10.239.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	3,1 Triliun Rupiah	3,1 Triliun Rupiah	9.900.000.000	3,3 Triliun Rupiah	7.900.000.000	3,4 Triliun Rupiah	10.400.000.000	3,5 Triliun Rupiah	9.900.000.000	3,5 Triliun Rupiah	38.100.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	100 Persen	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	1.200.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	83,98 Persen	85 Persen	4.288.000.000	87 Persen	4.350.000.000	89 Persen	4.585.000.000	91 Persen	4.725.000.000	91 Persen	17.948.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	5.243.949.076	100 Persen	5.676.623.781	100 Persen	5.820.485.028	100 Persen	6.004.014.705	100 Persen	22.745.072.590	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	3 Persen	1.700.000.000	3 Persen	1.575.000.000	3 Persen	1.753.750.000	3 Persen	1.836.437.500	12 Persen	6.865.187.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi HPT	0 Persen	2 Persen	1.125.000.000	2,5 Persen	1.250.000.000	2,5 Persen	1.425.000.000	3 Persen	1.550.000.000	10 Persen	5.350.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	480.000.000	100 Persen	550.000.000	100 Persen	603.000.000	100 Persen	663.000.000	100 Persen	2.296.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.556.449.909	100 Persen	4.659.574.314	100 Persen	4.646.426.895	100 Persen	4.790.241.155	100 Persen	18.652.692.273	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	72,16 Persen	70 Persen	100.000.000	75,47 Persen	100.000.000	75,92 Persen	120.000.000	76,36 Persen	140.000.000	76,36 Persen	460.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	64,13 Persen	66,67 Persen	175.000.000	70 Persen	175.000.000	73,17 Persen	175.000.000	95,24 Persen	175.000.000	95,24 Persen	700.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah UMKM yang Diberdayakan	0,8 Persen	0,5 Persen	150.000.000	0,5 Persen	200.000.000	0,5 Persen	200.000.000	0,5 Persen	100.000.000	2 Persen	650.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	0,02 Persen	0,03 Persen	700.000.000	0,03 Persen	550.000.000	0,04 Persen	742.000.000	0,05 Persen	738.019.000	0,05 Persen	2.730.019.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	5,66 Persen	33,96 Persen	60.000.000	52,83 Persen	60.000.000	76,42 Persen	60.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	260.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	17,39 Persen	17,95 Persen	75.000.000	20 Persen	75.000.000	20,49 Persen	80.000.000	20,95 Persen	85.000.000	20,95 Persen	315.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Dinilai	13,59 Persen	15,38 Persen	45.000.000	16 Persen	45.000.000	17,07 Persen	50.000.000	17,62 Persen	55.000.000	17,62 Persen	195.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya	Ya	700.000.000	Ya	700.000.000	Ya	700.000.000	Ya	750.000.000	Ya	2.850.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP yang Telah Ditera	44,36 Persen	50 Persen	135.000.000	54,60 Persen	150.000.000	60 Persen	155.000.000	64,86 Persen	196.500.000	64,86 Persen	636.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	11, 11 Persen	33,33 Persen	45.000.000	55,55 Persen	45.000.000	77,77 Persen	60.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	230.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	0 Persen	5,26 Persen	55.000.000	5,26 Persen	55.000.000	5,26 Persen	85.000.000	5,26 Persen	100.000.000	21,05 Persen	295.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	71,79 Persen	75,60 Persen	1.470.000.000	82,93 Persen	1.340.000.000	85,37 Persen	1.250.000.000	87,80 Persen	1.170.000.000	87,80 Persen	5.230.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	7,57 Persen	12,90 Persen	350.000.000	15,17 Persen	316.980.932	17,57 Persen	216.980.932	19,98 Persen	151.980.932	19,98 Persen	1.035.942.796	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Tidak Ada	Ada	105.000.000	Ada	115.000.000	Ada	145.000.000	Ada	200.000.000	Ada	565.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01	SEKRETARIAT DAERAH													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	22.256.296.886	100 Persen	23.060.847.353	100 Persen	23.811.122.109	100 Persen	24.831.769.380	100 Persen	93.960.035.728	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	106 Persen	100 Persen	3.287.867.024	100 Persen	3.287.867.024	100 Persen	3.616.653.726	100 Persen	3.978.319.099	100 Persen	14.170.706.873	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	96,79 Persen	97 Persen	1.404.691.632	97,5 Persen	1.545.160.795	98 Persen	1.699.676.875	98,5 Persen	1.869.644.562	98,5 Persen	6.519.173.864	Sekretariat Daerah
4	02	SEKRETARIAT DPRD													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	26.879.697.409	100 Persen	27.765.094.600	100 Persen	28.407.346.231	100 Persen	29.462.164.752	100 Persen	112.514.302.992	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan	Ada	Ada	10.153.000.000	Ada	11.968.300.000	Ada	11.965.130.000	Ada	12.161.643.000	Ada	46.248.073.000	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
		Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD													
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01	PERENCANAAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	6.641.897.959	100 Persen	6.624.426.172	100 Persen	6.520.358.765	100 Persen	6.575.562.001	100 Persen	26.362.244.897	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	1.465.500.000	Ada	2.120.050.000	Ada	2.299.055.000	Ada	1.662.960.500	Ada	7.547.565.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	99,04 Persen	100 Persen	1.729.000.000	100 Persen	1.864.400.000	100 Persen	2.028.440.000	100 Persen	2.282.784.000	100 Persen	7.904.624.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	98 Persen	100 Persen	670.000.000	100 Persen	720.000.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	2.930.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02	KEUANGAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	38.685.437.433	100 Persen	38.708.456.508	100 Persen	39.195.437.438	100 Persen	38.545.437.412	100 Persen	155.134.768.791	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	94,75 Persen	95,50 Persen	547.821.264.732	96 Persen	547.370.710.902	96,50 Persen	547.630.955.379	97 Persen	544.307.755.278	97 Persen	2.187.130.686.291	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	99,9 Persen	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	535.000.000	100 Persen	2.140.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	101,74 Persen	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	1.678.000.000	100 Persen	6.712.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	03	KEPEGAWAIAN													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	6.509.383.084	100 Persen	7.079.575.398	100 Persen	7.745.428.496	100 Persen	7.674.961.967	100 Persen	29.009.348.945	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai Manajemen ASN	95,81 Persen	96 Persen	920.812.902	96 Persen	1.032.894.192	97 Persen	1.156.183.611	98 Persen	1.291.801.972	98 Persen	4.401.692.677	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	23,32 Persen	34,15 Persen	3.091.387.098	34,15 Persen	3.450.525.808	53,11 Persen	3.713.578.389	61,71 Persen	3.797.386.603	61,71 Persen	14.052.877.898	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01	INSPEKTORAT DAERAH													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	6.158.238.466	100 Persen	6.802.109.799	100 Persen	7.108.560.137	100 Persen	7.409.121.499	100 Persen	27.478.029.901	Inspektorat	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	84,71 Persen	90 Persen	1.675.000.000	90 Persen	1.841.400.000	90 Persen	2.024.540.000	90 Persen	2.226.988.000	90 Persen	7.767.928.000	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan	100 Persen	100 Persen	645.000.000	100 Persen	709.500.000	100 Persen	780.450.000	100 Persen	858.495.000	100 Persen	2.993.445.000	Inspektorat	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KEWILAYAHAN													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.991.697.045	100 Persen	5.142.577.780	100 Persen	5.338.041.943	100 Persen	5.349.658.395	100 Persen	20.821.975.163	Kecamatan Samalanga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	205.000.000	Kecamatan Samalanga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	88 Persen	96 Persen	25.000.000	97 Persen	27.500.000	97 Persen	30.000.000	98 Persen	32.000.000	98 Persen	114.500.000	Kecamatan Samalanga
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Samalanga
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	98 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	255.000.000	Kecamatan Samalanga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.966.681.570	100 Persen	4.241.016.178	100 Persen	4.437.943.850	100 Persen	4.513.782.692	100 Persen	17.159.424.290	Kecamatan Simpang Mamplam
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	52.500.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	58.000.000	100 Persen	215.500.000	Kecamatan Simpang Mamplam
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	70 Persen	75 Persen	25.000.000	75 Persen	27.500.000	77 Persen	30.000.000	77 Persen	32.000.000	77 Persen	114.500.000	Kecamatan Simpang Mamplam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Simpang Mamplam
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	98 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	277.000.000	Kecamatan Simpang Mamplam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.937.589.954	100 Persen	2.993.412.357	100 Persen	3.302.689.429	100 Persen	3.641.847.571	100 Persen	12.875.539.311	Kecamatan Pandrah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	52.000.000	100 Persen	57.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	214.000.000	Kecamatan Pandrah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Pandrah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Pandrah
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	185.000.000	Kecamatan Pandrah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	4.286.260.262	100 Persen	4.488.329.590	100 Persen	4.662.693.423	100 Persen	4.882.857.622	100 Persen	18.320.140.897	Kecamatan Jeunieb

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	58.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	223.000.000	Kecamatan Jeunieb
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	88 Persen	90 Persen	25.000.000	92 Persen	27.500.000	95 Persen	30.000.000	95 Persen	32.000.000	95 Persen	114.500.000	Kecamatan Jeunieb
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Jeunieb
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	98 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	277.000.000	Kecamatan Jeunieb
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.848.748.567	100 Persen	2.947.122.478	100 Persen	3.015.870.820	100 Persen	3.096.121.699	100 Persen	11.907.863.564	Kecamatan Peulimbang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	185.000.000	Kecamatan Peulimbang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peulimbang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peulimbang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	52.500.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	58.000.000	100 Persen	215.500.000	Kecamatan Peulimbang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.305.040.917	100 Persen	3.403.398.599	100 Persen	3.600.529.736	100 Persen	3.962.631.898	100 Persen	14.271.601.150	Kecamatan Peudada
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	203.000.000	Kecamatan Peudada
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	25.000.000	89 Persen	27.500.000	94 Persen	30.000.000	96 Persen	32.000.000	96 Persen	114.500.000	Kecamatan Peudada
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peudada
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	70.000.000	100 Persen	78.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	90.000.000	100 Persen	323.000.000	Kecamatan Peudada
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.923.288.563	100 Persen	3.950.900.716	100 Persen	4.162.414.926	100 Persen	4.214.713.380	100 Persen	16.251.317.585	Kecamatan Jeumpa
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	205.000.000	Kecamatan Jeumpa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	56 Persen	85 Persen	25.000.000	90 Persen	27.500.000	92 Persen	30.000.000	95 Persen	32.000.000	95 Persen	114.500.000	Kecamatan Jeumpa
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Jeumpa
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	277.000.000	Kecamatan Jeumpa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.401.466.678	100 Persen	3.479.596.310	100 Persen	3.619.463.742	100 Persen	3.661.269.176	100 Persen	14.161.795.906	Kecamatan Kota Juang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	210.000.000	Kecamatan Kota Juang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	61 Persen	95 Persen	25.000.000	96 Persen	27.500.000	97 Persen	30.000.000	98 Persen	32.000.000	98 Persen	114.500.000	Kecamatan Kota Juang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Kota Juang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	225.000.000	Kecamatan Kota Juang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.587.832.536	100 Persen	2.680.254.259	100 Persen	2.806.822.005	100 Persen	2.899.155.086	100 Persen	10.974.063.886	Kecamatan Kuala
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.500.000	100 Persen	66.550.000	100 Persen	227.050.000	Kecamatan Kuala
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	75 Persen	85 Persen	25.000.000	90 Persen	27.500.000	95 Persen	30.000.000	95 Persen	32.000.000	95 Persen	114.500.000	Kecamatan Kuala
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Kuala
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	160.000.000	Kecamatan Kuala
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.921.370.276	100 Persen	3.028.723.240	100 Persen	3.178.091.513	100 Persen	3.259.878.106	100 Persen	12.388.063.135	Kecamatan Juli
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	48.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	188.000.000	Kecamatan Juli
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	63 Persen	78 Persen	25.000.000	82 Persen	27.500.000	88 Persen	30.000.000	94 Persen	32.000.000	94 Persen	114.500.000	Kecamatan Juli

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Juli
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	266.000.000	Kecamatan Juli
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	6.168.706.064	100 Persen	6.318.390.225	100 Persen	6.491.333.796	100 Persen	6.667.378.244	100 Persen	25.645.808.329	Kecamatan Peusangan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.500.000	100 Persen	66.550.000	100 Persen	232.050.000	Kecamatan Peusangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	79 Persen	90 Persen	25.000.000	92 Persen	27.500.000	95 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	78.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	306.000.000	Kecamatan Peusangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.826.825.109	100 Persen	3.916.700.684	100 Persen	3.977.613.679	100 Persen	4.027.519.807	100 Persen	15.748.659.279	Kecamatan Jangka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	230.000.000	Kecamatan Jangka
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Jangka
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Jangka
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	67.000.000	100 Persen	72.000.000	100 Persen	77.000.000	100 Persen	276.000.000	Kecamatan Jangka
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.564.336.639	100 Persen	3.645.699.961	100 Persen	3.736.623.473	100 Persen	3.829.160.299	100 Persen	14.775.820.372	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	210.000.000	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	79 Persen	90 Persen	25.000.000	92 Persen	27.500.000	94 Persen	30.000.000	96 Persen	32.000.000	96 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	78.000.000	100 Persen	288.000.000	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.633.571.885	100 Persen	2.687.962.420	100 Persen	2.924.625.382	100 Persen	2.864.350.799	100 Persen	11.110.510.486	Kecamatan Peusangan Selatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	46.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	196.000.000	Kecamatan Peusangan Selatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan Selatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Peusangan Selatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	270.000.000	Kecamatan Peusangan Selatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.632.348.540	100 Persen	3.749.953.878	100 Persen	3.876.586.198	100 Persen	3.913.576.329	100 Persen	15.172.464.945	Kecamatan Kuta Blang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	230.000.000	Kecamatan Kuta Blang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Kuta Blang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Kuta Blang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	270.000.000	Kecamatan Kuta Blang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.665.912.724	100 Persen	2.765.167.854	100 Persen	2.867.602.205	100 Persen	2.977.948.203	100 Persen	11.276.630.986	Kecamatan Makmur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	225.000.000	Kecamatan Makmur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Makmur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Makmur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	270.000.000	Kecamatan Makmur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.810.907.925	100 Persen	4.082.358.793	100 Persen	4.550.830.497	100 Persen	4.578.986.987	100 Persen	17.023.084.202	Kecamatan Gandapura	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	230.000.000	Kecamatan Gandapura	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	63 Persen	85 Persen	25.000.000	90 Persen	27.500.000	95 Persen	30.000.000	98 Persen	32.000.000	98 Persen	114.500.000	Kecamatan Gandapura	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	114.500.000	Kecamatan Gandapura	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	270.000.000	Kecamatan Gandapura	
8	01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.542.827.674	100 Persen	1.602.513.665	100 Persen	1.964.220.031	100 Persen	2.057.389.624	100 Persen	7.166.950.994	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,25 Persen	23 Persen	350.499.999	24 Persen	193.021.064	25 Persen	211.168.170	25 Persen	232.284.994	25 Persen	986.974.227	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	81,8 Persen	85 Persen	8.391.972.746	87 Persen	14.515.689.394	89 Persen	1.040.918.000	90 Persen	989.085.500	90 Persen	24.937.665.640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	64 Persen	68 Persen	351.000.000	70 Persen	138.600.000	72 Persen	97.364.636	74 Persen	103.882.868	74 Persen	690.847.504	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada	Ada	221.830.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	110.000.000	Ada	531.830.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	75 Persen	80 Persen	334.500.000	82 Persen	85.250.000	85 Persen	91.012.500	87 Persen	97.213.125	87 Persen	607.975.625	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	01	UNSUR KEKHUSUSAN												
9	01	KEKHUSUSAN ACEH												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.652.041.967	100 Persen	2.768.198.040	100 Persen	2.778.312.597	100 Persen	2.784.427.840	100 Persen	10.982.980.444	Dinas Syariat Islam
	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang Mengadakan Pengajian Rutin	609 Gampong	609 Gampong	8.628.000.000	609 Gampong	9.479.957.950	609 Gampong	10.160.174.598	609 Gampong	10.788.582.413	609 Gampong	39.056.714.961	Dinas Syariat Islam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.192.225.635	100 Persen	2.248.566.670	100 Persen	2.431.555.198	100 Persen	2.707.583.498	100 Persen	9.579.931.001	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Sidang yang Menghasilkan Keputusan	40 Persen	45 Persen	414.600.000	50 Persen	759.200.000	50 Persen	414.600.000	60 Persen	827.350.000	60 Persen	2.415.750.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.664.403.066	100 Persen	1.720.060.202	100 Persen	1.861.608.272	100 Persen	1.848.345.170	100 Persen	7.094.416.710	Sekretariat Baitul Mal
	Program Baitul Mal	Jumlah Mustahik	6.262 Orang	8.304 Orang	10.409.143.755	8.304 Orang	10.510.594.545	8.304 Orang	10.600.695.945	8.304 Orang	10.688.196.545	33.216 Orang	42.208.630.790	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
	JUMLAH TOTAL			Belanja	1.947.300.832.048		1.976.580.791.670		2.014.805.962.085		2.058.908.896.379		7.997.596.482.182	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPK dapat dicapai. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

8.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan kabupaten memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator makro Aceh dan nasional. Dengan demikian target indikator makro pembangunan kabupaten harus mengacu dengan target indikator makro provinsi dan nasional. Kabupaten Bireuen telah menetapkan 6 (enam) indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini. Selanjutnya penetapan dan proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 8.1.

8.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan. Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bireuen sampai akhir Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Dengan demikian peran dari perangkat daerah menjadi penting untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 8.2.

8.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah diukur dari pencapaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang terdiri dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan dan proyeksi target kinerja Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 8.3.

Tabel 8.1
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,33	72,7	73,1	73,5	73,9	73,9	Bappeda	BPS
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,25	12,25	11,75	11,25	10,75	10,75	Bappeda	BPS
3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,32	3,8	3,65	3,5	3,35	3,35	Naker	BPS
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,13	4,5	4,8	5	5,2	5,2	Bappeda	BPS
5	PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	23,59	24,72	25,31	25,91	26,52	26,52	Bappeda	BPS
6	Indeks Gini	Indeks	0,296	0,29	0,287	0,284	0,281	0,281	Bappeda	BPS

Tabel 8.2
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1	Indeks Penerapan Syariat Islam	Persen	76	87	90	92	95	95	DSI	DSI
2	Tingkat Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI	DSI
3	Persentase Tipe Dayah yang Naik Kelas	Persen	26,10	36,50	41,30	46,00	51,30	51,30	DAYAH	DAYAH
5	Jumlah Kearifan Lokal yang Dilestarikan	Adat	5	18	18	18	18	18	MAA	MAA
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	B	Setda	Setda
7	Opini BPK	WDP/ WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	BPKD
8	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	2	2	2	3	3	Inspektorat	Inspektorat
9	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	CC	B	B	B	B	BB	Setda	Setda
10	Indeks SPBE	Indeks	2,06	2,14	2,26	2,35	2,47	2,47	Diskominsa	Diskominsa
11	Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Persen	58,30	76,67	78,33	80	81,67	81,67	DLHK	DLHK
12	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	Persen	69	73,33	76,67	80	83,33	83,33	PUPR/PERKIM	PUPR/PERKIM

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	57,54	60,19	62,94	64,41	65,88	65,88	PUPR	PUPR
14	Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	Persen	97,9	98	98,5	99	100	100	PUPR	PUPR
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	69,39	72,05	72,43	72,73	73	73	DLHK	DLHK
16	Indeks Resiko Bencana	Indeks	168	166	164	162	160	160	BPBD/Dinsos	BPBD
17	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	33,62	33,85	33,89	33,93	33,97	33,97	Distan/Disnak/DPKP	BPS
18	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	21,56	21,95	22,15	22,35	22,55	22,55	Disperindag	BPS
19	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	0,71	1,01	1,16	1,31	1,46	1,46	Disperindag	BPS
20	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,77	9,49	9,83	10,12	10,47	10,47	DPKD	DPKD
21	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi	59	63	70	75	80	80	Dispورا	Dispورا
22	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,581	0,643	0,665	0,682	0,707	0,707	DPMGPKB	
23	Jumlah Peningkatan Investasi	Milyar Rupiah	60,62	63,06	64,32	65,61	66,92	259,91	DPMPTSP	DPMPTSP
24	Laju Inflasi	Persen	1,97	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	Disperindag	BPS

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,29	9,31	9,32	9,33	9,34	9,34	Dinas PK	BPS
26	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,84	15,04	15,10	15,16	15,22	15,22	Dinas PK	BPS
27	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,26	71,92	72,46	73	73,54	73,54	Dinkes/RSUD	BPS
28	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,26	0,66	0,86	1,06	1,2	1,2	Dispora	Dispora
29	Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,287	0,385	0,427	0,45	0,501	0,501	Dispora	Dispora
30	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,06	58,20	58,27	58,35	58,42	58,42	BPMGPKB	BPS
31	Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	BPMGPKB	BPMGPKB
32	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,05	3,10	3,15	3,17	3,20	3,20	Bappeda	Bappeda
33	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persen	24	40	48	56	62	62	Dinsos	Dinsos
34	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	79,43	85,66	88,77	91,89	95	95	DPKP	DPKP
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,91	67,73	68,37	69	69,63	69,63	Disnakertrans	BPS
36	Indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban	Indeks	1,72	<1	<1	<1	<1	<1	Satpol PP	Satpol PP
37	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	50	60	65	70	72	72	Kesbangpol	Kesbangpol
38	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persen	77,91	0	80	0	0	80	Kesbangpol	Kesbangpol

Tabel 8.3
Target Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	3,1 Triliun Rupiah	3,1 Triliun Rupiah	3,3 Triliun Rupiah	3,4 Triliun Rupiah	3,5 Triliun Rupiah	3,5 Triliun Rupiah	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	83,06 Persen	85,55 Persen	88,11 Persen	90,76 Persen	93,48 Persen	93,48 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	16,67 Persen	25 Persen	33,33 Persen	41,66 Persen	50 Persen	50 Persen	Dinas Kesehatan
4	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	60,42 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	65 Persen	65 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase PSKS yang difasilitasi	85,71 Persen	87,71 Persen	88,71 Persen	88,71 Persen	89,71 Persen	89,71 Persen	Dinas Sosial
B Aspek Pelayanan Umum								
Pendidikan								
6	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	54,12 Persen	68,28 Persen	69,64 Persen	71,04 Persen	72,46 Persen	72,46 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesehatan								
8	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kesehatan
9	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	422 Unit	430 Unit	442 unit	455 unit	469 unit	469 unit	Dinas Kesehatan
10	Jumlah UKBM yang Aktif	970 UKBM	1.069 UKBM	1.123 UKBM	1.179 UKBM	1.238 UKBM	1.238 UKBM	Dinas Kesehatan
11	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
12	Persentase Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi Serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	98,39 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
Pekerjaan Umum dan penataan Ruang								
13	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	25,02 Persen	26,17 Persen	27,76 Persen	29,36 Persen	30,95 Persen	30,95 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Cakupan Akses Air Minum	86,7 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Cakupan Akses Sanitasi Layak	87,13 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	71,30 Persen	71,87 Persen	72,10 Persen	72,33 Persen	72,55 Persen	72,55 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase Bangunan yang Terbangun	30 Persen	31,67 Persen	33,33 Persen	35 Persen	36,67 Persen	36,67 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	0 Persen	5 Persen	7,50 Persen	10 Persen	12,50 Persen	12,50 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	51,19 Persen	53,57 Persen	56,02 Persen	57,33 Persen	58,64 Persen	59,99 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	3,33 Persen	4,44 Persen	5,55 Persen	6,66 Persen	7,77 Persen	7,77 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
22	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani	14 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	96 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	90,39 Hektar	20 Hektar	20 Hektar	20 Hektar	13,4 hektar	73,4 hektar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	Persentase Kawasan Kumuh	9,26 Persen	8,95 persen	8,63 persen	8,32 persen	8,11 persen	8,11 persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi PSU yang Layak	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum								
26	Persentase Bencana yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	92,8 Persen	94 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	96 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
29	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,25 Persen	23 Persen	24 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	81,8 Persen	85 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	64 Persen	68 Persen	70 Persen	72 Persen	74 Persen	74 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33	Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	75 Persen	80 Persen	82 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sosial								
34	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosia31
35	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangani	43,02 Persen	43,06 Persen	43,08 Persen	43,10 Persen	43,12 Persen	43,12 Persen	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	84,65 Persen	84,65 Persen	84,65 Persen	84,65 Persen	84,65 Persen	84,65 Persen	Dinas Sosial
37	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
38	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
Tenaga Kerja								
39	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Memiliki Kompetensi	40,97 Persen	41 Persen	42 Persen	43 Persen	44 Persen	44 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi	12 Persen	12 Persen	12 Persen	12 Persen	12 Persen	48 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
41	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	65 Persen	73 Persen	76 Persen	80 Persen	84 Persen	84 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
42	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
43	Persentase Desa yang Dibina BKMT	2,79 Persen	2,79 Persen	2,79 Persen	2,79 Persen	2,79 Persen	11,17 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Persentase Gampong Layak Anak	31 Persen	45 Persen	47 Persen	48 Persen	50 Persen	50 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
45	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
Pangan								
46	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	103 Persen	105 Persen	105 Persen	106 Persen	106 Persen	106 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
47	Persentase KWT Aktif	72 Persen	75 Persen	77 Persen	79 Persen	81 Persen	81 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
48	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	9 Persen	13 Persen	16 Persen	19 Persen	22 Persen	22 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
49	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
Pertanahan								
50	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanahan
51	Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani	0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	Dinas Pertanahan
52	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	35,65 Persen	51,74 Persen	67,82 Persen	83,91 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanahan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Peruntukannya	0 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanahan
54	Persentase Tanah yang Bersertifikat	28,30 Persen	37,13 Persen	41,54 Persen	45,96 Persen	50,03 Persen	50,03 Persen	Dinas Pertanahan
55	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pertanahan
56	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani	20 Persen	40 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanahan
Lingkungan Hidup								
57	Indeks Kualitas Air	62 Persen	63,28 Persen	63,36 Persen	63,46 Persen	63,56 Persen	63,56 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
58	Persentase RTH yang Ditangani	12,12 Persen	12,12 Persen	12,12 Persen	12,12 Persen	12,12 Persen	12,12 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60	Persentase MHA yang Dibina	6,67 Persen	9 Persen	13 Persen	13 Persen	13 Persen	48 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
61	Jumlah Gampong Iklim	2 Gampong	4 Gampong	6 Gampong	8 Gampong	10 Gampong	10 Gampong	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
62	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
67	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-	Ada	Ada	-	-	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kependudukan dan Catatan Sipil								
68	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	89,16 Persen	90 Persen	90,20 Persen	90,40 Persen	90,60 Persen	90,60 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	68,75 Persen	89, 5 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70	Tersedianya database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
71	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Desa								
72	Adanya Fasilitasi Permasalahan Gampong dan Pendataan Gampong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
73	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	85 Persen	86 Persen	87 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
74	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
75	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi Keluarga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
76	Persentase Akseptor KB	61,89 Persen	66 Persen	70 Persen	74 Persen	78 Persen	78 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
77	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina	6,07 Persen	8 Persen	9 Persen	11 Persen	13 Persen	13 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
Perhubungan								
78	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,59	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi								
79	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85	86	87	88	90	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
80	Jumlah Aplikasi e-government yang digunakan SKPK	75 Aplikasi	78 Aplikasi	80 Aplikasi	82 Aplikasi	84 Aplikasi	84 Aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
81	Persentase Koperasi yang Aktif	72,16 Persen	75 Persen	75,47 Persen	75,92 Persen	76,36 Persen	76,36 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	64,13 Persen	66,67 Persen	70 Persen	73,17 Persen	95,24 Persen	95,24 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
83	Persentase Jumlah UMKM yang Diberdayakan	0,8 Persen	0,5 Persen	0,5 Persen	0,5 Persen	0,5 Persen	2 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
84	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	0,02 Persen	0,03 Persen	0,03 Persen	0,04 Persen	0,05 Persen	0,05 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
85	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	5,66 Persen	33,96 Persen	52,83 Persen	76,42 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
86	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	17,39 Persen	17,95 Persen	20 Persen	20,49 Persen	20,95 Persen	20,95 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
87	Persentase Koperasi yang Dinilai	13,59 Persen	15,38 Persen	16 Persen	17,07 Persen	17,62 Persen	17,62 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Penanaman Modal								
88	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
89	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	40 Pelaku Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	1.371 Pelaku Usaha	1.500 Pelaku Usaha	1.700 Pelaku Usaha	2.000 Pelaku Usaha	2.200 Pelaku Usaha	2.200 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
91	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	60 Perusahaan	80 Perusahaan	90 Perusahaan	100 Perusahaan	110 Perusahaan	110 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
92	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pemuda dan Olah Raga								
93	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	19,23 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	40 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
94	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	34 Cabor	36 cabor	37 Cabor	38 Cabor	40 Cabor	40 Cabor	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
95	Persentase Kepramukaan Aktif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Statistik								
96	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Persandian								
97	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah.	4 Persen	27 Persen	50 Persen	73 Persen	96 Persen	96 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kebudayaan								
98	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	61,54 Persen	76,92 Persen	84,62 Persen	92,31 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	71 Persen	73 Persen	74 Persen	76 Persen	77 Persen	77 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	13,10 Persen	17,86 Persen	20,24 Persen	22,46 Persen	22,46 Persen	22,46 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101	Persentase Museum yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan								
102	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4.819 Orang	7.173 Orang	8.173 Orang	9.173 Orang	10.173 Orang	10.173 Orang	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kearsipan								
103	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	13,5 Persen	21,2 Persen	25 Persen	28,2 Persen	32,7 Persen	32,7 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pariwisata								
104	Persentase Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	10,17 Persen	19,05 Persen	21,43 Persen	26,25 Persen	26,25 Persen	26,25 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
105	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	35,59 Persen	49,21 Persen	51,34 Persen	54,67 Persen	57,50 Persen	57,50 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
106	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	21 Persen	40 Persen	50 Persen	59 Persen	69 Persen	69 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Pertanian								
107	Persentase Rata-rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan	3,26 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	12 Persen	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tanaman Perkebunan (Kelapa, Karet dan Kakao)							
108	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanian dan Perkebunan
109	Cakupan Bina Kelompok Tani	83,98 Persen	85 Persen	87 Persen	89 Persen	91 Persen	91 Persen	Dinas Pertanian dan Perkebunan
110	Persentase Rata-rata Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	12 Persen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
111	Peningkatan Produksi HPT	1,34 Persen	2 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	3 Persen	10 Persen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
112	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Perdagangan							
113	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
114	Persentase UTTP yang Telah Ditera	44,36 Persen	50 Persen	54,6 Persen	60 Persen	64,86 Persen	64,86 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
115	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	11, 11 Persen	33,33 Persen	55,55 Persen	77,77 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	0 Persen	5,26 Persen	5,26 Persen	5,26 Persen	5,26 Persen	21,05 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
117	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	71,79 Persen	75,60 Persen	82,93 Persen	85,37 Persen	87,80 Persen	87,8 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Perindustrian								
118	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	7,57 Persen	12,90 Persen	15,17 Persen	17,57 Persen	19,98 Persen	19,98 Persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
119	Tersedianya Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Transmigrasi								
120	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	0 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
121	Persentase SP yang Aktif	42,85 Persen	42,85 Persen	42,85 Persen	42,85 Persen	42,85 Persen	42,85 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
122	Persentase KK Mandiri	37,31 Persen	41,79 Persen	47,76 Persen	57,73 Persen	59,70 Persen	59,70 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perikanan								
123	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.983 Ton	13.500 Ton	14.000 Ton	14.500 Ton	15.000 Ton	57.000 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.074 Ton	14.000 Ton	14.500 Ton	15.000 Ton	15,500 Ton	15,500 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
125	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	75 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
126	Jumlah Produksi Ikan Olahan	153 Ton	300 Ton	350 Ton	400 Ton	450 Ton	1.500 ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan								
Administrasi Pemerintahan								
Sekretariat Daerah								
127	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	106 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
128	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	96,79 Persen	97 Persen	97,5 Persen	98 Persen	98,5 Persen	98,5 Persen	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRK								
129	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Samalanga								
130	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Samalanga
131	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	88 Persen	96 Persen	97 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	Kecamatan Samalanga
132	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Samalanga
133	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Samalanga
Kecamatan Simpang Mamplam								
134	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Simpang Mamplam
135	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	70 Persen	75 Persen	75 Persen	77 Persen	77 Persen	77 Persen	Kecamatan Simpang Mamplam
136	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Simpang Mamplam
137	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Simpang Mamplam

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Pandrah								
138	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Pandrah
139	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Pandrah
140	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Pandrah
141	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Pandrah
Kecamatan Jeunieb								
142	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeunieb
143	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	88 Persen	90 Persen	92 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Kecamatan Jeunieb
144	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeunieb
145	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeunieb

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Peulimbang								
146	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peulimbang
147	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peulimbang
148	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peulimbang
149	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peulimbang
Kecamatan Peudada								
150	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peudada
151	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	98 Persen	100 Persen	89 Persen	94 Persen	96 Persen	98 Persen	Kecamatan Peudada
152	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peudada
153	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peudada

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Jeumpa								
154	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeumpa
155	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	56 Persen	85 Persen	90 Persen	92 Persen	95 Persen	95 Persen	Kecamatan Jeumpa
156	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeumpa
157	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jeumpa
Kecamatan Kota Juang								
158	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kota Juang
159	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	61 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	Kecamatan Kota Juang
160	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kota Juang
161	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kota Juang

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Kuala								
162	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kuala
163	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	75 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Kecamatan Kuala
164	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kuala
165	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kuala
Kecamatan Juli								
166	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Juli
167	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	63 Persen	78 Persen	82 Persen	88 Persen	94 Persen	94 Persen	Kecamatan Juli
168	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Juli
169	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Juli

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Peusangan								
170	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan
171	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	79 Persen	90 Persen	92 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan
172	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan
173	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan
Kecamatan Jangka								
174	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jangka
175	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jangka
176	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jangka
177	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Jangka

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng								
178	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
179	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	79 Persen	90 Persen	92 Persen	94 Persen	96 Persen	96 Persen	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
180	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
181	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
Kecamatan Peusangan Selatan								
182	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Selatan
183	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Selatan
184	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Selatan
185	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Peusangan Selatan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Kutablang								
186	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kutablang
187	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kutablang
188	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kutablang
189	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Kutablang
Kecamatan Makmur								
190	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Makmur
191	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Makmur
192	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Makmur
193	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Makmur

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Gandapura								
194	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Gandapura
195	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	63 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	98 Persen	98 Persen	Kecamatan Gandapura
196	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Gandapura
197	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Gandapura
Pengawasan								
198	Persentase Tindak Lanjut Temuan	84,71 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Inspektorat Kabupaten
199	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Inspektorat Kabupaten
Perencanaan								
200	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
201	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	99,04 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Keuangan								
202	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	94,75 Persen	95,5 Persen	96 Persen	96,5 Persen	97 Persen	97 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
203	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	99,9 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
204	Persentase Realisasi PAD	101,74 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penelitian dan Pengembangan								
205	Persentase OPD yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
206	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai Manajemen ASN	95,81 Persen	96 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
207	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	23,32 Persen	34,15 Persen	34,15 Persen	53,11 Persen	61,71 Persen	61,71 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Keistimewaan Aceh								
Syariat Islam								
208	Jumlah Gampong yang Mengadakan Pengajian Rutin	609 Gampong	609 Gampong	609 Gampong	609 Gampong	609 Gampong	609 Gampong	Dinas Syariat Islam

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPK (2026)	Perangkat Daerah
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adat Istiadat Aceh								
209	Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal	5 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	Sekretariat Majelis Adat Aceh
Peran Ulama Aceh								
210	Persentase Sidang yang Menghasilkan Keputusan	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	60 Persen	60 Persen	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Pendidikan Khusus Aceh								
211	Jumlah Dayah Terakreditasi	156 Dayah	161 Dayah	164 Dayah	167 Dayah	167 Dayah	167 Dayah	Dinas Pendidikan Dayah
212	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	48,24 Persen	67,62 Persen	77,87 Persen	88,73 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
Zakat dan Infaq Aceh								
213	Jumlah Mustahik	6.262 Orang	8.304 Orang	8.304 Orang	8.304 Orang	8.304 Orang	33.216 Orang	Sekretariat Baitul Mal

BAB IX
PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 dilakukan dengan dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 bagi daerah yang memiliki Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 atau 2023. Dokumen RPK Bireuen ini adalah penyelarasan dengan target dan program nasional, RPJPD Kabupaten, evaluasi RPJMD Kabupaten yang sebelumnya, RPD Provinsi, isu strategis, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

RPK Bireuen merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam empat tahun yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPK Bireuen, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPK Bireuen ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh OPD dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Program/Kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPK Tahun 2023-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah dan stakeholders Kabupaten Bireuen dalam rangka mewujudkan tercapainya pencapaian dokumen perencanaan RPK Bireuen 2023-2026 untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Bireuen.

BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A.GANI

